BADAN POM

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Sanggau







sanggau.pom.go.id
bpom.sanggau@pom.go.id
(0564) 2027066
Sanggau, Kalimantan Barat

KATA PENGANTAR

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata



Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang \Maha Kuasa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Balai POM di Sanggau dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai target dan kinerja yang tertuang dalam bentuk Laporan Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Sanggau mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nota Dinas Sekretariat Utama BPOM RI Nomor : PR.09.01.2.01.26.71 Perihal Permintaan Laporan Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sanggau pada tahun selanjutnya.

Sanggau, 26 Februari 2026

Kepala Balai POM di Sanggau,

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
DI SANGGAU

Erik Budianto Tampubolon, S.Si., Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Kab Sanggau merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran kegiatan pada tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Balai POM di Kab Sanggau tahun 2025-2029 yang terdiri dari 7 sasaran kegiatan dengan 26 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hasil capaian tiap sasaran kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kegiatan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 103,30% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
2. Pada Indikator Kegiatan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan memperoleh Capaian sebesar 114,53% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**;
3. Pada Indikator Kegiatan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT memperoleh Capaian sebesar 0% dengan kriteria **TIDAK MASUK HITUNGAN**;
4. Pada Indikator Kegiatan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan memperoleh Capaian sebesar 109,89% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
5. Pada Indikator Kegiatan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder memperoleh Capaian sebesar 103,84% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
6. Pada Indikator Kegiatan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memperoleh Capaian sebesar 114,94% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**;
7. Pada Indikator Kegiatan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memperoleh Capaian sebesar 109,89% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
8. Pada Indikator Kegiatan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memperoleh Capaian sebesar 107,53% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
9. Pada Indikator Kegiatan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memperoleh Capaian sebesar 107,85% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
10. Pada Indikator Kegiatan Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan memperoleh Capaian sebesar 108,70% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;

11. Pada Indikator Kegiatan Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar memperoleh Capaian sebesar 109,89% dengan kriteria **Sangat BAIK**;
12. Pada Indikator Kegiatan Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT memperoleh Capaian sebesar 100% dengan kriteria **BAIK**;
13. Pada Indikator Kegiatan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium memperoleh Capaian sebesar 109,83% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
14. Pada Indikator Kegiatan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman memperoleh Capaian sebesar 100% dengan kriteria **BAIK**;
15. Pada Indikator Kegiatan Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT memperoleh Capaian sebesar 108,32% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
16. Pada Indikator Kegiatan Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan memperoleh Capaian sebesar 100% dengan kriteria **BAIK**;
17. Pada Indikator Kegiatan Jumlah desa pangan aman memperoleh Capaian sebesar 100% dengan kriteria **BAIK**;
18. Pada Indikator Kegiatan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas memperoleh Capaian sebesar 100% dengan kriteria **BAIK**;
19. Pada Indikator Kegiatan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan memperoleh Capaian sebesar 100% dengan kriteria **BAIK**;
20. Pada Indikator Kegiatan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT memperoleh Capaian sebesar 104,17% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
21. Pada Indikator Kegiatan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar memperoleh Capaian sebesar 111,11% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**;
22. Pada Indikator Kegiatan Indeks Pelayanan Publik UPT memperoleh Capaian sebesar 109,31% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
23. Pada Indikator Kegiatan Nilai AKIP UPT BPOM memperoleh Capaian sebesar 99,51% dengan kriteria **BAIK**;
24. Pada Indikator Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Capaian sebesar 100% dengan kriteria **BAIK**;
25. Pada Indikator Kegiatan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM memperoleh Capaian sebesar 87,40% dengan kriteria **BAIK**;

26. Pada Indikator Kegiatan Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT memperoleh Capaian sebesar 100% dengan kriteria **BAIK;**

Pada tahun 2025 Balai POM di Sanggau melaksanakan 26 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mendukung pencapaian 7(tujuh) sasaran kegiatan dengan hasil 22 IKU efisien, 1 IKU tidak efisien dan 3 IKU tidak dapat dihitung dikarenakan adanya pemblokiran pada anggaran IKU tersebut. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,0035 sampai 0,15.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sanggau untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, Balai POM di Sanggau didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 sesuai DIPA Petikan awal yang diterbitkan tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp 4.148.145.000. Pada tanggal 19 Februari 2025 terdapat pemblokiran anggaran terkait efisiensi anggaran pada Balai POM di Sanggau sebesar Rp 1.746.569.000, kemudian pada tanggal 25 Maret 2025 terdapat relaksasi pemblokiran anggaran sehingga anggaran yang di blokir berkurang menjadi Rp 1.349.504.000. Pada tanggal 30 Juni 2025, terdapat penambahan anggaran belanja pegawai untuk pemenuhan gaji CPNS dan PPPK, sehingga total pagu anggaran bertambah menjadi Rp 4.427.160.000.

Realisasi per jenis belanja di Balai POM di Sanggau, untuk belanja pegawai adalah sebesar Rp 1.192.661.991, realisasi belanja barang sebesar Rp 1.927.338.952, dan realisasi belanja modal sebesar Rp 0. Total realisasi anggaran tahun 2025 adalah Rp 3.120.000.943 atau sebesar 70,47% jika dibandingkan dengan pagu termasuk blokir, untuk perhitungan realisasi setelah blokir adalah sebesar 99,98% dari pagu anggaran setelah blokir. Capaian realisasi ini berada di atas rata-rata realisasi nasional yang sebesar 99,51%

Balai POM di Sanggau berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sanggau pada tahun selanjutnya.

Sanggau, 26 Februari 2025
Kepala Balai POM di Sanggau

Erik Budianto Tampubolon, S.Si, Apt

HIGHLIGHT 2025





Pencanangan Zona Integritas Balai POM di Sanggau

Peresmian Balai POM di Sanggau, Pencanangan Zona Integritas, Forum Konsultasi Publik, serta Advokasi Program Nasional Terpadu Desa, Pasar, dan Sekolah Pangan Aman pada 25 April 2025 diresmikan langsung oleh Bupati Sanggau, Yohanes Ontot dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan POM, Tri Asti Isnariani, jajaran Forkopimda Sanggau, perwakilan Balai Besar POM di Pontianak, serta instansi terkait lainnya.

Inovasi dalam Manajemen Kinerja

Dalam meningkatkan kinerja Balai POM di Sanggau telah meluncurkan beberapa inovasi dalam mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik, inovasi-inovasi tersebut diantaranya:

Helpdesk PLBN Entikong



Helpdesk dan Penyebaran informasi di PLBN Entikong merupakan inovasi dari kegiatan pemeriksaan produk Obat dan Makanan yang masuk ke Indonesia. Dilakukan penyebaran informasi kepada para pelintas mengenai mekanisme pemasukan Obat Jalur Khusus atau Special Access Scheme (SAS) untuk penggunaan pribadi melalui barang kiriman dan barang bawaan (barang tentengan), memberikan pemahaman untuk tidak memperjual belikan produk Obat dan Makanan secara ilegal di wilayah Indonesia dan pentingnya untuk memilih dan mengkonsumsi Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Si Pintar (Aplikasi Pendampingan Industri Rumah Tangga Pangan)



Si Pintar (Aplikasi Pendampingan Industri Rumah Tangga Pangan) merupakan wadah informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha Pangan Olahan untuk memperoleh penjelasan mengenai Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Melalui SiPintar, para pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran dan dapat melakukan evaluasi mandiri agar proses produksi yang dilakukan selalu sesuai dengan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga pangan sehingga mampu meningkatkan

daya saing, dan masyarakat terlindungi dari konsumsi pangan yang merugikan terhadap kesehatan.



SIAP Balai POM Sanggau

SIAP (Sistem Informasi Pemeriksaan) Balai POM Sanggau merupakan wadah informasi yang digunakan oleh tim fungsi pemeriksaan untuk menyimpan dan mengelola berbagai data serta informasi yang dihasilkan dari kegiatan pemeriksaan dan pengawasan. Melalui SIAP, data dan informasi hasil pemeriksaan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan proses pemantauan, pengolahan data, serta penyusunan laporan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan.



Pena Rumah Sanggau

Pena Rumah Sanggau merupakan wadah informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha untuk memperoleh berbagai informasi terkait layanan pendampingan registrasi dan sertifikasi Obat dan Makanan. Melalui Pena Rumah Sanggau, pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman mengenai proses registrasi dan sertifikasi sehingga dapat memenuhi ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kualitas dan daya saing produknya.

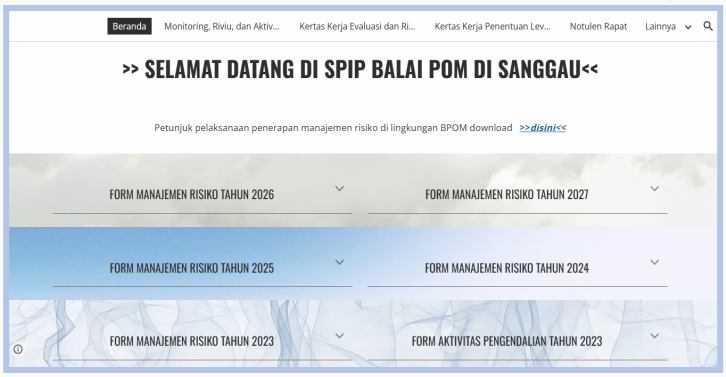


Renkeu Sanggau

Renkeu Sanggau merupakan situs yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan data dan informasi terkait pengelolaan perencanaan dan keuangan. Melalui Renkeu Sanggau, data dan dokumen keuangan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga

memudahkan proses pengelolaan, penelusuran informasi, serta mendukung tertib administrasi dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan.

SPIP Sanggau



SPIP Sanggau (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan situs yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan berbagai dokumen terkait penerapan manajemen risiko, seperti dokumen manajemen risiko, petunjuk pelaksanaan manajemen risiko, dokumen monitoring dan reviu aktivitas pengendalian risiko, serta kertas kerja manajemen risiko lainnya. Melalui SPIP Sanggau, berbagai dokumen tersebut dapat terdokumentasi dan dikelola dengan baik sehingga memudahkan proses pemantauan, evaluasi, serta mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif dan akuntabel.



Wall Of Fame

Wall of Fame merupakan inovasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Balai POM Sanggau yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada pegawai berprestasi. Program ini dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan, di mana pada periode triwulan diberikan penghargaan kepada tiga pegawai terbaik, sedangkan pada periode tahunan diberikan kepada satu pegawai terbaik yang ditentukan berdasarkan akumulasi hasil penilaian kinerja selama periode tersebut.

SPeKTa



SPeKTa (Sentra Pengembangan Kompetensi Terpadu) merupakan situs Google yang berisi berbagai informasi terkait pengembangan kompetensi pegawai di Balai POM Sanggau. Melalui SPeKTa, pegawai dapat memperoleh informasi

mengenai rencana dan peluang pelatihan yang relevan dengan tugas dan jabatannya sehingga dapat mendukung peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Info Bang Samer



Info Bang Samer merupakan media penyampaian informasi terkait Balai POM di Sanggau serta berbagai isu di bidang Obat dan Makanan yang disampaikan melalui media sosial. Penyampaian informasi tersebut menggunakan maskot Balai POM di Sanggau, yaitu Bang Samer, sehingga informasi dapat disampaikan secara lebih menarik, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pendekatan komunikasi yang kreatif dan berbasis visual ini menjadi strategi Balai POM di Sanggau dalam memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga kesadaran dan kepedulian publik terhadap keamanan Obat dan makanan dapat terus meningkat secara efektif dan berkelanjutan.

Video Pelayanan Ramah Kelompok Rentan

Inovasi ini merupakan media informasi yang dirancang untuk memberikan layanan informasi kepada kelompok rentan. Video ini dilengkapi dengan bahasa isyarat, narasi suara, dan subtitle sehingga dapat memudahkan akses informasi serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat.



SILab Balai POM Sanggau

SILab (Sistem Informasi Laboratorium) Balai POM Sanggau merupakan sistem informasi berbasis



Google Sites yang digunakan sebagai wadah terintegrasi untuk mengelola berbagai data laboratorium, seperti dokumen metode pengujian, hasil uji, sarana dan prasarana, reagen, serta kompetensi penguji. Melalui SILab, pengelolaan data laboratorium dapat dilakukan secara lebih terstruktur sehingga mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pengujian.

BETANG SEHAT (Bersama Tangani Stunting melalui Edukasi Masyarakat)



Merupakan kegiatan Edukasi kepada masyarakat mengenai pengendalian dan penurunan angka stunting. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sanggau dan Paroki Keuskupan Bunut Sanggau yang menyelenggarakan edukasi pembekalan terhadap calon pengantin bagi masyarakat Kabupaten Sanggau yang akan melakukan pernikahan. Balai POM Sanggau turut serta memberikan pengetahuan mengenai pencegahan stunting dan juga keamanan pangan di lingkungan keluarga pada kegiatan pembekalan calon pengantin.

Penghargaan atas Kinerja Balai POM di Sanggau

Balai POM di Sanggau sangat mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Balai POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2025, diantaranya :

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai POM di Sanggau





Pada September 2025, Balai POM di Sanggau meraih penghargaan Peringkat 2 IKPA Terbaik Semester I TA 2025 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dan penghargaan dari KPPN Sanggau berupa peringkat I Nilai IKPA Kategori Pagu Sedang Periode Semester I Tahun 2025.

Kinerja Kegiatan Penindakan Balai POM di Sanggau





Pada Juni 2025 Balai POM di Sanggau menerima sertifikat oleh Direktur Cegah tangkal sebagai Balai Terbaik 1 pada kategori Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dan Balai Terbaik 3 pada kategori Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan Pameran Pembangunan Sabang Merah Tahun 2025

Balai POM di Kabupaten Sanggau berpartisipasi dalam Kegiatan Pameran Pembangunan Sabang Merah Tahun 2025 pada Bulan September 2025. Pada kegiatan tersebut Balai POM di Sanggau melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pengawasan produk Obat dan Makananan dan Workshop kegiatan Balai POM selama dengan Tema Kolaborasi Hingga Pelosok Negeri Untuk Melayani Masyarakat. Balai POM di Kabupaten Sanggau mendapatkan Piagam penghargaan dari Bupati Sanggau atas partisipasi dalam Pameran Pembangunan Sabang Merah Tahun 2025


PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SANGGAU

Atas Partisipasi Dalam Pameran Pembangunan Sabang Merah Tahun 2025

Sebagai Rangkaian Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025

"SINERGI DALAM PEMBANGUNAN, BERTUMBUH DALAM KREATIVITAS, HARMONIS DALAM KEBERAGAMAN"

BUPATI SANGGAU

Drs. YOHANES ONTOT, M.Si

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Balai POM di Sanggau

Pada tahun 2025 Balai POM di Sanggau melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Internal BPOM Tahun 2025 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori "PELAYANAN PRIMA" dan mendapatkan piagam penghargaan dari Kepala Badan POM.


BADAN POM

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada:

Balai POM di Sanggau

sebagai:
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025
dengan Indeks Pelayanan Publik kategori
"Pelayanan Prima"

Jakarta, 19 November 2025
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D.


BADAN POM

ANUGERAH

Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

2025

KATEGORI PPID PELAKSANA UPT BALAI POM

BALAI POM DI SANGGAU

SEBAGAI BADAN PUBLIK

INFORMATIF

Jakarta, 3 Desember 2025
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D.

Dalam hal Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Balai POM di Sanggau mendapatkan Anugerah dari Kepala Badan POM pada Kategori PPID Pelaksana UPT Balai POM sebagai Badan Publik Informatif.

Komitmen Penguatan Kelembagaan dan Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Tahun 2025


SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

diberikan kepada:

Balai POM di Sanggau

atas komitmen yang nyata untuk melakukan perbaikan berkelanjutan guna mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025.

Jakarta, 24 Desember 2025

Sekretaris Utama
selaku Penanggung Jawab Pokja PUG BPOM

JAYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Balai POM di Sanggau menerima sertifikat atas Komitmen Penguatan Kelembagaan dan Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Tahun 2025 dari Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM RI, sebagai bentuk pengakuan atas kesungguhan UPT dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial ke dalam tata kelola kelembagaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, guna mewujudkan layanan pengawasan Obat dan makanan yang responsif, berkeadilan, dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN **13**
1.1 Latar Belakang 13
1.2 Gambaran Umum Organisasi 15
1.3 Struktur Organisasi 17
1.4 Isu Strategis 18
BAB II
PERENCANAAN KINERJA **20**
2.1 Uraian Singkat Renstra 20
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 22
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 25
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 25
2.5 Metode Pengukuran 29
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA **32**
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 32
3.2 Evaluasi Akhir Periode RENSTRA 124
3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis 124
3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 135
3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja 135
3.6. Realisasi Anggaran 136
3.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
BAB IV
PENUTUP 145
4.1 KESIMPULAN 145
4.2. Saran 145

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
LAMPIRAN II
TABEL PERHITUNGAN EFISIENSI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan yang sejalan dengan agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sanggau menyusun perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Penyusunan rencana tersebut dilakukan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh kebijakan dan strategi yang dirumuskan kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Sanggau Tahun 2025–2029 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di masa mendatang.

Dalam lima tahun kedepan, pengawasan Obat dan Makanan akan menghadapi berbagai tantangan di antaranya: 1) Aspek kesehatan, yakni memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat atau khasiat, serta mutu; 2) Aspek sosial, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan yang beredar; 3) Aspek ekonomi, yaitu mendorong daya saing industri Obat dan Makanan melalui kemudahan proses perizinan dan sertifikasi dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan kehalalan produk, dukungan terhadap pengembangan produk baru, peningkatan ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, pencegahan penyelundupan dan peredaran produk ilegal atau palsu, serta perluasan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan; 4) Aspek keamanan nasional, yaitu memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran atau kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan, seperti bioterorisme; dan 5) Aspek teknologi, yaitu meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi guna menghadapi tren peredaran produk secara daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Balai POM di Sanggau sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Balai POM di Sanggau untuk periode 2025-2029. Renstra Balai POM di Sanggau disusun dengan berpedoman pada Renstra Badan POM.

Balai POM di Sanggau sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan POM memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran Obat dan Makanan secara daring menuntut Balai POM di Sanggau harus memiliki strategi dalam melaksanakan pengawasan dan memastikan keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar. Wilayah kerja Balai POM di Sanggau yang mencakup 5 (lima) Kabupaten yakni Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu, dimana wilayah kerja Balai POM di Sanggau tersebut merupakan salah satu pintu masuk utama Provinsi Kalimantan Barat yang berpeluang menyebabkan masuknya produk Obat dan makanan ilegal atau tidak memenuhi ketentuan.

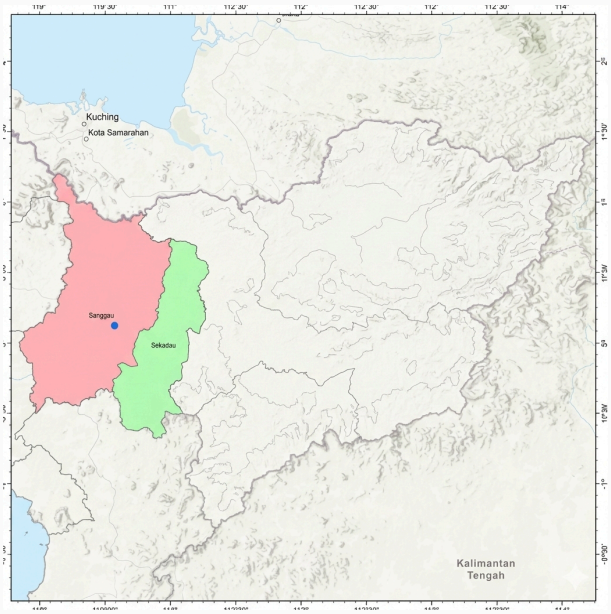
Wilayah kerja Balai POM di Sanggau meliputi lima Kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah geografis yang cukup luas. Balai POM di Sanggau memiliki tiga wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia, yaitu Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap peredaran Obat dan Makanan dimulai dari evaluasi *pre-market* pengawasan *post-market* hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administrasi, dan penindakan. Rangkaian kegiatan ini merupakan upaya pemastian agar produksi, distribusi Obat dan Makanan aman sampai dikonsumsi oleh masyarakat sehingga terjaga mutu dan khasiatnya mewujudkan masyarakat yang sehat, sekaligus juga memperkuat industri Obat dan Makanan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan memberikan tugas kepada Balai POM di Sanggau untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan wilayah kerja Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi.

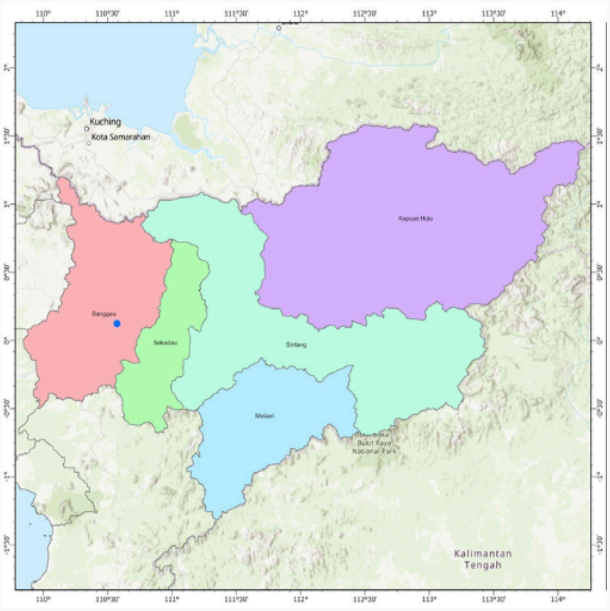
1.2 Gambaran Umum Organisasi



Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Rencana Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan POM tahun 2025-2029.



Gambar 1.1 Peta Catchment Area Wilayah Loka POM di Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2023



Gambar 1.2 Peta Catchment Area Wilayah Balai POM di Sanggau Tahun 2024-2025

Pada awal pembentukannya di tahun 2018, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau mengemban amanah yang spesifik namun krusial. Selama periode 2018 hingga 2023, fokus pengawasan terkonsentrasi pada dua wilayah penyangga utama di jalur lintas tengah Kalimantan Barat, serta wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia yaitu di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, Loka POM di Sanggau berhasil meletakkan fondasi pengawasan yang kuat, mulai dari pemeriksaan sarana, penindakan produk ilegal hingga pendampingan UMKM lokal agar

berdaya saing. Namun, luasnya geografis Kalimantan Barat dan meningkatnya risiko peredaran produk tidak memenuhi syarat di wilayah hulu menuntut adanya akselerasi jangkauan.

Mulai tahun 2024, terjadi restrukturisasi signifikan. Guna memastikan kehadiran negara hingga ke pelosok negeri, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau diperluas secara drastis dari 2 kabupaten menjadi 5 kabupaten yaitu kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Perubahan ini bukan sekadar penambahan luas wilayah, melainkan sebuah komitmen untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan layanan sertifikasi dan izin edar tanpa harus menempuh perjalanan jauh, memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk wilayah perbatasan (PLBN) dari peredaran Obat dan makanan ilegal, serta mempercepat tindak lanjut terhadap laporan masyarakat terkait dugaan keracunan makanan atau peredaran Obat terlarang di wilayah pedalaman khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan klasifikasi menjadi Balai POM di Sanggau sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM. Peningkatan klasifikasi Loka POM Sanggau menjadi Balai POM merupakan bagian dari penataan 11 Loka POM secara nasional menjadi Balai POM. Penataan UPT BPOM ini telah mendapatkan persetujuan Izin Prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain:

1) Aspek kesehatan: menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu;
2) Aspek sosial: meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas Obat dan Makanan yang beredar;
3) Aspek ekonomi: mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi Obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan Obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan Obat dan makanan;

4) Aspek keamanan nasional: meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme;
5) Aspek teknologi: meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran Obat dan Makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Balai POM di Sanggau sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Balai POM di Sanggau untuk periode 2025-2029. Renstra Balai POM di Sanggau disusun dengan berpedoman pada Renstra Badan POM. Balai POM di Sanggau sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan POM memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran Obat dan Makanan secara daring menuntut Balai POM di Sanggau harus memiliki strategi dalam melaksanakan pengawasan dan memastikan keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar.

TUGAS POKOK

Balai POM di Sanggau mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

FUNGSI

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk, fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Sanggau telah berubah klasifikasinya menjadi Balai POM di Sanggau. Perubahan ini mulai berlaku setelah pengukuhan yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2025. Adapun susunan Organisasi Balai POM di Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas: a) Kepala; dan b) Subbagian Tata Usaha; dan c) Kelompok Jabatan Fungsional, seperti yang dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai POM di Sanggau

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai POM di Sanggau sebanyak 34 orang. Rincian berdasarkan jenis kelamin, jenis laki-laki sebanyak 16 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang. Untuk penempatan jumlah pegawai PNS dan CPNS sebanyak 22 orang, PPPK sebanyak 6 orang dan tenaga outsourcing sebanyak 7 orang, sedangkan distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan untuk pendidikan S1 sebanyak 18 orang, Profesi sebanyak 4 orang, DIII sebanyak 5 orang dan SMA sebanyak 7 orang. Rincian distribusi atas sumber daya manusia di Balai POM Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Gender	Pendidikan					Jumlah
			S2	Profesi	S1	DIV/ DIII	SLTA/ Sederajat	
1	PNS/CPNS	Laki-laki	0	1	3	1	0	5
		Perempuan	0	3	10	3	0	16
2	PPPK	Laki-laki	0	0	4	0	0	4

No	Jabatan	Gender	Pendidikan					Jumlah
			S2	Profesi	S1	DIV/ DIII	SLTA/ Sederajat	
		Perempuan	0	0	1	1	0	2
3	OUTSOURCING	Laki-laki	0	0	0	0	7	7
		Perempuan	0	0	0	0	0	0
Total			0	4	18	5	7	34

1.4 Isu Strategis

a. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proaktif control, dengan mendorong penerapan Risk Management Programme.

Balai POM di Sanggau sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2025-2029 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (postmarket) di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan penyidikan dan penegakan hukum.

b. Aspek Lingkungan Strategis

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel Analisis SWOT seperti di bawah ini:

Tabel 1.2. Hasil Analisis SWOT

KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan Obat dan makanan sebagai UPT Badan POM 2. Kerjasama lintas sektor dengan Tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menunjang kegiatan pengawasan Obat dan makanan oleh Pemerintah daerah 3. Integritas pelayanan publik yang diakui secara Nasional 4. Kebutuhan kompetensi pegawai telah didata dan direncanakan 5. Melaksanakan fungsi dan berkomitmen dalam pengawasan Obat dan makanan secara komprehensif serta berinovasi secara berkesinambungan 6. Pengembangan laboratorium Balai POM di Sanggau sesuai standar Pengembagan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) 7. Memiliki berbagai platform komunikasi (website, media sosial, aplikasi mobile) 8. UPT telah menerapkan Reformasi Birokrasi dan tersertifikasi QMS ISO 9001 : 2015 9. Memiliki jaringan komunikasi yang tersebar di wilayah kerja Balai POM di Kab. Sanggau melalui Kader Keamanan Pangan Desa yang tersebar pada 13 Desa dan 49 anggota Saka POM	1. Regulasi dan pedoman terkait pengawasan Obat dan makanan belum lengkap, dan cepat berubah 2. kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang bersifat dinamis 3. Mekanisme terkait pertukaran informasi intelijen belum ada 4. Sarana dan Prasarana dalam pengawasan Obat dan makanan belum memadai 5. Pemanfaatan sistem informasi yang belum maksimal dan belum terintegrasi 6. Hasil uji menggunakan rapid test kit kurang akurat dibandingkan dengan metode pengujian laboratorium
PELUANG (OPPORTUNITY)	**ANCAMAN (THREAT)**
1. Adanya Tuntutan reformasi birokrasi untuk menerapkan zona integritas 2. Adanya Kebijakan Pemerintah terkait Peningkatan kualitas Pelayanan Publik 3. Penggunaan pihak ketiga dalam pengelolaan tenaga outsourcing, menyebabkan pengelolaan kinerja dapat lebih efektif dan efisien 4. Pintu masuk perbatasan yang semakin mudah diakses sehingga terdapat pelayanan pengawasan oleh Balai POM Sanggau di perbatasan 5. Jenis dan jumlah peredaran Obat dan makanan yang semakin meningkat dan bervariasi sehingga hasil pengawasan dapat menggambarkan profil keamanan dan mutu Obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja Balai POM Sanggau 6. Berkembangnya teknologi digital yang memudahkan penyebaran informasi Obat dan makanan 7. Potensi kolaborasi dengan lintas sektor dalam melakukan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sanggau 8. Menguatnya 3 pilar pengawasan (Pemerintah, Pelaku Usaha, Masyarakat) dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan	1. Wilayah kerja Balai POM Sanggau di daerah perbatasan menyebabkan risiko peredaran Obat dan makanan tanpa izin edar cukup tinggi 2. Menurunnya kepercayaan publik atas narasi negatif BPOM dan hasil pengujian rapid test kit 3. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha berkembang pesat yang menyebabkan peredaran Obat dan makanan juga membutuhkan kemampuan pengujian dengan ruang lingkup yang lebih luas 4. Perubahan iklim dapat mempengaruhi perencanaan kegiatan utama Unit Kerja 5. Pesatnya peredaran hoaks dan informasi yang tidak valid tentang Obat dan makanan pada sistem informasi BPOM 6. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan makanan 7. penyidikan terhambat karena terjadi pra peradilan dan tersangka melarikan diri

Penjelasan atas hasil analisa lingkungan strategis berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut:

INTERNAL

Adapun Strength (Kekuatan) yang dimiliki Balai POM di Sanggau adalah sebagai berikut:

- Balai POM di Sanggau memiliki Dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan Obat dan makanan sebagai UPT Badan POM yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Telah terjalin Kerjasama lintas sektor dengan Tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menunjang kegiatan pengawasan Obat dan makanan oleh Pemerintah daerah sejak tahun 2022 untuk Kab Sanggau, Kab Sekadau, dan Kab Sintang dengan kegiatan berupa pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen SPP-IRT, Pengawasan sarana IRTP pasca produk beredar, Pengawasan produk pangan industri rumah tangga dan pengawasan apotek dan toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan. Hal ini dibuktikan dengan nilai Indikator Kegiatan Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota memperoleh Capaian sebesar 100% dengan kriteria BAIK

- Balai POM di Sanggau memiliki Integritas pelayanan publik yang diakui secara Nasional yang diakui dalam beberapa penghargaan. Balai POM di Sanggau meraih nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,48 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 sebesar 4,93 dimana Balai POM di Sanggau menjadi Unit penyelenggara pelayanan publik dengan kategori pelayanan prima. Hal ini juga sejalan dengan Keterbukaan Informasi publik, dimana Balai POM di Sanggau menjadi UPT informatif dengan nilai pada tahun 2024 sebesar 92,72.

- Balai POM di Sanggau telah melakukan pendataan kebutuhan kompetensi pegawai termasuk GAP pelatihan pegawai serta pada awal tahun telah dilakukan pengajuan peserta pelatihan sesuai dengan daftar pelatihan yang telah dikeluarkan oleh PPSDM Badan POM. Balai POM di Sanggau telah memiliki pegawai yang tersertifikasi sesuai kompetensi di bidangnya. Diantaranya telah memiliki pegawai yang terspesialisasi yaitu

inspektur pangan, inspektur Kosmetik, inspektur CDOB, Penyuluh KIE, Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- Melaksanakan fungsi dan berkomitmen dalam pengawasan Obat dan makanan secara komprehensif serta berinovasi secara berkesinambungan. Balai POM berkomitmen untuk melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan makanan secara komprehensif, mencakup seluruh tahapan mulai dari pre market hingga post market guna menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Selain itu, Balai POM di Sanggau senantiasa berinovasi secara berkesinambungan dalam metode pengawasan, pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi agar pengawasan semakin efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis salah satunya melalui aplikasi Si Pintar untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan self assessment dalam penerapan CPPOB-IRT dan Sinbaku (Sinergi Balai POM Sanggau, Bea Cukai Entikong dan Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong)

- Pengembangan laboratorium Balai POM di Sanggau sesuai standar Pengembagan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN), ini merupakan bagian dari strategi nasional Badan POM untuk mewujudkan laboratorium pengujian yang handal, terstandar, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menjamin mutu dan keamanan produk yang beredar di masyarakat Balai POM di Sanggau diarahkan untuk memastikan keseragaman mutu pengujian diseluruh jaringan laboratorium pengawasan Badan POM. Pengembangan dilakukan secara bertahap, mencakup peningkatan kualitas infrastruktur, sistem manajemen mutu, kompetensi sumber daya manusia, serta integrasi sistem informasi laboratorium. Dari aspek infrastruktur dan fasilitas, laboratorium dikembangkan agar memenuhi persyaratan teknis sesuai standar SNI ISO/IEC 17025:2017 dan juga mencakup integrasi sistem informasi laboratorium yang terhubung dengan jaringan nasional PPPOMN. Melalui sistem ini, proses pertukaran data, pelaporan hasil uji, dan koordinasi pengawasan antar laboratorium dapat dilakukan secara efisien dan transparan. Dari ruang pengujian dilengkapi dengan sarana pendukung yang memadai untuk pengujian kimia, mikrobiologi, dan parameter lainnya yang relevan dengan pengawasan Obat, pangan, Kosmetik, serta produk tradisional. Peningkatan ini juga memperhatikan faktor keselamatan kerja, efisiensi tata ruang, dan pengendalian lingkungan laboratorium. Laboratorium Balai POM di Sanggau menerapkan prinsip-prinsip sistem mutu laboratorium yang berorientasi pada keandalan hasil uji, validasi metode, serta kalibrasi peralatan secara berkala untuk memperoleh pengakuan formal melalui

akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang sekaligus memperkuat posisi laboratorium dalam jaringan pengujian nasional sehingga secara keseluruhan pengembangan laboratorium Balai POM di Sanggau sesuai standar PPPOMN diharapkan mampu memperkuat peran Balai POM di Sanggau sebagai garda terdepan dalam pengawasan Obat dan makanan, khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan laboratorium yang berstandar nasional, hasil pengujian menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung upaya perlindungan masyarakat terhadap peredaran produk yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan.

- Balai POM di Sanggau Memiliki berbagai platform komunikasi (website, media sosial, aplikasi mobile) yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memudahkan dalam penyampaian informasi ke berbagai kalangan. salah satu media platform komunikasi Balai POM di Sanggau adalah website yang dapat diakses di alamat https://sanggau.pom.go.id/. Media Sosial yang dimiliki oleh Balai POM di Sanggau antara lain Facebook (Loka POM di Kabupaten Sanggau), Instagram (@bpom.sanggau), X (@bpom.sanggau), Youtube (BPOM Sanggau).

- UPT telah menerapkan Reformasi Birokrasi dan tersertifikasi QMS ISO 9001 : 2015. Reformasi Birokrasi (RB) adalah upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Balai POM di Sanggau telah menerapkan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Sejak tahun 2021 Balai POM di Sanggau telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu, dah telah tersertifikasi ISO 9001 : 2015. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa UPT telah menerapkan sistem yang teruji dan pemikiran berbasis risiko dalam mengelola kualitas layanannya.

- Memiliki jaringan komunikasi yang tersebar di wilayah kerja Balai POM di Kab. Sanggau melalui melalui Kader Keamanan Pangan Desa yang tersebar pada 13 Desa dan 49 anggota Saka POM. Balai POM Sanggau memiliki keunggulan strategis dalam hal jangkauan pengawasan Obat dan makanan melalui jaringan komunikasi yang telah terbangun secara sistematis di wilayah kerjanya. Kekuatan ini terwujud melalui pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Desa yang telah tersebar di 13 desa, didukung oleh 49 anggota Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan (Saka POM).

Keberadaan jaringan ini memberikan beberapa keuntungan signifikan. Pertama, memungkinkan Balai POM untuk menjangkau wilayah-wilayah yang secara geografis mungkin sulit diakses secara langsung, sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan lebih merata di seluruh Kabupaten Sanggau. Kedua, kader-kader yang berasal dari masyarakat lokal memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan dinamika di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat menjadi mata dan telinga yang efektif bagi Balai POM. Ketiga, melalui kader dan anggota Saka POM ini, proses edukasi dan sosialisasi tentang keamanan pangan serta pengawasan Obat dan makanan dapat dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan produk Obat dan makanan di lingkungan mereka. Dengan demikian, jaringan komunikasi yang tersebar ini menjadi aset strategis yang memperkuat kapasitas Balai POM Sanggau dalam menjalankan tugas pengawasan, sekaligus membangun sistem pengawasan yang partisipatif dan berbasis masyarakat.

Adapun Weakness (Kelemahan) yang dimiliki Balai POM di Sanggau adalah sebagai berikut:

- Regulasi dan pedoman terkait pengawasan Obat dan makanan belum lengkap, dan cepat berubah. Regulasi dan pedoman dalam pengawasan cepat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perdagangan global. Kondisi ini dapat menimbulkan tantangan dalam penerapan standar pengawasan di lapangan dan memerlukan penyesuaian cepat dari Unit Kerja, baik dalam hal pemahaman regulasi, pelaksanaan kegiatan, maupun koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait

- Seiring dengan perkembangan peraturan dan kondisi di lapangan, kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang bersifat dinamis. Pendataan kompetensi pegawai serta gap pelatihan pegawai menjadi salah satu langkah persiapan peningkatan kompetensi ASN untuk menjawab tantangan dalam melakukan pengawasan Obat dan makanan.

- Mekanisme terkait pertukaran informasi intelijen belum ada, sehingga dalam melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk memperoleh informasi intelijen dari stakeholder terkait belum terpenuhi.

- Sarana dan Prasarana dalam pengawasan Obat dan makanan belum memadai. Sarana dan prasarana dalam pengawasan Obat dan makanan saat ini belum sepenuhnya

memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Keterbatasan peralatan laboratorium, serta infrastruktur pendukung di wilayah kerja yang luas dan sebagian sulit dijangkau menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang cepat dan menyeluruh. Kondisi ini memerlukan upaya peningkatan kapasitas dan modernisasi sarana prasarana agar efektivitas pengawasan Obat dan makanan dapat terus ditingkatkan

- Pemanfaatan sistem informasi yang belum maksimal dan belum terintegrasi. Pemanfaatan sistem informasi dalam pengawasan Obat dan makanan saat ini belum maksimal dan belum sepenuhnya terintegrasi antar unit kerja maupun dengan instansi terkait. Kondisi ini dapat menghambat pertukaran data, analisis informasi, serta pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi sistem informasi agar pengelolaan data pengawasan menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap perkembangan situasi di lapangan

- Hasil uji menggunakan rapid test kit kurang akurat dibandingkan dengan metode pengujian laboratorium

EKSTERNAL

Untuk Opportunity (Peluang) yang dimiliki Balai POM di Sanggau adalah sebagai berikut:

- Adanya Tuntutan reformasi birokrasi untuk menerapkan zona integritas Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Balai POM di Sanggau secara bertahap menerapkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penerapan zona integritas dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, menumbuhkan budaya kerja yang profesional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

- Dalam implementasinya, Balai POM di Sanggau menekankan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas, sistem kerja yang transparan, serta pengawasan internal yang efektif. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pelayanan publik, serta penerapan inovasi yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas kinerja. Melalui langkah-langkah tersebut, Balai POM di Sanggau berupaya menjadi instansi pemerintah yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus menjadi contoh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sanggau. Dengan demikian, penerapan Zona Integritas diharapkan tidak hanya menjadi komitmen administratif, tetapi juga menjadi budaya kerja yang melekat dan berkelanjutan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan.

- Kebijakan pemerintah terkait peningkatan kualitas pelayanan publik yang tengah digalakkan secara nasional menjadi peluang strategis bagi Balai POM di Sanggau untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang telah berjalan baik menjadi semakin baik. Momentum reformasi birokrasi dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sejalan dengan upaya berkelanjutan yang telah dilakukan Balai POM di Sanggau. Peluang ini dapat dioptimalkan Balai POM di Sanggau melalui beberapa strategi. Pertama, terus mengembangkan inovasi layanan pengawasan Obat dan makanan agar lebih aksesibel, baik melalui pendekatan konvensional maupun digital. Kedua, mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan sertifikasi untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha lokal di wilayah kerja Sanggau. Ketiga, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat dalam menciptakan ekosistem pelayanan yang terintegrasi. Keempat, dengan konsistensi peningkatan kualitas pelayanan, kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Balai POM akan terus meningkat, sehingga memperkuat posisi dan kredibilitas institusi. Dengan memanfaatkan peluang ini, Balai POM di Sanggau dapat terus bertransformasi menjadi institusi pelayanan publik yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengawasan Obat dan makanan di tingkat daerah, sekaligus memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat dari risiko produk yang tidak memenuhi standar keamanan

- Penggunaan pihak ketiga dalam pengelolaan tenaga outsourcing, menyebabkan pengelolaan kinerja dapat lebih efektif dan efisien Melalui kerja sama dengan pihak ketiga, pengelolaan tenaga outsourcing dapat dilakukan secara lebih profesional dan terukur. Mekanisme ini memungkinkan Balai POM di Sanggau untuk fokus pada pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi utama organisasi, sementara aspek administrasi dan pengelolaan tenaga pendukung dapat ditangani secara efisien oleh penyedia jasa yang berkompeten. Dengan sistem ini, pengawasan terhadap kinerja tenaga outsourcing dapat dilaksanakan secara lebih objektif dan sistematis, karena terdapat standar evaluasi kinerja yang jelas dan terukur. Selain itu, penggunaan pihak

ketiga juga memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan beban kerja dan prioritas kegiatan instansi.

- Pintu masuk perbatasan yang semakin mudah diakses sehingga terdapat pelayanan pengawasan oleh Balai POM di Sanggau di perbatasan Sebagai salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kabupaten Sanggau memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan mutu produk Obat dan makanan yang beredar di wilayah perbatasan. Seiring dengan semakin mudahnya akses dan mobilitas masyarakat melalui pintu masuk perbatasan, Balai POM di Sanggau terus memperkuat upaya pengawasan untuk memastikan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan dikonsumsi masyarakat telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudahan akses di pintu perbatasan, seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau dan PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan interaksi lintas batas. Namun, hal ini juga berpotensi meningkatkan risiko peredaran produk Obat dan makanan ilegal atau tidak memenuhi standar. Menyikapi hal tersebut, Balai POM di Sanggau menempatkan layanan pengawasan dan pemeriksaan secara aktif di kawasan perbatasan.

- Jenis dan jumlah peredaran Obat dan makanan yang semakin meningkat dan bervariasi sehingga hasil pengawasan dapat menggambarkan profil keamanan dan mutu Obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Sanggau. Jenis dan jumlah peredaran Obat dan makanan yang semakin meningkat dan bervariasi di wilayah kerja Balai POM di Sanggau menjadi peluang untuk memperkuat pengawasan dan pemetaan profil keamanan serta mutu produk yang beredar di masyarakat. Melalui kegiatan pengawasan yang terencana dan berbasis risiko, Balai POM di Sanggau dapat menghasilkan data dan informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi peredaran Obat dan makanan, sehingga mendukung pengambilan kebijakan dan tindak lanjut pengawasan yang lebih tepat sasaran.

- Berkembangnya teknologi digital yang memudahkan penyebaran informasi Obat dan makanan Balai POM di Sanggau memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan memperkuat edukasi masyarakat terkait pentingnya penggunaan Obat yang aman serta konsumsi pangan yang bermutu. Melalui berbagai platform digital seperti media sosial, situs web resmi, dan aplikasi informasi

publik, Balai POM di Sanggau secara aktif menyampaikan informasi mengenai pengawasan, peringatan produk, hasil uji laboratorium, serta kampanye Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) dan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluarsa). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih cepat dan transparan melalui sistem pelaporan daring, basis data produk, serta koordinasi lintas instansi yang terintegrasi. Hal ini mendukung terciptanya sistem pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- Potensi kolaborasi dengan lintas sektor dalam melakukan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sanggau. Balai POM di Sanggau memiliki kolaborasi yang baik antar lintas sektor. Balai POM di Sanggau secara rutin melakukan pengawasan bersama dengan TPID (tim pengendali inflasi daerah) serta lintas sektor lain seperti dalam pengawasan bersama menjelang hari besar maupun kegiatan rutin pengawasan Obat dan makanan, dilakukan juga pengawasan yang bermuara pada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan Obat dan makanan tidak memenuhi ketentuan yang dilaksanakan dengan melibatkan Polres setempat, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Dengan bekerja sama bersama lintas sektor, pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan menyeluruh, mulai dari pintu masuk perbatasan hingga distribusi di masyarakat. Kolaborasi ini juga memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, sehingga keamanan, mutu, dan khasiat produk yang beredar di wilayah kerja dapat lebih terjamin.

- Menguatnya 3 pilar pengawasan (Pemerintah, Pelaku Usaha, Masyarakat) dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Dalam upaya mewujudkan pengawasan Obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh, Balai POM di Sanggau terus memperkuat sinergi tiga pilar pengawasan, yaitu Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat. Ketiga pilar ini memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam memastikan peredaran Obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas, pelaku usaha bertanggung jawab dalam menjamin mutu produk yang dihasilkan, sedangkan masyarakat berperan aktif sebagai konsumen cerdas yang kritis terhadap produk yang dikonsumsi. Melalui kolaborasi yang kuat di antara ketiga pilar tersebut, Balai POM di Sanggau berkomitmen untuk membangun sistem pengawasan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan,

guna melindungi masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas di bidang Obat dan makanan

Untuk Threat (Ancaman) yang dimiliki Balai POM di Sanggau adalah sebagai berikut:

- Wilayah kerja Balai POM Sanggau di daerah perbatasan menyebabkan risiko peredaran Obat dan makanan tanpa izin edar cukup tinggi. Sebagai wilayah perbatasan, arus keluar-masuk barang dan pelintas cukup tinggi, baik melalui jalur resmi maupun jalur tidak resmi (jalur tikus). Hal ini meningkatkan potensi masuknya produk dari luar negeri yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya temuan terkait produk tanpa izin edar oleh Petugas Balai POM di Sanggau

- Menurunnya kepercayaan publik atas narasi negatif BPOM dan hasil pengujian rapid test kit. Menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan POM akibat narasi negatif, terutama terkait hasil pengujian Obat dan Sediaan Farmasi seperti rapid test kit, dapat menimbulkan beberapa risiko serius. Untuk mengatasi hal ini, Balai POM di Sanggau perlu secara proaktif memberikan penjelasan publik dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menyebarkan informasi yang akurat dan terverifikasi. Serta meningkatkan kemampuan Laboratorium untuk meningkatkan kualitas hasil uji.

- Pertumbuhan jumlah pelaku usaha berkembang pesat yang menyebabkan peredaran Obat dan makanan juga membutuhkan kemampuan pengujian dengan ruang lingkup yang lebih luas. Pertumbuhan pesat jumlah pelaku usaha Obat dan makanan, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di wilayah kerja Balai POM Sanggau menimbulkan beberapa risiko signifikan yang mendasari kebutuhan mendesak akan pengembangan kemampuan pengujian. Secara singkat, pertumbuhan pesat pelaku usaha menuntut sistem pengawasan yang lebih kuat dan canggih, di mana pengembangan kemampuan pengujian Balai POM Sanggau bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan esensial untuk menjamin keamanan produk yang beredar dan melindungi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

- Perubahan iklim dapat mempengaruhi perencanaan kegiatan utama Unit Kerja. Kondisi infrastruktur jalan di wilayah kerja Balai POM di Sanggau yang masih terbatas di beberapa wilayah, cuaca ekstrim, serta potensi banjir di beberapa wilayah dapat menghambat petugas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan makanan. Oleh karena itu, dalam perencanaan kegiatan, Balai POM Sanggau perlu

mempertimbangkan faktor risiko perubahan iklim agar pelaksanaan tugas tetap efektif dan berkelanjutan

- Pesatnya peredaran hoaks dan informasi yang tidak valid tentang Obat dan makanan pada sistem informasi BPOM. Informasi yang menyesatkan di media sosial dan platform digital dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang telah memiliki izin edar serta memicu kepanikan atau konsumsi produk yang tidak aman. Oleh karena itu, BPOM perlu memperkuat sistem informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses, serta meningkatkan literasi masyarakat agar mampu membedakan informasi resmi dengan hoaks

- Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM Sanggau. Masih tingginya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM Sanggau merupakan indikasi adanya tantangan serius dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat setempat. Hal ini secara konkret dibuktikan melalui sejumlah perkara hukum yang berhasil ditangani oleh penyidik Balai POM Sanggau, menunjukkan aktivitas penegakan hukum yang proaktif namun juga mencerminkan skala permasalahan yang masih signifikan di lapangan. Sejak tahun 2019-2024 dibuktikan dengan perkara hukum yang ditangani oleh penyidik Balai POM Sanggau sebanyak enam perkara.

- Penyidikan terhambat karena terjadi pra peradilan dan tersangka melarikan diri. Praperadilan dapat menghadirkan risiko signifikan terhadap kelancaran proses penyidikan, termasuk potensi terhambatnya proses hukum dan pelarian tersangka. Ketika permohonan praperadilan diajukan, proses penyidikan seringkali menghadapi hambatan atau penundaan. Selama proses sidang praperadilan berlangsung, yang putusannya bersifat final dan cepat, penyidik harus fokus mempersiapkan argumen dan bukti untuk mempertahankan keabsahan tindakannya di pengadilan. Hal ini secara tidak langsung dapat mengalihkan sumber daya dan perhatian dari fokus utama penyidikan perkara.

- Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 menjadi isu strategis bagi Balai POM di Sanggau, mengingat luasnya wilayah kerja yang mencakup lima kabupaten dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, tingginya risiko kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan, dan belum optimalnya sertifikasi dapur SPPG. Kondisi ini menuntut penguatan kapasitas pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, serta sinergi lintas sektor

agar keamanan dan mutu pangan dalam program MBG di wilayah Sanggau dapat terjamin secara menyeluruh.

- Tingginya angka stunting di wilayah kerja Balai POM di Sanggau yang meliputi kabupaten-kabupaten di pedalaman dan perbatasan Kalimantan Barat menjadi isu strategis yang mendesak untuk ditangani, mengingat stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa dalam jangka panjang. Peredaran produk Pangan Olahan yang tidak memenuhi standar mutu dan gizi, beredarnya suplemen serta produk kesehatan ilegal yang dikonsumsi ibu hamil dan balita, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap keamanan pangan di daerah terpencil menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Hal tersebut menuntut Balai POM di Sanggau untuk mengintensifkan pengawasan pangan berbasis risiko, memperkuat edukasi keamanan pangan kepada masyarakat, serta membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dan lintas sektor dalam upaya mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah Kalimantan Barat.

Berikut Isu Strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai POM di Sanggau Tahun Anggaran 2025, antara lain:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

   Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembentukan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi Birokrasi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

   Dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi pada Balai POM di Sanggau, dilakukan berbagai upaya penguatan tata kelola organisasi secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, penguatan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Balai POM di Sanggau juga terus mendorong peningkatan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan publik melalui berbagai media

komunikasi dan informasi, termasuk publikasi dan sosialisasi program pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penguatan tata kelola organisasi tersebut juga didukung melalui peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dalam lingkungan instansi pemerintah guna memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Upaya peningkatan maturitas SPIP dilakukan melalui penguatan perencanaan strategis, penetapan tujuan organisasi yang jelas dan terukur, penguatan struktur dan proses pengendalian, serta penerapan manajemen risiko dalam setiap kegiatan organisasi.

Melalui penerapan SPIP yang efektif dan terintegrasi, diharapkan seluruh proses penyelenggaraan kegiatan pada Balai POM di Sanggau dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan akuntabel. Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan secara efektif dan efisien, menghasilkan laporan keuangan yang andal, menjaga keamanan aset negara, serta menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penerapan Reformasi Birokrasi yang didukung oleh penyelenggaraan SPIP yang baik diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas

2. Pengawalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan terhadap Obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas peredaran produk Obat dan makanan, termasuk risiko peredaran produk ilegal, tidak memenuhi standar, atau berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Dalam implementasinya, instruksi presiden ini menugaskan berbagai pihak, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, untuk mengambil langkah konkret sesuai kewenangannya. Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan melalui pembinaan pelaku

usaha, pengawasan distribusi, edukasi masyarakat, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas kesehatan, dinas perdagangan, dan aparat penegak hukum.

Salah satu instrumen pendukung implementasi kebijakan tersebut adalah pemanfaatan **Dana Alokasi Khusus (DAK)**, khususnya DAK nonfisik maupun fisik yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung program prioritas nasional. Melalui DAK, pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas pengawasan Obat dan makanan, antara lain melalui peningkatan sarana prasarana laboratorium, pengadaan peralatan pengujian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan kegiatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.

Pada tahun 2025, 4 kabupaten di wilayah kerja Balai POM di Sanggau mendapatkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik POM. 4 Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sanggau, Sintang, Sekadau, dan Melawi. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka pengkajian izin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaran bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan stadart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. Balai POM di Sanggau turut berperan dalam memberikan bantuan pendampingan serta narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota.

Dengan demikian, implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 yang didukung melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan perlindungan masyarakat dari risiko produk Obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, sekaligus memperkuat sistem pengawasan nasional yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Kurangnya minat pelaku UMKM untuk mengurus perizinan produk melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

   Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya perizinan produk, persepsi bahwa proses pengurusan izin di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) rumit dan memerlukan waktu yang lama, serta adanya kekhawatiran terhadap biaya yang harus dikeluarkan.

Selain itu, sebagian pelaku UMKM juga masih memiliki keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan administrasi maupun standar produksi yang ditetapkan.

Rendahnya minat untuk mengurus perizinan ini berdampak pada terbatasnya jumlah produk UMKM yang memiliki izin edar resmi, sehingga dapat menghambat perluasan pasar, menurunkan tingkat kepercayaan konsumen, serta membatasi peluang produk UMKM untuk masuk ke pasar yang lebih luas seperti ritel modern maupun ekspor. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, pendampingan, serta penyederhanaan informasi terkait proses perizinan agar pelaku UMKM lebih terdorong untuk mendaftarkan produknya secara resmi

Di Wilayah kerja Balai POM di Sanggau, belum memiliki banyak UMK atau industri yang bergerak di sektor produksi farmasi (Obat Bahan Alam dan Kosmetik). Sebagian besar UMKM di sektor makanan dan minuman pun masih bergerak dengan skala usaha yang masih kecil/mikro umumnya memiliki keterbatasan dalam modal, teknologi, dan manajemen usaha. Kondisi ini membuat pelaku usaha lebih fokus pada produksi dan penjualan sehari-hari dibandingkan mengurus legalitas seperti izin edar BPOM yang dianggap membutuhkan biaya, waktu, dan persyaratan tambahan.

Kurangnya modal menjadi salah satu alasan paling umum yang sering ditemukan pada pelaku UMKM sehingga mereka kesulitan memenuhi standar produksi yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi atau izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Proses perizinan produk umumnya mensyaratkan pemenuhan berbagai standar, seperti penggunaan bahan baku yang terjamin keamanannya, fasilitas produksi yang higienis, peralatan yang memadai, serta sistem pengemasan dan pelabelan yang sesuai dengan ketentuan. Demikian pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal sehingga belum mampu melakukan peningkatan sarana dan prasarana produksi sesuai dengan standar tersebut. Misalnya, mereka masih menggunakan peralatan sederhana, tempat produksi yang belum memenuhi standar sanitasi, serta kemasan produk yang masih sederhana.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Sanggau sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, serta mutu Obat dan Makanan. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Badan POM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara:

VISI

”Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

MISI

1. Meningkatkan Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta layanan publik yang prima.

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Balai POM di Sanggau menggunakan 7 (tujuh) sasaran kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Balai POM di Sanggau tahun 2025-2029. Adapun rincian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Rincian Sasaran Strategis

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu Indikator: Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: 1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025) 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Indikator: 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Indikator: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Farmasi dan Pangan Olahan		
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE Indikator: 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Layanan Publik UPT yang prima Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT
			Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan disusun pada tahun n-1 untuk memberikan gambaran kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan unit kerja dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dan sebagai acuan/basis penyusunan RKA.

Tahun 2025 merupakan tahun awal RPJMN baru yaitu RPJMN tahun 2025-2029, di bawah pemerintahan baru pula. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dilaksanakan di tahun 2024, dimana pemerintahan baru belum dibentuk dan RPJMN baru tahun 2025-2029 juga belum disusun, sehingga RKT Tahun 2025 bersifat perkiraan yang akan dijadikan acuan/basis penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025. Berdasarkan Keputusan Kepala Balai POM di Sanggau, Nomor: HK.02.02.19C.09.24.60 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai POM di Sanggau Tahun 2025,ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Sanggau

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Anggaran
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.5	44.611.500
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	17.891.140
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	17.364.930
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	17.364.930
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	44.611.500
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	9.471.500
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	9.471.500
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.5	80.835.000
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80.835.000
		Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	1.793.000
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5	148.740.000
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.13	115.232.000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	94.959.000
		Jumlah desa pangan aman	1	153.129.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Anggaran
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100.645.000
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91	27.950.000
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	107.367.000
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	52.824.000
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.51	48.030.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	76	301.000.000
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	2.393.019.000
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.85	223.000.000
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	58.000.000

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Sanggau menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Kab. Sanggau tahun 2025-2029 dan DIPA Balai POM di Kab. Sanggau Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.148.145.000 (empat miliar seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Kab. Sanggau. Berikut disajikan tabel

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, serta Target dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Sanggau Tahun 2025:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Balai POM di Sanggau

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sanggau	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,5
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,5
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,13
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	76
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

Berdasarkan nota dinas nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagaimana tampak pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.4 Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Balai POM di Sanggau

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Semula	Target Menjadi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sanggau	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,5	90
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	86
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	95
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Semula	Target Menjadi
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,5	93
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	91
		Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	92
		Persentase Label Produk tembakau dan/ atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	91
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5	12
		Persentase Kabupaten /Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	20
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,13	88,13
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2
		Jumlah desa pangan aman	1	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Semula	Target Menjadi
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91	11.11
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	96
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	90
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.51	4,51
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	76	76
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.85	2,85
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	100

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Sanggau selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana tampak pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 Balai POM di Sanggau

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B9	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sanggau	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,5	80,5	80,5	80,5	44.611.500
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	17.891.140
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	17.364.930
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	17.364.930
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	65	80	100	44.611.500
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	9.471.500
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	9.471.500

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B9	B12	
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,5	89,5	89,5	89,5	80.835.000
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80.835.000
		Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	91	91	91	1.793.000
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10,07	10,51	10,95	11,5	148.740.000
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,13	88,13	88,13	88,13	115.232.000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	75	100	2	94.959.000
		Jumlah desa pangan aman	-	25	75	1	153.129.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	75	100	1	100.645.000
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik	22	43	64	91	27.950.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B9	B12	
		dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan					
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	85	96	107.367.000
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	90	52.824.000
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	4,51	48.030.000
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	76	301.000.000
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	5	2.393.019.000
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	2,85	223.000.000
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	14	44	75	100	58.000.000

Berdasarkan nota dinas nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM dilakukan revisi terhadap dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagaimana tampak pada tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.6 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Sanggau

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B9	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sanggau	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,5	80,5	90	90	89.223.000
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	86	86	13.155.250
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	13.155.250
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	91	91	13.155.250
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	65	95	95	6.440.620
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	6.251.190
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	91	91	6.251.190
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	89,5	89,5	93	93	52.622.790

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B9	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	91	91	52.622.790
		Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	91	92	92	2.000.000
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	91	92	2.000.000
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT					
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10,07	11,2	12	12	148.740.000
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman					
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,13	88,13	88,13	88,13	115.232.000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan	-	75	100	2	94.959.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B9	B12	
		keamanan pangan					
		Jumlah desa pangan aman	-	25	75	1	153.129.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	75	100	1	100.645.000
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	22	62	86	11,11	27.950.000
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	85	96	107.367.000
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	90	52.824.000
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	4,51	48.030.000
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	76	301.000.000
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	5	2.393.019.000
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	2,85	223.000.000
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	14	44	75	100	58.000.000

2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\%\ Capaian = \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

(1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan

(2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Tabel 2.7 Kriteria Pencapaian Indikator

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Nilai Kerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri atas

a). NKO Periodik

NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara tahunan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

b) NKO Tahunan

NKO tahunan NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat

kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

(1) Capaian Perjanjian Kinerja Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara - 7 - PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Predikat AKIP

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

(3) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan

100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100.

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

(4) Total Capaian Perjanjian Kinerja Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja.

(5) Nilai Kinerja Organisasi Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut

Tabel 2.9 Kriteria Predikat Kinerja Organisasi

Predikat	NKO Total	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Selanjutnya pengukuran realisasi triwulan. Pengukuran ini membandingkan realisasi triwulan dengan target tahunan, pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses realisasi indikator terhadap target triwulan dan tahunan masing-masing, agar bisa dilakukan tindakan untuk mempertahankan pencapaian target ataupun tindakan perbaikan agar dapat mengejar realisasi target tahunannya. Untuk kriteria pencapaian realisasi indikator terhadap target tahunan merujuk pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10 Kriteria Pencapaian Indikator Terhadap Target Tahunan

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target tahunan sebesar ≥ 100%	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target tahunan sebesar 70% - < 100%	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target tahunan sebesar <_70%	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target sudah tercapai.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

NKO Organisasi

Dalam memantau Nilai Kinerja Organisasi (NKO), BPOM di Sanggau melakukan pengukuran kinerja secara periodik diukur dari pencapaian indikator kinerja seluruh sasaran kegiatan berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi pada Perjanjian Kinerja (PK). NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Sedangkan NKO Tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, sejalan dengan regulasi tersebut terdapat pedoman yang menjadi acuan bagi unit/satuan kerja dalam melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja berkelanjutan melalui Surat Edaran Sestama Nomor : PR.09.01.2.03.25.10. Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/satuan Kerja di Lingkungan BPOM. NKO Tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu Capaian Perjanjian Kinerja yang dilakukan normalisasi 110% jika capaian kinerja > 110% dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), untuk komponen hasil evaluasi AKIP ini menjadi faktor koreksi dari hasil normalisasi capaian PK. NKO periodik dan tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi SIMETRIS yang terintegrasi antara e-Planning dan e-Performance melalui https://simetris.pom.go.id/eperformance_new/ . Proses penghitungan kinerja menggunakan manual indikator kinerja yang telah disusun dan disepakati serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja.

Mengacu Nota Dinas Sestama Nomor PR.09.01.2.01.26.71 tanggal 26 Januari 2026 hal Permintaan Laporan Kinerja Tahun 2025 bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dalam perhitungan capaian kinerja bulan Juni dan Juli mengacu pada Manual IKU yang ditetapkan pada awal tahun 2025, sementara perhitungan capaian kinerja sejak bulan Agustus mengacu pada Manual IKU

berdasarkan hasil pembahasan pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni 2025. Terhadap indikator yang mengalami perubahan Manual IKU, maka perlu dilakukan perhitungan ulang terhadap realisasi indikator triwulan 1 dan 2 berdasarkan Manual IKU terbaru. Perubahan ini agar dicantumkan pada Laporan Kinerja Interim Triwulan 3 dan tidak perlu dilakukan perubahan pada Laporan Kinerja Interim 1 dan 2.

BPOM di Sanggau pada Tahun 2025 memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 94,38% dengan kriteria “Baik” dengan notifikasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ini digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja pegawai. Rincian Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun dan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	92,97	103,30%	103,30%	10%	92,97%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	98,50	114,53%	110%	10%	99%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0 %	0%	10%	0%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89%	109,89%	10%	98,90%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	95	98,66	103, 84 %	103.84 %	10%	93,46%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100	114.94%	110%	10%	99%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89%	109.89 %	10%	98,90%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	100	107,53%	107.53 %	10%	96,78%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	98,14	109,53%	109,53%	10%	97,07%
		Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92	100	108,70%	108.70 %	10%	97,83%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109,89%	109. 89%	10%	98,90%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100%	100%	10%	90%
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12	13,18	109,83 %	109,83 %	10%	98,85%
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100%	100%	10%	90%
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,13	95,46	108,32%	108,32%	10%	97,49%
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100 %	100%	10%	90%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
		Jumlah desa pangan aman	1	1	100%	100 %	10%	90%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100%	100%	10%	90%
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	11,11	11,11	100%	100%	10%	90%
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	100	104,17%	104,17%%	10%	93,75%
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111,11%	110%	10%	99%,
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51	4,93	109,31%	109,31%	10%	98,38%
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	76	75,63	99,51%	99,51%	10%	89,56%
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100%	100%	10%	90%
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85	2,84	99,65%	99,65%	10%	89,69%
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100%	100%	10%	90%
							Total Capaian PK	2.359,52
							Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)	=(2.359,53/25)=**94,38**
							Predikat NKO	**Baik**

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2025

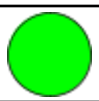
Berdasarkan perhitungan tersebut, Balai POM di Sanggau mendapat Nilai Kinerja Organisasi sebesar 94,38 dengan predikat NKO Baik.

Capaian sasaran kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 diatas merupakan gambaran tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai tingkat pencapaian tersebut, dilakukan pengukuran melalui indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan setiap sasaran kegiatan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, telah ditetapkan 7 Sasaran Kegiatan dengan 26 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Adapun capaian indikator kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	No	IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	92,97	103,30%		**Sangat Baik**
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	98,50	114,53%		**Tidak dapat disimpulkan**
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0 %	-	**Tidak Masuk Perhitungan**
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89%		**Sangat Baik**
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	95	98,65	103,,84 %		**Sangat Baik**
		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100	114.94%		**Tidak dapat disimpulkan**
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89%		**Sangat Baik**
		8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	93	100	107,53%		**Sangat Baik**

No	Sasaran Kegiatan	No	IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
			dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	98,14	107,85%		**Sangat Baik**
		10	Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92	100	108,70%		**Sangat Baik**
		11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109,89%		**Sangat Baik**
		12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100%		**Baik**
		13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12	13,18	109,83 %		**Sangat Baik**
		14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100		**Baik**
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.13	95,46	108,32%		**Sangat Baik**
		16	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100 %		**Baik**
		17	Jumlah desa pangan aman	1	1	100%		**Baik**
		18	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1%	1%	100%		**Baik**
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	19	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	11,11	11,11	100%		**Baik**

No	Sasaran Kegiatan	No	IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	100	104,17%		**Sangat Baik**
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111.11%		**Tidak dapat disimpulkan**
7	Layanan Publik UPT yang prima	22	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51	4.93	109,31%		**Sangat Baik**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	23	Nilai AKIP UPT BPOM	76	75,63	99,51%		**Baik**
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100%		**Baik**
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85	2,84	99,65%		**Baik**
		26	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100%		**Baik**

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator kinerja berupa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, upaya perbaikan (rekomendasi), analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan, dan tindak lanjut rekomendasi sebelumnya oleh Balai POM di Sanggau adalah sebagai berikut:

IKSK.1.1 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan



Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggambarkan kondisi Obat yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Sanggau. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi mencakup Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko. Tindak lanjut pada proses sampling melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai Pedoman Tindak Lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, Pedoman Tindak Lanjut, serta *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Sampel Sediaan Farmasi yang dimaksud adalah Sediaan Farmasi yang disampling oleh Balai POM di Sanggau pada tahun berjalan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium pada lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 Tahun 2025. Kriteria Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk produk dengan nomor izin edar yang sudah habis masa berlaku)
2) Produk kedaluwarsa

3) Produk rusak
4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang menggambarkan efektivitas sistem pengawasan terhadap peredaran Pangan, Obat dan produk farmasi lainnya. Dalam mencapai indikator ini diperlukan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

= (A+B+C+D)/4

Keterangan:

A. Persentase Sampel **Obat** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
= a+b+c+d+e
Dengan komponen formula sebagai berikut:
a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)
b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)
c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)
d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)

B. Persentase Sampel **Obat Bahan Alam** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
= (a+b+c+d+e)/5
Dengan komponen formula sebagai berikut:
a. Pemenuhan target pengawasan = (a1+a2)/2
Keterangan:
a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%
a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%
b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai Pedoman Sampling / jumlah sampel yang diuji) x 100%

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) x 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

Dengan komponen formula sebagai berikut:

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1+a2)/2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai Pedoman Sampling / jumlah sampel yang diuji) x 100%
d. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) x 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

Dengan komponen formula sebagai berikut:

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1+a2)/2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling / Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai pedoman sampling / Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling = (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) x 100%

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) x 100%.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) x 100%.

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.1.1

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	92,97	103,30%		**SANGAT BAIK**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 yaitu sebesar 92,97% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%, sedangkan capaian yang diperoleh sebesar 103,30% atau termasuk dalam kategori **"Sangat Baik"**. Indikator ini merupakan indikator yang baru untuk periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak terdapat *baseline* data pada tahun sebelumnya untuk menjadi *baseline* target awal Renstra di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama Renstra, sehingga pengukuran capaian dari UPT belum dapat tergambarkan. Perhitungan indikator ini tidak lagi memperhitungkan hasil pengawasan penandaan maupun hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), namun lebih menekankan kepada kesesuaian sampling, pengawasan penandaan dan

pengujian dengan pedoman yang berlaku, baik Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium serta pedoman ataupun SOP lainnya yang terkait.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi IKSK.1.1 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	92,97

Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2024 belum memiliki capaian realisasi, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2025 sebesar 92,97%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi pada tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi IKSK.1.1 Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,97	94	98,90%		**AKAN TERCAPAI**

Realisasi kinerja Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah sebesar 92,97% sedangkan target Renstra pada tahun 2029 adalah sebesar 94%, sehingga capaian indikator kegiatan yang diperoleh sebesar 98,90%. Berdasarkan capaian tersebut, realisasi kinerja pada tahun 2025 termasuk dalam kategori **"Akan Tercapai"**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi IKSK.1.1 dengan Unit Kerja Lain dalam Satu Klaster

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,55	100	92,97

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan pada unit kerja lain dalam klaster yang sama, yaitu Balai POM di Tanjungbalai dan Balai POM di Tabalong. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, realisasi Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tertinggi dicapai oleh Balai POM di Tabalong sebesar 100%, diikuti oleh Balai POM di Tanjungbalai sebesar 93,55%, dan Balai POM di Sanggau sebesar 92,97%, dengan selisih yang relatif kecil dibandingkan capaian Balai POM di Tabalong.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian persentase indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 yaitu 103,30% atau masuk dalam

kategori **"Sangat Baik"**. Keberhasilan dapat tercapai karena Balai POM di Sanggau mampu mengendalikan parameter penilaian indikator tersebut. Tercapainya realisasi indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat menunjukkan bahwa kegiatan sampling, penandaan, pengujian dan pelaporan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan terlaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan di awal tahun 2025. Kesesuaian perencanaan sampling ini menunjukkan nilai kesesuaian antara realisasi dengan target sampel, rencana sampling per kategori sampel serta kategori kelas terapi sampel yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan. Ketepatan dalam penyusunan perencanaan akan mendukung ketercapaian pelaksanaan sampling sehingga dapat mendukung tercapainya kegiatan sampling yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dalam pelaksanaan sampling yang dilakukan sesuai dengan pedoman termasuk *timeline* yang ditetapkan. Selain pelaksanaan sampling, pengujian yang dilakukan juga telah sesuai dengan parameter pengujian dalam Pedoman Sampling. Pelaporan hasil sampling dan pengujian termasuk ketepatan pengambilan keputusan dalam pengawasan penandaan serta pelaporan sesuai *timeline* menjadi pencapaian keberhasilan dalam persentase ini.

Pada tahun 2025, Balai POM di Sanggau telah melakukan sampling dan pengawasan penandaan sesuai dengan jumlah terhadap 223 produk Sediaan Farmasi mengikuti target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 ini terdapat perubahan dalam penetapan kesimpulan hasil pengawasan Penandaan label Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan adanya surat edaran dari Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik nomor T-PW.02.03.4.03.25.99 tanggal 27 Maret 2025 tentang Pembatalan Surat Deputi, dimana sebelumnya ketidaksesuaian Minor disimpulkan Memenuhi Ketentuan (MK), maka dengan terbitnya surat tersebut mencabut surat sebelumnya nomor T-PW.03.08.4.07.24.475 tanggal 8 Juli 2024 perihal Perubahan Kategorisasi Temuan Pelanggaran Penandaan dan Iklan Kosmetik, sehingga ketidaksesuaian Minor disimpulkan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Adapun pengawasan penandaan label kemasan ini dilakukan dengan melakukan penilaian pada label kemasan sampel. Pada proses perizinan produk sebelum diedarkan, untuk produk Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan terdapat persetujuan label kemasan oleh Badan POM. Label yang disetujui adalah label yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain harus lengkap memuat informasi seperti nama dan merk produk, komposisi produk, nama dan alamat produsen atau

pendaftar, kode produksi dan tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, serta memuat klaim-klaim yang jujur, obyektif, tidak menyesatkan, dan lain-lain. Label kemasan yang telah disetujui untuk produk Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan dapat diakses oleh petugas pengawas Badan POM di seluruh Indonesia. Label kemasan yang telah disetujui tersebut menjadi acuan penilaian petugas terhadap pengawasan penandaan label kemasan sampel. Selain pengawasan penandaan label kemasan untuk sampel komoditi seperti tersebut di atas, juga dilakukan pengawasan penandaan label kemasan untuk komoditi Kosmetik.

Terdapat perbedaan pada teknis pengawasan label kemasan untuk sampel Kosmetik, karena untuk produk Kosmetik tidak ada persetujuan label kemasan pada saat proses registrasi izin edar (Notifikasi). Penilaian label kemasan Kosmetik dilakukan tanpa membandingkan dengan label kemasan yang disetujui, namun dilakukan penilaian terhadap kelengkapan label sesuai ketentuan, serta penilaian terhadap klaim-klaim yang dicantumkan dalam label kemasan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2020 tentang persyaratan teknis penandaan Kosmetik dan Peraturan BPOM Nomor 3 tahun 2022 tentang persyaratan teknis klaim Kosmetik. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa label kemasan harus memuat klaim-klaim yang jujur, obyektif, dan tidak menyesatkan.

Sampel yang telah disampling kemudian dilakukan pengujian sesuai dengan parameter uji yang dipersyaratkan pada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2025 dan hasil uji seluruh sampel telah dilaporkan kepada direktorat terkait melalui SIPT. Untuk pemenuhan terhadap waktu pengujian dan pelaporan dari sampel Sediaan Farmasi harus memenuhi kriteria ketepatan waktu sampling, pengujian dan pelaporan untuk masing-masing komoditi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling dan Pengujian. Adapun waktu pengujian yang ditetapkan untuk komoditi kedeputian 2 di Pedoman Sampling untuk tahun 2025 ini mengalami percepatan yang signifikan menjadi 15 hari kerja, dibandingkan periode sebelumnya yaitu 30 hari kerja.

Dari 223 sampel yang telah disampling, seluruh sampel telah selesai dilakukan pengujian sesuai dengan parameter uji yang dipersyaratkan pada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2025, kemudian hasil uji seluruh sampel telah dilaporkan kepada direktorat terkait melalui SIPT. Hasil pengujian yang telah dilaporkan melalui SIPT

terdapat hasil yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian 4 (empat) sampel Obat Bahan Alam dan 1 (satu) sampel Suplemen Kesehatan.

Dari segi kesesuaian jumlah laporan tindak lanjut untuk Sediaan Farmasi, Balai POM di Sanggau menerima 110 surat dari masing-masing direktorat pengawasan terkait, antara lain 2 (dua) surat dari KMEI ONAPPZA, 35 Surat dari Direktorat Pengawasan OBASK terkait Obat Bahan Alam, 15 surat dari Direktorat Pengawasan OBASK terkait Suplemen Kesehatan, dan 56 Surat dari Direktorat pengawasan Kosmetik. Terhadap 110 surat yang dikirimkan dari direktorat tersebut, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh fungsi pemeriksaan Balai POM di Sanggau dan telah dilaporkan kembali kepada direktorat terkait.

Dari penjelasan diatas, dapat terlihat bahwa pada tahun 2025, Balai POM di Sanggau telah mengoptimalkan efektivitas kinerja terhadap produk Sediaan Farmasi baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan dengan memaksimalkan proses monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan.

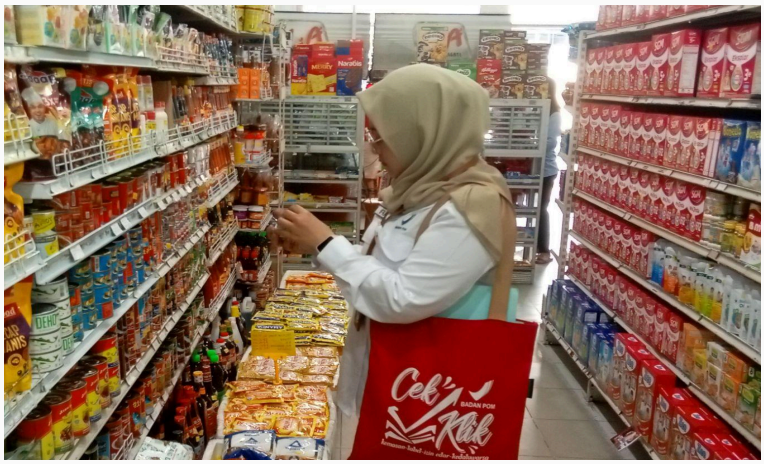
6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan utama yang mendukung indikator ini adalah konsistensi/komitmen dalam melakukan monitoring dan evaluasi sehingga kegiatan sampling, pengujian hingga pelaporan sesuai dengan SLA yang ditetapkan. Adapun beberapa langkah kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka menunjang pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi Definisi Operasional dan cara perhitungan realisasi indikator kinerja pada anggota tim sampling yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025.
2. Pelaksanaan rapat koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2025.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan sampling yang telah disesuaikan dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta target sampling pada tahun 2025.
4. Pelaksanaan finalisasi rencana pelaksanaan sampling tahun 2025 dengan Regionalisasi Laboratorium Regional Samarinda secara daring melalui zoom meeting.

5. Melakukan koordinasi dengan laboratorium penguji yaitu Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak tentang rencana pelaksanaan sampling tahun 2025.
6. Pelaksanaan sampling telah sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2025, serta tersedianya sampel Sediaan Farmasi sesuai dengan kriteria Pedoman Sampling tahun 2025.
7. Melakukan notifikasi kepada laboratorium penguji saat melakukan pengiriman sampel setiap bulannya.
8. Melakukan monitoring kemampuan uji laboratorium untuk memastikan sampel dapat diuji pada laboratorium penguji.
9. Monitoring terhadap *timeline* waktu sampling, waktu pengujian dan waktu pelaporan serta kesesuaian pengujian dengan parameter uji kritis setiap bulannya dengan membuat kertas kerja.
10. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dilakukan secara berkala dan dilaporkan hasil tindak lanjut kepada direktorat terkait.
11. Koordinasi terkait hasil uji untuk sampel yang diuji pada Laboratorium Regional baik melalui whatsapp group maupun melalui SIPT.
12. Pemenuhan *timeline* waktu sampling, waktu pengujian dan waktu pelaporan dilakukan secara berkala, untuk mengukur dan memantau capaian sesuai dengan target yang ditetapkan.
13. *Brainstorming* serta peningkatan kompetensi petugas juga menjadi salah satu program penunjang dalam keberhasilan.
14. Monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan rencana pelaksanaan dan realisasi sampling serta kategori sampel.
15. Monitoring dan evaluasi terhadap SLA sampling, pengujian, dan pelaporan.
16. Monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian pengambilan kesimpulan penandaan dan pengujian.

IKSK.1.2 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan



Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana hasil pengawasan dan pengujian terhadap sampel Pangan Olahan yang teridentifikasi berisiko telah ditindaklanjuti secara tepat, konsisten, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kerja Balai POM di Sanggau. Definisi dari Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga yang disampling berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

Tindak lanjut sesuai ketentuan yang dimaksud adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling yang meliputi kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, dan ketepatan pelaporan sampling dan pengujian. Tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian.
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi.
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS.
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS.

5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.

Sampel Pangan Olahan yang dimaksud adalah sampel Pangan Olahan yang disampling oleh Balai POM di Sanggau pada tahun berjalan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium. Kriteria Pangan Olahan yang Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk produk dengan nomor izin edar yang sudah habis masa berlaku)
2) Produk kedaluwarsa
3) Produk rusak
4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Pangan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS. Komponen yang berpengaruh dalam perhitungan capaian indikator adalah kesesuaian dengan Pedoman Sampling, yang meliputi kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan pelaporan sampling dan pengujian serta tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ketentuan lainnya. Dalam mencapai indikator ini diperlukan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A : Kesesuaian Target Sampel = (A1+A2)/2

Dengan komponen perhitungan sebagai berikut:

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling / Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

B: Kesesuaian Parameter Uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai Pedoman Sampling / Jumlah sampel yang diuji) x 100%

C: Ketepatan Pengambilan Kesimpulan = (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai Pedoman Sampling / Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D: Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel = (Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak / Jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E: Ketepatan Waktu = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai Pedoman Sampling / Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

F: Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ketentuan lainnya = ((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti / Total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.1.2

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	98,50	114,53%		**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 98,50%, yaitu telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 86%, sehingga capaian indikator kegiatan yang diperoleh adalah sebesar 114,53% atau masuk dalam kategori **"Tidak Dapat Disimpulkan"**. Pada Renstra 2025-2029, batasan maksimal capaian sangat baik adalah 110%, apabila realisasi lebih dari 110% maka capaian indikator menjadi Tidak Dapat Disimpulkan. Bila dibandingkan dengan periode renstra sebelumnya dimana batasan maksimal capaian indikator sangat baik adalah 120%. Selain itu, adapun indikator ini

merupakan indikator yang baru untuk periode renstra 2025-2029 sehingga tidak terdapat *baseline* data pada tahun sebelumnya untuk menjadi *baseline* target awal renstra di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama renstra, sehingga pengukuran capaian dari UPT belum dapat tergambarkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi IKSK.1.2 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	98,50

Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2024 belum memiliki capaian realisasi, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 98,50%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi pada tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi IKSK.1.2 Tahun 2025 dengan Target Renstra 2029

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,50	90	109,44%		**TERCAPAI/ MELAMPAUI**

Realisasi kinerja Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah sebesar 98,50% sedangkan target Renstra pada tahun 2029 adalah sebesar 90% sehingga capaian indikator kegiatan yang didapat sebesar 109,44%. Berdasarkan capaian tersebut, realisasi kinerja pada tahun 2025 termasuk dalam kategori **"Tercapai/Melampaui"**, yaitu kondisi dimana realisasi kinerja telah memenuhi dan berada diatas target akhir periode Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi IKSK.1.2 dengan Unit Kerja Lain dalam Satu Klaster

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,36	83,08	98,50

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan pada unit kerja lain dalam klaster yang sama, yaitu Balai POM di Tanjungbalai dan Balai POM di Tabalong. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, realisasi Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tertinggi dicapai oleh Balai POM di Sanggau sebesar 98,50%, diikuti oleh Balai POM di Tanjungbalai sebesar 87,36%, dan Balai POM di Tabalong sebesar 83,08%.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian persentase indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 yaitu 114,53% atau masuk dalam kategori **"Tidak Dapat Disimpulkan"**. Keberhasilan dapat tercapai karena Balai POM di Sanggau mampu mengendalikan parameter penilaian indikator tersebut. Tercapainya realisasi indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat menunjukkan bahwa kegiatan sampling hingga pelaporan dan tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman-pedoman yang berlaku dan terlaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan di awal tahun 2025. Kesesuaian perencanaan sampling ini menunjukkan nilai kesesuaian antara realisasi dengan target sampel, rencana sampling per kategori sampel yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan. Ketepatan dalam penyusunan perencanaan akan mendukung ketercapaian pelaksanaan sampling sehingga dapat mendukung tercapainya kegiatan sampling yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dalam pelaksanaan sampling yang dilakukan sesuai dengan pedoman termasuk *timeline* yang ditetapkan. Selain pelaksanaan sampling, pengujian yang dilakukan juga telah sesuai dengan parameter pengujian dalam Pedoman Sampling. Pelaporan hasil sampling dan pengujian termasuk ketepatan pengambilan keputusan dalam pengawasan penandaan serta pelaporan sesuai *timeline* menjadi pencapaian keberhasilan dalam persentase ini.

Pada tahun 2025, Balai POM di Sanggau telah menyelesaikan sampling terhadap produk Pangan Olahan beresiko sebanyak 127 sampel. Dari semua sampel yang diuji tersebut, sebanyak 7 (tujuh) sampel Pangan Olahan yang parameter uji nya belum sesuai dengan Pedoman Sampling, hal ini telah dilakukan koordinasi dengan Balai Besar POM di Pontianak sebagai Balai Penguji. Terdapat 5 (lima) sampel Pangan yang pelaporannya melebihi *deadline*. Berdasarkan hasil pemeriksaan penandaan label dan pengujian terhadap sampel yang diambil pada tahun 2025, sebanyak 7 (tujuh) sampel yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan telah ditindaklanjuti. Terhadap 7 (tujuh) sampel yang dinyatakan TMS tersebut, ditemukan ketidaksesuaian pada kandungan cemaran Hg, cemaran Cd, kadar sakarin, total koliform dan Angka Lempeng Total (ALT). Adanya hasil pengujian sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2025 Balai POM di sanggau telah mengoptimalkan efektivitas kinerja pengawasan terhadap produk Pangan Olahan beresiko baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan dengan memaksimalkan proses monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan. Meskipun diperlukan adanya pergantian rencana pelaksanaan sampling dan pengujian diakibatkan oleh adanya efisiensi dan relaksasi yang terjadi pada Triwulan I dan Triwulan II, Balai POM di Sanggau dapat beradaptasi dengan cepat dalam menanggapi dan melakukan penyesuaian pada pelaksanaan sampling dan pengujian. Hal ini memberikan dampak yang signifikan dalam mengoptimalkan pencapaian target indikator Persentase sampel Pangan Olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan utama yang mendukung indikator ini adalah konsistensi/komitmen dalam melakukan monitoring dan evaluasi sehingga kegiatan sampling, pengujian hingga pelaporan sesuai dengan SLA yang ditetapkan. Adapun beberapa langkah kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka menunjang pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi Definisi Operasional dan cara perhitungan realisasi indikator kinerja pada anggota tim sampling yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025.

2. Pelaksanaan rapat koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2025.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan sampling yang telah disesuaikan dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta target sampling pada tahun 2025.
4. Pelaksanaan finalisasi rencana pelaksanaan sampling tahun 2025 dengan Regionalisasi Laboratorium Regional Samarinda secara daring melalui zoom meeting.
5. Melakukan koordinasi dengan laboratorium penguji yaitu Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak tentang rencana pelaksanaan sampling tahun 2025.
6. Pelaksanaan sampling telah sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025, serta tersedianya sampel Pangan Olahan sesuai dengan kriteria Pedoman Sampling tahun 2025.
7. Melakukan notifikasi kepada laboratorium penguji saat melakukan pengiriman sampel setiap bulannya.
8. Melakukan monitoring kemampuan uji laboratorium untuk memastikan sampel dapat diuji pada laboratorium penguji.
9. Monitoring terhadap *timeline* waktu sampling, waktu pengujian dan waktu pelaporan serta kesesuaian pengujian dengan parameter uji kritis setiap bulannya dengan membuat kertas kerja.
10. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dilakukan secara berkala dan dilaporkan hasil tindak lanjut kepada direktorat terkait.
11. Koordinasi terkait hasil uji untuk sampel yang diuji pada Laboratorium Regional baik melalui whatsapp group maupun melalui SIPT.
12. Pemenuhan *timeline* waktu sampling, waktu pengujian dan waktu pelaporan dilakukan secara berkala, untuk mengukur dan memantau capaian sesuai dengan target yang ditetapkan.
13. *Brainstorming* serta peningkatan kompetensi petugas juga menjadi salah satu program penunjang dalam keberhasilan.
14. Monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan rencana pelaksanaan dan realisasi sampling serta kategori sampel.
15. Monitoring dan evaluasi terhadap SLA sampling, pengujian, dan pelaporan.
16. Monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian pengambilan kesimpulan penandaan dan pengujian.

IKSK 1.3 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT



Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan Pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi Pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, Pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa Pangan Olahan dalam kemasan atau Pangan Olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan Pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait Pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar yang dimaksud yaitu berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian 118 Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Dalam mencapai indikator ini diperlukan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

$$\frac{\Sigma\ (30\% \times A_1, A_2, \ldots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \ldots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \ldots, C_n)}{n}$$

Dengan komponen perhitungan sebagai berikut:

A = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi / Total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling / Total parameter uji dalam Pedoman Sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi / Total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = Total sampel

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan Pangan dari Dinas Kesehatan.
b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan Pangan bersumber dari Pangan Olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel Pangan dugaan KLB keracunan Pangan yang disampling oleh UPT atau sampel Pangan dugaan KLB keracunan Pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
e. Sampel Pangan dugaan KLB keracunan Pangan yang di sampling di wilayah Balai akan menjadi kinerja Balai meskipun Balai tersebut tidak melakukan pengujian.
f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Balai yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
    - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
    - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
    - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.

h. Terkait penginputan SIPT di Balai POM:
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Balai Penyampling.
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
   - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
   - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.1.3

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0		**TIDAK MASUK HITUNGAN**

Target Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah 100% dan realisasi indikator kegiatan sebesar 0% sehingga capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 0% atau masuk dalam kategori **"Tidak Masuk Hitungan"**. Capaian indikator kegiatan tersebut tidak dapat diukur dikarenakan tidak adanya sampel KLB keracunan Pangan yang disampling oleh petugas Balai POM di Sanggau selama periode tahun 2025. Kondisi ini disebabkan oleh kendala aksesibilitas geografis yang menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan respons lapangan. Kasus KLB keracunan Pangan yang terjadi di wilayah kerja Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 berlokasi di daerah yang cukup jauh dan sulit dijangkau, sehingga petugas Balai POM di Sanggau tidak dapat melakukan pengambilan sampel secara langsung di lokasi kejadian, sehingga pengambilan sampel KLB keracunan Pangan dilakukan oleh petugas Puskesmas setempat yang lebih dekat dengan lokasi kejadian dan dapat merespons lebih cepat. Sampel yang diambil oleh petugas Puskesmas tersebut tidak termasuk dalam kategori sampel yang disampling oleh Balai POM di Sanggau, sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai realisasi pada indikator kegiatan ini. Meskipun demikian, Balai POM di Sanggau tetap melakukan upaya dengan melakukan koordinasi dengan petugas pengambil sampel dan Dinas Kesehatan tempat KLP KP terjadi untuk memastikan sampel yang diambil telah ditangani dengan baik dan telusur epidemiologi KLB KP dilaksanakan secara lengkap. Sehingga dugaan agen penyebab dapat disimpulkan dan

sampel dapat dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak. Selain itu Balai POM di Sanggau tetap melakukan monitoring sampai dengan hasil uji dugaan agen penyebab KLB KP dikeluarkan dan melaporkan kejadian KLB KP melalui aplikasi Spimker.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.1.3

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	-	0

Indikator Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Indikator Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada tahun 2024 belum memiliki capaian realisasi, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2025 sebesar 0%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi pada tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 IKSK.1.3

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	-	100	-	-	-

Realisasi kinerja Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah sebesar 0%, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.1.3

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	0	0	0

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan pada unit kerja lain dalam klaster yang sama, yaitu Balai POM di Tanjungbalai dan Balai POM di Tabalong. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, realisasi Indikator Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT antara lain Balai POM di Tanjungbalai sebesar 0%, Balai POM di Tabalong sebesar 0%, dan Balai POM di Sanggau sebesar 0%.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai POM di Sanggau telah membentuk Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang disahkan sesuai Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sanggau Nomor HK.02.02.19C.02.25.48 tahun 2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB KP). Upaya ini dilakukan untuk merespon dan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk menentukan penyebab KLB keracunan Pangan serta tindak lanjutnya, sesuai dengan pendekatan analisis risiko. Upaya lainnya telah dilakukan oleh Balai POM di Sanggau yaitu ikut serta dalam Tim Gerak Cepat Kejadian Luar Biasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Nomor 2 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Gerak Cepat Kejadian Luar Biasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau tahun 2025 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2025.

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT di Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 belum memenuhi target awal yang telah ditetapkan, yaitu 100 %. Hal ini disebabkan karena lokasi kejadian kasus KLB keracunan Pangan tersebut jauh dari Balai POM di sanggau, sehingga sesuai kesepakatan dalam Tim Gerak Cepat (TGC) untuk pengambilan sampel dilakukan oleh petugas Puskesmas setempat yang lebih dekat dengan lokasi kejadian dan dapat merespon lebih cepat. Sampel yang diambil oleh petugas Puskesmas selanjutnya dikomunikasikan kepada petugas Balai POM di Sanggau untuk kemudian diteruskan ke Balai Besar POM di Pontianak selaku laboratorium penguji. Sesuai dengan Definisi Operasional, sampel yang diambil oleh

petugas Puskesmas tersebut tidak termasuk dalam kategori sampel yang disampling oleh Balai POM di Sanggau, sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai realisasi pada indikator ini. Dengan kondisi demikian, realisasi indikator Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar pada tahun 2025 tercatat sebesar 0% atau tidak terdapat realisasi sama sekali, sehingga capaian kinerja pada indikator ini tidak dapat ditetapkan dan dievaluasi secara kuantitatif. Sesuai dengan hasil pertemuan sosialisasi indikator di BPOM terkait KLB keracunan Pangan pada tanggal 26 Juni 2025 melalui media luring di Jakarta dan daring di *zoom meeting* yang disampaikan oleh Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM, apabila tidak terdapat sampel KLB KP yang disampling oleh UPT selama tahun 2025 dan capaian 0% maka indikator ini dikecualikan dari pengukuran NPSS/NKO UPT.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meskipun realisasi dari Indikator Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT di Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 belum memenuhi target awal yang telah ditetapkan atau tidak dapat diperhitungkan, Balai POM di Sanggau tetap melakukan upaya dalam rangka menunjang pencapaian kegiatan tersebut pada tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC).
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
3. Melakukan koordinasi dengan Balai Besar POM di Pontianak selaku laboratorium penguji.
4. Melakukan pemantauan berita KLB KP di wilayah kerja secara berkala.
5. Melakukan koordinasi dengan petugas pengambil sampel dalam hal penetapan agen penyebab KLB KP.
6. Memberikan informasi terkait cara penanganan sampel KLB KP.
7. Melaporkan kejadian KLB KP di wilayah kerja Balai POM di Sanggau melalui aplikasi SPIMKER.
8. Melakukan koordinasi dengan SPPG MBG.
9. Melakukan peningkatan pelayanan publik UPT Balai POM di Sanggau melalui ULPK.

IKSK 1.4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan



Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah Pangan Olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* berbasis analisis risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling yang meliputi kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan. Tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat yaitu TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian, sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan/atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah. Dalam mencapai indikator ini diperlukan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A : Kesesuaian target sampel PIRT = (A1+A2)/2

Dengan komponen perhitungan sebagai berikut:

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling / Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

B : Kesesuaian Parameter Uji = (Jumlah sampel sesuai / Total Sampel PIRT) x 100%

C : Ketepatan Pengambilan Kesimpulan = (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai Pedoman Sampling / Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D : Ketepatan waktu pengambilan sampel = (Jumlah sampel diambil di TW 1 / Total Sampel PIRT) x 100%

E : Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah sampel tepat waktu / Total Sampel PIRT) x 100%

F : Tindak lanjut Sampel PIRT = (Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti / Total jumlah sampel yang TMS) x 100%

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.1.4

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91**	**100**	**109,89**		**SANGAT BAIK**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 100%, yaitu telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 91%, sehingga capaian indikator kegiatan yang diperoleh adalah sebesar 109,89% atau masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**. Selain itu, adapun indikator ini merupakan indikator yang baru untuk periode renstra 2025-2029 sehingga tidak terdapat baseline data pada tahun sebelumnya untuk menjadi baseline target awal renstra di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama renstra, sehingga pengukuran capaian dari UPT belum dapat tergambarkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.1.4

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	**100**

Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya

belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2024 belum memiliki capaian realisasi, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2025 sebesar 100%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi pada tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan RENSTRA IKSK.1.4

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	95	105,26%		**TERCAPAI/ MELAMPAUI**

Realisasi kinerja Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah sebesar 100% sedangkan target Renstra pada tahun 2029 adalah sebesar 95% sehingga capaian indikator kegiatan yang didapat sebesar 105,26%. Berdasarkan capaian tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 termasuk dalam kategori **"Tercapai/Melampaui"**, yaitu kondisi dimana realisasi kinerja telah memenuhi dan berada diatas target akhir periode Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan unit kerja lain dalam satu klatser IKSK.1.4

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	85	100

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan pada unit kerja lain dalam klaster yang sama, yaitu Balai POM di Tanjungbalai dan Balai POM di Tabalong.

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, realisasi Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tertinggi dicapai oleh Balai POM di Sanggau dan Balai POM di Tanjungbalai yaitu sebesar 100%, diikuti oleh Balai POM di Tabalong sebesar 85%.

5) **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian persentase indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 yaitu 109,89% atau masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**. Keberhasilan dapat tercapai karena Balai POM di Sanggau mampu mengendalikan parameter penilaian indikator tersebut. Tercapainya realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat menunjukkan bahwa kegiatan sampling, penandaan, pengujian dan pelaporan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman-pedoman yang berlaku dan terlaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan di awal tahun 2025. Kesesuaian perencanaan sampling ini menunjukkan nilai kesesuaian antara realisasi dengan target sampel, rencana sampling per kategori sampel yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan. Ketepatan dalam penyusunan perencanaan akan mendukung ketercapaian pelaksanaan sampling sehingga dapat mendukung tercapainya kegiatan sampling yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dalam pelaksanaan sampling yang dilakukan sesuai dengan pedoman termasuk *timeline* yang ditetapkan. Selain pelaksanaan sampling, pengujian yang dilakukan juga telah sesuai dengan parameter pengujian dalam Pedoman Sampling. Pelaporan hasil sampling dan pengujian termasuk ketepatan pengambilan keputusan dalam pengawasan penandaan serta pelaporan sesuai *timeline* menjadi pencapaian keberhasilan dalam persentase ini.

Balai POM di Sanggau juga konsisten dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan realisasi, juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian rencana pelaksanaan sampling dan pengujian setiap bulan. Selain itu, kesesuaian pemilihan parameter uji sampel PIRT, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pelaporan, hingga tindak lanjut yang dibuat terhadap pangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pada tahun 2025, Balai POM di Sanggau melakukan sampling terhadap 11 (sebelas) produk PIRT yang telah selesai di sampling pada bulan April 2025. Adapun hasil pemantauan terhadap pemenuhan parameter uji dari 11 (sebelas) sampel

tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 1 (satu) sampel Tidak Memenuhi Syarat parameter uji Angka Kapang Khamir (TMS AKK). Hasil uji ini telah disampaikan melalui sistem pelaporan terpusat (SIPT).

Kegiatan pengambilan sampel sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun sebelumnya, baik dalam segi jumlah maupun jenis pangan yang akan disampling. Pemilihan parameter juga ditentukan berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian untuk pangan PIRT. Ketepatan pengambilan keputusan hasil sampling dan pengujian serta ketepatan waktu pelaporan juga telah diperhatikan sesuai dengan ketentuan, serta melakukan pembuatan tindak lanjut berupa rekomendasi pembinaan kepada UPT yang mengampu Dinas Kesehatan wilayah tempat izin PIRT sampel tersebut dikeluarkan terhadap pangan PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

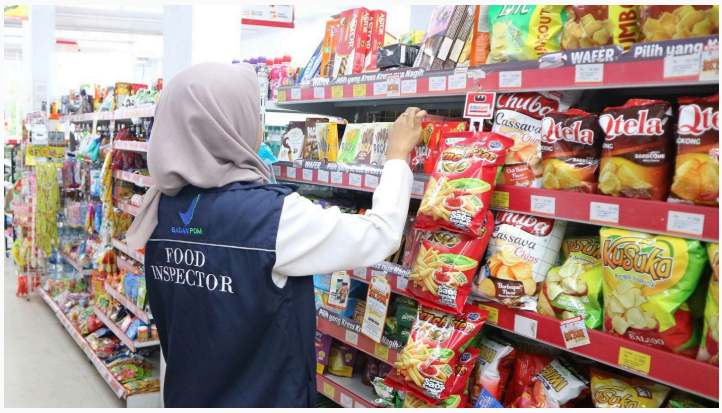
6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan utama yang mendukung indikator ini adalah konsistensi/komitmen dalam melakukan monitoring dan evaluasi sehingga kegiatan sampling, pengujian hingga pelaporan sesuai dengan SLA yang ditetapkan. Adapun beberapa langkah kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka menunjang pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi Definisi Operasional dan cara perhitungan realisasi indikator kinerja pada anggota tim sampling.
2. Pelaksanaan rapat koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2025.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan sampling yang telah disesuaikan dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta target sampling pada tahun 2025.
4. Pelaksanaan finalisasi rencana pelaksanaan sampling tahun 2025 dengan Regionalisasi Laboratorium Regional Samarinda secara daring melalui zoom meeting.
5. Melakukan koordinasi dengan laboratorium penguji yaitu Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak tentang rencana pelaksanaan sampling tahun 2025.
6. Pelaksanaan sampling telah sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2025, serta tersedianya sampel PIRT sesuai dengan kriteria Pedoman Sampling tahun 2025.

7. Melakukan notifikasi kepada laboratorium penguji saat melakukan pengiriman sampel setiap bulannya.
8. Melakukan monitoring kemampuan uji laboratorium untuk memastikan sampel dapat diuji pada laboratorium penguji.
9. Monitoring terhadap *timeline* waktu sampling, waktu pengujian dan waktu pelaporan serta kesesuaian pengujian dengan parameter uji kritis setiap bulannya dengan membuat kertas kerja.
10. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dilakukan secara berkala dan dilaporkan hasil tindak lanjut kepada direktorat terkait.
11. Koordinasi terkait hasil uji untuk sampel yang diuji pada Laboratorium Regional baik melalui whatsapp group maupun melalui SIPT.
12. Pemenuhan *timeline* waktu sampling, waktu pengujian dan waktu pelaporan dilakukan secara berkala, untuk mengukur dan memantau capaian sesuai dengan target yang ditetapkan.
13. *Brainstorming* serta peningkatan kompetensi petugas juga menjadi salah satu program penunjang dalam keberhasilan.
14. Monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan rencana pelaksanaan dan realisasi sampling serta kategori sampel.
15. Monitoring dan evaluasi terhadap SLA sampling, pengujian, dan pelaporan.
16. Monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian pengambilan kesimpulan penandaan dan pengujian.

IKSK 1.5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*



Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi serta sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Persentase keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* merupakan indikator kinerja yang mencerminkan efektivitas koordinasi dan kepatuhan para pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana keputusan, rekomendasi, atau tindakan korektif yang dikeluarkan berdasarkan hasil pengawasan telah direspons dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi Obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana yaitu sarana produksi, sarana distribusi dan saryanfar (sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus serta pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon yang diberikan oleh *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada Pedoman Pengawasan dan Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan. Dalam mencapai indikator ini diperlukan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

= (A+B)/2

Keterangan:

A : (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepala pelaku usaha) x 100%

B : (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepala lintas sektor) x 100%

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.1.5

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	**95**	**98,65**	**103,84**		**SANGAT BAIK**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* adalah sebesar 98,65%, yaitu melampaui target yang ditetapkan sebesar 95%, sehingga capaian indikator kegiatan yang diperoleh adalah sebesar 103,84% atau masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.1.5

Indikator Kegiatan	Realisasi

	2024	2025
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	-	98,65

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* pada tahun 2024 belum memiliki capaian realisasi, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2025 sebesar 98,65%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi pada tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan RENSTRA IKSK.1.5

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98,65	97	101,70%	▲	**TERCAPAI/ MELAMPAUI**

Realisasi kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* pada tahun 2025 adalah 98,65% sedangkan target Renstra tahun 2029 adalah sebesar 97% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 101,70%. Berdasarkan capaian tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 termasuk dalam kategori **"Tercapai/Melampaui"**, yaitu kondisi dimana realisasi kinerja telah memenuhi dan berada diatas target akhir periode Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi kinerja dengan unit kerja lain dalam satu klaster Tahun 2025 IKSK.1.5

Indikator Kegiatan	Balai POM di	Balai POM di	Balai POM di

	Tanjungbalai	Tabalong	Sanggau
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75,08	75	98,65

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan pada unit kerja lain dalam klaster yang sama, yaitu Balai POM di Tanjungbalai dan Balai POM di Tabalong. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* tertinggi dicapai oleh Balai POM di Sanggau sebesar 98,65%, diikuti oleh Balai POM di Tanjungbalai sebesar 75,08%, dan Balai POM di Tabalong sebesar 75%, dengan selisih yang relatif kecil dibandingkan capaian Balai POM di Tanjungbalai.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian persentase indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* tahun 2025 yaitu 103,84% atau masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**. Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* memiliki keterkaitan yang erat dengan beberapa indikator kinerja lainnya. Hal ini disebabkan karena rekomendasi yang diterbitkan merupakan salah satu keluaran (*output*) dari rangkaian kegiatan pengawasan, yang meliputi pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana distribusi, serta pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Ketiga kegiatan tersebut masing-masing memiliki indikator kinerja tersendiri, namun hasilnya berkontribusi terhadap penerbitan keputusan atau rekomendasi pengawasan.

Pada tahun 2025, indikator kinerja tersebut mengalami perubahan, baik dalam hal Definisi Operasional maupun metode perhitungan yang digunakan untuk mencapai target kinerja. Perubahan pada Definisi Operasional dan metode perhitungan indikator yang berkaitan dengan pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana distribusi, serta pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan berpotensi mempengaruhi peningkatan jumlah rekomendasi yang diterbitkan sebagai hasil dari kegiatan pengawasan.

Hal ini terjadi karena ketepatan dalam penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan, kesesuaian dalam penetapan sanksi, serta ketepatan penerbitan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi bagian penting dari komponen penilaian dalam pencapaian target indikator kinerja pada kegiatan pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana distribusi, dan pengawasan iklan Sediaan Farmasi serta Pangan Olahan. Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan dan disampaikan kepada pemangku kepentingan, maka semakin besar pula tantangan yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja terkait tindak lanjut rekomendasi tersebut.

Kriteria Sangat Baik didapatkan dari usaha intervensi yang strategis secara terus menerus terhadap penyelesaian tindak lanjut oleh *stakeholder* dan evaluasi secara berkala yang dilakukan selama tahun 2025. Pada tahun 2025 telah dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha secara langsung setiap dilakukan pemeriksaan agar pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Sanggau. Selain tindak lanjut oleh pelaku usaha juga terdapat rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor. Koordinasi yang baik dengan *stakeholder* seperti Dinas Kesehatan Kab/Kota menjadi pendukung keberhasilan pencapaian ini. Hasil pengawasan IRTP yang dilakukan oleh Balai POM di Sanggau ditindaklanjuti oleh lintas sektor yaitu Dinas kesehatan Kab/Kota. Selama tahun 2025 Balai POM di Sanggau sebanyak 72 keputusan/rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari total 74 keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan. Selain itu 2 (dua) rekomendasi yang dikeluarkan kepada lintas sektor telah seluruhnya ditindaklanjuti oleh lintas sektor terkait. Adapun kendala dalam pencapaian kinerja adalah terdapat pelaku usaha yang tidak menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sesuai *timeline* yang ditetapkan, untuk mengatasi hal ini diperlukan monitoring yang ketat dan melakukan *reminder* kepada pelaku usaha untuk segera mengirimkan rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun beberapa langkah kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka menunjang pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi.
2. Melakukan kegiatan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan.
3. Melakukan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi.

4. Melakukan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan.
5. Melakukan kegiatan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Melakukan monitoring terhadap keputusan/rekomendasi yang disampaikan ke pemangku kepentingan dengan memastikan keputusan/rekomendasi tersampaikan ke pemangku kepentingan tepat waktu.
7. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan yang dilakukan.
8. Melakukan *reminder* dengan mengirimkan email ke pelaku usaha agar mengirimkan surat tindak lanjut sesuai dengan waktu yang ditetapkan di surat tindak lanjut hasil pengawasan.
9. Melaksanakan kegiatan Desk CAPA kepada Pelaku usaha yang belum menindaklanjuti Rekomendasi hasil pengawasan sarana, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025 bersamaan dengan kegiatan *launching* Program Ayo Buang Sampah Obat dan Sosialisasi Pengendalian Resistensi Antimikroba di Kabupaten Sekadau.

IKSK 1.6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan



Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas produksi di bidang kefarmasian. Indikator ini menunjukkan proporsi sarana produksi yang telah dilakukan pemeriksaan (inspeksi) serta memperoleh tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Terdapat beberapa Definisi Operasional dalam perhitungan presentase ini yaitu:

a) Sarana produksi (Sarprod) Sediaan Farmasi yaitu meliputi:
   1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
   2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak Bahan Alam, produk Obat Bahan Alam dan/atau Suplemen Kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri Obat Bahan Alam, Industri ekstrak Bahan Alam, Usaha kecil Obat Bahan Alam, Usaha mikro Obat Bahan Alam dan industri Suplemen Kesehatan.
   3) Fasilitas produksi Kosmetik, yaitu industri Kosmetik golongan A dan industri Kosmetik golongan B.
b) Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
c) Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada:
   Regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, Pedoman Tindak Lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Dalam mencapai indikator ini diperlukan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Dengan komponen formula sebagai berikut:
% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
   = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan / Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) x 100%
B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun / Jumlah target tahunan) x 100%
C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
   = rata-rata persentase sub aspek 1-6
   1) Ketepatan penetapan tindak lanjut

2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
3) Kesesuaian format laporan inspeksi
4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod Obat Bahan Alam = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) x 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x 100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / Jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu / Jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

% Sarprod Suplemen Kesehatan = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) x 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x 100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / Jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu / Jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / Jumlah target sesuai renlak) x 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x 100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / Jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu / Jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.1.6

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**87**	**100**	**114,94**		**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 100%, yaitu telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 87%, sehingga capaian indikator kegiatan yang diperoleh adalah sebesar 114,94% atau masuk dalam kategori **"Tidak Dapat Disimpulkan"**. Pada Renstra 2025-2029, batasan maksimal capaian sangat baik adalah 110%, apabila realisasi lebih dari 110% maka capaian indikator menjadi Tidak Dapat Disimpulkan. Bila dibandingkan dengan periode renstra sebelumnya dimana batasan maksimal capaian indikator sangat baik adalah 120%. Selain itu, adapun indikator ini merupakan indikator yang baru untuk periode renstra 2025-2029 sehingga tidak terdapat

baseline data pada tahun sebelumnya untuk menjadi *baseline* target awal renstra di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama renstra, sehingga pengukuran capaian dari UPT belum dapat tergambarkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.1.6

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	98,65

Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2024 belum memiliki capaian realisasi, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 98,65%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi pada tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan Target RENSTRA 2029 IKSK.1.6

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	91	109,89%		**TERCAPAI/ MELAMPAUI**

Realisasi kinerja Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah 100% sedangkan target Renstra tahun 2029 adalah sebesar 91% sehingga didapat capaian indikator kegiatan sebesar 109,89%. Berdasarkan capaian tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 termasuk dalam kategori **"Tercapai/Melampaui"**, yaitu kondisi dimana realisasi kinerja telah memenuhi dan berada diatas target akhir periode Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi kinerja dengan unit kerja lain dalam satu klaster Tahun 2025 IKSK.1.6

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan pada unit kerja lain dalam klaster yang sama, yaitu Balai POM di Tanjungbalai dan Balai POM di Tabalong. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, realisasi Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh realisasi yang sama pada ketiga unit kerja yaitu sebesar 100%.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah sebesar 114,94% atau masuk dalam kategori **"Tidak Dapat Disimpulkan"**. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari proses perencanaan kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berbasis pada pemetaan sarana produksi yang berada dalam lingkup kewenangan pengawasan. Pemetaan sarana tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sarana yang menjadi objek pengawasan dapat teridentifikasi secara komprehensif dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja pemeriksaan tahunan. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, efektif, serta selaras dengan prioritas pengawasan yang telah ditetapkan. Selain itu, penjadwalan kegiatan pemeriksaan telah direncanakan sejak awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara bertahap, terkoordinasi, dan terkendali, serta memungkinkan seluruh rangkaian kegiatan pengawasan dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu pada Tahun 2025.

Selain faktor perencanaan yang matang, proses pengukuran capaian indikator kinerja juga dilaksanakan secara mandiri oleh unit pengampu indikator dengan memperhatikan

parameter penilaian yang telah ditetapkan. Parameter tersebut meliputi kesesuaian antara realisasi pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja yang telah disusun, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan, ketepatan dalam penarikan kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan, serta kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan. Pemenuhan seluruh parameter tersebut secara konsisten dan berkelanjutan menjadi faktor penting yang mendukung tercapainya kinerja pengawasan yang optimal.

Pada Tahun 2025, Balai POM di Sanggau sesuai Surat Sekretaris Utama nomor B-PR.06.02.2.01.25.06 tanggal 2 Januari 2025 dinyatakan tidak memiliki target sarana Kosmetik. Namun, sebagai hasil dari *re-catchment area* yang dialami oleh Balai POM di Sanggau pada tahun 2024 yang masih menjadi Loka POM di Kabupaten Sanggau, menambah wilayah kerja, salah satunya adalah Kabupaten Sintang yang memiliki sarana produksi Kosmetik, sehingga Kepala Balai POM di Sanggau mengajukan Surat Usulan Perubahan Target sarana Produksi Obat dan Makanan Tahun 2025 dengan nomor T-PW.03.01.27B.06.25.79 pada tanggal 4 Juni 2025 yang bertujuan untuk memasukkan sarana produksi Kosmetik yang berlokasi di Kabupaten Sintang sebagai salah satu target sarana produksi Sediaan Farmasi Balai POM di Sanggau.

Usulan perubahan target sarana produksi Kosmetik tersebut disetujui oleh Direktur Pengawasan Kosmetik melalui surat dinas nomor T-PW.03.02.44.06.25.2068 tanggal 18 Juni 2025, sehingga saat ini Balai POM di Sanggau memiliki 2 (dua) sarana produksi Sediaan Farmasi yang berada di wilayah kerja antara lain Industri Kosmetik Golongan A yaitu PT Forestwise Wild Keepers yang berlokasi di Kabupaten Sintang dan Industri Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) CV Tahasun Herbal yang berlokasi di Kabupaten Sanggau. Kedua sarana tersebut menjadi objek pengawasan rutin dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan produksi Sediaan Farmasi sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada awal perencanaan kegiatan tahun 2025, pemeriksaan terhadap sarana industri Kosmetik direncanakan untuk dilaksanakan pada Triwulan III, sedangkan pemeriksaan terhadap sarana UKOT direncanakan pada Triwulan IV. Namun demikian, mekanisme penilaian dan realisasi indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang bersifat *flat* pada setiap triwulan

menyebabkan capaian kinerja pada Triwulan I dan Triwulan II tercatat sebesar 0%, karena kegiatan pemeriksaan belum dilaksanakan pada periode tersebut.

Menindaklanjuti kondisi tersebut serta berdasarkan arahan Kepala Balai POM di Sanggau, dilakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan melalui perubahan Rencana Pelaksanaan (Renlak). Pemeriksaan sarana yang semula direncanakan pada Triwulan III dimajukan pelaksanaannya menjadi Triwulan II, guna mendukung pencapaian indikator kinerja secara lebih proporsional pada setiap periode pelaporan.

Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Kosmetik dilakukan pada tanggal 24 Juni 2025 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sarana Memenuhi Ketentuan (MK) serta penyelesaian CAPA terhadap temuan aspek CPKB yang ditemukan petugas telah *closed* pada bulan Agustus 2025 sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan sarana UKOT dilaksanakan pada bulan November 2025 dengan hasil pemeriksaan sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan CAPA telah dilaporkan selesai pada bulan Februari 2026. Seluruh kegiatan pemeriksaan memenuhi *timeline* yang ditentukan dan pelaporan telah disampaikan ke pusat melalui SIPT.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik dari aspek sumber daya manusia maupun sarana pendukung kegiatan pengawasan. Petugas pemeriksa memiliki kompetensi teknis yang memadai serta didukung oleh pengalaman dan pemahaman yang baik terhadap ketentuan teknis pengawasan di bidang Sediaan Farmasi. Kondisi tersebut berperan penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Di samping itu, komitmen dan koordinasi yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan turut berkontribusi dalam menjamin bahwa setiap tahapan kegiatan, mulai dari pelaksanaan pemeriksaan hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, capaian indikator kinerja pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi Sediaan Farmasi telah berjalan dengan baik, selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta memenuhi kriteria penilaian indikator kinerja yang berlaku. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka memastikan kepatuhan sarana terhadap standar dan ketentuan di bidang produksi Sediaan Farmasi.

Keberhasilan tersebut juga tercermin dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel. Kegiatan inspeksi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pemeriksaan yang ditetapkan pada awal tahun berjalan. Selain itu, kelengkapan dokumen pelaporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan hasil inspeksi kepada unit pusat menjadi faktor pendukung penting dalam pencapaian kinerja tersebut. Pelaporan hasil pengawasan dilakukan melalui aplikasi SIPT dengan melampirkan dokumen pendukung yang lengkap, antara lain surat tugas, berita acara pemeriksaan, laporan hasil inspeksi, serta surat tindak lanjut hasil pengawasan. Seluruh laporan hasil inspeksi disampaikan sesuai dengan ketentuan batas waktu pelaporan, yaitu paling lambat 25 hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan. Pada tahun 2025, Balai POM di Sanggau telah menyampaikan laporan hasil pengawasan dengan dokumen yang lengkap dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga turut mendukung tercapainya kinerja pengawasan yang optimal.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun beberapa langkah kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka menunjang pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat koordinasi internal terkait pembahasan Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2025–2029, yang bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tingkat unit kerja.
2. Melakukan penetapan target pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi tahun 2025 berdasarkan pemetaan sarana yang berada dalam wilayah kerja serta prioritas pengawasan yang telah ditetapkan.
3. Melakukan penyesuaian terhadap target pengawasan sarana produksi Kosmetik. Pada awal tahun 2025, Balai POM di Sanggau belum memiliki target pengawasan sarana produksi Kosmetik yang tercantum dalam rencana kerja. Namun demikian, berdasarkan kondisi riil sarana yang terdapat di wilayah kerja, Balai POM di Sanggau mengajukan usulan perubahan target pengawasan kepada unit pusat. Usulan tersebut bertujuan agar penetapan target pengawasan lebih mencerminkan kondisi sarana produksi yang sebenarnya di wilayah kerja, sehingga kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih relevan dan optimal.

4. Melakukan sosialisasi Definisi Operasional dan tata cara perhitungan realisasi oleh Ketua Tim kepada seluruh anggota tim yang dilakukan pada tanggal 12 - 13 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan dan pelaporan kinerja.
5. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana kegiatan inspeksi secara berkala dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan capaian indikator dapat dipantau secara berkelanjutan hingga seluruh target pengawasan Tahun 2025 dapat diselesaikan.
6. Melakukan peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan sehingga laporan yang dihasilkan lengkap dan sesuai pedoman. Hal ini tercapai dengan adanya pegawai Balai POM di Sanggau yang mengikuti Pelatihan Inspektur Kosmetik Tingkat Dasar sebanyak 1 (satu) orang pada bulan September - Oktober 2025.
7. Dilakukan pengecekan bertingkat mengenai hasil pengawasan dan pengambilan kesimpulan dari hasil pemeriksaan oleh supervisor atau ketua tim.
8. Melakukan *reminder timeline* pelaporan secara rutin sehingga pelaporan yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada dan dilaporkan tepat waktu oleh PIC.

IKSK.1.7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas produksi pangan. Indikator ini menunjukkan proporsi sarana produksi yang telah dilakukan pemeriksaan serta memperoleh tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Terdapat beberapa Definisi Operasional yang berhubungan dengan perhitungan presentasi ini yaitu:

a. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi Pangan Olahan.
b. Fasilitas produksi Pangan Olahan meliputi fasilitas produksi Pangan Olahan, baik yang memproduksi Pangan Olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun Pangan Olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.
c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi Pangan Olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi

perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut
2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Dalam mencapai indikator ini diperlukan formula perhitungan sebagai berikut:

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\textit{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\textit{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
2. Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:
   a. Ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
   b. Kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
   c. Kesesuaian *grading*: kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:
      i. Pemeriksaan A dan B atau pemeriksaan level I dan level II maka *grading* sebagai A (MK)
      ii. Pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka *grading* sebagai B (TMK)
      iii. Pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka *grading* sebagai C (TMK)

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.25 Perbandingan Target dan Realisas Tahun 2025 IKSK.1.7

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91**	**100**	**109,89**		**SANGAT BAIK**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 100%, yaitu telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 91%, sehingga capaian indikator kegiatan yang diperoleh adalah sebesar 109,89% atau masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.1.7

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	100

Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2024 belum memiliki capaian realisasi, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi pada tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan RENSTRA 2029 IKSK.1.7

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100%		**TERCAPAI/ MELAMPAUI**

Realisasi kinerja Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah 100% sedangkan target Renstra pada tahun 2029 adalah sebesar 100% sehingga capaian indikator kegiatan diperoleh sebesar 100%. Berdasarkan capaian tersebut, realisasi kinerja tahun 2025 termasuk dalam kategori **"Tercapai/Melampaui"**, yaitu kondisi dimana realisasi kinerja telah memenuhi dan berada diatas target akhir periode Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.1.7

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,72	100	100

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan pada unit kerja lain dalam klaster yang sama, yaitu Balai POM di Tanjungbalai dan Balai POM di Tabalong. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, realisasi Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tertinggi dicapai oleh Balai POM di Sanggau dan Tabalong yaitu sebesar 100%, diikuti oleh Balai POM di Tanjungbalai sebesar 98,72%.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah sebesar 109,89% atau masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang direncanakan secara sistematis, terstruktur, dan berbasis pada pemetaan sarana produksi Pangan Olahan yang berada dalam lingkup kewenangan pengawasan. Pemetaan sarana dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sarana produksi yang menjadi objek pengawasan dapat teridentifikasi secara menyeluruh serta

menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja pemeriksaan tahunan. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan prioritas pengawasan yang telah ditetapkan. Selain itu, penjadwalan kegiatan pemeriksaan telah dirancang sejak awal tahun anggaran sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap, terkoordinasi, dan terkendali, serta memungkinkan seluruh rangkaian kegiatan pengawasan diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025.

Selain perencanaan yang matang, proses pengukuran capaian indikator kinerja juga dilaksanakan secara mandiri oleh unit pengampu indikator dengan mengacu pada parameter penilaian yang telah ditetapkan. Parameter tersebut meliputi kesesuaian antara realisasi pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja yang telah disusun, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan, ketepatan dalam penarikan kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan, serta kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan. Pemenuhan parameter tersebut secara konsisten menjadi faktor penting yang mendukung tercapainya kinerja pengawasan yang optimal.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik dari aspek sumber daya manusia maupun sarana pendukung kegiatan pengawasan. Petugas pemeriksa memiliki kompetensi teknis yang memadai serta didukung oleh pengalaman dan pemahaman yang baik terhadap ketentuan teknis pengawasan di bidang Pangan Olahan. Kondisi ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Selain itu, komitmen dan koordinasi yang baik antara petugas pemeriksa dan supervisor turut memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dalam penentuan hasil pemeriksaan, termasuk penetapan *grading* sarana dan tindak lanjut hasil pengawasan, telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Pada tahun 2025, Balai POM di Sanggau memiliki target sarana produksi Pangan Olahan sebanyak 9 (sembilan) sarana produksi Pangan Olahan. Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan pada tahun 2025 mencakup sarana produksi Pangan Olahan dengan izin edar MD serta sarana produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dikategorikan berisiko. Hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan yang dilakukan selama tahun 2025 ini adalah 7 (tujuh) sarana yang mendapatkan hasil penilaian

Memenuhi Ketentuan (MK) dan 3 (tiga) sarana yang mendapatkan hasil penilaian Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dengan tindak lanjut berupa sanksi administrasi Peringatan terhadap sarana terkait.

Seluruh sarana yang telah direncanakan dalam rencana pemeriksaan tahunan berhasil diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan parameter pengukuran mengenai ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan melalui sistem informasi pengawasan, kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana pelaksanaan yang ditetapkan sejak awal tahun berjalan.

Selain itu, parameter lain seperti ketepatan pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut hasil pengawasan serta ketepatan dalam penentuan *grading* hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan menunjukkan bahwa telah terdapat kesamaan persepsi antara petugas pemeriksa dan supervisor dalam proses evaluasi hasil pemeriksaan. Konsistensi dalam penerapan pedoman tersebut juga turut mendukung terciptanya proses pengawasan yang akuntabel dan berkualitas.

Keberhasilan kinerja tersebut juga tercermin dari proses pelaporan hasil pengawasan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel. Pelaporan hasil pemeriksaan dilakukan melalui aplikasi SIPT dengan melampirkan dokumen pendukung yang lengkap, antara lain surat tugas, berita acara pemeriksaan, laporan hasil inspeksi, serta surat tindak lanjut hasil pengawasan. Seluruh laporan hasil inspeksi disampaikan sesuai dengan ketentuan batas waktu pelaporan, yaitu paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Pada tahun 2025, seluruh hasil pengawasan telah dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu sehingga mendukung tercapainya capaian indikator kinerja di atas target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi Pangan Olahan telah berjalan dengan baik, selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta memenuhi kriteria penilaian indikator kinerja yang berlaku. Realisasi kinerja yang melampaui target tersebut didukung oleh kompetensi petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai standar, konsistensi dalam penetapan tindak lanjut hasil pengawasan, serta komitmen dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun beberapa langkah kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka menunjang pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat koordinasi internal tentang pembahasan Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2025 - 2029.
2. Melakukan penetapan target pengawasan sarana produksi Pangan Olahan tahun 2025.
3. Melakukan sosialisasi Definisi Operasional dan tata cara perhitungan realisasi oleh Ketua Tim kepada seluruh anggota tim yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan dan pelaporan kinerja.
4. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana kegiatan inspeksi secara berkala dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan capaian indikator dapat dipantau secara berkelanjutan hingga seluruh target pengawasan tahun 2025 dapat diselesaikan.
5. Melakukan peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan sehingga laporan yang dihasilkan lengkap dan sesuai pedoman.
6. Dilakukan pengecekan bertingkat terhadap pengambilan keputusan oleh supervisor atau ketua tim untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan.
7. Melakukan *reminder timeline* pelaporan secara rutin sehingga pelaporan yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang dan dilaporkan tepat waktu.

IKSK. 1.8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan



Sarana distribusi Sediaan Farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi Sediaan Farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Obat dan Bahan Obat meliputi Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan Obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran Suplemen Kesehatan yaitu Distributor, Agen, Swalayan, Apotek, Toko Obat, Depot Jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi Sediaan Farmasi meliputi fasilitas distribusi Kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan Obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan Obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Kegiatan pemeriksaan dan penetapan tindak lanjut melibatkan beberapa tahap yang dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan pemeriksaan dan penetapan tindak lanjut dilakukan sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, Pedoman Tindak Lanjut, serta *timeline*

yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Dalam mencapai indikator ini diperlukan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = rata-rata dari % fasilitas distribusi Obat, % fasilitas distribusi Obat Bahan Alam, % fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan, % fasilitas distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Dengan komponen perhitungan sebagai berikut:

A. Persentase fasilitas distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

= rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak Lanjut (b)

Dengan komponen perhitungan sebagai berikut:

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan = (A/B) x 100%

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan Obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan Obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

b) Kesesuaian Tindak Lanjut = {(A/C) + (B/C)}/2 x 100%

A. Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan Obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (*timeline*), pada periode bulan berjalan.

B. Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan Obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh independent supervisor melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan.

C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan Obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

Dengan komponen perhitungan sebagai berikut:

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) x 100%
b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x 100%
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / Jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu / Jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

C. Persentase fasilitas distribusi suplemen Kesehatan yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / Jumlah target pengawasan sesuai renlak) x 100%.
b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x 100%.
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / Jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%.
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu / Jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%.

D. Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / Jumlah target pengawasan sesuai renlak) x 100%.
b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x 100%.
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / Jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%.
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu / Jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%.

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.1.8

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**93**	**100**	**107,53%**		**SANGAT BAIK**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 100%, yaitu telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 93%, sehingga capaian indikator kegiatan yang diperoleh adalah sebesar 107,53% atau masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**. Indikator ini merupakan indikator yang baru untuk periode renstra tahun 2025-2029 sehingga tidak terdapat *baseline* data pada tahun sebelumnya untuk menjadi *baseline* target awal renstra di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama renstra, sehingga pengukuran capaian dari UPT belum dapat tergambarkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.1.8

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	100

Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2024 belum memiliki capaian realisasi, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi pada tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 Tahun 2029 IKSK.1.8

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	96,75	103,35%		**TERCAPAI/ MELAMPAUI**

Realisasi kinerja Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah 100% sedangkan target Renstra pada tahun 2029 adalah sebesar 96,75% sehingga capaian indikator kegiatan yang diperoleh sebesar 103,35%. Berdasarkan capaian tersebut, realisasi kinerja pada tahun 2025 termasuk dalam kategori **"Tercapai/Melampaui"**, yaitu kondisi dimana realisasi kinerja telah memenuhi dan berada diatas target akhir periode Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.1.8

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan pada unit kerja lain dalam klaster yang sama, yaitu Balai POM di Tanjungbalai dan Balai POM di Tabalong. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, realisasi Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk ketiga unit kerja memperoleh hasil yang sama, yaitu sebesar 100%.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah sebesar 107,53% atau masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**. Realisasi yang melampaui target tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam perhitungan indikator kinerja utama (IKU). Dalam pelaksanaannya, kesesuaian antara rencana pelaksanaan kegiatan (renlak) dengan realisasi di lapangan, ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan, ketepatan dan kelengkapan pelaporan, serta ketepatan penetapan tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi aspek penting yang diperhatikan oleh petugas pemeriksa dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, Balai POM di Sanggau memiliki target pemeriksaan sebanyak 113 sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Target tersebut terdiri atas 64 sarana distribusi Obat, 8 (delapan) sarana distribusi Obat Bahan Alam, 9 (sembilan) sarana distribusi Suplemen Kesehatan, dan 32 sarana distribusi Kosmetik. Berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan, diperoleh keputusan bahwa 58 sarana distribusi Obat dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK), sedangkan 6 (enam) sarana distribusi Obat dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan diberikan tindak lanjut berupa sanksi administratif Peringatan Keras.

Selanjutnya, terhadap sarana distribusi Obat Bahan Alam, seluruh 8 (delapan) sarana yang diperiksa dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK). Pada sarana distribusi Suplemen Kesehatan, sebanyak 8 (delapan) sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK), sedangkan 1 (satu) sarana dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) karena ditemukan produk kedaluwarsa dan telah diberikan sanksi administratif berupa Peringatan. Adapun pada sarana distribusi Kosmetik, sebanyak 23 sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK), sementara 9 (sembilan) sarana dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan diberikan sanksi administratif berupa Peringatan I.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi tersebut dimonitor secara berkala guna memastikan kesesuaian antara target pemeriksaan dengan rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun. Proses perencanaan kegiatan pengawasan didasarkan pada analisis prioritas pengawasan yang mempertimbangkan tingkat risiko sarana serta riwayat hasil pengawasan sebelumnya. Selain itu, kelengkapan dokumen hasil pengawasan yang dilaporkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) yang dilengkapi dengan data dukung seperti surat tugas, berita acara pemeriksaan, laporan hasil inspeksi, serta surat tindak lanjut hasil pengawasan, serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada unit pusat turut menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja tersebut.

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini juga didukung oleh perencanaan program dan kegiatan pengawasan yang disusun secara sistematis. Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025, telah disusun rencana pelaksanaan pemeriksaan yang memuat target *output* sarana distribusi Sediaan Farmasi yang akan diperiksa setiap bulan. Perencanaan tersebut dilanjutkan dengan penetapan prioritas sarana distribusi yang meliputi sarana distribusi Obat dan sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi Obat Bahan Alam (OBA) dan sarana distribusi Suplemen Kesehatan berdasarkan tingkat risiko dan hasil pengawasan sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengawasan di lapangan.

Selanjutnya, disusun rencana pelaksanaan pemeriksaan bulanan yang mencakup jumlah sarana yang akan diperiksa, penugasan petugas pemeriksa, serta estimasi kebutuhan anggaran kegiatan. Pendekatan tersebut mendukung terciptanya kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan serta meningkatkan efektivitas pengendalian

pelaksanaan pemeriksaan di lapangan. Hingga akhir tahun 2025, pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pengawasan yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi pada tahun 2025 meliputi sarana distribusi Obat, sarana distribusi Obat Bahan Alam (OBA), sarana distribusi Suplemen Kesehatan, serta sarana distribusi Kosmetik yang berada di wilayah kerja Balai POM di Sanggau. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun dengan mempertimbangkan prioritas pengawasan berbasis analisis risiko serta hasil pengawasan sebelumnya. Selain kegiatan pengawasan rutin, pelaksanaan pengawasan pada tahun tersebut juga mencakup kegiatan intensifikasi pengawasan guna meningkatkan efektivitas pengendalian terhadap peredaran Sediaan Farmasi.

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan berdasarkan beberapa parameter utama, yaitu kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan rencana yang telah ditetapkan, ketepatan penetapan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai pedoman yang berlaku, serta ketepatan waktu dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan melalui sistem pelaporan yang berlaku. Pemenuhan parameter tersebut secara konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian kinerja pengawasan yang optimal.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh kompetensi petugas pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, konsistensi dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta komitmen dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu. Pelaksanaan pemeriksaan yang berjalan sesuai dengan perencanaan, dukungan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan inovasi dalam sistem pelaporan dan monitoring kegiatan pengawasan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas pengawasan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi di wilayah kerja Balai POM di Sanggau. Dengan demikian, capaian indikator kinerja pada tahun 2025 dapat terealisasi secara optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun beberapa langkah kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka menunjang pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana pemeriksaan berbasis target kinerja dan prioritas risiko.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
3. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu melalui sistem pelaporan yang berlaku.
4. Sosialisasi Definisi Operasional indikator kinerja dan tata cara perhitungan realisasi kepada seluruh anggota tim dalam forum dialog kinerja.
5. Partisipasi dalam Desk Pembahasan Renstra Periode 2025–2029 guna memastikan keselarasan perencanaan kinerja dengan arah kebijakan strategis organisasi.
6. Pelaksanaan intensifikasi pengawasan.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dan ketepatan waktu pelaporan terus diupayakan untuk sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
8. *Brainstorming* antar petugas menjadi program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Penyamaan persepsi dalam pengambilan keputusan antara petugas dan supervisor juga terus ditingkatkan agar pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman.

IKSK. 1.9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang mencerminkan efektivitas pengawasan pada mata rantai distribusi Pangan. Indikator ini menunjukkan proporsi sarana distribusi yang telah dilakukan pemeriksaan serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Sarana distribusi Pangan Olahan yang dimaksud adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan Pemeriksaan dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pemeriksaan juga dilakukan sesuai dengan ketentuan, yaitu mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Dalam mencapai indikator ini diperlukan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan = (Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa) x 100%

Keterangan:

1. Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
2. Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut **(A+B+C)**, yaitu:
   A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / Target jumlah sarana yang diperiksa sesuai renlak) x 100%)
   B = 70% x ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)
   C = 10% x ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.1.9

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	98,14	107,85%		**SANGAT BAIK**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 98,14%, yaitu telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 91%, sehingga capaian indikator kegiatan yang diperoleh adalah sebesar 107,85% atau masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**. Selain itu, adapun indikator ini merupakan indikator yang baru untuk periode renstra 2025-2029 sehingga tidak terdapat *baseline* data pada tahun sebelumnya untuk menjadi *baseline* target awal renstra di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama renstra, sehingga pengukuran capaian dari UPT belum dapat tergambarkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.1.9

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	98,14

Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2024 belum memiliki capaian realisasi, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 98,14%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi pada tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 Tahun 2029 IKSK.1.9

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,14	95	103,30%		**TERCAPAI/ MELAMPAUI**

Realisasi kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah sebesar 98,14% sedangkan target Renstra pada tahun 2029 adalah sebesar 95% sehingga capaian indikator kegiatan diperoleh sebesar 103,30%. Berdasarkan capaian tersebut, realisasi kinerja tahun 2025 termasuk dalam kategori **"Tercapai/Melampaui"**, yaitu kondisi dimana realisasi kinerja telah memenuhi dan berada diatas target akhir periode Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.1.9

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	98,14

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan pada unit kerja lain dalam klaster yang sama, yaitu Balai POM di Tanjungbalai dan Balai POM di Tabalong. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, realisasi Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tertinggi dicapai oleh Balai POM di Tabalong dan Balai POM di Tanjungbalai yaitu sebesar 100%, diikuti oleh Balai POM di Sanggau sebesar 98,14%, dengan selisih yang relatif kecil dibandingkan capaian Balai POM di Tabalong dan Balai POM di Tanjungbalai.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tertinggi pada tahun 2025 adalah sebesar 107,85% atau masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**. Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi melebihi target yang telah ditetapkan dikarenakan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam perhitungan IKU. Kesesuaian renlak, ketepatan waktu, ketepatan pelaporan serta kelengkapan pelaporan menjadi perhatian bagi petugas agar dapat mencapai target IKU yang ditetapkan.

Pada tahun 2025, Balai POM di Sanggau menetapkan target pemeriksaan terhadap 43 sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kepatuhan sarana distribusi Pangan Olahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan mutu Pangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, sebanyak 33 sarana distribusi Pangan Olahan dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK), sedangkan 10 sarana distribusi Pangan Olahan dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Terhadap sarana yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi administratif, yang terdiri atas 8 (delapan) surat peringatan dan 2 (dua) surat peringatan keras, sebagai upaya pembinaan dan penegakan kepatuhan sarana distribusi terhadap ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Sanggau dalam rangka memastikan bahwa kegiatan distribusi Pangan Olahan di wilayah kerja telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada tahun 2025, dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pemeriksaan secara berkala sehingga jumlah target pemeriksaan sesuai dengan renlak dan analisis prioritas pengawasan yang telah disusun pada awal tahun berjalan, selain itu kelengkapan hasil

pengawasan yang dilaporkan melalui aplikasi SIPT seperti surat tugas, berita acara pemeriksaan dan surat tindak lanjut hasil pengawasan serta ketepatan waktu dalam pelaporan hasil inspeksi ke pusat juga menjadi pendukung keberhasilan ini.

Monitoring dan evaluasi secara tertib serta *brainstorming* antar petugas menjadi program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Pemantauan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dan ketepatan waktu pelaporan terus diupayakan untuk sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penyamaan persepsi dalam pengambilan keputusan antara petugas dan supervisor juga terus ditingkatkan agar pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun beberapa langkah kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka menunjang pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana pemeriksaan berbasis target kinerja dan prioritas risiko.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
3. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu melalui sistem pelaporan yang berlaku.
4. Sosialisasi Definisi Operasional indikator kinerja dan tata cara perhitungan realisasi kepada seluruh anggota tim dalam forum dialog kinerja.
5. Partisipasi dalam Desk Pembahasan Renstra Periode 2025 - 2029 guna memastikan keselarasan perencanaan kinerja dengan arah kebijakan strategis organisasi.
6. Pelaksanaan intensifikasi pengawasan.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dan ketepatan waktu pelaporan terus diupayakan untuk sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
8. *Brainstorming* antar petugas menjadi program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Penyamaan persepsi dalam pengambilan keputusan antara petugas dan supervisor juga terus ditingkatkan agar pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman.

IKSK. 1.10. Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan periklanan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Indikator ini menunjukkan proporsi iklan yang telah dilakukan pengawasan dan dinilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, norma, serta etika periklanan yang berlaku. Sediaan Farmasi yang dimaksud antara lain Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi.

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Pada pelaksanaan pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sesuai ketentuan yang dimaksud berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Target pengawasan iklan Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, Kosmetik dan Pangan Olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media. Tepat waktu yang dimaksud adalah sesuai pedoman. Dalam mencapai indikator ini diperlukan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

Keterangan:

A. Persentase Iklan Obat yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b)/2

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan = Jumlah iklan yang selesai diawasi / Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak x 100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu / Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi / jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) x 100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu / Jumlah iklan yang selesai diawasi) x 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai / Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) x 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi / Jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) x 100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu / Jumlah iklan yang selesai diawasi) x 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai / Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) x 100%

D. Persentase iklan Kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / Jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (Capaian jumlah iklan per media / Jumlah target per media) x 100%
- Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / Jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / Jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E. Persentase iklan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi / Jumlah target iklan sesuai renlak) x 40%
b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((Jumlah iklan yang diawasi per media iklan / Jumlah iklan yang diawasi) / Proporsi target media) x 20%
c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu / Jumlah iklan yang diawasi) x 40%

1. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.1.10

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**92**	**100**	**108,70%**		**SANGAT BAIK**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indikator Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebesar 100%, yaitu telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 92%, sehingga capaian indikator kegiatan yang diperoleh adalah sebesar 108,70% atau masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**. Selain itu, adapun indikator ini merupakan indikator yang baru untuk periode renstra 2025-2029 sehingga tidak terdapat *baseline* data pada tahun sebelumnya untuk menjadi *baseline* target awal renstra di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama renstra, sehingga pengukuran capaian dari UPT belum dapat tergambarkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.1.10

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	-	100

Berdasarkan Indikator Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Indikator Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2024 belum memiliki capaian realisasi, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi pada tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 Tahun 2029 IKSK.1.10

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100	96,4	103,73%		**TERCAPAI /MELAMPAUI**

Realisasi kinerja Indikator Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah 100% sedangkan target Renstra pada tahun 2029 adalah sebesar 96,4% sehingga capaian indikator kegiatan diperoleh sebesar 103,73%. Berdasarkan capaian tersebut, realisasi kinerja tahun 2025 termasuk dalam kategori **“Tercapai/Melampaui”**, yaitu kondisi dimana realisasi kinerja telah memenuhi dan berada diatas target akhir periode Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.1.10

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM diSanggau
Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,9	100	100

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan pada unit kerja lain dalam klaster yang sama, yaitu Balai POM di Tanjungbalai dan Balai POM di Tabalong. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, realisasi Indikator Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan tertinggi dicapai oleh Balai POM di Sanggau dan Balai POM di Tabalong yaitu sebesar 100%, diikuti oleh Balai POM di Tanjungbalai sebesar 99,9%.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator kinerja Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 tercatat sebesar 108,70%, sehingga termasuk dalam kategori **“Sangat Baik”**. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Pada tahun pertama implementasinya, target indikator kinerja tersebut ditetapkan sebesar 92%. Target ini merupakan nilai rata-rata yang dihitung dari pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa kelompok iklan produk, yaitu iklan Obat, iklan Obat Bahan Alam, iklan Suplemen Kesehatan, iklan Kosmetik, serta iklan Pangan Olahan. Perhitungan realisasi capaian dilakukan melalui mekanisme penilaian mandiri oleh ketua tim pengawas dengan menggunakan perangkat penilaian (*tools*) yang telah disusun dan disepakati bersama antara unit pengampu, unit pelaksana teknis, serta Biro Perencanaan dan Keuangan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pengawasan iklan pada berbagai kelompok produk tersebut dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu pemenuhan target pengawasan, ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan, serta akurasi dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sepanjang tahun 2025, seluruh kelompok produk yang menjadi objek pengawasan telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu, proses pelaporan menunjukkan tingkat ketepatan waktu yang tinggi serta peningkatan akurasi dalam evaluasi dan penetapan hasil pengawasan.

Pencapaian kinerja yang melampaui target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung utama. Salah satu faktor yang berperan signifikan adalah efektivitas pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan iklan yang memanfaatkan sistem pelaporan terintegrasi melalui portal Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Pemanfaatan sistem ini memungkinkan proses evaluasi serta penyusunan laporan hasil pengawasan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, konsistensi dalam pelaksanaan rencana pengawasan tahunan yang telah disusun pada awal tahun 2025 juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan capaian indikator. Seluruh target pengawasan yang telah ditetapkan, baik berdasarkan jenis produk maupun media iklan, dapat direalisasikan sesuai jadwal yang direncanakan. Capaian pengawasan pada berbagai media iklan, seperti televisi, radio, media cetak, dan media daring, berada pada kisaran optimal sesuai dengan proporsi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketepatan waktu pelaporan serta akurasi dalam pengambilan keputusan juga didukung oleh proses evaluasi dan validasi hasil pengawasan yang dilakukan secara disiplin oleh petugas pengawas dan ketua tim. Proses tersebut memastikan bahwa setiap hasil pengawasan telah diverifikasi secara memadai sebelum dilaporkan kepada unit pusat, sehingga pelaporan dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Selain faktor sistem dan mekanisme kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung capaian indikator ini. Peningkatan pemahaman petugas terhadap pedoman penilaian iklan serta kriteria pelanggaran iklan memberikan kontribusi signifikan terhadap meningkatnya akurasi dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan. Kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia pengawas iklan semakin berkembang melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pedoman evaluasi iklan. Hal tersebut turut mendorong konsistensi mutu hasil evaluasi serta meningkatkan kinerja pengawasan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, capaian indikator Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 yang memperoleh predikat

"Sangat Baik" juga didukung oleh terjalinnya kerja sama yang harmonis antara pihak penanggung jawab iklan dengan petugas pengawas. Hubungan kerja yang komunikatif dan kolaboratif antara kedua pihak memungkinkan proses pengawasan berjalan lebih efektif, sehingga mendukung keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun beberapa langkah kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka menunjang pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam Desk Pembahasan Renstra Periode 2025-2029 guna memastikan keselarasan perencanaan kinerja dengan arah kebijakan strategis organisasi.
2. Sosialisasi Definisi Operasional indikator kinerja dan tata cara perhitungan realisasi kepada seluruh anggota tim dalam forum dialog kinerja.
3. Pelaksanaan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara rutin dan terencana sesuai target yang ditetapkan melalui surat edaran BPOM Pusat. Pengawasan dilaksanakan dengan memanfaatkan data yang terinput dalam aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT).
4. Kegiatan peningkatan kompetensi petugas pengawas melalui pembinaan teknis, koordinasi, serta pendampingan yang difasilitasi oleh unit pengampu di BPOM Pusat. Pembinaan ini meningkatkan pemahaman petugas terhadap parameter standar kesesuaian iklan, prosedur penilaian, dan ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan.
5. Penguatan koordinasi internal tim pengawasan di lingkungan Balai POM di Sanggau, khususnya antara ketua tim, operator SIPT, dan bagian pelaporan, untuk memastikan data hasil pengawasan dapat diinput, diverifikasi, dan dikirimkan secara tepat waktu kepada BPOM Pusat.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelaporan elektronik (SIPT) secara optimal yang memungkinkan pengawasan dilakukan lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini berperan penting dalam menjaga ketepatan waktu pelaporan, salah satu parameter utama dalam perhitungan indikator kinerja.
7. Kegiatan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian target pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, baik melalui rapat evaluasi internal maupun melalui forum koordinasi dengan BPOM Pusat. Kegiatan ini membantu

mengidentifikasi hambatan, seperti keterlambatan pelaporan atau kendala teknis sistem, serta memastikan tindak lanjut dilakukan dengan segera.

IKSK 1.11. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Persentase label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan indikator kinerja yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan pelabelan produk. Indikator ini menunjukkan proporsi label produk yang telah diawasi dan dinilai kesesuaiannya dengan standar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi:

a. Rokok;
b. Cerutu;
c. Rokok daun;
d. Tembakau iris;
e. Tembakau padat dan cair;
f. Hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang dimaksud adalah setiap keterangan mengenai Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada Produk Tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan Produk Tembakau. Pengawasan label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. Pengawasan label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan Produk Tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku. Dalam mencapai indikator ini diperlukan formula perhitungan sebagai berikut:

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
= (A+B) / 2

Keterangan:

A. Persentase pemenuhan jumlah target pengawasan label: (Jumlah label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi) x 100%

B. Persentase ketepatan waktu pelaporan label: (Jumlah label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

   Keterangan:

   i. Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.

   ii. Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.

   iii. Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

   iv. Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT.

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.1.11

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109,89%		**SANGAT BAIK**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indikator Persentase label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi sesuai standar adalah sebesar 100%, yaitu telah

melampaui target yang ditetapkan sebesar 91%, sehingga capaian indikator kegiatan yang diperoleh adalah sebesar 109,89% atau masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**. Selain itu, adapun indikator ini merupakan indikator yang baru untuk periode renstra 2025-2029 sehingga tidak terdapat *baseline* data pada tahun sebelumnya untuk menjadi *baseline* target awal renstra di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama renstra, sehingga pengukuran capaian dari UPT belum dapat tergambarkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.1.11

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	**100**

Indikator Persentase label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Indikator Persentase label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi sesuai standar pada tahun 2024 belum memiliki capaian realisasi, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi pada tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 Tahun 2029 IKSK.1.11

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	100	95	105,26%		**TERCAPAI/ MELAMPAUI**

Realisasi kinerja Indikator Persentase label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi sesuai standar Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah 100% sedangkan target Renstra pada tahun 2029 adalah sebesar 95% sehingga capaian

indikator kegiatan yang diperoleh sebesar 105,26% atau masuk dalam kategori **"Tercapai/Melampaui"**, yaitu kondisi dimana realisasi kinerja telah memenuhi dan berada diatas target akhir periode Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.1.11

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94,64	100	100

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan pada unit kerja lain dalam klaster yang sama, yaitu Balai POM di Tanjungbalai dan Balai POM di Tabalong. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, realisasi Indikator Persentase label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi sesuai standar tertinggi dicapai oleh Balai POM di Sanggau dan Balai POM di Tabalong yaitu sebesar 100%, diikuti oleh Balai POM di Tanjungbalai sebesar 94,64%.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Sehubungan dengan Surat Edaran BPOM Nomor B-PW.01.15.3.02.25.62 tanggal 7 Februari 2025, pada awalnya dilakukan penyesuaian terhadap target pengawasan label Produk Tembakau sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Namun demikian, berdasarkan Surat Relaksasi Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171, target pengawasan bagi Balai POM dikembalikan pada volume awal, yaitu sebanyak 144 label Produk Tembakau. Selanjutnya, melalui Surat Edaran BPOM Nomor B-PW.01.15.35.04.25.525 tanggal 8 April 2025, ditetapkan penggunaan alat pelaporan khusus untuk kegiatan pengawasan label Rokok Elektronik pada tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut juga diatur bahwa pelaksanaan pengawasan label Rokok Elektronik mulai dilaksanakan pada Triwulan II, dengan target pengawasan sebesar 1 (satu) label per triwulan untuk setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah dilakukan pengukuran terhadap hasil kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025, diperoleh capaian indikator kinerja Persentase label Produk Tembakau dan/atau Rokok

Elektronik yang diawasi sesuai standar adalah sebesar 109,89% atau masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**.

Capaian yang melampaui target tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam implementasinya, terdapat beberapa aspek penting yang menjadi perhatian utama petugas pengawas, antara lain kesesuaian antara rencana pelaksanaan kegiatan (renlak) dengan realisasi pelaksanaan di lapangan, kesesuaian jumlah label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi dengan target yang tercantum dalam rencana kegiatan, serta ketepatan dalam melakukan penilaian dan pengambilan kesimpulan terkait kesesuaian label terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan dan informasi lainnya pada kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

Selain itu, ketepatan waktu serta kelengkapan pelaporan hasil pengawasan juga menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian indikator kinerja. Seluruh hasil pengawasan wajib dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu, dengan batas waktu penyampaian laporan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah kegiatan pengawasan dilaksanakan. Kedisiplinan dalam pelaporan ini turut memastikan bahwa data pengawasan terdokumentasi secara sistematis dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Secara umum, capaian indikator kinerja ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik oleh Balai POM di Sanggau telah berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan serta komitmen petugas dalam memastikan bahwa label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar pelabelan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun beberapa langkah kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka menunjang pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam Desk Pembahasan Renstra Periode 2025–2029 guna memastikan keselarasan perencanaan kinerja dengan arah kebijakan strategis organisasi.
2. Sosialisasi Definisi Operasional indikator kinerja dan tata cara perhitungan realisasi kepada seluruh anggota tim dalam forum dialog kinerja.
3. Pelaksanaan pengawasan label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik secara rutin dan terencana sesuai target yang ditetapkan melalui surat edaran BPOM Pusat. Pengawasan dilaksanakan dengan memanfaatkan data label yang terinput dalam aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT).
4. Kegiatan peningkatan kompetensi petugas pengawas melalui pembinaan teknis, koordinasi, serta pendampingan yang difasilitasi oleh unit pengampu di BPOM Pusat. Pembinaan ini meningkatkan pemahaman petugas terhadap parameter standar pelabelan, prosedur penilaian, dan ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan.
5. Penguatan koordinasi internal tim pengawasan di lingkungan Balai POM di Sanggau, khususnya antara ketua tim, operator SIPT, dan bagian pelaporan, untuk memastikan data hasil pengawasan dapat diinput, diverifikasi, dan dikirimkan secara tepat waktu kepada BPOM Pusat.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelaporan elektronik (SIPT) secara optimal yang memungkinkan pengawasan dilakukan lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini berperan penting dalam menjaga ketepatan waktu pelaporan, salah satu parameter utama dalam perhitungan indikator kinerja.
7. Kegiatan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian target pengawasan label, baik melalui rapat evaluasi internal maupun melalui forum koordinasi dengan BPOM Pusat. Kegiatan ini membantu mengidentifikasi hambatan, seperti keterlambatan pelaporan atau kendala teknis sistem, serta memastikan tindak lanjut dilakukan dengan segera.

IKSK. 1.12. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT



Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah Unit Pelayanan Teknis (UPT) bertujuan untuk mengukur kesesuaian Balai POM di Sanggau dalam melaksanakan kegiatan pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM. Persentase pemenuhan dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Dalam mencapai indikator ini diperlukan formula perhitungan sebagai berikut:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

= 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Keterangan:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik

terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.
3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). (C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.
4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). (D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.

1. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.1.2

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	**100**	**100**	**100%**		BAIK

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT adalah sebesar 100%, yaitu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian indikator kegiatan yang diperoleh adalah sebesar 100% atau masuk dalam kategori **"Baik"**. Selain itu, adapun indikator ini merupakan indikator yang baru untuk periode renstra 2025-2029 sehingga tidak terdapat *baseline* data pada tahun sebelumnya untuk menjadi *baseline* target awal renstra di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama renstra, sehingga pengukuran capaian dari UPT belum dapat tergambarkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.1.12

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	**100**

Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT pada tahun 2024 belum memiliki capaian realisasi, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi pada tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 Tahun 2029 IKSK.1.12

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100%		**TERCAPAI/ MELAMPAUI**

Realisasi kinerja Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah sebesar 100% sedangkan target Renstra pada tahun 2029 adalah sebesar 100% sehingga capaian indikator kegiatan diperoleh sebesar 100%. Berdasarkan capaian tersebut, realisasi kinerja tahun 2025 termasuk dalam kategori **"Tercapai/Melampaui"**, yaitu kondisi dimana realisasi kinerja telah memenuhi dan berada diatas target akhir periode Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.1.12

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	106,6	105,27	100

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan pada unit kerja lain dalam klaster yang sama, yaitu Balai POM di Tanjungbalai dan Balai POM di Tabalong. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, realisasi Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tertinggi dicapai oleh Balai POM di Tanjungbalai sebesar 106,6%, diikuti oleh Balai POM di Tabalong sebesar 105,27%, dan Balai POM di Sanggau sebesar 100%, dengan selisih yang relatif kecil dibandingkan capaian Balai POM di Tabalong.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT di Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 sudah mencapai target dengan kriteria **"Baik"**. Komponen pertama IKU yaitu persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A) telah dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sarana pelayanan Apotek. Pada kegiatan pemeriksaan apotek sudah diterapkan penggunaan tools AMR, namun terdapat beberapa kendala dimana terdapat beberapa apotek yang diperiksa tidak mengelola antibiotik, hal ini mengakibatkan tidak tercapainya target 12 apotek yang diperiksa menggunakan tools AMR dengan realisasi hanya 11 apotek yang diperiksa dengan tools AMR. Selain itu ketepatan pengisian tools masih belum sesuai sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, Balai POM di Sanggau memiliki persen ketepatan pengisian tool sebesar 96,53%. Persepsi inspektur pada pengisian tools belum seragam sehingga terdapat ketidaksesuaian pengisian tools AMR. Komponen pertama (A) ini memiliki target total sebesar 80%, dengan realisasi Balai POM di Sanggau adalah sebesar 94,1%, maka capaian pada komponen pertama (A) ini adalah sebesar 117,62 %.

Komponen kedua (B) berupa bimbingan teknis pengendalian AMR telah dilakukan pada tanggal 19 Juni 2025 di Kabupaten Sekadau yang dilakukan juga bersamaan dengan kegiatan *launching* Program Ayo Buang Sampah Obat. Kegiatan ini mengundang seluruh penanggung jawab apotek di Kabupaten Sekadau, Dinas Kesehatan, dan Ketua organisasi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Kegiatan bimbingan teknis ini telah dilakukan sesuai target yaitu satu kegiatan, sehingga realisasi pada komponen ini adalah sebesar 100%. Komponen ketiga (C) yaitu publikasi hasil pengawasan pengendalian resistensi antibiotik oleh UPT yang memiliki target melakukan 2 (dua) publikasi. Pada Triwulan III telah dilakukan publikasi hasil pengawasan UPT pada tahun 2024 yaitu pada tanggal 10 Oktober 2025 pada media sosial Balai POM di Sanggau. Serta publikasi Triwulan IV yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2025 melalui media sosial Balai POM di Sanggau. Hal ini mengakibatkan realisasi capaian komponen ini menjadi 100% dari target.

Kegiatan advokasi sebagai komponen keempat (D) dari IKU pengendalian AMR di wilayah UPT telah terlaksana pada tanggal 13 November 2025. Pelaksanaan advokasi dilakukan oleh Kepala Balai POM di Sanggau didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Advokasi ini membahas implementasi kebijakan Gubernur Kalimantan Barat terkait Surat Edaran nomor 442/245/SDK-A/DINKES tentang Pencegahan Resistensi Antibiotika di Kabupaten Sintang, serta penyampaian hasil pengawasan sarana pelayanan kefarmasian (Apotek) di Kabupaten Sintang khususnya penyerahan antibiotik tanpa resep. Advokasi ini menghasilkan komitmen Kepala Dinas Kesehatan untuk mendukung penggunaan antibiotik secara rasional di wilayah Kabupaten Sintang.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Balai POM di Sanggau antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan pemeriksaan sarana Apotek dengan menggunakan tools AMR.
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengendalian resistensi antimikroba yang terlaksana dengan baik sesuai target yaitu kabupaten dengan capaian penggunaan antibiotik tanpa resep terbanyak.

3. Publikasi hasil pengawasan Apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter secara terencana dan tepat waktu.
4. Advokasi lintas sektor terhadap pengendalian AMR dengan menggalang komitmen lintas sektor terkait implementasi kebijakan Gubernur Kalimantan Barat terkait Surat Edaran nomor 442/245/SDK-A/DINKES tentang Pencegahan Resistensi Antibiotika.
5. Melaksanakan penggalangan komitmen oleh para Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) pada BimTek pengendalian AMR.
6. Menghimbau seluruh Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) untuk memasang poster “Tidak Melayani Antibiotik tanpa Resep” di sarana Apotek.
7. Peningkatan kompetensi inspektur Obat melalui pelatihan daring.

IKSK 1.13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium



Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen, yaitu:

1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
2. Standar Peralatan;
3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Dalam mencapai indikator ini diperlukan formula perhitungan sebagai berikut:

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat (46 % x Rata-rata A) + (31 % x Rata-rata B) + (15% x Rata-rata C) + (8 % x Rata-rata D) → (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.1.13

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12	13,18	109,83%		**SANGAT BAIK**

Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Sanggau sesuai standar kemampuan Laboratorium (SKL) dilakukan setiap Triwulan. Berdasarkan Surat Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) nomor: PR.10.01.10.01.26.01, tanggal 2 Januari 2026, Hal: Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Loka dan Balai POM Kabupaten/Kota Sebagai Laboratorium tingkat Tingkat 1 dan Tingkat 2, Balai POM di Sanggau memperoleh capaian indikator kegiatan sebesar 109,83% dengan realisasi sebesar 13,18% dari target 12% seperti terlihat pada tabel diatas. Dengan demikian, indikator kegiatan tersebut masuk dalam kategori **"Sangat Baik".**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.1.13

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	13,18

Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada tahun 2024 belum

memiliki capaian realisasi, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 13,18%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi pada tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 IKSK.1.13

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	13,18	10,7	123,17%		**TERCAPAI/ MELAMPAUI**

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi Indikator Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di sanggau sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada tahun 2025 adalah sebesar 13,18% terhadap target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 10,7% sehingga diperoleh capaian indikator kegiatan sebesar 123,175% atau masuk dalam kategori **"Tercapai/Melampaui"**. Namun terdapat perbedaan *tools* atau perhitungan realisasi antara tahun 2025 dengan 2026 hingga 2029. Pada tahun 2025, Laboratorium Balai POM di Sanggau masih menggunakan *tools* laboratorium tingkat 1, sedangkan untuk tahun 2026 hingga 2029 Balai POM di Sanggau menggunakan *tools* Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 2.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.1.13

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	13	11,45	13,18

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan pada unit kerja lain dalam klaster yang sama, yaitu Balai POM di Tanjungbalai dan Balai POM di Tabalong. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, realisasi Indikator Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di sanggau sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tertinggi dicapai oleh Balai POM di Sanggau

sebesar 13,18%, diikuti oleh Balai POM di Tanjungbalai sebesar 13%, dan Balai POM di Tabalong sebesar 11,45%.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2025 Balai POM di Sanggau menggunakan *tools* Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 1, dimana Standar Kemampuan Laboratorium dinilai melalui 3 (tiga) komponen yaitu Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Laboratorium. Realisasi Pemenuhan SKL Balai POM di Sanggau pada Triwulan I tahun 2025 memiliki realisasi sebesar 11,87% dari target 10,07% sehingga diperoleh capaian indikator kegiatan sebesar 117,87%. Balai POM di Sanggau melakukan revisi target akhir tahun 2025 dari target yang sebelumnya 11,5% menjadi 12% pada Triwulan II tahun 2025. Sehingga pada Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Sanggau memiliki realisasi sebesar 11,98%, jika dibandingkan dengan target Triwulan yang telah direvisi diperoleh realisasi sebesar 11,5% sehingga diperoleh capaian indikator kegiatan sebesar 104,17%. Pada Triwulan III diperoleh realisasi sebesar 12,64% dari target 12% sehingga diperoleh capaian indikator sebesar 105,33%, dan Triwulan IV diperoleh realisasi sebesar 13,18% dari target 12% sehingga diperoleh capaian indikator kegiatan pada realisasi akhir sebesar 109,86%. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan dapat mempengaruhi pencapaian keberhasilan kegiatan sesuai target yang ditetapkan, yaitu terdapat Obat yang sudah direncanakan untuk diuji guna penambahan ruang lingkup, tetapi tidak ditemukan di peredaran serta pengadaan reagensia yang telah direncanakan mengalami kekosongan stok.

Upaya perbaikan kinerja yang dilakukan oleh Balai POM di Sanggau adalah dengan melakukan verifikasi metode analisis *rapid test* Obat dalam rangka menambah ruang lingkup identifikasi komoditi Obat. Upaya lain adalah peningkatan kompetensi personil untuk meningkatkan pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium dan melakukan pemeliharaan peralatan alat laboratorium yang telah dimiliki Balai POM di Sanggau. Berdasarkan Surat Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) nomor: PR.10.01.10.01.26.01, tanggal 2 Januari 2026, Hal: Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium

Loka dan Balai POM Kabupaten/Kota Sebagai Laboratorium tingkat Tingkat 1 dan Tingkat 2, Balai POM di Sanggau memperoleh nilai dengan rincian komponen sebagai berikut:

Tabel 3.52 Rincian Nilai Tahun 2025 Per Komponen

Komponen	Nilai Pemenuhan 2025
Presentase Pemenuhan SRL (%)	6,58
Presentase Pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium (%)	30,00
Presentase Pemenuhan Standar Peralatan (%)	35,00
Presentase Pemenuhan SKL (%)	13,18

Pada tahun 2025, realisasi kegiatan menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, khususnya dalam pemenuhan ruang lingkup komoditi Pangan dan komoditi Obat. Kondisi ini mendukung tercapainya nilai pemenuhan Laboratorium sesuai indikator yang ditetapkan. Hal ini juga mencerminkan proses perencanaan yang matang dan terstruktur.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian Indikator nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar kemampuan Laboratorium Balai POM di Sanggau sebagai berikut:

1. Perencanaan penambahan ruang lingkup, pengadaan peralatan, dan peningkatan kompetensi.
2. Melakukan komunikasi secara rutin antara ketua tim dan anggota tim laboratorium secara rutin dalam memantau pelaksanaan penambahan ruang lingkup.
3. Terpenuhinya pengadaan sampel dan reagensia yang digunakan untuk penambahan ruang lingkup secara terencana dan tepat waktu.
4. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala menjadi instrumen pengendalian yang efektif.
5. Penambahan Ruang Lingkup (RL) Obat sebanyak 13 RL dan Pangan sebanyak 3 RL.
6. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan mandiri melalui ideas dan pelatihan pengujian secara daring dari PPPOMN.

7. Melakukan penyesuaian target capaian indikator tahun 20025 sesuai dengan hasil desk dengan rorenkeu dan unit pengampu.
8. Pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium oleh pihak ke-3.
9. Melakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan laboratorium.

IKSK 1.14. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan Pangan di sepanjang rantai Pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan yang dilakukan yaitu meliputi:

a. Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah.
b. Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota.
c. Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi *tools* penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.

Adapun Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten/Kota mengisi *tools* penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan.
b. Kabupaten/Kota mengirimkan *tools* penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60).

Dalam mencapai indikator ini diperlukan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

Keterangan:

a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
b) Merupakan Kab/Kota di lingkup wilayah kerja UPT
c) Jumlah target dihitung secara kumulatif
d) Formula Perhitungan

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.53 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.1.14

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100%		**BAIK**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah sebesar 20%, yaitu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 20%, sehingga capaian indikator kegiatan yang diperoleh adalah sebesar 100% atau masuk dalam kategori **"Baik"**. Selain itu, adapun indikator ini merupakan indikator yang baru untuk periode renstra 2025-2029 sehingga tidak terdapat *baseline* data pada tahun sebelumnya untuk menjadi *baseline* target awal renstra di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama renstra, sehingga pengukuran capaian dari UPT belum dapat tergambarkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.1.14

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	20

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada tahun 2024 belum memiliki capaian realisasi, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 20%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi pada tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.55 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 IKSK.1.14

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	100	20%		**PERLU UPAYA KERAS**

Realisasi kinerja Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah sebesar 20% sedangkan target Renstra pada tahun 2029 adalah sebesar 100% sehingga capaian indikator kegiatan diperoleh sebesar 20%. Berdasarkan capaian tersebut, realisasi kinerja tahun 2025 termasuk dalam kategori **"Perlu Upaya Keras"**.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.56 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.1.14

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29	25	**20**

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan pada unit kerja lain dalam klaster yang sama, yaitu Balai POM di Tanjungbalai dan Balai POM di Tabalong. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, realisasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tertinggi dicapai oleh Balai POM di Tabalong sebesar 25%, diikuti oleh Balai POM di Sanggau sebesar 20%, dan Balai POM di Tanjungbalai sebesar 14,29%.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum dilakukan perhitungan pada Triwulan III. Perhitungan realisasi akan dilakukan pada Triwulan IV. Kegiatan Kab/Kota Pangan Aman dilaksanakan dalam bentuk kegiatan advokasi, pendampingan hingga pelaporan kegiatan

yang telah dilaksanakan. Kegiatan Advokasi dilakukan kepada 5 (lima) Kab/Kota di wilayah kerja UPT Balai POM di Sanggau, kemudian dilakukan pendampingan terhadap 1 (satu) Kab/Kota di wilayah kerja UPT Balai POM di Sanggau yaitu Kabupaten Sanggau. Kegiatan pendampingan berjalan lancar dengan koordinasi yang baik antara Dinas Ketahanan Pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan Kabupaten Sanggau, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, dan Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sanggau. Penilaian Kab/Kota Pangan Aman dilakukan terhadap komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pangan Segar Asal Hewan (PSAH), Pangan Segar Asal Ikan (PSAI), Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT), Pangan Olahan Siap Saji (POSS). Dari hasil pendampingan, didapatkan nilai 64,32 dan telah melewati nilai minimum 60 untuk diajukan sebagai Kab/Kota Pangan Aman tahun 2025.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Koordinasi yang baik antar instansi seperti Dinas Ketahanan Pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan Kabupaten Sanggau, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, dan Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sanggau menjadi penunjang keberhasilan kinerja ini. Selain itu dokumentasi yang baik dalam setiap kegiatan juga diperlukan agar dapat menjadi bukti kegiatan telah dilaksanakan dengan baik

IKSK 2.1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT



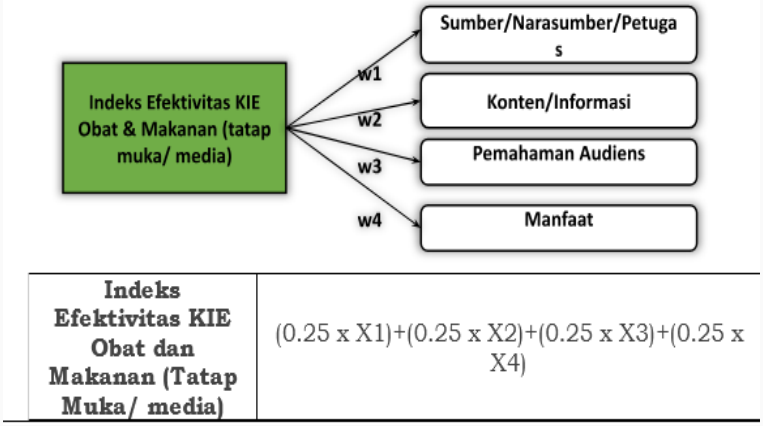
Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden pada survey ini adalah masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei yang dilakukan dapat berupa face to face interview, penyebaran kuesioner dan online survey. Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Adapun indikator pembentuk indeks efektifitas KIE dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.
2. Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	(0.25 x X1)+(0.25 x X2)+(0.25 x X3)+(0.25 x X4)

Indeks efektivitas KIE yang diperoleh akan diinterpretasikan untuk menilai tingkat keefektifan pelaksanaan kegiatan berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 3.58 Tingkat Efektifitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.2.1

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,13	95,46	108,32		**SANGAT BAIK**

Target Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada tahun 2025 adalah 88,13% dengan realisasi indikator kegiatan sebesar 95,46%, sehingga capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 108,32% dengan Kategori **SANGAT BAIK.** Capaian ini menggambarkan bahwa strategi komunikasi, informasi, dan

edukasi (KIE) yang dilaksanakan telah mencapai sasaran dan tujuan secara optimal. serta berjalan sangat efektif sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai keamanan Obat dan makanan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.60 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.2.1

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	97,92	95,46

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, pada tahun 2024 sebesar 97,92%, serta pada tahun 2025 sebesar 95,46%. Terdapat perbedaan cara perhitungan indeks efektifitas KIE dalam aplikasi evaluasikie.pom.go.id tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2025 perhitungan capaian indeks efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan didapatkan melalui rerata dari perolehan nilai indeks survei tatap muka (lingkup rincian ouput Masyarakat yang Ditingkatkan Pengetahuannya Melalui KIE) dan indeks survei media (lingkup RO Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan) yang tidak dilakukan di tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 IKSK.2.1

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95,46	91,65	104,15%		**TERCAPAI/ MELAMPAUI**

Pada periode akhir Renstra 2029 target indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah sebesar 91,65, sedangkan realisasi pada tahun 2025 sebesar 92,97%. Berdasarkan hasil capaian tersebut yang dibandingkan dengan target periode akhir Renstra 2029 maka realisasi kinerja termasuk dalam kategori **TERCAPAI/MELAMPAUI.**

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.2.1

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,81	92,96	95,46

Realisasi indikator kinerja tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Balai POM dalam satu klaster, dimana Balai POM di Sanggau berada di atas target nasional sebesar 86,52%. Berdasarkan realisasi, Balai POM di Sanggau memperoleh realisasi lebih tinggi daripada Balai POM di Tanjung Balai dan Balai POM di Tabalong.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks 95,46 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE langsung dan menggunakan berbagai media yang dinilai dari berbagai aspek. Audiens di wilayah Balai POM di Sanggau mayoritas masih menggemari KIE yang disampaikan oleh narasumber secara lisan dan/atau langsung karena dirasa lebih mudah dipahami dan bermanfaat. Hal ini tergambarkan dari nilai survey efektifitas KIE langsung yang lebih tinggi dibandingkan KIE melalui media. Adapun hal-hal yang mendukung tercapainya realisasi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. KIE langsung (97,29)
   a) Penilaian untuk kategori Narasumber KIE sebesar 97,74
      Nilai ini menunjukkan bahwa narasumber yang bertugas dalam kegiatan KIE langsung dinilai sangat kompeten, menguasai materi, cekatan dan aktifan dalam membantu audiens memperoleh informasi, serta mampu menyampaikan informasi dengan baik dan meyakinkan kepada audiens. Kualitas narasumber yang baik menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan KIE secara langsung.
   b) Penilaian untuk kategori Informasi KIE sebesar 97,83
      Hal ini menggambarkan bahwa materi atau informasi yang disampaikan dalam kegiatan KIE langsung dinilai sangat relevan, akurat, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Penyusunan materi yang baik dan berbasis

pada isu aktual terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menjadi kekuatan utama dalam kategori ini.

c) Penilaian untuk kategori Pemahaman Audiens KIE sebesar 96,74

Nilai pemahaman audiens ini tidak terlepas dari dukungan kualitas narasumber yang kompeten serta materi informasi yang relevan dan mudah dicerna, sebagaimana tercermin dari tingginya nilai pada kedua kategori tersebut. Kombinasi antara penyampaian yang baik oleh narasumber dan konten informasi yang terstruktur turut berkontribusi pada tingkat pemahaman audiens yang tinggi. Ruang interaksi dua arah antara narasumber dan audiens turut berkontribusi signifikan terhadap tingginya tingkat pemahaman dan daya ingat audiens

d) Penilaian untuk kategori Manfaat KIE bagi Audiens KIE sebesar 96,85

Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar audiens merasakan manfaat yang nyata dari kegiatan KIE tatap muka yang telah dilaksanakan, baik dalam meningkatkan pengetahuan maupun mendorong perubahan perilaku terkait penggunaan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.

2. KIE melalui Media (93,63)

a) Penilaian untuk kategori Sumber KIE sebesar 94,48

Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar audiens menilai sumber informasi KIE melalui media sosial, media elektronik, dan media cetak sebagai sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan

b) Penilaian untuk kategori Konten KIE sebesar 95,45

Kategori ini mencakup penilaian terhadap daya tarik tampilan media KIE seperti gambar atau video, kemudahan pemahaman informasi yang disampaikan, serta kesesuaian materi dengan kebutuhan audiens. Tingginya nilai pada kategori ini mencerminkan bahwa konten yang disajikan melalui media dinilai sangat menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Penyusunan konten yang berkualitas dan berbasis pada isu terkini menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan KIE melalui media.

c) Penilaian untuk kategori Pemahaman Audiens KIE sebesar 91,56

Nilai yang lebih rendah dibandingkan kategori lainnya mencerminkan adanya tantangan nyata dalam memastikan retensi pesan pada audiens ketika

informasi disampaikan melalui media. Hal ini dapat dipahami mengingat komunikasi melalui media bersifat satu arah dan tidak memberikan ruang interaksi langsung, sehingga kemampuan audiens untuk mengingat dan memahami pesan secara menyeluruh menjadi lebih terbatas.

d) Penilaian untuk kategori Manfaat KIE bagi Audiens KIE sebesar 93,02.
Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar audiens merasakan manfaat yang signifikan dari informasi yang diperoleh melalui media, baik dalam meningkatkan pengetahuan maupun mendorong kesadaran terkait penggunaan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan benar.

Hasil survei ini menjadi kajian dan masukan bagi Balai POM di Sanggau untuk melaksanakan KIE secara lebih sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas, majemuk, dan frekuensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE langsung maupun KIE melalui media dapat tercapai

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Sanggau sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 antara lain:

1. Sosialisasi definisi operasional indikator dan manual IKU yang dilakukan oleh Ketua Tim pada tanggal 12 Maret 2025 dan dihadiri oleh seluruh pegawai
2. Penyusunan Plan of Action (PoA) terkait pelaksanaan kegiatan KIE secara langsung maupun melalui media pada tanggal 31 Januari 2025
3. Pelaksanaan KIE langsung (offline) pada tanggal 10 Maret 2025 di SMPN 1 Sanggau dengan tema stunting, diikuti oleh 60 orang siswa-siswi. Pada kegiatan ini disampaikan materi terkait 5 Kunci Keamanan Pangan dan stunting serta BPOM Mobile
4. Pelaksanaan KIE langsung (offline) pada tanggal 24 Oktober 2025 di SMPN 2 Sanggau dengan tema Kosmetik, diikuti oleh 20 orang siswa-siswi. Pada kegiatan ini disampaikan materi Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetik Aman serta Cek KLIK
5. Pelaksanaan KIE langsung melalui zoom pada tanggal 29 Oktober 2025 dengan tema stunting, diikuti oleh 20 mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Keling

Kumang Kabupaten Sekadau. Pada kegiatan ini disampaikan materi 5 Kunci Keamanan Pangan dan stunting serta Cek KLIK

6. Sosialisasi terkait Profil BPOM dan Cek KLIK pada kegiatan Ospek yang diselenggarakan MTSN 1 Sanggau, diikuti oleh 128 siswa-siswi pada tanggal 15 Juli 2025
7. Penyuluhan terkait 5 Kunci Keamanan Pangan untuk Sekolah pada kegiatan sosialisasi Sekolah Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sanggau di SMPN 1 Entikong, Kabupaten Sanggau pada tanggal 27 Agustus 2025, diikuti oleh 50 orang siswa dan wali murid.
8. Penyuluhan terkait 5 Kunci Keamanan Pangan untuk Sekolah pada kegiatan sosialisasi Sekolah Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sanggau di SMPN 1 Toba, Kabupaten Sanggau pada tanggal 2 September 2025, diikuti oleh 50 orang siswa dan wali murid.
9. Penyuluhan terkait 5 Kunci Keamanan Pangan untuk Sekolah pada kegiatan sosialisasi Sekolah Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sanggau di SMPN 1 Jangkang, Kabupaten Sanggau pada tanggal 4 September 2025, diikuti oleh 50 orang siswa dan wali murid.
10. Pelaksanaan KIE melalui media selama Januari - Desember 2025 sebanyak 301 konten mandiri dan 137 konten repost pada media sosial Balai POM di Sanggau (Instagram, Facebook, dan X). Konten ini meliputi topik Obat, Pangan, Kosmetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Stunting, serta Publikasi Kinerja.

IKSK 2.2. Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan



Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Tahun 2025 merupakan awal periode renstra yang baru dari tahun 2025-2029, apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak,maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:
   1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
   4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Pada periode Renstra 2025-2029, adanya dinamika kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 disikapi BPOM dengan melakukan perubahan, baik jumlah tahapan yang harus dilakukan dan lokasi lokus intervensi. Balai POM di Sanggau sendiri menyikapi hal tersebut dengan menentukan lokus intervensi di Kabupaten Sanggau dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan program sekolah ini disinergikan dengan program desa dan pasar dengan tujuan agar pelaksanaan program desa, pasar dan sekolah terpadu di setiap kab/kota sehingga dapat membentuk kab/kota pangan aman.

Adapun perhitungan indikator Jumlah Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perhitungan indikator Jumlah Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)

Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) **atau** Nov - Des (TW 4)	25%	Juni - Juli (TW 3) **atau** Nov - Des (TW 4)
Pengawalan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.2.2

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100		**BAIK**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Jumlah Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan pada tahun 2025 yaitu 2 sekolah dari target 2 sekolah, sedangkan capaian diperoleh sebesar 100% atau termasuk dalam kategori **"Baik"**. Perhitungan indikator ini menekankan kepada keselarasan antara timeline pelaksanaan tahapan dengan pedoman yang berlaku yaitu TOR/KAK Pelaksanaan Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan dan pedoman lainnya yang terkait.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.2.2

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	2

Indikator Jumlah Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.63 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 IKSK.2.2

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	3	66,66%		**PERLU UPAYA KERAS**

Pada periode akhir Renstra 2029 target Indikator Jumlah Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan adalah sebesar 3 Sekolah, sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah 2 Sekolah. Berdasarkan hasil capaian tersebut yang dibandingkan dengan target periode akhir Renstra 2029 maka realisasi kinerja termasuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras**

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.2.2

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	2

Realisasi indikator kinerja Jumlah Jumlah Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan pada Unit Kerja lain dalam satu klaster, Balai POM di Sanggau memperoleh realisasi yang sama dengan Balai POM di Tanjung Balai dan Balai POM di Tabalong, yaitu 2 sekolah.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program PJAS merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 mengalami perubahan nomenklatur menjadi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman. Program ini bertujuan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah.

Penyampaian timeline saat dilakukan advokasi, dukungan lintas sektor, serta koordinasi yang baik antara Balai POM di Sanggau, serta lokus intervensi mendukung pelaksanaan program sesuai timeline dan pedoman. Upaya Balai POM di Sanggau dalam menjalankan seluruh tahapan kegiatan secara konsisten terhadap target 2 sekolah yang telah ditetapkan dapat dirincikan sebagai berikut:

a) Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah (skor 25%) dilakukan pada tanggal 30 April 2025. Pada tahapan ini mengundang Stakeholder diantaranya Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Kesra di Kabupaten Sanggau, sekolah yang akan diintervensi dan sekolah perluasan.
b) Sosialisasi Keamanan Pangan (skor 25%) dilakukan pada 09 Mei 2025. Dilakukan sosialisasi kepada 24 orang, terdiri dari 5 orang sekolah intervensi dan 19 orang lokus perluasan.
c) Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (skor 25%) dilakukan pada 21 Mei 2025. Bimbingan teknis dilakukan terhadap 5 orang kader sekolah SDN 09 Sanggau dan 5 orang kader sekolah MTsN 1 Sanggau.
d) Monitoring dan sertifikasi (skor 25%) dilakukan pada 14 Juli 2025. Hasil sertifikasi menunjukkan bahwa seluruh sekolah yang diintervensi memperoleh Sertifikat Sekolah

yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. SDN 09 Sanggau memperoleh nilai 96 dan MTsN 1 Sanggau memperoleh nilai 92.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian tahapan kegiatan berhasil dilaksanakan didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain:

1. Sosialisasi definisi operasional indikator dan manual IKU yang dilakukan oleh Ketua Tim pada tanggal 12 Maret 2025 dan dihadiri oleh seluruh pegawai
2. Penyusunan Plan of Action (PoA) terkait pelaksanaan program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan pada tanggal 31 Januari 2025
3. Koordinasi awal dan komunikasi aktif dengan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau serta Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, dan Kepala Sekolah lokus intervensi sehingga dapat melaksanakan tiap tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan SAPA Sekolah.
4. Advokasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten sebagai komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan seluruh tahapan intervensi.
5. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Kader Keamanan Pangan sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTS
6. Untuk pelaksanaan tahapan monitoring dan evaluasi kader keamanan pangan sekolah yang ditunjukkan dengan adanya SK Tim Keamanan Pangan Sekolah, Komitmen Pimpinan dan dokumen rencana aksi serta adanya kegiatan intervensi yang dilakukan oleh kader keamanan pangan sekolah ke komunitas sekolah diperlukan komitmen yang tinggi dari sekolah dan kader keamanan sekolah yang telah mengikuti bimbingan teknis sebelumnya
7. Untuk pelaksanaan sertifikasi sekolah telah dikoordinasikan dan dikomunikasikan pelaksanaannya dengan baik terkait dengan indikator-indikator penilaian yang harus dicapai oleh masing-masing sekolah terintervensi.

Program/Kegiatan intervensi sekolah yang membudayakan keamanan pangan juga dilaksanakan sebagai kegiatan terpadu bersamaan dengan pelaksanaan program desa pangan aman dan pasar pangan aman berbasis komunitas.. Hal ini bertujuan untuk tersedianya Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi yang merupakan salah satu

langkah untuk menuju Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman sebagai gerakan bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan.

IKSK 2.3. Jumlah Desa Pangan Aman



Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi . Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Adapun capaian indikator ini dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman

.Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu. Untuk pembobotan pada setiap tahapan kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.65 Bobot tiap kegiatan desa pangan aman

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April **atau** Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni **atau** September -Oktober
4.	Monev	20%	Juli **atau** November
5.	Pengawalan	10%	Februari – November
	Total Skor	**100%**	

Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.

Khusus pada tahun 2025, pembobotan Loka POM dan 11 Balai POM baru dilakukan berdasarkan pada progres tahapan di bawah ini. Namun pada tahun 2026-2029 progres tahapan sama dengan progres di Balai Besar dan Balai.

Tabel 3.66 Bobot tiap kegiatan desa pangan aman

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April **atau** Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	25%	Mei – Juni **atau** September -Oktober
4.	Monev	25%	Juli **atau** November
	Total Skor	**100%**	

Catatan: 11 Balai POM baru: 1) Banyumas, 2) Balikpapan, 3) Indragiri Hulu, 4) Dumai, 5) Bima, 6) Sanggau, 7) Tanjungbalai, 8) Tabalong, 9) Ende, 10) Tanjungbalai, 11) Baubau

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.67 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.2.3

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Jumlah desa pangan aman	1	1	100%		**BAIK**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Jumlah desa pangan aman pada tahun 2025 yaitu 1 desa dari target 1 desa, sedangkan capaian diperoleh sebesar 100% atau termasuk dalam kategori **"Baik"**. Perhitungan indikator ini menekankan kepada keselarasan antara timeline pelaksanaan tahapan dengan pedoman yang berlaku yaitu TOR/KAK Pelaksanaan Desa Pangan Aman dan pedoman lainnya yang terkait.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.68 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.2.3

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Jumlah desa pangan aman	-	1

Indikator Jumlah Desa Pangan Aman merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.69 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 IKSK.2.3

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Jumlah desa pangan aman	1	3	33,33%		**PERLU UPAYA KERAS**

Pada periode akhir Renstra 2029 target Indikator Jumlah Desa Pangan Aman adalah sebesar 3 Desa, sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah 1 Desa. Berdasarkan hasil capaian tersebut yang dibandingkan dengan target periode akhir Renstra 2029 maka realisasi kinerja termasuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras**

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.70 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.2.3

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Jumlah desa pangan aman	1	1	1

Realisasi indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman pada Unit Kerja lain dalam satu klaster, Balai POM di Sanggau memperoleh realisasi yang sama dengan Balai POM di Tanjung Balai dan Balai POM di Tabalong, yaitu 1 desa.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 dilaksanakan di 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan merupakan program yang baru dilaksanakan oleh Balai POM di Sanggau pada tahun 2025. Balai POM di Sanggau melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas -komunitas yang ada sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas desa yang diintervensi yaitu IRTP, pelaku usaha ritel, pelaku usaha warung siap saji, PKK/keluarga, sekolah dan Karang Taruna/remaja.

Penyampaian timeline saat dilakukan advokasi, dukungan lintas sektor, serta koordinasi yang baik antara Balai POM di Sanggau, serta lokus intervensi mendukung pelaksanaan program sesuai timeline dan pedoman. Upaya Balai POM di Sanggau dalam menjalankan seluruh tahapan kegiatan secara konsisten terhadap target 1 desa yang telah ditetapkan dapat dirincikan sebagai berikut:

a) Advokasi Kelembagaan Desa (skor 25%) dilakukan pada tanggal 30 April 2025. Pada tahapan ini mengundang Stakeholder diantaranya BAPPERIDA, Tata Pemerintahan Setda Sanggau, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disperindagkop dan Usaha Mikro, Kelurahan yang akan diintervensi keamanan pangan. dan Kelurahan yang tidak termasuk target intervensi yang berada dalam kabupaten yang sama sesuai dengan ketentuan yang ada pada KAK

b) Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) (skor 25%) dilakukan pada tanggal 11 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 5 orang kader (2 orang kader keluarga, 1 orang kader sekolah, dan 2 orang kader Masyarakat)
c) Bimtek Komunitas (skor 25%) dilakukan selama bulan September 2025 secara mandiri oleh para kader. 1 orang kader melakukan bimtek minimal kepada 4 orang komunitas
d) Monitoring dan evaluasi (skor 25%) dilakukan pada 26 November 2025. Kelurahan yang menjadi lokus intervensi menyerahkan dokumen rencana program keamanan pangan di setiap desa yang ditandatangani oleh Pejabat Pemerintah Daerah (Lurah dan Camat)

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian tahapan kegiatan berhasil dilaksanakan didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain:

1. Sosialisasi definisi operasional indikator dan manual IKU yang dilakukan oleh Ketua Tim pada tanggal 12 Maret 2025 dan dihadiri oleh seluruh pegawai
2. Penyusunan Plan of Action (PoA) terkait pelaksanaan program Desa Pangan Aman pada tanggal 31 Januari 2025
3. Koordinasi awal dan komunikasi aktif dan intens dengan, BAPPERIDA, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Sanggau, Dinas Kesehatan dan Kelurahan sehingga dapat melaksanakan tiap tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan Desa Pangan aman
4. Dukungan dari stakeholder terutama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau yang memberikan dukungan dan respon yang positif dan aktif terhadap koordinasi dan komunikasi sehingga capaian target tiap tahapan program dapat terlaksana dengan baik.
5. Advokasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten sebagai komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan seluruh tahapan intervensi.
6. Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Kader Keamanan Pangan Desa dan Bimbingan Teknis kepada Komunitas Desa.
7. Untuk pelaksanaan tahapan monitoring dan evaluasi kader keamanan pangan desa yang ditunjukkan dengan adanya SK Tim Keamanan Pangan Desa dan adanya kegiatan intervensi yang dilakukan oleh kader keamanan pangan serta dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri

Program/Kegiatan intervensi desa pangan aman juga dilaksanakan sebagai kegiatan terpadu bersamaan dengan pelaksanaan program sekolah yang membudayakan keamanan pangan dan pasar pangan aman berbasis komunitas.. Hal ini bertujuan untuk tersedianya Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi yang merupakan salah satu langkah untuk menuju Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman sebagai gerakan bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan.

IKSK 2.4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas



Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar , pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di

dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Adapun capaian indikator ini dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas. Untuk pembobotan pada setiap tahapan kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.71. Bobot tiap tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas

No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10-%	Februari - Juli
	Total Skor	**100%**	

Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan Loka POM berdasarkan pada progres tahapan dibawah, sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

Tabel 3.72. Pembobotan kegiatan pasar pangan aman Loka POM

No	Tahapan	Skor Loka POM	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni

No	Tahapan	Skor Loka POM	Jadwal
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	25%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	25%	Mei- Juli
5	Pengawalan	-	Februari - Juli
	Total Skor	**100%**	

Catatan:

a. Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.

b. Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.73 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.2.4

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100%		**BAIK**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2025 yaitu 1 pasar dari target 1 pasar, sedangkan capaian diperoleh sebesar 100% atau termasuk dalam kategori **"Baik"**. Perhitungan indikator ini menekankan kepada keselarasan antara timeline pelaksanaan tahapan dengan pedoman yang berlaku yaitu TOR/KAK Pelaksanaan Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas dan pedoman lainnya yang terkait.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.73 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.2.4

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	1

Indikator Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.74 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 IKSK.2.4

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100%		**TERCAPAI/ MELAMPAUI**

Pada periode akhir Renstra 2029 target Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah sebesar 1 Pasar, sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah 1 pasar. Berdasarkan hasil capaian tersebut yang dibandingkan dengan target periode akhir Renstra 2029 maka realisasi kinerja termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.75 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.2.4

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1

Realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Unit Kerja lain dalam satu klaster, Balai POM di Sanggau memperoleh realisasi yang sama dengan Balai POM di Tanjung Balai dan Balai POM di Tabalong, yaitu 1 pasar.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan program ini dinilai dari ketepatan waktu pelaksanaan serta kesesuaian pelaksanaan tahapan dengan pedoman yang berlaku. Penyampaian timeline saat

dilakukan advokasi, dukungan lintas sektor, serta koordinasi yang baik antara Balai POM di Sanggau, serta lokus intervensi mendukung pelaksanaan program sesuai timeline dan pedoman. Upaya Balai POM di Sanggau dalam menjalankan seluruh tahapan kegiatan secara konsisten terhadap target 1 pasar yang telah ditetapkan dapat dirincikan sebagai berikut:

a) Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar (skor 25%) dilakukan pada tanggal 30 April 2025. Pada tahapan ini mengundang BAPPERIDA, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Pasar yang akan diintervensi keamanan pangan dan Pasar yang tidak termasuk target intervensi yang berada dalam kabupaten yang sama sesuai dengan ketentuan yang ada pada KAK
b) Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar (skor 25%) dilakukan pada tanggal 20 Mei 2025. Dilakukan bimtek kepada 20 peserta yang merupakan petugas pengelola Pasar Sentral yaitu dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar dan Pedagang Pasar Sentral di Kabupaten Sanggau.
c) Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar (skor 25%) dilakukan melalui media sosial pada bulan Juni 2025. Balai POM di Sanggau membuat 5 konten keamanan pangan yang selanjutnya dibagikan oleh petugas pengelola Pasar kepada Pedagang Pasar melalui media sosial.
d) Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi (skor 25%) dilakukan pada tanggal 18 Juli 2025. Hasil pengawasan dan monev yaitu dengan melakukan pengawasan sejumlah 40 sampel dengan parameter Cek KLIK, melakukan penilaian pasar serta menyusun rencana program keamanan pangan oleh petugas pasar.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian tahapan kegiatan berhasil dilaksanakan didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain:

1. Sosialisasi definisi operasional indikator dan manual IKU yang dilakukan oleh Ketua Tim pada tanggal 12 Maret 2025 dan dihadiri oleh seluruh pegawai
2. Penyusunan Plan of Action (PoA) terkait pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tanggal 31 Januari 2025

3. Koordinasi awal dan komunikasi aktif dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau sehingga dapat melaksanakan tiap tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
4. Dukungan dari stakeholder, terutama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau yang memberikan dukungan dan respon yang positif dan aktif terhadap koordinasi dan komunikasi sehingga capaian target tiap tahapan program dapat terlaksana dengan baik
5. Advokasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten sebagai komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan seluruh tahapan intervensi.
6. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan serta Sosialisasi kepada Komunitas Pasar melalui media sosial
7. Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dilakukan oleh petugas Pasar yang telah ditunjuk untuk melakukan pengawasan Cek KLIK dan penyusunan rencana aksi untuk kegiatan tahun 2026

Program/Kegiatan intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas juga dilaksanakan sebagai kegiatan terpadu bersamaan dengan pelaksanaan program sekolah yang membudayakan keamanan pangan dan desa pangan aman. Hal ini bertujuan untuk tersedianya Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi yang merupakan salah satu langkah untuk menuju Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman sebagai gerakan bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan.

IKSK 3.1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan



Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan olahan merupakan bagian dari Sasaran Kegiatan Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu. Adapun ruang lingkup, standar dan kriteria UMKM yang didampingi adalah sebagai berikut:

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada Pangan Olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
   a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
   b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
   a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
   - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
   - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
   b) UMKM pada Kosmetik adalah industri Kosmetik golongan A dan industri Kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.

b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

1) Usaha yang sudah mempunyai produk Obat bahan alam dan/atau Obat Kuasi namun belum memiliki izin edar;
2) *Start-up* yang akan memproduksi Obat bahan alam dan/atau Obat Kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke Obat bahan alam;
4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan *Startup* / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriterja sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

1) UMKM yang memproduksi Kosmetik;
2) UMKM Kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
3) UMKM Kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
4) UMKM Kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor

Prioritas pemilihan UMKM Kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1) Pangan Olahan

Tabel 3.76. Bobot tiap tahapan kegiatan Pendampingan UMKM Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
				dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK Pangan Olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

Catatan: Setiap UPT BPOM melaporkan hasil setiap tahapan ke Dit. PMPUPO cc Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

2) Obat Bahan Alam

Tabel 3.77. Bobot tiap tahapan kegiatan Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM Obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3) Kosmetik [(2)]

Tabel 3.78. Bobot tiap tahapan kegiatan Pendampingan UMKM Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan

				dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Cara Perhitungan dan Formula :

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

A = $\frac{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ \ yang\ memperoleh\ IP-CPPOB}{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$

B = $\frac{jumlah\ rekomendasi\ sertifikat\ CPOTB\ Bertahap}{Jumlah\ UMKM\ OBA\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$

C = $\frac{Jumlah\ rekomendasi\ SPA\ CPKB}{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ \ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.79 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.3.1

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	11,11	11,11	100%		**BAIK**

Target Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah **11,11**% dengan realisasi indikator kegiatan sebesar 11,11%, sehingga capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 100% dengan kategori **BAIK.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.80 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.3.1

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	-	11,11

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan tahun 2024 tidak memiliki realisasi, serta pada tahun 2025 realisasi sebesar 11,11

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.81 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 IKSK.3.1

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	11,11	100	-		

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah **11,11**%, sedangkan target Renstra 2029 sebesar 100, sehingga capaian indikator kegiatan tersebut tidak bisa dihitung**.**

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.82 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.3.1

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di.Sanggau
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	8,82	14,29	11,11

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan unit kerja lain dalam satu klaster, realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Balai POM di Tanjungbalai sebesar 8,82, Balai POM di Tabalong sebesar 14,29, dan Balai POM di Sanggau sebesar 11,11

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Balai POM di Sanggau tahun 2025, diperoleh capaian sebesar 100% dan capaian sudah memenuhi target yang ditetapkan dan mendapatkan kriteria “Baik”. Penyebab keberhasilan ini dikarenakan telah dilakukan kegiatan pendampingan UMKM sesuai dengan ketentuan juknis pendampingan UMK. Pada tahun 2025 seluruh UMKM yang didampingi bergerak pada sektor produksi Pangan Olahan, terdiri dari 2 (dua) UMK dengan skala usaha kecil dan 1 (satu) UMK dengan skala mikro.

Tahapan yang telah dilakukan pada awal tahun sebagai pembuka kegiatan ini yaitu melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait keamanan pangan dan registrasi Pangan Olahan yang dilakukan secara online terhadap pelaku usaha/UMKM dari 5 (lima) kabupaten.

Tahapan selanjutnya melakukan penetapan target UMKM. Setelah tahapan ini ditetapkan, dilakukan bimbingan teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang dilakukan secara daring

terhadap 3 target UMKM tersebut. Diberikan materi sesuai dengan kurikulum yang terdapat pada Juknis Pendampingan Pangan Olahan. Diberikan *pre-test* dan *post-test* sebagai metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan atau kemampuan peserta sebelum dan sesudah diberikan bimbingan teknis.

Tahapan selanjutnya dalam rangkaian kegiatan pendampingan adalah pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi sarana bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah ditetapkan sebagai target pendampingan. Pada tahap ini, setiap UMK yang menjadi sasaran program akan mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan selama proses pemenuhan persyaratan berlangsung hingga diterbitkannya izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mampu memahami, menyiapkan, serta memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam proses pengajuan izin penerapan CPPOB, baik dari aspek administratif maupun teknis di lapangan. Pendampingan yang diberikan mencakup beberapa aspek penting, yaitu pendampingan penyusunan dan kelengkapan dokumen, pendampingan penerapan CPPOB terkait sarana dan prasarana produksi (sarpras), serta pelaksanaan kegiatan coaching clinic terkait penggunaan sistem e-sertifikasi. Pada pendampingan dokumen, tim pendamping memberikan bimbingan kepada pelaku UMK dalam menyiapkan berbagai dokumen yang dipersyaratkan, seperti dokumen profil usaha, alur proses produksi, dokumen sanitasi dan higiene, serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi. Pendampingan ini dilakukan agar dokumen yang disusun oleh pelaku usaha telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat mempermudah proses verifikasi pada tahap selanjutnya. Selanjutnya, pada pendampingan penerapan CPPOB yang berkaitan dengan sarana dan prasarana produksi, tim pendamping melakukan pembinaan secara langsung kepada pelaku UMK terkait pemenuhan standar fasilitas produksi yang baik dan sesuai dengan prinsip CPPOB. Kegiatan ini meliputi pemberian arahan terkait tata letak ruang produksi, kebersihan lingkungan produksi, ketersediaan fasilitas sanitasi, pengendalian proses produksi, hingga penerapan praktik higiene bagi pekerja yang terlibat dalam proses pengolahan pangan. Melalui pendampingan ini, diharapkan pelaku usaha dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap kondisi sarana produksinya sehingga memenuhi standar yang dipersyaratkan. Selain itu, pelaku UMK juga mendapatkan fasilitasi melalui kegiatan coaching clinic e-sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan sistem pengajuan sertifikasi secara elektronik. Pada kegiatan ini, tim pendamping memberikan bimbingan teknis mengenai

tata cara pendaftaran akun, pengisian data usaha, pengunggahan dokumen persyaratan, serta proses pengajuan permohonan sertifikasi melalui sistem e-sertifikasi yang telah disediakan. Dengan adanya kegiatan coaching clinic ini, diharapkan pelaku UMK dapat lebih mudah mengikuti proses pengajuan sertifikasi secara mandiri dan memahami setiap tahapan yang harus dilalui dalam sistem tersebut.

Tahapan terakhir merupakan tahapan pelaporan yang dilakukan pada *spreadsheet* pelaporan UMKM dari Direktorat PMPU PO serta pelaporan tahunan pendampingan UMKM.

Semua tahapan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan juknis pendampingan UMKM berikut dengan deadline masing-masing tahapan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan terhadap kegiatan UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOTB), Kosmetika yang Baik (CPKB), dan/atau Industri Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada Balai POM di Sanggau tahun 2025 yang mencapai 100% dan memenuhi target dengan kriteria “Baik” dipengaruhi oleh beberapa faktor.

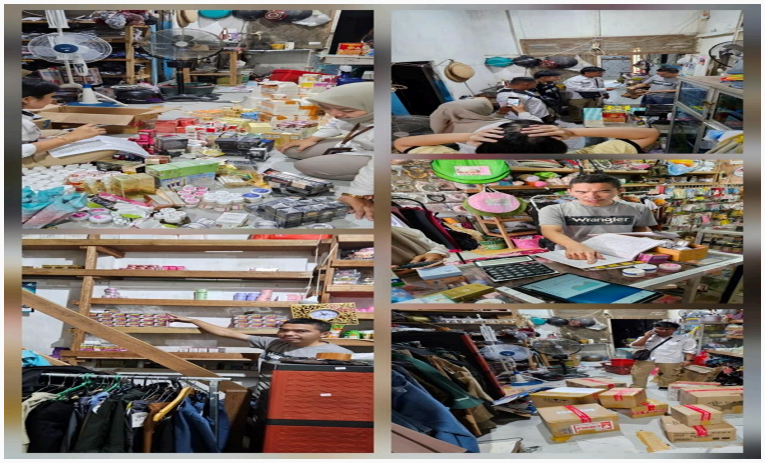
Pertama, pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis (juknis) pendampingan UMK yang berlaku. Kepatuhan terhadap pedoman tersebut memastikan setiap tahapan kegiatan dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan sesuai standar yang ditetapkan.

Kedua, seluruh tahapan dalam proses pendampingan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rentang waktu yang telah direncanakan. Tahapan tersebut meliputi kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha, penetapan target UMK yang akan didampingi, pelaksanaan bimbingan teknis, kegiatan pendampingan dan fasilitasi penerapan standar, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) serta pelaporan.

Ketiga, adanya koordinasi dan komitmen yang baik antara tim pendamping dengan pelaku UMKM sehingga proses pembinaan dapat berjalan efektif dan pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh rekomendasi sertifikat.

Dengan terlaksananya seluruh tahapan pendampingan secara optimal, indikator kinerja yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

IKSK 4.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT



Pada tahun 2025, BPOM di Sanggau telah berhasil mencapai sasaran kegiatan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BPOM di Sanggau. Sesuai dengan Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Defenisi IKSK dari Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam mencapai indikator ini diperlukan formula perhitungan sebagai berikut :

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut = ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *softcopy.*

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.83 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.4.1

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	100	104,17		**SANGAT BAIK**

Target Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah 100% dan realisasi indikator kegiatan sebesar 100 sehingga capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 104,17% dengan kriteria **SANGAT BAIK.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.84 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.4.1

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	**100**	**100**

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada tahun 2024 sebesar 100%, dan realisasi Persentase

Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada tahun 2025 sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.84 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 IKSK.4.1

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	100	100%		**TERCAPAI/ MELAMPAUI**

Realisasi atas Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah 100, sedangkan target Renstra 2029 sebesar 100, sehingga capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 100% dengan Kategori **TERCAPAI/MELAMPAUI.**

Meskipun penyidikan Perkara merupakan suatu hal yang tidak dapat sepenuhnya di prediksi kedepannya, namun tetap diperlukan upaya dan evaluasi dalam pencapaian indikator keberhasilan serta menetapkan perencanaan yang tepat. Kemudian dalam evaluasi perencanaan diperlukan pertimbangan dalam menetapkan jumlah target agar potensi tidak tercapainya target dapat diatasi sehingga tidak mengganggu capaian realisasi ditahun yang akan datang.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.85 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.4.1

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	100	100

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan unit kerja lain dalam satu klaster, realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sanggau sebesar 100%, realisasi ini berada di posisi yang sama capaian nilainya, seperti di Balai POM di Tanjungbalai dan Balai POM di Tabalong sama yaitu sebesar 100%.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada dasarnya, kejahatan khususnya di bidang Obat dan Makanan tidak dapat diprediksi kapan, dimana, dan berapa jumlahnya yang akan terjadi. BPOM di Sanggau sebagai unit kerja yang salah satu tugas dan fungsinya melindungi masyarakat dari kejahatan di bidang Obat dan Makanan diharuskan melakukan perlindungan tersebut terlepas dari target perkara yang tercapai. Hal ini menjadi perhatian bersama, bahwa memberikan rasa aman kepada masyarakat adalah sebuah keutamaan.

BPOM di Sanggau dalam menjalankan tugas dan fungsi Penindakan selalu bersentuhan langsung dengan pelanggaran dan/atau kejahatan, tentunya hal tersebut sangat sulit diprediksi, sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran dan/atau kejahatan, BPOM di Sanggau harus menindaklanjuti dengan cepat dan tanggap, karena salah satu misi Badan POM Republik Indonesia adalah meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh masyarakat, sehingga menjadi suatu kewajiban bagi BPOM di Sanggau, apabila terjadi suatu pelanggaran dan/atau kejahatan untuk menindaklanjutinya, walaupun hal tersebut dapat mempengaruhi realisasi serta dapat melebihi target.

Tahapan dan Upaya yang dilakukan BPOM di sanggau untuk mencapai target perkara dalam proses penyidikan dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), upaya yang telah dilakukan dalam penerbitan SPDP yaitu berkoordinasi dengan Polres di wilayah kerja Balai POM di Sanggau terkhusus di Polres Melawi yang menjadi wilayah tempat Kejadian perkara untuk memberikan surat pengantar SPDP agar dapat segera diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sintang dan kepada tersangka sebagai pemberitahuan bahwa penyidikan atas suatu perkara telah dimulai, pengiriman SPDP harus dilakukan secara tepat waktu / tidak lebih dari 7 hari dalam kalender agar tidak ada cacat hukum di dalam proses penyidikan;
2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) upaya yang telah dilakukan agar Tahap I dapat tercapai antara lain Penyidik BPOM di

Sanggau memastikan bahwa berkas perkara telah tersusun secara sistematis, terpenuhinya alat bukti yang sah, unsur formil dan materiil telah terpenuhi serta peran aktif penyidik dalam berkoordinasi dengan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Sintang yang menangani perkara;

3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) upaya yang telah dilakukan untuk memperoleh P21 dari Kejaksaan Negeri Sintang adalah memastikan bahwa sebanyak minimal 2 alat bukti yang sah telah terpenuhi, syarat formil seperti BAP dan surat perintah yang lengkap, unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan sudah terpenuhi, menindaklanjuti petunjuk penuntut umum yang tertuang dalam P19 dan secara intensif membangun komunikasi yang baik agar persepsi antara penyidik dengan penuntut umum dapat sejalan ; dan
4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sintang, upaya yang telah dilakukan yaitu : membangun komunikasi aktif untuk memperoleh informasi terbitnya P21 dari Jaksa peneliti yang menyatakan bahwa berkas sudah lengkap, melakukan koordinasi dari korwas PPNS Polres Melawi terkait surat pengantar, memastikan seluruh barang bukti lengkap sesuai dengan daftar barang bukti di dalam berkas perkara, kemudian Penyidik dapat berkomunikasi dengan jaksa penuntut untuk menentukan waktu penyerahan tersangka serta barang bukti di Kejaksaan setempat.

Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja di Balai POM di Sanggau tahun 2025 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal yang menjadi faktor Tercapainya target kinerja tingkat efektifitas keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai POM di Sanggau pada Tahun 2025 tentu tidak luput dari terjalinnya komunikasi yang baik agar koordinasi berkesinambungan dalam membantu kegiatan penyidikan agar semua proses dapat berjalan dengan cepat dan lancar, mengingat bahwa proses penyidikan membutuhkan dukungan dari seluruh aparat penegak hukum antara Balai POM di Sanggau dengan Lintas Sektor terkait seperti Korwas PPNS Polres setempat, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dsb. Sehingga didapat hasil capaian perkara pada bulan November Tahun 2025 telah sampai di Tahap II. Capaian kinerja tersebut tentu menjadi motivasi untuk memberikan hasil yang lebih baik di tahun berikutnya.

Kendala dan tantangan tidak luput dari bagian dalam pencapaian target, seperti tantangan maraknya peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara daring yang dipengaruhi

oleh kemajuan teknologi dan potensi tersangka melarikan diri sehingga terbitnya DPO yang mempengaruhi proses penyidikan. Hal ini menjadi salah satu peran pentingnya membangun komunikasi serta koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penyidikan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Realisasi jumlah perkara pada tahun 2025 sebanyak 1 (satu) perkara dengan komoditi Kosmetika tanpa izin edar, Obat tradisional tanpa izin edar dan Obat tanpa izin edar. persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 100% dengan kategori Sangat Baik. Sebelum melakukan Operasi Penindakan, Pada tanggal 25 Juni 2025 Kepala Balai POM Sanggau terlebih dahulu melakukan Koordinasi dengan Kepala dan jajaran di Kantor Kepolisian Resor Melawi. Pelaksanaan Operasi Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dilakukan pada tanggal 16 Juli 2025, penertiban dilakukan terhadap sarana distribusi yang menjual berbagai jenis Sediaan Farmasi Tanpa izin edar, yang disamarkan dengan modus toko pakaian, aneka plastik dan peralatan rumah tangga sehingga terhadap sarana tidak dapat dilakukan pemeriksaan serta pembinaan. Tahapan-tahapan dalam proses penyidikan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan indikator yaitu :

1. Penerbitan SPDP No : SPDP/01-25/BPOM-PPNS.27B/VII/2025 Tanggal 17 Juli 2025 yang merupakan hasil dari Gelar Perkara dilaksanakan di Polres Melawi pada tanggal 17 Juli 2025
2. Dilakukan Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Berkas Perkara No BP/01/BALAIPOM/VIII/2025/PPNS Tanggal 12 Agustus 2025 yang disertai dengan Surat Pengantar dari Polres Melawi.
3. Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Penerbitan P21 Nomor B-2513/O.1.12/Eku.1/10/2025 oleh Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 17 Oktober 2025 yang menyatakan bahwa Hasil penyidikan perkara pidana atas nama AWANG Anak dari CONG CIN PIN (alm) yang melanggar Pasal 435 UU NO 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sudah lengkap.

4. Koordinasi dengan Korwas PPNS dalam hal memberikan pendampingan dalam kegiatan Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) dan menjalankan komunikasi intensif dengan Jaksa Penutut untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan Tahap II oleh PPNS Balai POM di Sanggau kepada Kejaksaan Negeri Sintang yang dilakukan pada tanggal 12 November 2025.

Perencanaan yang berkesinambungan dimulai dari pengumpulan bahan keterangan, pendalaman informasi, operasi penindakan dan proses penyidikan perkara yang dilakukan secara sistematis menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian atas Indikator yang sudah ditetapkan.

IKSK 5.1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar



Indikator Persentase Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang di selesaikan sesuai standar merupakan salah satu Indikator baru pada Periode Renstra tahun 2025-2029. Defenisi Operasional pada Indikator ini dijelaskan sebagai berikut :

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber

Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
   1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
   2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Cara Perhitungan dan formula :

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.86 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.5.1

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111,11%		**Tidak dapat disimpulkan**

Target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah 90% dan realisasi indikator kegiatan sebesar 100% sehingga capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 111,11% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.87 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.5.1

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	-	100

Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar merupakan salah satu indikator yang baru ditetapkan pada periode Renstra tahun 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan periode renstra sebelumnya. Pada periode tahun 2025 realisasi atas Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar diperoleh sebesar 100%.

Sebagai indikator baru, dalam pencapaian target belum ditemukan kesulitan/kendala yang berarti sehingga dalam pemenuhan target dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang sudah ditetapkan.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.88 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 IKSK.5.1

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai	100	94	111,11%		**TERCAPAI / MELAMPAUI**

Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar merupakan salah satu Indikator yang baru ditetapkan pada periode Renstra tahun 2025-2025. Namun pada tahun 2025 Balai POM di Sanggau

mencapai nilai sebesar 100, sedangkan target Renstra tahun 2029 hanya sebesar 94, sehingga capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 111,11% dengan Kategori **TERCAPAI/MELAMPAUI** sehingga realisasi kinerja telah memenuhi dan berada di atas target akhir periode Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.89 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.5.1

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai	95,22	100	100

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan unit kerja lain dalam satu klaster, realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai Balai POM di Tanjungbalai sebesar 95,22, Balai POM di Tabalong sebesar 100 dan Balai POM di Sanggau sebesar 100.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan di wilayah kerja di Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 telah memenuhi target awal yang telah ditetapkan, yaitu 111,11 % dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Pada tahun 2025, Balai POM di Sanggau telah menyusun 12 Laporan Profiling Siber, 1 Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal dan 1 Laporan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Pada dasarnya, kejahatan khususnya di bidang Obat dan Makanan tidak dapat diprediksi kapan, dimana, dan berapa jumlahnya yang akan terjadi. BPOM di Sanggau sebagai unit kerja yang salah satu tugas dan fungsinya melindungi masyarakat dari kejahatan di bidang Obat dan Makanan diharuskan melakukan perlindungan tersebut hingga di dunia maya yang dalam perkembangan teknologi digital dapat diakses oleh siapa saja tanpa memandang Batasan ruang serta waktu sehingga Hal ini menjadi perhatian bersama,

bahwa memberikan rasa aman kepada masyarakat adalah sebuah keutamaan, dimanapun kejahatan tersebut terjadi.

Untuk mencapai realisasi tahun 2025, upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring melalui kegiatan Patroli siber dan Penjejakan Digital (Profilling Siber) serta melaporkannya dengan tepat waktu pada Aplikasi Dashboard Penindakan.
2. Menyusun dan menganalisis laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal Obat dan Makanan serta melaporkannya melalui Srikandi secara tepat waktu.
3. Mengumpulkan bahan keterangan dan menyusun analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dan dilaporkan melalui persuratan dengan tepat waktu.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Perencanaan penyusunan Laporan profiling siber dilakukan setiap bulan melalui pemantauan secara daring kemudian dituangkan dalam bentuk laporan profiling siber yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal disusun berdasarkan Analisis yang dikirimkan serta Rekomendasi yang diberikan kepada UPT. Dasar dalam penyusunan Laporan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kajian/analisis tren kerawanan yang menggambarkan wilayah kerja UPT dengan hasil Output yaitu memprediksi tren kejahatan, mengidentifikasi perkembangan modus kejahatan, menggambarkan potensi kerawanan kejahatan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut yang perlu diambil sebagai deteksi dini. Melaksanakan penelusuran secara daring, pengumpulan data, mengidentifikasi peta kerawanan kejahatan, mengolah hingga menganalisis data, serta pembahasan dengan diskusi merupakan faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target.

Hal yang menjadi faktor tercapainya target kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar yaitu :

1. Penyusunan target sarana/akun yang akan di profiling siber dan dilaporkan di Aplikasi dashboard Penindakan dilakukan dengan konsisten serta tepat waktu
2. Menetapkan batas waktu / timeline dalam pelaporan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaporan ke pusat.
3. Menindaklanjuti Rekomendasi Cegah Tangkal yang dikirimkan ke UPT dengan melakukan langkah-langkah taktis meliputi : pemeriksaan terhadap sarana, pengambilan sampel, melakukan kegiatan pengujian, kegiatan intelijen pembinaan terhadap pelaku usaha / masyarakat hingga melaksanakan operasi penindakan.
4. Berkoordinasi dan berkomunikasi aktif dengan PIC Laporan di pusat untuk memastikan bahwa apabila terdapat suatu kendala dalam penyusunan laporan, PIC dapat memberikan solusi sehingga tidak berpengaruh dalam pemenuhan target yang ditetapkan.

IKSK 6.1. Indeks Pelayanan Publik UPT

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik. Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik secara periodik. Salah satunya melalui penilaian kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang secara teknis kembali diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2. Profesionalitas SDM (25%);
3. Sarana Prasarana (18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);

5. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6. Inovasi (12%).

Penilaian PEKPPP di Lingkungan BPOM 2025 dilakukan dengan metode pengisian kuesioner melalui aplikasi evortala.pom.go.id yang mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Penilaian dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Terdapat 3 (tiga) jenis kuesioner yang digunakan dalam Penilaian PEKPPP, antara lain:

1. Formulir F-01. Diperuntukkan dan diisi oleh unit penyelenggara pelayanan yang menjadi lokus penilaian, untuk memperoleh data perspektif.
2. Formulir F-02. Diisi oleh evaluator atau penilai berdasarkan data dukung yang dilampirkan unit penyelenggara pelayanan publik dan hasil wawancara dan verifikasi data untuk memperoleh nilai yang objektif.
3. Formulir F-03. Diisi oleh minimal 10 pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi. Dari ketiga formulir tersebut dilakukan pembobotan Formulir F02 dan Formulir F03 untuk mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik, dengan persentase F02: F03 yaitu 75%: 25%. Nilai PEKPP yang didapatkan akan dikategorikan sesuai dengan ketentuan berikut:

Tabel 3.90 Katagori Nilai PEKPP

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.91 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.6.1

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51	4,93	109,31		**Sangat Baik**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT pada tahun 2025 yaitu sebesar 4,93 dari target yang ditetapkan 4,51, sedangkan capaian diperoleh sebesar 109,31% atau termasuk dalam kategori **"Sangat Baik"**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.92 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.6.1

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	4,93

Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.93 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 IKSK.6.1

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,93	4,7	104,89%		**TERCAPAI/ MELAMPAUI**

Pada periode akhir Renstra 2029 target Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT adalah sebesar 4,7, sedangkan realisasi pada tahun 2025 sebesar 4,93. Berdasarkan hasil capaian tersebut yang dibandingkan dengan target periode akhir Renstra 2029 maka realisasi kinerja termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.94 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.6.1

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,38	4,97	4,93

Realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT pada Balai POM dalam satu klaster, dimana Balai POM di Sanggau yang berada diatas target nasional sebesar 4,27. Berdasarkan realisasi, Balai POM di Sanggau memperoleh realisasi lebih tinggi daripada Balai POM di Tanjung Balai dan dan sedikit lebih rendah dari Balai POM di Tabalong.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Aspek Profesionalisme SDM (nilai 5)

   Balai POM di Sanggau telah menetapkan standar pelayanan publik melalui Keputusan Kepala Balai POM di Sanggau Nomor HK.02.01.19C.05.25.58 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Sanggau yang ditetapkan pada 15 Mei 2025 . Standar pelayanan Balai POM di Sanggau telah memenuhi 14 (empat belas) komponen, jenis layanan sudah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di lingkungan BPOM. Balai POM di Sanggau dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik telah melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagaimana tercantum dalam daftar hadir kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2024. Unsur instansi terkait diwakili oleh Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sanggau. Unsur akademisi atau praktisi diwakili oleh PSDKU Politeknik Negeri Pontianak di Sanggau, sedangkan organisasi masyarakat sipil diwakili oleh Persaudaraan Melayu Serumpun dan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Sanggau. Masyarakat pengguna layanan diwakili oleh IKMers Kabupaten Sanggau, dan unsur media massa turut hadir melalui perwakilan Radio Republik Indonesia (RRI) Entikong serta media lokal. Pelibatan lintas unsur tersebut menunjukkan komitmen Balai POM di Sanggau dalam memastikan bahwa standar pelayanan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat.

   Dalam rangka menilai sekaligus meningkatkan kualitas layanan, Balai POM di Sanggau secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan menggunakan instrumen kuesioner yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil pelaksanaan SKM

dipublikasikan secara terbuka melalui enam (6) media publikasi, yaitu media cetak, media elektronik, media sosial, website resmi sanggau.pom.go.id, aplikasi layanan, serta portal Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN). Publikasi tersebut menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas Balai POM di Sanggau dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Balai POM di Sanggau telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin, baik setiap bulan maupun tahunan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil SKM bulanan dan tahunan yang telah dilaksanakan kemudian disusun dalam bentuk laporan serta dijadikan dasar untuk merancang kegiatan tindak lanjut guna meningkatkan mutu pelayanan.

2. Aspek Kebijakan Pelayanan (nilai 5)

   Balai POM di Sanggau memberikan pelayanan kepada masyarakat baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja sebagai bentuk komitmen dalam memastikan pelayanan publik yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan jam pelayanan ini dituangkan dalam Standar Pelayanan Publik (SPP) dan dipublikasikan secara terbuka melalui berbagai media. Pelayanan tatap muka di Kantor Balai POM di Sanggau dilaksanakan setiap Senin–Kamis pukul 08.00–16.30 WIB dan Jumat pukul 08.00–16.00 WIB, tanpa jeda istirahat karena pegawai melaksanakan istirahat secara bergilir (shift). Selain itu, Balai POM di Sanggau juga memberikan pelayanan tatap muka di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sanggau setiap Rabu dan Kamis pukul 08.00 15.30 WIB. Informasi mengenai jam layanan dipublikasikan secara luas melalui berbagai kanal, seperti layar PC pelayanan publik, media cetak di area front office, media sosial Instagram (@bpom.sanggau), website resmi sanggau.pom.go.id, serta layanan WhatsApp (WA) ULPK, yang menunjukkan keterbukaan informasi dan kesiapan petugas dalam memberikan layanan tanpa jeda.

   Selain memberikan pelayanan sesuai jam kerja, Balai POM di Sanggau juga melakukan penambahan waktu layanan di luar jam kerja pada hari kerja apabila terdapat kebutuhan mendesak dari masyarakat, seperti pelayanan sertifikasi pada Senin, 22 Juli 2025 yang dilakukan setelah jam layanan berakhir. Di samping itu, Balai POM di Sanggau juga melaksanakan pelayanan di luar hari kerja pada kondisi tertentu, antara lain melalui kegiatan Mobil Laboratorium Keliling “Cek Produkmu

Bersama BPOM" yang dilaksanakan pada Minggu, 19 Januari 2025 di Taman Aronk Belopa, Kabupaten Sanggau, serta kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Masyarakat bersama Komisi IX DPR RI pada Minggu, 25 Mei 2025 di GOR SMK Amaliyah, Kabupaten Sekadau. Pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut mencerminkan komitmen Balai POM di Sanggau dalam memberikan pelayanan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Balai POM di Sanggau telah menetapkan Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Balai POM di Sanggau sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kode perilaku tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai POM di Sanggau Nomor HK.02.02.27B.06.25.85 tanggal 3 Juni 2025, yang menjadi landasan moral dan etika bagi setiap petugas dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik mencakup beberapa aspek utama, yaitu hak dan kewajiban petugas, larangan, penghargaan, dan sanksi. Dalam bagian larangan, secara tegas diatur larangan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta larangan melakukan diskriminasi dalam bentuk apa pun terhadap masyarakat pengguna layanan. Penerapan kode perilaku ini diharapkan dapat memperkuat budaya kerja yang berakhlak, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan lingkungan pelayanan yang transparan, adil, dan akuntabel di Balai POM di Sanggau. Balai POM di Sanggau tidak hanya menerapkan sistem penghargaan bagi pegawai berprestasi, tetapi juga menumbuhkan budaya pelayanan prima sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Penerapan budaya pelayanan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip motto dan budaya kerja ASN, yaitu BerAKHLAK dan PIKKIR, serta memperkuat nilai-nilai tersebut melalui budaya pelayanan 5S (Sambut dengan Senyum, Salam, dan Semangat untuk memberikan Solusi). Implementasi budaya pelayanan diatur melalui Nota Dinas Nomor KP.09.03.27B.26B4.07.25.50 tanggal 1 Juli 2025 tentang Seragam Petugas Layanan Publik Balai POM di Sanggau, yang menegaskan pentingnya tampilan profesional dan identitas pelayanan.

Petugas pelayanan publik diwajibkan mengenakan seragam dengan identitas nama dan pin SAMER (Solutif, Anti Korupsi, Melayani, Efektif dan Efisien, Responsif). Motto SAMER, yang terinspirasi dari bunga khas Kabupaten Sanggau yaitu Sabang Merah, menjadi simbol semangat dalam memberikan pelayanan yang solutif dan

berintegritas. Selain itu, Balai POM di Sanggau juga memiliki maskot “Bang Samet”, yang merepresentasikan keberagaman budaya Melayu, Tionghoa, dan Dayak di Kalimantan Barat sebagai cerminan pelayanan publik yang inklusif dan harmonis.

3. Aspek Sarana Prasarana (nilai 5)

   Balai POM di Sanggau menyediakan berbagai fasilitas pelayanan publik untuk mendukung kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses bagi seluruh pengguna layanan. Area parkir tersedia untuk kendaraan roda dua dan roda empat, dilengkapi dengan CCTV, atap pelindung, penitipan helm, petugas parkir (security), serta karcis parkir manual bagi pengunjung. Selain itu, ruang tunggu pelayanan didesain agar nyaman dan ramah pengguna, dilengkapi kursi tunggu prioritas dan pendingin ruangan (AC) sebagai fasilitas wajib. Fasilitas tambahan yang disediakan antara lain televisi, bahan bacaan, air minum, hotspot/Wi-Fi, pengisi daya baterai (charger booth), serta mesin antrean berlayar monitor untuk memperlancar proses layanan. Untuk menunjang kebersihan dan kenyamanan, Balai POM di Sanggau juga menyediakan toilet yang layak pakai bagi pria dan wanita, dilengkapi dengan wastafel, air bersih, sabun, tisu, ember, dan tempat sampah. Seluruh fasilitas ini dipelihara secara rutin melalui monitoring dan evaluasi kebersihan oleh petugas khusus. Balai POM di Sanggau berkomitmen memberikan layanan yang ramah terhadap semua kalangan, termasuk dengan menyediakan ruang tunggu prioritas, area parkir beratap, dan fasilitas umum yang bersih, aman, serta mudah diakses. Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan inklusif dan berkeadilan, Balai POM di Sanggau menyediakan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan, seperti kursi roda, jalan landai dengan pegangan rambat, guiding block, toilet dan loket khusus, ruang tunggu prioritas, ruang laktasi, dan arena bermain anak. Selain itu, tersedia alat bantu tuna rungu (hearing aid) dan tunanetra (tongkat sensor), serta petugas pemandu dan video selamat datang dengan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Fasilitas front office juga dilengkapi dengan petugas layanan khusus, meja dan kursi pengguna, bahan cetak informasi publik, buku tamu manual, layar informasi digital, serta bahan bacaan terkait Obat dan makanan. Seluruh fasilitas tersebut menggambarkan komitmen Balai POM di Sanggau dalam mewujudkan pelayanan publik yang bermutu, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (nilai 4,7)

   Subsite UPP BPOM telah disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang dikelola oleh masing-masing UPP dengan domain pom.go.id. Sistem

Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Balai POM di Sanggau diselenggarakan dalam dua bentuk, yaitu non elektronik dan elektronik. SIPP non elektronik meliputi pelayanan lisan di Kantor Balai POM dan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sanggau, serta penyebaran informasi melalui media cetak seperti koran, brosur, leaflet, spanduk, dan papan pengumuman. Melalui berbagai media tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi layanan secara langsung maupun melalui bahan publikasi yang mudah diakses di ruang publik. Sementara itu, SIPP elektronik tersedia dalam dua jenis: berbasis intranet/lokal dan internet. Layanan intranet ditampilkan melalui layar monitor di ruang pelayanan ULPK, sedangkan layanan internet dapat diakses melalui situs resmi https://sanggau.pom.go.id yang telah terintegrasi dengan SIPP Nasional (SIPPN) di laman https://sippn.menpan.go.id. Website SIPP Balai POM di Sanggau juga telah memenuhi kriteria sebagai kanal pelayanan digital yang efektif dan terpercaya, yaitu mudah dioperasikan, mudah diakses, kompatibel, merupakan kanal resmi pemerintah (domain .go.id), serta memiliki navigasi yang mudah dipahami oleh pengguna. Dalam pengelolaannya, pemutakhiran data dan informasi kanal digital Balai POM di Sanggau belum dilakukan setiap hari. Balai POM di Sanggau juga melengkapi sistem informasinya dengan berbagai unsur pendukung seperti data standar pelayanan, pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR, survei kepuasan masyarakat, penilaian kinerja petugas, serta FAQ, disertai kanal tambahan seperti pengaduan WBS, layanan chat online, e-LHKPN, link perizinan, dan JDIH/Regulasi, guna memastikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan (nilai 5)

   Balai POM di Sanggau telah menyediakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana konsultasi serta pengaduan guna mendukung layanan publik yang transparan dan responsif. Fasilitas tersebut meliputi kotak saran yang ditempatkan di area pelayanan dan dibuka setiap bulan, ruang khusus pengaduan yang terpisah dari front office untuk menjaga privasi, serta petugas layanan informasi dan pengaduan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 150 Tahun 2025 dan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Sanggau Nomor OT.03.01.27B.06.25.94 Tahun 2025. Selain itu, disediakan pula air minum dan snack gratis bagi pengguna layanan, serta register konsultasi dan pengaduan melalui buku tamu dan aplikasi SimpelLPK untuk pencatatan dan dokumentasi setiap laporan yang masuk.

Fasilitas layanan konsultasi dan pengaduan dapat diakses secara tatap muka maupun daring. Layanan tatap muka tersedia di Kantor Balai POM di Sanggau dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sanggau, dengan ruang konsultasi yang nyaman dan terpisah dari area front office. Sementara itu, layanan daring dapat diakses melalui email (loka_sanggau@pom.go.id), telepon (0564-2027066), WhatsApp (0853-8783-0799), media sosial (Instagram, Facebook, dan X), serta website resmi https://sanggau.pom.go.id dan aplikasi pengaduan mandiri. Selain itu, Balai POM di Sanggau juga terhubung dengan kanal SP4N-LAPOR sebagai bagian dari sistem nasional pengelolaan pengaduan publik.

6. Aspek Inovasi (nilai 4,5)

   Balai POM di Sanggau memiliki dua inovasi pelayanan publik utama, yaitu Help Desk Barang Bawaan/Tentengan di PLBN Entikong yang diluncurkan sejak Juli 2022, dan Aplikasi SiPintar (Pendampingan Industri Rumah Tangga Pangan) sejak Juli 2023. Kedua inovasi tersebut memiliki dukungan sumber daya dan keberlanjutan melalui alokasi pada POK Balai POM di Sanggau masing-masing, yakni MAK 3165.BKB.001.051.B.52413 dan MAK 3165.QIC.004.053.H.524113 untuk pengawasan perbatasan, serta MAK 3165.QDG.001.051.A untuk kegiatan bimbingan teknis pendampingan UMKM. Keduanya merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas layanan publik, pengawasan perbatasan, dan pemberdayaan pelaku usaha pangan di wilayah kerja Sanggau .

   Inovasi SiPintar merupakan aplikasi berbasis website yang menjadi wadah informasi dan pendampingan bagi pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk memahami dan menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPB). Aplikasi ini dikembangkan dalam upaya transformasi digital layanan publik, mendorong kemandirian pelaku usaha dalam melakukan audit mandiri, serta memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Rumah BUMN Kabupaten Sanggau. Implementasi dilakukan melalui serangkaian tahapan mulai dari penyusunan rencana, pengembangan aplikasi dan QR code, uji coba bersama stakeholder, sosialisasi, hingga pemasangan QR code di sarana produksi dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sanggau.

   Dampak penerapan SiPintar menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pemahaman dan penerapan CPPB oleh pelaku usaha, yang berimbas pada naiknya persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan serta peningkatan capaian kinerja Balai POM di Sanggau. Keberlanjutan inovasi ini didukung oleh kesiapan sumber

daya manusia dan anggaran setiap tahun, serta diperkuat dengan kegiatan monitoring, evaluasi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menjaga konsistensi penerapan dan pengembangan aplikasi. Dengan demikian, kedua inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memperkuat peran Balai POM di Sanggau sebagai penggerak utama pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di wilayah perbatasan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator Indeks Pelayanan Publik UPT antara lain:

a) Sosialisasi definisi operasional indikator dan manual IKU yang dilakukan oleh Ketua Tim pada tanggal 12 Maret 2025 dan dihadiri oleh seluruh pegawai
b) Penyusunan Rencana kerja terkait peningkatan kualitas pelayanan publik pada tanggal 31 Januari 2025
c) Balai POM di Sanggau bergabung secara aktif dengan Mall Pelayanan Publik sehingga Masyarakat mudah mengakses pelayanan publik, baik untuk layanan sertifikasi, layanan permintaan informasi, maupun layanan pengaduan terkait Obat dan Makanan
d) Publikasi berbagai kanal permintaan informasi dan pengaduan terkait Obat dan makanan serta jadwal pelayanan yang telah ditetapkan
e) Pelaksanaan FKP yang konsisten dengan mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi: (1) tokoh masyarakat; (2) akademisi; (3) pelaku usaha; (4) LSM serta melibatkan (5) media massa yang diharapkan juga menjadi corong dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
f) Menetapkan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan dengan mempertimbangka masukan yang didapatkan saat FKP
g) Penyediaan sarana prasarana pelayanan publik khususnya terkait kebutuhan kelompok rentan seperti kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, dan sebagainya
h) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat setiap bulan dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil survey tersebut
i) Melakukan pengelolaan konsultasi dan pengaduan Balai POM di Sanggau dengan melakukan monitoring dan evaluasi konsultasi dan pengaduan

j) Melakukan edukasi Obat dan Makanan kepada Masyarakat secara konsisten dengan memanfaatkan melalui berbagai media : media sosial, media elektronik, dan media luar ruang.

IKSK 7.1. Nilai AKIP UPT BPOM



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
b. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

   Cara Perhitungan Dan Formula :

   Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

   (1) Perencanaan Kinerja;
   (2) Pengukuran Kinerja;
   (3) Pelaporan Kinerja;
   (4) Evaluasi Kinerja Internal;

(5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Tabel 3.95. Bobot Komponen Penilaian AKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

Tabel 3.96. Predikat nilai AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang.

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sejalan dengan berbagai regulasi terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, terdapat pedoman yang menjadi acuan bagi BPOM di Sanggau dalam melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan Evaluasi SAKIP di Lingkungan BPOM dan Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan guna mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.97 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.7.1

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kriteria
Nilai AKIP UPT BPOM	76	75,63	99,51%		**BAIK**

Target Nilai AKIP UPT BPOM Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah 76 dan realisasi indikator kegiatan sebesar 75,63 sehingga capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 99,51% dengan kriteria **BAIK**.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor PI.04.71.7.01.26.03 tanggal 5 Januari 2026 perihal Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 dan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor

PI.04.71.7.01.26.32 tanggal 27 Januari 2026 perihal Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025, atas implementasi SAKIP BPOM di Sanggau dapat dikategorikan BB (Sangat Baik) dengan perolehan nilai sebesar 75,63 dan masih dibawah rata-rata nilai Nasional 78,48.

Capaian ini merupakan fondasi yang kuat untuk ditingkatkan pada periode mendatang. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek dalam komponen penilaian yang belum optimal, guna memastikan target pada tahun berikutnya dapat tercapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.98 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.7.1

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Nilai AKIP UPT BPOM	75,55	75,63

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Nilai AKIP UPT BPOM tahun 2024 sebesar 75,55 dan tahun 2025 sebesar 75,63. Dengan kenaikan sebesar 0,08 poin. Meskipun kenaikan yang terjadi relatif kecil, pertumbuhan angka realisasi dari 75,55 menjadi 75,63 tetap menjadi indikator penting dalam upaya penguatan birokrasi. Hasil ini akan menjadi dasar evaluasi untuk mengidentifikasi komponen penilaian yang dapat dipacu lebih maksimal pada periode mendatang.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.90 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 IKSK.7.1

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Nilai AKIP UPT BPOM	75,63	80	94,53%		**Akan Tercapai**

Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah 75,63, sedangkan target Renstra sebesar 80, capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 94,53% dengan Kategori **Akan Tercapai**. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Balai POM di Sanggau akan mencapai dan berada pada jalur yang tepat (*on track*) dalam memenuhi target jangka menengah organisasi. Dalam mencapai capaian indikator kinerja tersebut

perlu adanya perbaikan perbaikan secara konsisten pada seluruh komponen penilaian akuntabilitas kinerja, sehingga diperlukan penguatan strategi dengan penguatan kapasitas SDM, perbaikan perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi secara berkala serta rencana dan alternatif solusi yang intensif dalam peningkatan akuntabilitas agar dapat mencapai target di akhir renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.92 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.7.1

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Nilai AKIP UPT BPOM	74,78	77,97	75,63

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan unit kerja lain dalam satu klaster, realisasi Nilai AKIP UPT BPOM Balai POM di Tanjungbalai sebesar 74,78, Balai POM di Tabalong sebesar 77,97 dan Balai POM di Sanggau sebesar 75,63. Data ini menjadi sarana *benchmarking* yang penting bagi Balai POM di Sanggau untuk memetakan kualitas akuntabilitas kinerjanya dibandingkan unit kerja setingkat. Capaian yang berada di posisi tengah klaster ini memberikan gambaran objektif mengenai ruang perbaikan yang masih tersedia guna mencapai standar kinerja tertinggi di dalam klaster.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pada Tahun 2025 nilai AKIP Balai POM di Sanggau adalah 75,63 dengan kategori BB (Sangat Baik) namun belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 76, sehingga capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 99,51% dengan kriteria **BAIK**. Implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dengan perbandingan nilai sebagai berikut:

Tabel 3.93 Perbandingan Nilai SAKIP

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	24	17,28	17,76
2.	Pengukuran Kinerja	24	17,28	17,28
3.	Pelaporan Kinerja	12	8,88	8,88
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	14,80	14,80
5.	Capaian Kinerja	20	17,31	16,91
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**75,55**	**75,63**
Predikat			**BB**	**BB**

Dari hasil penilaian SAKIP di atas apabila dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat penurunan pada komponen capaian kinerja yang menurun sebesar 0,4 dari tahun 2024. Penurunan nilai pada komponen capaian kinerja tersebut dikarenakan terdapat 2 IKU yang tidak tercapai pada tahun 2024 yaitu persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dan Nilai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Ketidaktercapaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat disebabkan oleh adanya 1 sampel pangan fortifikasi tepung terigu yang hasil pengujiannya tidak memenuhi syarat yaitu pada parameter uji PK vitamin B9 (asam folat), sedangkan pada nilai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) disebabkan kurangnya monitoring pengawasan terhadap Penetapan Status Pengguna yang belum diajukan atas mutasi aset masuk yang bernilai besar pada akhir tahun. Untuk 4 komponen penilaian lainnya juga masih terdapat kelemahan seperti yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Balai POM di Sanggau sebagai berikut:

Kelemahan dalam Komponen Perencanaan Kinerja:

- Pada Lapkin Tahun 2024, matriks analisis tren belum sesuai dengan SK Pedoman SAKIP Nomor 83 Tahun 2025.
- Penyusunan target kinerja jangka menengah Tahun 2025 s.d. 2029 dan jangka pendek Tahun 2025 belum didukung dengan Kertas Kerja Penetapan Target yang disusun secara memadai.
- Terdapat personel yang terlibat dalam lebih dari 5 (lima) Tim Kerja. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas, fokus kerja pegawai, dan optimalisasi kinerja masing-masing Tim Kerja.

- Adanya perbedaan penyajian nomenklatur Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada dokumen-dokumen pendukung dalam tahap perencanaan (Renstra, SK IKU, RKT, PK, RAPK).
- Terdapat perbedaan penyajian target kinerja pada dokumen perencanaan kinerja (Renstra, RKT, PK, RAPK)
- Matriks tren dan analisis realisasi indikator sasaran kegiatan dan anggaran belum menyajikan analisis mengenai anggaran dan realisasi anggaran, capaian realisasi anggaran dan penilaian capaian anggaran Tahun 2020 s.d. 2024.
- Belum terdapat data dukung yang menunjukkan bahwa penyusunan MPH telah dilaksanakan melalui dialog kinerja oleh Satker.

Kelemahan dalam komponen Pengukuran Kinerja:

- Dokumen Manual IKU Tahun 2025-2029 yang telah disusun belum mencantumkan kode indikator kinerja.
- SOP pengumpulan data kinerja belum terdapat mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data berupa tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan, dan tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan.
- Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Tahun 2025 belum dilengkapi dengan data dukung undangan, daftar hadir dan dokumentasi rapat evaluasi internal tersebut.
- Kertas kerja perhitungan capaian kinerja belum memadai karena belum dilengkapi dengan penjelasan mengenai sumber data (raw data) yang digunakan dan belum menguraikan secara jelas terkait tahapan dan metode pelaksanaan cleansing data atas data yang digunakan.
- Tidak tertibnya pengisian kendala/hambatan dan rencana aksi setiap bulan pada aplikasi SIMETRIS. Selain itu rencana aksi tindak lanjut yang telah disusun tidak relevan dan berkesinambungan setiap periode.

Kelemahan dalam komponen Pelaporan Kinerja:

- Laporan Kinerja Interim Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025 serta Laporan Kinerja Tahun 2024 belum dilengkapi dengan tanggal pengesahan dokumen.
- Terdapat perbedaan penyajian informasi data target serta realisasi kinerja pada dokumen pelaporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja (PK, RAPK, RHPK, LEI, Lapkin 2024, Simetris).

- Belum terdapat Matriks Rencana Aksi atas capaian Program/Kegiatan Triwulan.
- Laporan Kinerja Tahun 2024 belum menginformasikan terkait upaya yang telah dilaksanakan dan/atau penyebab kegagalan terkait efisiensi/inefisiensi atas penggunaan sumber daya di masing-masing capaian sasaran/indikator kinerja/kegiatan.
- Terdapat rekomendasi yang tidak selaras antara Lapkin Triwulan I 2025 dengan Lapkin Triwulan II 2025.
- Lapkin Tahun 2024 belum menyajikan analisis mendetail mengenai pemanfaatan informasi kinerja.

Kelemahan dalam komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal::

- Belum terdapat sertifikat peningkatan kompetensi terkait SAKIP dari Kepala Satker selaku Penanggung Jawab Tim Penyelenggara SAKIP.
- LEI Triwulan II Tahun 2025 belum menyajikan informasi terkait rekomendasi, Rencana Tindak lanjut (RTL), dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal pada periode sebelumnya.
- Analisis penyebab ketidaktercapaian dijelaskan karena belum terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis karena menunggu finalisasi manual IKU “UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT” oleh PMPU PO dan arahan pimpinan. Namun, berdasarkan hasil analisis penyebab ketidaktercapaian indikator yang telah disajikan dan ditetapkan tidak relevan sebagai penyebab utama. Selain itu, rencana tindak lanjut yang dirumuskan belum mampu mengatasi kendala dan hambatan yang ada dan meningkatkan capaian target kinerja.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam komponen penilaian SAKIP tersebut, Balai POM di Sanggau akan melakukan rekomendasi sesuai Laporan Hasil Evaluasi sebagai berikut:

Rekomendasi dalam komponen Perencanaan Kinerja:

- Menyusun Laporan Kinerja Tahunan sesuai dengan Pedoman SAKIP BPOM.
- Melengkapi kertas kerja penetapan target yang telah disusun dengan argumen dan perhitungan yang logis, hasil analisis atas capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga layak dijadikan dasar penetapan target, serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan.

- Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja.
- Melaksanakan dan mendokumentasikan kegiatan dialog kinerja secara memadai.

Rekomendasi dalam komponen Pengukuran Kinerja:

- Memperbaiki dokumen Manual IKU dengan mencantumkan kode indikator kinerja atau menyesuaikan dengan perubahan format sesuai kondisi terkini sesuai kebijakan BPOM.
- Menyusun/menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria tahapan pengumpulan data kinerja yang baik, salah satunya melengkapi pemenuhan kriteria terkait mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data.
- Melakukan evaluasi internal secara berkala dan melengkapi administrasi pelaksanaan evaluasi internal seperti undangan rapat, daftar hadir dan dokumentasi rapat, serta notulen atau laporan.
- Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja.
- Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS telah lengkap termasuk penyajian informasi terkait kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.

Rekomendasi dalam komponen Pelaporan Kinerja:

- Melengkapi tanggal pengesahan sesuai kondisi aktual pada masing-masing dokumen pelaporan kinerja.
- Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen pelaporan kinerja untuk memastikan keselarasan data antar dokumen pelaporan kinerja.
- Memastikan seluruh pengisian data pelaporan dan evaluasi kinerja pada dokumen LEI maupun Lapkin telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait Matriks Rencana Aksi atas capaian Program/Kegiatan Triwulan, keselarasan rekomendasi antar periode, upaya yang telah dilakukan dan/atau penyebab terkait efisiensi/inefisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai masing-masing capaian sasaran/indikator kinerja/kegiatan, dan pemanfaatan informasi kinerja pada

Lapkin Tahunan atau menyesuaikan dengan perubahan informasi sesuai kondisi terkini sesuai kebijakan BPOM.

Rekomendasi dalam komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

- Memastikan bahwa seluruh Tim Pengelola SAKIP satker telah mendapatkan pelatihan yang memadai, minimal melalui keikutsertaan pelatihan pada aplikasi IDEAS PPSDM.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian permasalahan/kendala/hambatan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target.
- Memastikan hasil analisis penyebab kegagalan pencapaian indikator dan RTL yang ditetapkan relevan, selaras dan berkesinambungan pada setiap periode.

Atas poin-poin rekomendasi tersebut, Balai POM di Sanggau merangkum kendala, rekomendasi serta rencana tindak lanjut ke dalam tabel berikut:

Tabel 3.94. Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai resiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai AKIP UPT BPOM	Pada Lapkin Tahun 2024, matriks analisis tren belum sesuai dengan SK Pedoman SAKIP Nomor 83 Tahun 2025.	Menyusun Laporan Kinerja Tahunan sesuai dengan Pedoman SAKIP BPOM.	Menyusun Laporan Kinerja Tahunan sesuai dengan Pedoman SAKIP BPOM.	Februari 2027	Y	S-01-01	Dokumen pendukung AKIP berupa laporan evaluasi internal dan laporan kinerja tidak sesuai dengan pedoman
		Penyusunan target kinerja jangka menengah Tahun 2025 s.d. 2029 dan jangka pendek Tahun 2025 belum didukung dengan Kertas Kerja Penetapan Target yang disusun	Melengkapi kertas kerja penetapan target yang telah disusun dengan argumen dan perhitungan yang logis, hasil analisis atas capaian kinerja tahun-tahun	Melengkapi kertas kerja penetapan target yang telah disusun	TW I 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai resiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		secara memadai.	sebelumnya sehingga layak dijadikan dasar penetapan target, serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan.					
		Terdapat personel yang terlibat dalam lebih dari 5 (lima) Tim Kerja. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas, fokus kerja pegawai, dan optimalisasi kinerja masing-masing Tim Kerja.	Menyusun tim kerja dengan mempertimbangkan keterlibatan personel tidak lebih dari 5 tim kerja	Menyusun tim kerja dengan mempertimbangkan keterlibatan personel tidak lebih dari 5 tim kerja	Januari 2026	T	-	-
		Adanya perbedaan penyajian nomenklatur Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada dokumen-dokumen pendukung dalam tahap perencanaan (Renstra, SK IKU, RKT, PK, RAPK).	Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja.	Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja	TW I 2026	Y	S-01-02	Penyajian data capaian indikator antara RAPK, Laporan Internal, dan Laporan kinerja tidak selaras
		Terdapat perbedaan penyajian target kinerja pada dokumen perencanaan kinerja (Renstra, RKT, PK, RAPK)	Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja.	Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja	TW I 2026	Y	S-01-02	Penyajian data capaian indikator antara RAPK, Laporan Internal, dan Laporan kinerja tidak selaras
		Belum terdapat data dukung yang menunjukkan bahwa penyusunan MPH telah dilaksanakan melalui dialog kinerja oleh Satker.	Melakukan dialog kinerja untuk penyusunan MPH dengan melibatkan seluruh pegawai	Melakukan dialog kinerja	TW I 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai resiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Dokumen Manual IKU Tahun 2025-2029 yang telah disusun belum mencantumkan kode indikator kinerja.	Memperbaiki dokumen Manual IKU dengan mencantumkan kode indikator kinerja atau menyesuaikan dengan perubahan format sesuai kondisi terkini sesuai kebijakan BPOM.	Memperbaiki dokumen Manual IKU dengan mencantumkan kode indikator kinerja	TW I 2026	T	-	-
		SOP pengumpulan data kinerja belum terdapat mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data berupa tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan, dan tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan.	Menyusun/menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria tahapan pengumpulan data kinerja yang baik, salah satunya melengkapi pemenuhan kriteria terkait mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data.	Menyusun/menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria tahapan pengumpulan data kinerja yang baik	April 2026	T	-	-
		Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Tahun 2025 belum dilengkapi dengan data dukung undangan, daftar hadir dan dokumentasi rapat evaluasi internal tersebut.	Melengkapi administrasi pelaksanaan evaluasi internal seperti undangan rapat, daftar hadir dan dokumentasi rapat, serta notulen atau laporan.	Melengkapi administrasi pelaksanaan evaluasi internal	TW III 2025	Y	S-01-01	Dokumen pendukung AKIP berupa laporan evaluasi internal dan laporan kinerja tidak sesuai dengan pedoman
		Kertas kerja perhitungan capaian kinerja belum memadai karena belum dilengkapi dengan penjelasan mengenai sumber data (raw data) yang digunakan dan belum menguraikan secara jelas terkait tahapan dan	Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan	Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja	TW I 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai resiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		metode pelaksanaan cleansing data atas data yang digunakan.	kinerja.					
		Tidak tertibnya pengisian kendala/hambatan dan rencana aksi setiap bulan pada aplikasi SIMETRIS. Selain itu rencana aksi tindak lanjut yang telah disusun tidak relevan dan berkesinambungan setiap periode.	Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS telah lengkap termasuk penyajian informasi terkait kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.	Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS telah lengkap	TW I 2026	T	-	-
		Laporan Kinerja Interim Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025 serta Laporan Kinerja Tahun 2024 belum dilengkapi dengan tanggal pengesahan dokumen.	Melengkapi tanggal pengesahan sesuai kondisi aktual pada masing-masing dokumen pelaporan kinerja.	Melengkapi tanggal pengesahan pada dokumen pelaporan kinerja	TW III 2025	Y	S-01-01	Dokumen pendukung AKIP berupa laporan evaluasi internal dan laporan kinerja tidak sesuai dengan pedoman
		Terdapat perbedaan penyajian informasi data target serta realisasi kinerja pada dokumen pelaporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja (PK, RAPK, RHPK, LEI, Lapkin 2024, Simetris).	Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen pelaporan kinerja untuk memastikan keselarasan data antar dokumen pelaporan kinerja	Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen pelaporan kinerja	TW I 2026	Y	S-01-02	Penyajian data capaian indikator antara RAPK, Laporan Internal, dan Laporan kinerja tidak selaras
		1. Belum terdapat Matriks Rencana Aksi atas capaian Program/Kegiatan Triwulan.	Memastikan seluruh pengisian data pelaporan dan evaluasi kinerja pada dokumen LEI	Memastikan seluruh pengisian data pelaporan dan evaluasi	TW I 2026	Y	S-01-01	Dokumen pendukung AKIP berupa laporan evaluasi internal dan laporan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai resiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		2. LEI Triwulan II Tahun 2025 belum menyajikan informasi terkait rekomendasi, Rencana Tindak lanjut (RTL), dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal pada periode sebelumnya.	telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait Matriks Rencana Aksi atas capaian Program/Kegiatan Triwulan.	kinerja pada dokumen LEI telah lengkap				kinerja tidak sesuai dengan pedoman
		Terdapat rekomendasi yang tidak selaras antara Lapkin Triwulan I 2025 dengan Lapkin Triwulan II 2025.	Memastikan seluruh pengisian data pelaporan dan evaluasi kinerja pada dokumen Lapkin telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait keselarasan rekomendasi antar periode	Memastikan seluruh pengisian data pelaporan dan evaluasi kinerja pada dokumen Lapkin telah lengkap	TW I 2026	Y	S-01-01	Dokumen pendukung AKIP berupa laporan evaluasi internal dan laporan kinerja tidak sesuai dengan pedoman
		Belum terdapat sertifikat peningkatan kompetensi terkait SAKIP dari Kepala Satker selaku Penanggung Jawab Tim Penyelenggara SAKIP.	Memastikan bahwa seluruh Tim Pengelola SAKIP satker telah mendapatkan pelatihan yang memadai, minimal melalui keikutsertaan pelatihan pada aplikasi IDEAS PPSDM.	Memastikan bahwa seluruh Tim Pengelola SAKIP satker telah mendapatkan pelatihan yang memadai	TW I 2026	T	-	-
		Penyebab ketidaktercapaian indikator yang telah disajikan dan ditetapkan tidak relevan sebagai penyebab utama. Selain itu, rencana tindak lanjut yang dirumuskan belum mampu mengatasi kendala dan	Memastikan hasil analisis penyebab kegagalan pencapaian indikator dan RTL yang ditetapkan relevan	Memastikan hasil analisis penyebab kegagalan pencapaian indikator dan RTL yang ditetapkan relevan	TW I 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai resiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		hambatan yang ada dan meningkatkan capaian target kinerja.						

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung nilai AKIP Balai POM di Sanggau antara lain :

a. Pemaparan manual IKU setiap indikator yang dilakukan oleh Ketua Tim pada tanggal 12 Maret 2025 dan dihadiri oleh seluruh pegawai
b. Balai POM di Sanggau telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah Tahun 2025-2029, jangka pendek Tahun 2025 dan dokumen perencanaan anggaran TA 2025.
c. Seluruh dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun telah dipublikasikan melalui subsite Balai POM Sanggau yang mudah diakses oleh stakeholder.
d. Telah menyusun Mekanisme/SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja berupa SOP Mikro Pengumpulan Pengukuran Data Kinerja Dan Penyusunan Laporan
e. Pimpinan Satuan Kerja terlibat dalam pembahasan capaian kinerja pada rapat evaluasi internal yang dilaksanakan setiap triwulan di Tahun 2024 dan 2025.
f. Mengawal capaian indikator kinerja melalui monitoring dan evaluasi secara rutin dalam pencapaian target serta melakukan analisa kendala dan hambatan dalam pencapaian target kinerja sebagai bentuk mitigasi
g. Adanya upaya peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai POM di Sanggau, melalui Bimbingan Teknis SAKIP oleh Inspektorat dalam rangka perbaikan dan penguatan implementasi SAKIP sesuai dengan pedoman dan memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Balai POM di Sanggau Tahun 2025.

IKSK 7.2 Nilai Kinerja Anggaran UPT



Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
    1. Revisi DIPA (bobot 10%)
    2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
    3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
    4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
    5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
    6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
    7. Capaian Output (bobot 25%)
    8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
b. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
    1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
    2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara Perhitungan dan Formulasi :

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Tabel 3.94 Katagori Konversi NKA

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.95 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.7.2

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100		**BAIK**

Target Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah 5 dan realisasi indikator kegiatan sebesar 5 sehingga capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 100% dengan kriteria **BAIK**. Berdasarkan data kinerja tahun 2025, UPT BPOM di Kabupaten Sanggau telah memenuhi seluruh target indikator kinerja anggaran yang ditetapkan. Konsistensi antara target dan realisasi ini menandakan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap standar operasional yang berlaku.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.96 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.7.2

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	**92,38**	**95,76 (skala 5)**

Meskipun penilaian pada tahun 2025 berdasarkan konversi nilai, akan tetapi untuk penilaian IKPA dan EKA sebagai komponen nilai NKA tidak berubah dari tahun lalu, jika diperbandingkan realisasi kinerja tersebut, realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Balai POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 sebesar 92,28 dan padai tahun 2025 sebesar 95,76 (skala 5). Capaian kinerja anggaran tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar **3,38 poin** dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan dari **92,38** (2024) ke **95,76** (2025) mengindikasikan bahwa langkah-langkah dalam pelaksanaan anggaran yang diterapkan telah membuahkan hasil yang lebih baik dan lebih akuntabel.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.97 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 IKSK.7.2

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100%		**TERCAPAI/MELAMPAUI**

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Balai POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2025 adalah 5, sedangkan target Renstra 2029 sebesar 5, sehingga capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 100 dengan kategori **TERCAPAI/MELAMPAUI**. Secara kumulatif, realisasi kinerja anggaran menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan berkualitas. Kenaikan nilai sebesar 3,38 poin dari tahun 2024 ke 2025 menjadi bukti konkret adanya perbaikan sistematis. Dengan capaian realisasi tahun 2025 yang telah menyentuh angka 5 (skala 5), instansi berhasil mempertahankan kriteria BAIK dan memenuhi target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra hingga tahun 2029.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.98 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.7.2

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Kabupaten Sanggau dengan unit kerja lain dalam satu klaster, realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Balai POM di Tanjungbalai, Balai POM di Tabalong dan Balai POM di Sanggau sama yaitu sebesar 5. Realisasi kinerja Balai POM di Kabupaten Sanggau menunjukkan hasil yang kompetitif di tingkat klaster. Dengan skor 5, unit kerja ini mampu bersaing dan sejajar dengan Balai POM di Tanjungbalai serta Balai POM di Tabalong. Hal ini menegaskan kredibilitas Balai POM

Sanggau dalam mempertahankan akuntabilitas keuangan yang setara dengan unit kerja dalam satu klaster.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai POM di Sanggau mencapai angka 95,76 dan masuk dalam skala 5 (Sangat Baik), pencapaian ini tidak lepas dari penyusunan rencana kegiatan yang matang, eksekusi kegiatan sesuai rencana dan target, serta monitoring dan evaluasi kegiatan maupun anggaran yang dilakukan secara rutin. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Sanggau dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2025 antara lain:

1. Revisi DIPA

   Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 dan surat Sekretaris Utama Badan POM RI Nomor : B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 04 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor : S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 Balai POM di Sanggau secara responsif melakukan persiapan revisi anggaran dengan melakukan penyisiran anggaran terhadap pos-pos anggaran agar tetap memastikan bahwa fungsi pengawasan Obat dan makanan di wilayah kerja tetap berjalan optimal. Serta melakukan perencanaan revisi yang matang dan dilakukan dalam satu waktu, hal ini bertujuan untuk membatasi jumlah frekuensi revisi agar tidak melampaui ambang batas penilaian indikator IKPA.

2. Deviasi Halaman III DIPA

   Selain melakukan penyesuaian terhadap instruksi efisiensi Presiden, Balai POM di Sanggau memberikan perhatian khusus pada indikator Deviasi Halaman III DIPA, dengan melakukan pemutakhiran (update) Halaman III DIPA, peninjauan ulang terhadap seluruh jadwal kegiatan pengawasan Obat dan makanan agar selaras dengan rencana penarikan dana bulanan (RPD), serta mendorong setiap ketua tim untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai jadwal yang telah

disepakati, guna menghindari penumpukan tagihan di akhir periode yang dapat memperlebar margin deviasi.

3. Penyerapan Anggaran

   Balai POM di Sanggau berkomitmen untuk menjaga Indikator Penyerapan Anggaran tetap optimal pada setiap triwulan. Meskipun terdapat penyesuaian anggaran akibat instruksi Presiden, fokus utama tetap tertuju pada realisasi belanja yang efektif dan tepat waktu guna mendukung pengawasan Obat dan makanan dengan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan teknis dan kegiatan operasional, sehingga lebih cepat mencapai target penyerapan triwulan dan melakukan evaluasi mingguan terhadap sisa pagu anggaran per akun belanja untuk mendeteksi adanya kendala.

4. Belanja Kontraktual

   Walaupun Belanja Modal Balai POM di Sanggau diblokir sepenuhnya, Indikator Belanja Kontraktual tetap diperhitungkan dalam pelaksanaan anggaran, adanya percepatan pendaftaran kontrak terkait sewa kendaraan, sewa rumah dinas serta untuk kebutuhan rutin seperti jasa kebersihan, jasa keamanan, dan jasa pengemudi pada pihak ketiga yang dilaksanakan di awal tahun berjalan menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam indikator ini, juga penggunaan *E-Katalog* dalam kegiatan pengadaan kebutuhan kantor dan alat habis pakai laboratorium dengan tidak melewati batas waktu pendaftaran kontrak menjadi kunci pencapaian indikator ini pada Balai POM di Sanggau.

5. Penyelesaian Tagihan

   Dalam indikator penyelesaian tagihan, tim keuangan melakukan monitoring harian terhadap setiap Berita Acara Serah Terima (BAST) yang telah ditandatangani, guna memastikan proses pengujian tagihan dilakukan lebih cepat, mempercepat proses input data, sehingga target penyampaian SPM ke KPPN dalam kurun waktu kurang dari 5 hari kerja dapat tercapai secara konsisten, juga memberikan pemahaman kepada penyedia jasa terkait kelengkapan dokumen tagihan di awal kontrak, sehingga saat pekerjaan selesai, proses penagihan tidak terkendala kekurangan berkas.

6. Pengelolaan UP dan TUP

   Balai POM di Sanggau berkomitmen melakukan penggantian UP (GUP) secara rutin segera setelah kuitansi masuk mencapai ambang batas minimal, guna menghindari pengurangan nilai akibat saldo kas UP yang lama dipertanggungjawabkan ke KPPN, pada saat monev kegiatan mingguan, tim keuangan bersama ketua tim teknis

membahas terkait kegiatan yang akan dilaksanakan menggunakan UP serta target revolving UP bulanan agar memastikan kegiatan serta pengelolaan UP berjalan dengan lancar.

7. Capaian Output

   Dalam mencapai nilai capaian output yang optimal, Balai POM di Sanggau menyusun perencanaan pencapaian target fisik bulanan sejak awal tahun, guna menghindari penumpukan target di akhir tahun. Melalui rapat evaluasi rutin, tim teknis dan tim keuangan mengidentifikasi hambatan dalam pencapaian output dan segera melakukan penyesuaian strategi lapangan agar target tetap tercapai 100%, serta memastikan pengisian realisasi rincian output dilakukan secara akurat dan tepat waktu setiap bulannya.

8. Dispensasi SPM

   Dalam upaya mempertahankan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, Balai POM di Sanggau melakukan evaluasi mendalam terhadap indikator Dispensasi SPM pada penilaian IKPA. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas keterlambatan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) di bulan Desember tahun anggaran 2025 yang menyebabkan perlunya permohonan dispensasi kepada KPPN, dikarenakan perencanaan penggunaan Uang Panjar yang kurang tepat sehingga pengajuan SPM TUP melewati batas akhir deadline dari KPPN.

9. Data Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Balai POM di Sanggau di angka 92,51, hal ini mencerminkan adanya ketepatan dalam pelaksanaan target fisik di tahun 2025. Dari aspek efektivitas, indikator Capaian Rincian Output (RO) mencapai angka 100,00, yang menandakan bahwa seluruh target fisik dan layanan fungsional telah terealisasi sepenuhnya sesuai dengan target. Dari aspek efisiensi, Satuan Kerja ini mencatatkan nilai Efisiensi SBK sebesar 50,05 dengan Penggunaan SBK yang tetap terjaga pada angka 100,00. Dalam upaya mencapai nilai EKA tersebut, Balai POM di Sanggau melakukan perencanaan realisasi target fisik terhadap Rincian Output dari awal tahun, kemudian mereviu kembali atas realisasi pada setiap triwulan agar realisasi capaian fisik tetap selaras dengan perencanaan sampai pada akhir tahun anggaran.

Upaya Balai POM di Sanggau dalam pengelolaan keuangan membuahkan hasil pada bulan September 2025, Balai POM di Sanggau meraih penghargaan Peringkat 2 IKPA Terbaik Semester I TA 2025 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dan penghargaan dari

KPPN Sanggau berupa peringkat I Nilai IKPA Kategori Pagu Sedang Periode Semester I Tahun 2025.

Meskipun telah mencapai kategori Sangat Baik dengan nilai skala 5, Balai POM di Sanggau melakukan langkah mitigasi agar performa ini tetap berkelanjutan:

- Mempertahankan Konsistensi di Skala Maksimal: Mengingat nilai telah mencapai angka 5, tantangan utama ke depan adalah mempertahankan. Diperlukan monitoring berkala agar tidak terjadi penurunan kualitas administrasi serta dalam pelaksanaan anggaran.
- Mengadopsi sistem dashboard real-time untuk memantau sisa anggaran dan pelaporan progres capaian pada rapat mingguan agar realisasi anggaran terhadap perencanaan dapat dideteksi lebih awal sebelum realisasi lewat sistem.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam menunjang keberhasilan, kegiatan yang dilakukan Balai POM di Sanggau antara lain :

1. Pemaparan manual IKU setiap indikator yang dilakukan oleh Ketua Tim pada tanggal 12 Maret 2025 dan dihadiri oleh seluruh pegawai
2. Melakukan rapat rutin mingguan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan agar tetap sesuai perencanaan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan anggaran dalam mencapai target serta mengawal deviasi setiap bulan.
4. Mengawal pelaksanaan belanja kontraktual agar selesai maksimal triwulan III dan melakukan percepatan penyelesaian belanja modal.
5. Melakukan monitoring capaian output setiap bulannya agar tercapai sesuai target bulanan.
6. Melakukan pengelolaan UP dan TUP dengan melakukan revolving anggaran sesuai ketentuan
7. Melaksanakan proses kegiatan keuangan sesuai target indikator-indikator yang menunjang penilaian IKPA dan EKA.

IKSK 7.3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM



Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

a. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 3.99. Kategori Tingkat Maturitas Manajemen Risiko

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

b. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Cara Perhitungan dan Formula

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 3.100. Nilai Maturitas

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = $\frac{Skor\ Total}{16}$

Keterangan:

a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama.

1) Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.101 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.7.3

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kriteria
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85	2,84	99,65		**BAIK**

Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sanggau tahun 2025 adalah sebesar 2,84 termasuk dalam kategori Risk Aware, dimana risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat. Capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 2,85 sehingga capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 99,65% dengan kriteria **BAIK.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.102 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.7.3

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	2,84

Indikator Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sanggau merupakan salah satu indikator baru pada periode Renstra 2025-2029 dan sebaliknya belum ada pada periode Renstra 2022-2024. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan realisasinya untuk mengetahui apakah capaian realisasi 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.103 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 IKSK.7.3

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,84	3	94,66%		**AKAN TERCAPAI**

Pada periode akhir Renstra 2029 target indikator Tndeks Manajemen Risiko UPT BPOM Balai POM di Sanggau adalah sebesar 3, sedangkan realisasi pada tahun 2025 sebesar 2,84 dengan capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 94,66%. Berdasarkan hasil

capaian tersebut yang dibandingkan dengan target periode akhir Renstra 2029 maka realisasi kinerja termasuk dalam kategori **AKAN TERCAPAI.**

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.104 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.7.3

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,72	2,84	2,84

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan unit kerja lain dalam satu klaster, realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Balai POM di Sanggau sama dengan Balai POM di Tabalong dengan nilai sebesar 2,84, sedikit lebih tinggi dari realisasi Balai POM di Tanjungbalai sebesar 2,72.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sanggau tahun 2025 adalah 2,844 dengan kategori *Risk Aware* dan meningkat dari tahun 2024 sebesar 0,031. Namun demikian capaian tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 2,850, sehingga capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 99,65% dengan kriteria **BAIK**. Rincian hasil penilaian disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.105 Indeks Manajemen Resiko Balai POM di Sanggau

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	**45,0**	**45,5**	**0,5**
Nilai Maturitas	**2,813**	**2,844**	**0,031**
Tingkat Maturitas	*Risk Aware*	*Risk Aware*	

Adapun hal-hal yang menjadi catatan dalam penilaian indeks manajemen risiko berdasarkan laporan hasil penilaian maturitas manajemen risiko dalam pencapaian target adalah sebagai berikut :

- Belum seluruh pegawai memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko. Setiap pegawai harus memiliki pemahaman/ kompetensi terkait manajemen risiko. Pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko dapat dipenuhi dengan pelatihan mandiri melalui IDEAS, maupun melalui pelatihan dan sertifikasi. Namun demikian, masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami terkait manajemen risiko

yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan melalui pelatihan manajemen risiko, termasuk CRMO, kegiatan penyegaran (refreshment), dan diseminasi secara berkala agar penerapannya semakin optimal.

- Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain:
  1. Narasi pada penyebab risiko yang tidak selaras dengan kategori risiko yang diidentifikasi, seperti pada kode risiko F-01-01;
  2. Terdapat ketidaksesuaian narasi pada risk event dengan penyebab risiko, hal tersebut terlihat dari penyajian narasi yang terbalik, seperti pada kode risiko SDM-02-06;
  3. Terdapat atribut pengendalian yang tidak selaras dengan aktivitas pengendalian saat ini (existing control), seperti pada kode risiko O-04-02 dan O-03-05.

  Ketidaksesuaian dalam penyusunan daftar risiko perlu ditinjau kembali sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM sehingga daftar risiko yang disusun telah selaras dan tepat.
- Proses identifikasi risiko telah dilakukan dengan melibatkan seluruh fungsi, namun belum terdapat bukti terdokumentasi yang memadai bahwa pimpinan unit kerja telah memberikan masukan/arahan terkait implementasi manajemen risiko.
- Belum terdapat eskalasi risiko kepada tingkat yang lebih tinggi atas risiko yang berada di atas selera risiko (≥16) atau terhadap risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima, baik melalui checklist pada aplikasi SAPA APIP maupun pelaporan secara formal.
- Telah terdapat cascading untuk IKU Indeks Manajemen Risiko kepada tim manajemen representatif unit kerja, namun belum pada seluruh anggota tim.

Berdasarkan catatan kelemahan dalam pemenuhan indeks manajemen risiko tersebut, Balai POM di Sanggau akan melakukan upaya perbaikan berdasarkan rekomendasi sesuai Laporan Hasil Evaluasi sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko melalui pelatihan/ sertifikasi/ refreshment/ workshop/ awareness manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

- Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM secara berkala
- Mendokumentasikan keterlibatan dan komitmen Pimpinan unit kerja selaku pemilik risiko dalam proses pengelolaan manajemen risiko dengan melengkapi secara detail masukan/arahan yang disampaikan pada notulen rapat.
- Melaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi untuk risiko yang berada di atas selera risiko atau terhadap risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima, melalui checklist pada aplikasi SAPAAPIP maupun pelaporan secara formal.
- Menyertakan uraian tugas manajemen risiko pada SKP seluruh pegawai yang terlibat dalam tim manajemen representatif unit kerja.

Adapun faktor penyebab kegagalan untuk Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM disajikan dalam tabel berikut:

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai resiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Belum seluruh pegawai memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko	Peningkatan awareness seluruh pegawai dalam pengelolaan manajemen risiko.	Menyusun rencana pengembangan kompetensi dan melakukan pelatihan secara berkesinam bungan terkait manajemen risiko	TW IV 2026	T	-	-
		Ketidaksesuaian dalam identifikasi dan analisa risiko,/ ketidakselarasan daftar risiko yang disusun	Perbaikan daftar risiko sesuai catatan LHE inspektorat dan reviu kembali seluruh daftar risiko secara berkala	Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraa n Manajemen Risiko Badan POM secara berkala	TW IV 2026	Y	O-01-0 7	Daftar risiko yang dibuat tidak relevan dengan sasaran kegiatan
		Belum terdapat bukti terdokumentasi yang memadai	Perbaikan dokumentasi notulen rapat yang	Mendokumentasi kan keterlibatan dan komitmen Pimpinan unit	TW IV 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai resiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		bahwa pimpinan unit kerja telah memberikan masukan/arahan terkait implementasi manajemen risiko	menggambarkan keterlibatan pimpinan dalam memberikan masukan dan arahan	kerja selaku pemilik risiko dalam proses pengelolaan manajemen risiko dengan melengkapi secara detail masukan/arahan yang disampaikan pada notulen rapat.				
		Belum terdapat eskalasi risiko kepada tingkat yang lebih tinggi atas risiko yang berada di atas selera risiko (≥16) atau terhadap risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima, baik melalui checklist pada aplikasi SAPAAPIP maupun pelaporan secara formal.	Reviu kembali daftar risiko dan identifikasi kegiatan/proses bisnis yang dimungkinkan adanya risiko yang dapat dieskalasi	Melaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi untuk risiko yang berada di atas selera risiko atau terhadap risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima, melalui checklist pada aplikasi SAPAAPIP maupun pelaporan secara formal		T	-	-
		Belum seluruh SKP pegawai yang terlibat dalam tim manajemen representatif terdapat uraian tugas manajemen risiko	Memastikan adanya uraian tugas manajemen risiko saat [penyusunan MPH dan SKP seluruh anggota tim manajemen representatif	Menyertakan uraian tugas manajemen risiko pada SKP seluruh pegawai yang terlibat dalam tim manajemen representatif unit kerja.	TW I 2026	T	-	-

Tabel 3.106 Matriks Rekomendasi Triwulan

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung nilai indeks manajemen risiko Balai POM di Sanggau antara lain :

a. Melakukan rapat tim SPIP semester 1 2025 bersama pimpinan dalam rangka pembahasan tindak lanjut laporan hasil penilaian tingkat maturitas manajemen risiko tahun 2024 untuk perbaikan pada tahun 2025 pada tanggal 10 Januari 2025.
b. Melakukan rapat pembahasan daftar risiko semester 1 tahun 2025 bersama pimpinan dan seluruh pegawai pada tanggal 13 Januari 2025 untuk mengidentifikasi dan mendata kembali risiko yang dikelola pada tahun 2025.
c. Pemaparan manual IKU setiap indikator yang dilakukan oleh Ketua Tim pada tanggal 12 Maret 2025 dan dihadiri oleh seluruh pegawai.
d. Melakukan rapat tim SPIP per Triwulan pada tanggal 21 April 2025 untuk memonitoring progres RTP pada masing-masing fungsi.
e. Melakukan rapat pembahasan rencana tindak pengendalian (RTP) semester 1 tahun 2025 pada tanggal 23 Juni 2025 oleh tim SPIP
f. Melakukan rapat tim SPIP dalam rangka pembahasan RTP Semester 1 tahun 2025 pada tanggal 1 Juli 2025 untuk memonitoring progres RTP pada masing-masing fungsi.
g. Melakukan rapat pembahasan daftar risiko semester 2 tahun 2025 dan aktivitas pengendalian RTP Semester 1 Tahun 2025 bersama pimpinan dan seluruh pegawai pada tanggal 8-9 Juli 2025
h. Melakukan rapat Tim SPIP dalam rangka persiapan penilaian maturitas manajemen risiko tahun 2025 pada tanggal 17 September 2025 dan 8 Oktober 2025
i. Mendorong peningkatan pemahaman setiap pegawai mengenai pengelolaan manajemen risiko dengan melakukan diseminasi dan pelatihan mandiri
j. Melakukan identifikasi risiko terhadap seluruh sasaran kegiatan, dan mencakup seluruh kategori risiko
k. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan risiko yang ada pada setiap proses bisnis di masing-masing fungsi setiap triwulannya
l. Terdapat pegawai yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui Certified Risk Management Officer (CRMO)
m. Pemanfaatan media pembelajaran IDEAS Badan POM bagi pegawai terutama yang belum pernah terpapar terkait pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Badan POM.
n. Pendokumentasian implementasi manajemen risiko yang menunjang dalam pengukuran maturitas manajemen risiko melalui gsite SPIP Balai POM di Sanggau

IKSK 7.4. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT



Persentase implementasi rencana aksi RB merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Cara perhitungan dan Formula adalah sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ rencana\ aksi\ RB\ yang\ diimplementasikan}{Total\ Jumlah\ rencana\ aksi\ RB\ yang\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

1. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025

Tabel 3.107 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2025 IKSK.7.4

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi Warna	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100%		**BAIK**

Target Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah 100% dan realisasi indikator kegiatan sebesar 100% sehingga capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 100% dengan kriteria **BAIK.** Berdasarkan hasil tersebut Balai POM telah melaksanakan rencana aksi RB sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.108 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 IKSK.7.4

Indikator Kegiatan	Realisasi	
	2024	2025
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan tahun sebelumnya, realisasi Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Sanggau pada tahun 2024 dan 2025 sama yaitu sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut menggambarkan konsistensi Balai POM di Sanggau dalam pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan setiap tahun sehingga tidak ada penurunan capaian kinerja.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan RENSTRA 2029

Tabel 3.109 Perbandingan Realisasi 2025 dan RENSTRA 2029 IKSK.7.4

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2029	Capaian	Notifikasi Warna	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	-	-	-	-

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 adalah 100%. Berdasarkan renstra Balai POM di Sanggau tahun 2025-2029, target persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Sanggau hanya terdapat pada tahun 2025 sehingga capaian indikator kegiatan tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Meskipun demikian, realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara penuh sesuai dengan perencanaan tahunan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja lain dalam Satu Klaster

Tabel 3.110 Perbandingan Realisasi dengan unit kerja lain dalam satu klaster IKSK.7.4

Indikator Kegiatan	Balai POM di Tanjungbalai	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Sanggau
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai POM di Sanggau dengan unit kerja lain dalam satu klaster, realisasi Persentase implementasi rencana aksi RB Balai POM di Tanjungbalai, Balai POM di Tabalong dan Balai POM di Sanggau sama yaitu sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi telah berjalan optimal pada seluruh unit kerja lain dalam satu klaster sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi persentase implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 mencapai 100% dan telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian indikator kegiatan tersebut sebesar 100% dengan kriteria **BAIK**. Pencapaian target tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh komitmen pimpinan UPT beserta seluruh pegawai dalam mendukung dan mengimplementasikan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Balai POM di Sanggau. Komitmen tersebut tercermin melalui keterlibatan aktif seluruh unit kerja dalam melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta kesungguhan dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, peran Agen of Change (AOC) turut memberikan kontribusi penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Reformasi Birokrasi. AOC berperan sebagai penggerak perubahan di lingkungan kerja melalui upaya mendorong internalisasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi, meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya budaya kerja yang berintegritas, serta menjadi teladan dalam penerapan perilaku kerja yang profesional,

disiplin, dan berorientasi pada pelayanan. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, kampanye perubahan, serta komunikasi internal, AOC turut memperkuat pemahaman dan komitmen pegawai dalam mendukung pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi.

Keberhasilan tersebut juga didukung oleh sinergi dan koordinasi yang baik pada setiap area perubahan, sehingga setiap program dan kegiatan dalam rencana aksi dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Di samping itu, pelaksanaan pengendalian dan monitoring yang dilakukan secara berkala menjadi mekanisme penting untuk memastikan progres pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta memungkinkan dilakukannya evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan adanya dukungan dari berbagai aspek tersebut, seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Balai POM di Sanggau dapat terlaksana secara optimal dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Ketercapaian persentase implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pemenuhan nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) UPT Balai POM di Sanggau pada tahun 2026. Capaian tersebut sekaligus memperkuat komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan.

6. **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

   Hal yang menjadi faktor tercapainya target kinerja tingkat implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Sanggau antara lain :

   a. Pemaparan manual IKU setiap indikator yang dilakukan oleh Ketua Tim pada tanggal 12 Maret 2025 dan dihadiri oleh seluruh pegawai
   b. Rapat Penyusunan rencana kegiatan implementasi RB di UPT telah disesuaikan dengan kondisi UPT pada bulan Januari 2025
   c. Menetapkan tim kerja zona integritas dalam membangun dan mengawal pelaksanaan kegiatan RB pada bulan Januari
   d. Telah dilaksanakan internalisasi oleh Inspektorat untuk pelaksanaan RB di lingkungan UPT dan oleh Balai Besar POM di Pontianak dalam implementasi RB pada bulan Agustus 2025
   e. Melakukan monitoring pelaksanaan program implementasi rencana aksi RB pada Unit Kerja Balai POM di Sanggau secara setiap triwulan

f. Telah dibentuk Agent of Change (AOC) yang bertugas sebagai agen perubahan dan katalisator dalam implementasi berAkhlak dan pelaksanaan inovasi yang mendukung internalisasi reformasi birokrasi di Balai POM Sanggau

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Pada tahun 2025 di Balai POM di Sanggau terdapat 26 Indikator Kegiatan di mana masing-masing telah dilakukan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil, sesuai dengan tabel seperti berikut ini:

Tabel 3.111 Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Telah dilakukan pengambilan sampel sesuai dengan renlak yang telah disusun.	Agar dilakukan pengambilan sampel sesuai dengan renlak yang telah disusun. Agar diperhatikan kembali waktu pelaporan surat penarikan produk dari kedeputian.	Telah dilakukan pengambilan sampel sesuai dengan renlak yang telah disusun.	Selesai	Telah dilakukan pengambilan sampel sesuai dengan renlak yang telah disusun.	April-Juni	T	-	-
		Terdapat beberapa pelaporan sampel di SIPT yang melewati timeline terutama terkait pelaporan hasil pengujian	Agar dilakukan koordinasi ke Balai penguji terkait kegiatan pengujian sampel Balai POM di Sanggau	Perlu dilakukan koordinasi ke pengujian terkait dengan timeline pelaporan hasil uji sebagai bahan dalam perhitungan IKU dan koordinasi terkait kemungkinan perubahan renlak menyesuaikan kemampuan uji balai penguji	Selesai	Telah dilakukan koordinasi ke pengujian terkait timeline dan kemampuan pengujian	Juli-Septemb er	T	-	-
		Terdapat beberapa surat penarikan kedeputian yang belum dilakukan pelaporan sesuai	Agar dilakukan pengambilan sampel sesuai dengan renlak yang telah disusun. Agar diperhatikan kembali waktu pelaporan surat	Telah dilakukan pengambilan sampel sesuai dengan renlak yang telah disusun dan melakukan pelaporan surat	Selesai	Melakukan pelaporan surat penarikan produk dari kedeputian sesuai waktu yang ditetapkan	Oktober - Desembe r	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		waktu yang ditetapkan	penarikan produk dari kedeputian.	penarikan produk dari kedeputian						
		Terdapat beberapa sampel OBA, SK dan Kosmetik yang melewati SLA pengujian dan perbedaan dalam pengambilan keputusan dalam pengawasan penandaan.	Agar dilakukan evaluasi terhadap kegiatan sampling pada tahun 2025 dan dilakukan perencaaan terhadap kegiatan tahun 2026		Selesai	Melakukan evaluasi dan pembuatan dokumen perencanaan tahun 2026	Januari 2026	T	-	-
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kegiatan sampling Pangan Olahan sampai dengan bulan Juni sebanyak 58 sampel sesuai dengan renlak sampling pangan yang telah disusun	Agar dilakukan pengambilan sampel Pangan Olahan sesuai dengan renlak yang telah disusun dan lakukan pengujian test kit terhadap sampel yang belum tersampling sesuai dengan renlak yang renlak yang telah disusun	Melakukan pengambilan sampel Pangan Olahan sebanyak 58 sampel sampai dengan bulan Juni sesuai dengan renlak yang telah disusun	Selesai	Telah dilakukan pengambilan sampel Pangan Olahan sesuai dengan renlak yang telah disusun dan lakukan pengujian test kit terhadap sampel yang belum tersampling sesuai dengan renlak yang renlak yang telah disusun	April-Juni	T	-	-
		Akan dilakukan kegiatan pengujian testkit terhadap sampel produk olahan daging dan olahan ikan & udang	Agar dilakukan pengambilan sampel Pangan Olahan sesuai dengan renlak yang telah disusun dan lakukan pengujian test kit terhadap sampel yang belum tersampling sesuai dengan renlak yang telah disusun	Melakukan pengujian test kit untuk sampel yang belum tersampling	Selesai	Telah dilakukan pengujian test kit untuk sampel daging olahan dan ikan & udang olahan pada bulan agustus dan september	Agustus-September	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		Telah dilakukan pengambilan sampel Pangan Olahan sebanyak 99 sampel sampai dengan bulan September. Akan dilakukan pengambilan sampel Pangan Olahan sesuai dengan renlak yang telah disusun di TW 4.	Agar dilakukan pengambilan sampel Pangan Olahan sesuai dengan renlak yang telah disusun.	Telah selesai dilakukan pengambilan sampel Pangan Olahan sesuai dengan renlak yang telah disusun di TW 4.	Selesai	Seluruh sampel telah selesai tersampling sesuai dengan renlak yang telah disusun	Oktober-Desember	T	-	-
		Terdapat beberapa sampel Pangan Olahan yang melewati SLA pengujian dan ketidaksesuaian parameter pengujian sesuai pedoman sampling	Agar dilakukan evaluasi terhadap kegiatan sampling pada tahun 2025 dan dilakukan perencaaan terhadap kegiatan tahun 2026		Selesai	Melakukan evaluasi dan pembuatan dokumen perencanaan tahun 2026	Januari 2026	T	-	-
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Kejadian KLB KP tidak termonitoring Pada TW 2	Selalu pantau berita KLB baik di medsos ataupun berita di wilayah kerja Balai POM di Sanggau, dan koordinasi selalu dengan tim TGC Kabupaten Sanggau.	telah dilakukan monitoring berita KLB KP dari berita, medsos	Selesai	Belum ada kejadian KLB KP, Berita KLB KP telah termonitoring	Juni 2025	T	-	-
		BPOM Sanggau belum masuk kedalam SK Tim Gerak Cepat Kabupaten Sanggau	Koordinasi ke Dinkes Sanggau untuk dimasukkan kedalam SK Tim TGC.	Audiensi dengan kepala dinas kesehatan Kab. Sanggau	Selesai	SK TGC Kab. Sanggau telah diperbarui dan terdapat BPOM Sanggau sebagai anggota	Juni 2025	T	-	-
		Kejadian KLB KP tidak termonitoring Pada TW 3	Selalu pantau berita KLB baik di medsos ataupun berita di wilayah kerja Balai POM di Sanggau, dan	Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan pada bulan	Selesai	Berita KLB KP telah termonitoring Pada TW 3	Juli - September 2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
			koordinasi selalu dengan tim TGC Kabupaten Sanggau.	September. Monitoring telah dilakukan dari bulan Juli- September.						
		Kejadian KLB KP tidak termonitoring Pada TW 4	Selalu pantau berita KLB baik di medsos ataupun berita di wilayah kerja Balai POM di Sanggau, dan koordinasi selalu dengan tim TGC Kabupaten Sanggau.	Melakukan Koordinasi dengan tim TGC dinkes dan melakukan monitoring berita KLB melalui Medsos, Berita, dll.	Selesai	Berita KLB KP telah termonitoring Pada TW 4	Oktober-Desember 2025	T	-	-
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Telah dilakukan pengambilan sampel Pangan Olahan sebanyak 11 sampel PIRT sesuai dengan renlak yang disusun. Penilaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti memenuhi semua kriteria perhitungan realisasi yang diperoleh sebesar 100%	Agar dilakukan pengambilan sampel Pangan Olahan sesuai dengan renlak yang telah disusun.	Melakukan pengambilan sampel Pangan Olahan sebanyak 11 sampel PIRT sesuai dengan renlak yang disusun	Selesai	Capaian pada indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan	April-Juni	T	-	-
		Telah selesai dilakukan kegiatan sampling sampel PIRT dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap	Agar tetap dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel PIRT tersebut	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel PIRT tersebut pada TW 4	Selesai	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel PIRT tersebut pada TW 4	Oktober-Desember	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		sampel PIRT tersebut pada TW IV								
		Adanya deadline pengambilan sampel pangan PIRT	Agar dilakukan evaluasi terhadap kegiatan sampling pada tahun 2025 dan dilakukan perencaaan terhadap kegiatan tahun 2026		Selesai	Melakukan evaluasi dan pembuatan dokumen perencanaan tahun 2026	Januari 2026	T	-	-
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Surat rekomendasi dan keputusan yang dikeluarkan belum ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait pada TW 3	Lakukan selalu monitoring terhadap keputusan yang sudah dikeluarkan, untuk dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder sesuai target	Telah diinstruksikan kepada petugas untuk memastikan CAPA sarana yang diperiksa dikirim sesuai timeline , sudah dilakukan monitoring dari bulan Juli -September 2025.	Selesai	Surat rekomendasi dan keputusan yang dikeluarkan Sudah ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait pada TW 3.	Juli -September	Y	O-03-08	Stakeholder dan pelaku usaha terkait tidak menindaklanjuti rekomendasi dan/atau hasil pemeriksaan Balai POM di Sanggau
		Surat rekomendasi dan keputusan yang dikeluarkan belum ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait pada TW 4.	Laksanakan monitoring terhadap keputusan yang sudah dikeluarkan, untuk dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder sesuai target	Mengingatkan petugas untuk memastikan CAPA sarana yang diperiksa dikirim sesuai timeline	Selesai	Surat rekomendasi dan keputusan yang dikeluarkan Sudah ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait pada TW4.	Oktober-Desember 2025	Y	O-03-08	Stakeholder dan pelaku usaha terkait tidak menindaklanjuti rekomendasi dan/atau hasil pemeriksaan Balai POM di Sanggau
		Belum ada perencanaan prioritas pemeriksaan sarana	Laksanakan evaluasi terhadap Tindak Lanjut yang telah dikirimkan, untuk menjadi dasar perencanaan prioritas pemeriksaan di 2026.		Selesai	Sudah ada perencanaan prioritas pemeriksaan sarana	Januari 2026	T	-	-
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang	Rencana pemeriksaan sarana produksi Kosmetik di TW III	Dilakukan revisi rencana pemeriksaan Kosmetik dari TW III menjadi TW II	Telah dilakukan pemeriksaan sarana terhadap sarana produksi Kosmetik	Selesai	Capaian pada indikator ini telah mencapai realisasi 100%	Juni 2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	dan produksi UKOT di TW IV, namun IKU bersifat flat sehingga nilai IKU tidak dapat dihitung jika belum ada realisasi		pada bulan Juni 2025						
		Akan dilakukan pemeriksaan sarana produksi UKOT sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun pada TW IV	Agar dilakukan pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi OBA pada bulan November 2025	Selesai	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi OBA pada TW IV	Novembe r 2025	T	-	-
		Kegiatan pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi tahun 2025 telah terlaksana dengan capaian 114,94%	Agar dilakukan evaluasi pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi dan melakukan perencanaan tahun berikutnya.		Selesai	Perencanaan tahun 2026 telah tersusun	Januari 2026	T	-	-
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 4 sarana produksi Pangan Olahan, yaitu : - 3 sarana produksi MD - 1 sarana produksi IRTP Akan dilakukan pemeriksaan terhadap sisa target pememriksaan	Agar dilakukan pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun	Telah dilakukan pemeriksaan sarana terhadap 8 sarana produksi Pangan Olahan termasuk sarana IRTP	Selesai	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun pada TW 3	April-Juni 2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		Pangan Olahan pada TW 3								
		Telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 8 sarana produksi Pangan Olahan, yaitu : - 6 sarana produksi MD - 2 sarana produksi IRTP Akan dilakukan pemeriksaan terhadap sisa target yaitu 1 sarana Pangan Olahan di TW 4	Agar dilakukan pemeriksaan sarana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.	Melakukan pemeriksaan terhadap sisa target yaitu 1 sarana Pangan Olahan di TW 4	Selesai	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun pada TW 4	Oktober-Desember 2025	T	-	-
		Pemeriksaan dilakukan berdasarkan POA, namun belum dibuat dokumen kajian resiko	Agar dilakukan pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan rencana pelaksanaan dan kajian resiko yang telah disusun		Selesai	Pemeriksaan dilakukan berdasarkan POA dan kajian resiko yang telah disusun	Januari 2026	T	-	-
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak tepat dalam waktu pelaporan	Agar dilaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan renlak yang telah disusun dan perhatikan kembali terkait ketepatan waktu pelaporan	Telah dilakukan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan renlak yang telah disusun	Selesai	Tepat waktu dalam pelaporan	April-Juni 2025	T	-	-
		Telah disusun renlak TW IV untuk pemeriksaan sarana distribusi dan dilaporkan tepat waktu	Agar dilaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan renlak yang telah disusun dan perhatikan kembali terkait ketepatan waktu pelaporan	Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap sisa target yang ada sesuai dengan renlak yang telah disusun dan melakukan	Selesai	Telah dilakukan pemeriksaan sesuai renlak TW IV dan dilaporkan tepat waktu	Oktober-Desember 2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
				pelaporan tepat waktu						
		Kegiatan pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi seluruhnya sesuai dengan kriteria penilaian IKU yaitu ketepatan waktu pelaporan, ketepatan pengambilan keputusan, dan kelengkapan dokumen pelaporan	Agar dilakukan pembuatan renlak sesuai dengan pedoman atau prioritas pengawasan tahun 2026. Perhatikan kriteria penilaian presentase sesuai dengan DO yang telah ditetapkan dan evaluasi kegiatan tahun 2025 untuk menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan tahun 2026		Selesai	Dilakukan pembuatan renlak sesuai pedoman atau prioritas pengawasan	Januari-Maret 2026	T	-	-
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak tepat dalam waktu pelaporan	Agar dilaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan renlak yang telah disusun dan perhatikan kembali terkait ketepatan waktu pelaporan	Telah dilakukan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan renlak yang telah disusun	Selesai	Tepat waktu dalam pelaporan	April-Juni 2025	T	-	-
		Telah disusun renlak TW IV untuk pemeriksaan sarana distribusi dan dilaporkan tepat waktu	Agar dilaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan renlak yang telah disusun dan perhatikan kembali terkait ketepatan waktu pelaporan	Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap sisa target yang ada sesuai dengan renlak yang telah disusun dan melakukan pelaporan tepat waktu	Selesai	Telah dilakukan pemeriksaan sesuai renlak TW IV dan dilaporkan tepat waktu	Oktober-Desember	T	-	-
		Terdapat 1 pelaporan sarana distribusi pangan yang melewati waktu pelaporan dan 1 pelaporan	Agar dilakukan pembuatan renlak atau POA tahun 2026. Perhatikan kriteria penilaian presentase sesuai dengan DO yang		Selesai	Telah dilakukan pembuatan renlak atau POA tahun 2026	Januari-Maret	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		sarana distribusi pangan yang tidak sesuai ketentuan dalam pengambilan keputusan.	telah ditetapkan dan evaluasi kegiatan tahun 2025 untuk menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan tahun 2026							
10	Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Kegiatan pengawasan iklan telah dilaksanakan dengan hasil pengawasan memenuhi kriteria perhitungan IKU sehingga realisasi yang dicapai melebihi target yang telah ditetapkan	Agar dilaksanakan kegiatan pengawasan iklan sesuai dengan renlak yang ditetapkan. Perhatikan ketepatan waktu pelaporan, pengambilan kesimpulan dan aspek lainnya yang termasuk dalam perhitungan realisasi IKU	Telah dilakukan pengawasan iklan sesuai renlak yang ditetapkan dengan memperhatikan ketepatan waktu pelaporan, pengambilan kesimpulan dan aspek lainnya yang termasuk dalam perhitungan realisasi IKU	Selesai	Capaian pada indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan	April-Juni	T	-	-
		Sampai dengan bulan September, kegiatan pengawasan iklan sudah berjalan sesuai renlak, untuk TW 4 akan dilanjutkan pengawasan iklan sesuai perencanaan	Agar dilaksanakan kegiatan pengawasan iklan sesuai dengan renlak yang ditetapkan. Perhatikan ketepatan waktu pelaporan, pengambilan kesimpulan dan aspek lainnya yang termasuk dalam perhitungan realisasi IKU	Telah dilakukan pengawasan iklan sesuai renlak yang ditetapkan dengan memperhatikan ketepatan waktu pelaporan, pengambilan kesimpulan dan aspek lainnya yang termasuk dalam perhitungan realisasi IKU	Selesai	Pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada TW 4 telah dilaksanakan sesuai renlak dan capaian indikator mencapai target.	Desembe r	T	-	-
			Agar dilaksanakan kegiatan pengawasan iklan sesuai dengan renlak yang ditetapkan. Perhatikan ketepatan waktu pelaporan,		Selesai	PoA telah selesai dilakporkan untuk perencanaan 2026	Januari	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
			pengambilan kesimpulan dan aspek lainnya yang termasuk dalam perhitungan realisasi IKU							
11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Sampai dengan bulan September, kegiatan pengawasan label tembakau dan rokok elektronik sudah berjalan sesuai renlak, untuk TW 4 akan dilanjutkan pengawasan label tembakau dan rokok elektronik sesuai perencanaan	Agar dilaksanakan kegiatan pengawasan label tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai dengan renlak yang ditetapkan. Perhatikan ketepatan waktu pelaporan, pengambilan kesimpulan dan aspek lainnya yang termasuk dalam perhitungan realisasi IKU	Telah dilakukan pengawasan label tembakau dan rokok elektronik sesuai renlak yang ditetapkan dengan memperhatikan ketepatan waktu pelaporan, pengambilan kesimpulan dan aspek lainnya yang termasuk dalam perhitungan realisasi IKU	Selesai	Pengawasan label tembakau dan rokok elektronik pada TW 4 telah dilaksanakan sesuai renlak dan capaian indikator mencapai target.	Desembe r	T	-	-
			Agar dilaksanakan kegiatan pengawasan label tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai dengan renlak yang ditetapkan. Perhatikan ketepatan waktu pelaporan, pengambilan kesimpulan dan aspek lainnya yang termasuk dalam perhitungan realisasi IKU		Selesai	PoA telah selesai dilakporkan untuk perencanaan 2026	Januari	T	-	-
12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Belum dilakukan kegiatan AMR pada TW 4	Laksanakan advokasi ke kabupaten Sintang, Publikasi AMR TW 4 dan dokumentasikan data dukung untuk pelaporan di TW 4.	telah dilakukan advokasi pada bulan November, Publikasi pada bulan Desember, seluruh data telah dilaporkan	Selesai	Sudah dilakukan kegiatan AMR pada TW 4	Oktober - Desembe r	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
				pada bulan Desember						
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai SKL belum mencapai target	Laksanakan rencana pemenuhan ruang lingkup sesuai target tw 1.	melakukan pemenuhan ruang lingkup Obat 5 sampel	Selesai	Nilai SKL telah mencapai Target	Februai-Maret 2025	Y	O-05-01	Sistem dokumen mutu di laboratorium tidak berjalan
		Target RAPK triwulan belum dilakukan penyesuaian	Lakukan penyesuaian target tiap triwulan sesuai perencanaan pemenuhan nilai SKL.	Melakukan pengajuan perubahan target RAPK Triwulan	Selesai	Target RAPK triwulan sudah dilakukan penyesuaian	Maret-Juni	T	-	-
		Nilai SKL 11,87	Lakukan pemenuhan ruang lingkup Obat sesuai target nilai TW 2 bulan juni.	Telah dilakukan verifikasi metode analisis untuk Ruang lingkup Obat sebanyak 1 sampel	Selesai	Nilai SKL 11,98	Mei-Juni	Y	O-05-01	Sistem dokumen mutu di laboratorium tidak berjalan
		Target tahunan 11,5	Lakukan penyesuaian target akhir tahun 2025.	Melakukan pengajuan perubahan target akhir nilai SKL kepada Roren	Selesai	Telah disetujui perubahan target tahunan pemenuhan SKL menjadi 12.	Juni-September	T	-	-
		Rencana pemenuhan ruang lingkup TW 4 belum dilakukan	Lakukan pemenuhan ruang lingkup Obat sesuai target nilai TW 4 bulan Desember.	Melakukan verifikasi metode rapid test kit Obat untuk pemenuhan ruang lingkup sesuai perencanaan	Selesai	pemenuhan ruang lingkup TW 4 sudah dilakukan	Desember 2025	Y	O-05-01	Sistem dokumen mutu di laboratorium tidak berjalan
		Rencana pemenuhan target SKL 2026 belum ditetapkan	Evaluasi kembali seluruh kegiatan pengujian dan pengembangan laboratorium, lakukan perencanaan untuk tahun 2026.		Selesai	Rencana Pemenuhan target SKL 2026 telah ditetapkan	Februari 2026	T	-	-
14	Persentase Kabupaten/Kota yang	Kegiatan kab/kota pangan aman telah dilaksanakan	Laksanakan kegiatan pendampingan sesuai dengan juknis yang	Melakukan kegiatan pendampingan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan dengan	Selesai	Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan	Oktober-Desember	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
	didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	mulai TW II dan akan dilaksanakan kegiatan pendampingan lanjutan sesuai juknis dan dilakukan sesuai timeline	telah ditetapkan dan perhatikan kembali timelinenya	memperhatikan timeline		sesuai dengan juknis				
		Kegiatan Kab/kota pangan aman sudah selesai dilaksanakan. Kab yang didampingi yaitu Kab Sanggau dengan nilai evaluasi oleh UPT 64,32 dan sudah mencapi nilai minila yaitu 60	Agar dilakukan evaluasi terhadap kegiatan pendampingan tahun 2025 dan dipersiapkan untuk kegiatan advokasi di tahun 2026		Selesai	Kegiatan advokasi kab/kota pangan aman tahun 2026	Januari - Maret 2026	T	-	-
15	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Capaian indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebesar 106,93%. Realisasi indikator ini melebihi target tahunan (realisasi TW II 94,24 dan target tahunan 88,13)	1. Merencanakan kegiatan KIE melalui media pada Triwulan III 2. Agar faktor-faktor keberhasilan tersebut dipertahankan dalam pelaksanaan KIE berikutnya.	1. Telah dilakukan KIE melalui media selama TW III dengan rincian: a. Juli sebanyak 28 konten mandiri dan 18 konten repost b. Agustus sebanyak 30 konten mandiri dan 14 konten repost c. September sebanyak 26 konten mandiri dan	Selesai	Capaian pada indikator ini telah melebihi target tahunan (realisasi per September 94,81 dari target tahunan 88,13)	Juli-September	Y	SDM-02-02	Pelaporan layanan publikasi pada RHPK tidak lengkap

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
				22 konten repost 2. Faktor - faktor keberhasilan dapat dipertahankan pada TW IV dengan capaian indikator sebesar 107,58%						
		Capaian indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sampai dengan September sebesar 107,58%. Realisasi indikator ini melebihi target tahunan.	1. Membuat perencanaan dan melaksanakan KIE di TW IV: a. KIE rutin:KIE tatap muka dengan target sekolah di Kab. Sanggau b. KIE stunting: KIE daring dengan lokus Kabupaten Sekadau 2. Agar faktor-faktor keberhasilan tersebut dipertahankan dalam pelaksanaan KIE berikutnya.	1. Telah dilakukan KIE rutin dan KIE Stunting dengan rincian: a. KIE rutin dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2025 di SMPN 2 Sanggau dengan peserta para siswa/i. Tema KIE: Kosmetik b. KIE Stunting dilaksanakan secara daring pada tanggal 29 Oktober 2025 dengan peserta mahasiswa/i Institut Teknologi Keling Kumang Kab. Sekadau 2. Faktor-faktor keberhasilan dapat dipertahankan pada TW IV	Selesai	Capaian pada indikator ini telah melebihi target tahunan (realisasi 95,46 dari target tahunan 88,13)	Oktober-Desember	Y	O-02-10 dan SDM-02-02	Pelaporan layanan publikasi pada RHPK tidak lengkap dan Peserta KIE Tingkat II tidak mendapatkan materi yang sesuai dengan kategori peserta

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
				dengan capaian indikator sebesar 108,32%						
		Capaian indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2025 sampai dengan sebesar 108,32%. Realisasi indikator ini melebihi target tahunan.	1. Agar membuat perencanaan kegiatan KIE tahun 2026 2. Agar faktor-faktor keberhasilan indikator tingkat efektfitas KIE Obat dan Makanan tahun 2025 dipertahankan dalam pelaksanaan KIE tahun 2026		Selesai	PoA kegiatan KIE (Tatap Muka dan Media) tahun 2026 telah disusun	Januari -Maret 2026	Y	O-02-10 dan SDM-02-02	Pelaporan layanan publikasi pada RHPK tidak lengkap dan Peserta KIE Tingkat II tidak mendapatkan materi yang sesuai dengan kategori peserta
16	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Kegiatan Tahap 1 berupa Forum Advokasi bersama lintas sektor sekolah dilaksanakan bersama dengan kegiatan advokasi desa dan pasar sesuai dengan POA yang akan dilaksanakan pada bulan April 2025.	Agar melaksanakan kegiatan Forum Advokasi bersama lintas sektor Sekolah pada bulan April 2025.	Melaksanakan Forum Advokasi bersama lintas sektor Sekolah dilaksanakan bersama dengan kegiatan advokasi Desa dan Pasar	Selesai	Telah dilaksanakan kegiatan Forum Advokasi bersama lintas sektor sekolah sehingga capaian sebesar 25% sesuai dengan target perencanaan	April	Y	SDM-02-06	Penanggung jawab kegiatan yang baru pada tahun 2026 belum memahami pelaksanaan kegiatan Sekolah yang membudayakan keamanan pangan dan Pasar pangan aman berbasis komunitas
		Seluruh tahapan program sudah selesai. Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh agar menjadi dasar	Melakukan evaluasi secara menyeluruh agar menjadi dasar dalam melakukan perbaikan untuk pelaksanaan program yang lebih baik di tahun berikutnya	Telah dilakukan Evaluasi seluruh tahapan pada program yaitu, advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan sertifikasi sekolah	Selesai	Adanya notulensi rapat evaluasi dan perencanaan program pada tahun depan tersusun dengan baik.	Desember	Y	SDM-02-06	Penanggung jawab kegiatan yang baru pada tahun 2026 belum memahami pelaksanaan kegiatan Sekolah

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		dalam melakukan perbaikan untuk pelaksanaan program yang lebih baik di tahun berikutnya								yang membudayakan keamanan pangan dan Pasar pangan aman berbasis komunitas
		Realisasi Pelaksanaan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 sebesar 100%,	Agar merencanakan kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2026		Selesai	PoA kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2026 telah disusun	Januari	Y	SDM-02-06	Penanggung jawab kegiatan yang baru pada tahun 2026 belum memahami pelaksanaan kegiatan Sekolah yang membudayakan keamanan pangan dan Pasar pangan aman berbasis komunitas
17	Jumlah desa pangan aman	Telah dilaksanakan tahapan advokasi lintas sektor terkait program Desa Pangan aman pada bulan April 2025 sesuai dengan	Agar dibuatkan perencanaan terkait kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan dengan memperhatikan pelaksanaan kegiatan desa pangan aman sesuai juknis terbaru	1. Bimtek Kader Keamanan Pangan telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2025 2. Bimtek Komunitas oleh Kader Keamanan Pangan telah dilaksanakan pada bulan September	Selesai	Telah ditetapkannya Tim Keamanan Pangan Desa dan Kader Keamanan Pangan Desa oleh Kelurahan	Juli	Y	SDM-02-06	Penanggung jawab kegiatan yang baru pada tahun 2026 belum memahami pelaksanaan kegiatan Sekolah yang membudayakan keamanan pangan dan Pasar pangan aman berbasis

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		PoA yang telah disusun. Capaian indikator ini sampai Triwulan II sebesar 25%				Beringin Undangan terkait pelaksanaan kegiatan Bimtek KKPD telah dikirimkan dan menunggu pelaksanaan kegiatan. .				komunitas
		Realisasi Pelaksanaan program Desa Pangan Aman hingga TW III sebesar 75%, untuk tahapan monev belum terlaksana	Realisasi Pelaksanaan program Desa Pangan Aman hingga TW III sebesar 75%, untuk tahapan monev belum terlaksana	Monev program Desa pangan Aman bersama lintas sektor telah dilaksanakan tanggal 26 November 2025 di Aula Dinas Kesehatan Kab. Sanggau	Selesai	Tahapan monev Program Desa Pangan Aman dilaksanakan pada bulan November dan realisasi pelaksanaan 100%	Novembe r	Y	SDM-02-06	Penanggung jawab kegiatan yang baru pada tahun 2026 belum memahami pelaksanaan kegiatan Sekolah yang membudayakan keamanan pangan dan Pasar pangan aman berbasis komunitas
		Realisasi Pelaksanaan program Desa Pangan Aman tahun 2025 sebesar 100%,	Agar merencanakan kegiatan Desa pangan Aman tahun 2026		Selesai	PoA kegiatan Desa Pangan aman tahun 2026 telah disusun	Januari	Y	SDM-02-06	Penanggung jawab kegiatan yang baru pada tahun 2026 belum memahami pelaksanaan kegiatan Sekolah yang membudayakan keamanan pangan dan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
										Pasar pangan aman berbasis komunitas
18	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Kegiatan Tahap 1 berupa Forum Advokasi bersama lintas sektor Pasar dilaksanakan bersama dengan kegiatan advokasi Desa dan Sekolah sesuai dengan POA yang akan dilaksanakan pada bulan April 2025.	Agar melaksanakan kegiatan Forum Advokasi bersama lintas sektor Pasar pada bulan April 2025.	Melaksanakan Forum Advokasi bersama lintas sektor Pasar dilaksanakan bersama dengan kegiatan advokasi Desa dan Sekolah	Selesai	Telah dilaksanakan kegiatan Forum Advokasi bersama lintas sektor Pasar sehingga capaian sebesar 25% sesuai dengan target perencanaan	April 2025	Y	SDM-02-06	Penanggung jawab kegiatan yang baru pada tahun 2026 belum memahami pelaksanaan kegiatan Sekolah yang membudayakan keamanan pangan dan Pasar pangan aman berbasis komunitas
		Kegiatan sosialisasi keamanan pangan telah dilaksanakan pada bulan Juni sesuai dengan perencanaan. Tahapan berikutnya yaitu pengawasan keamanan pangan di pasar pada bulan Juli.	Agar melaporkan kegiatan sosialisasi keamanan pangan sesuai dengan timeline dari pusat (30 hari kalender setelah pelaksanaan kegiatan) dan melaksanakan tahapan berikutnya yaitu pengawasan keamanan pangan di pasar pada bulan Juli	Melakukan kegiatan Pengawasan keamanan pangan oleh kader pengelola pasar.	Selesai	Capaian kegiatan Program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas sebesar 100% dengan terselesaikannya tahapan pengawasan keamanan pangan sesuai dengan target perencanaan.	Juli 2025	Y	SDM-02-06	Penanggung jawab kegiatan yang baru pada tahun 2026 belum memahami pelaksanaan kegiatan Sekolah yang membudayakan keamanan pangan dan Pasar pangan aman berbasis komunitas

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		Seluruh tahapan pada program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 telah selesai dilaksanakan dan dilaporkan sesuai timeline yang ditentukan. Perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.	Melakukan evaluasi untuk perbaikan dalam mempersiapkan pelaksanaan program di tahun berikutnya	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program pasar pangan berbasis komunitas	Selesai	Adanya notulensi rapat evaluasi dan Perencanaan kegiatan pada tahun depan tersusun dengan baik	Desember 2025	Y	SDM-02-06	Penanggung jawab kegiatan yang baru pada tahun 2026 belum memahami pelaksanaan kegiatan Sekolah yang membudayakan keamanan pangan dan Pasar pangan aman berbasis komunitas
		Realisasi Pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 sebesar 100%,	Agar merencanakan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2026		Selesai	PoA kegiatan asar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2026 telah disusun	Januari-Maret	Y	SDM-02-06	Penanggung jawab kegiatan yang baru pada tahun 2026 belum memahami pelaksanaan kegiatan Sekolah yang membudayakan keamanan pangan dan Pasar pangan aman berbasis komunitas
19	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik	Telah dilaksanakan Kegiatan pendampingan UMK sampai dengan bulan Juni berupa penetapan UMK, sosialisasi, Bimbingan teknis dan sebagian	Agar kegiatan pendampingan UMK dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Juknis Pendampingan UMK.	Melaksanakan Kegiatan pendampingan UMK sampai dengan TW 3 berupa penetapan UMK, sosialisasi, Bimbingan teknis dan sebagian rangkaian fasilitasi/pendampingan sesuai dengan	Selesai	Capaian indikator ini telah terlaksana dengan baik	April-Juni	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
	dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	rangkaian fasilitasi/pendampingan.		pedoman pendampingan						
		Belum dilaksanakan penyelesaian terhadap tahap pendampingan dan coaching clinic serta tahap monev dan pelaporan	Agar kegiatan pendampingan UMK dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Juknis Pendampingan UMK.	1.menyelesaikan Tahap fasilitasi/pendampingan dan *coaching clinic* 2.Melakukan tahap monev dan pelaporan	Selesai	Telah dilaksanakan penyelesaian terhadap tahap pendampingan dan coaching clinic serta tahap monev dan pelaporan	Juli-Desember	T	-	-
		Belum dilaksanakan Kegiatan pendampingan UMK sampai dengan bulan September berupa penetapan UMK, sosialisasi, Bimbingan teknis dan sebagian rangkaian fasilitasi/pendampingan. Akan dilanjutkan untuk pendampingan (coaching clinic) terhadap 1 UMK pada TW 4	Agar dilakukan pendampingan (coaching clinic e-sertif) terhadap 1 UMK target tersisa hingga terbit IPCPPOB sesuai dengan Pedoman Juknis Pendampingan UMK.	Melakukan pendampingan (coaching clinic e-sertif) terhadap 1 UMK target tersisa hingga terbit IPCPPOB sesuai dengan Pedoman Juknis Pendampingan UMK.	Selesai	Telah dilakukan pendampingan (coaching clinic e-sertif) terhadap 1 UMK target tersisa hingga terbit IPCPPOB sesuai dengan Pedoman Juknis Pendampingan UMK	Oktober-Desember	T	-	-
		Tahapan pendampingan belum berurutan seperti pada juknis (Tahapan sosialisasi pada	Agar dapat dilakukan pendampingan sesuai dengan tahapan pada juknis		Selesai	Tahapan pendampingan telahberurutan seperti pada juknis	Januari-Desember 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		pendampingan UMK dilakukan setelah penetapan target UMK)								
20	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan lakukan pendalaman melalui kegiatan intelijen agar dapat dilakukan kegiatan penindakan untuk di jadikan target perkara tahun 2025	Menyusun POA terkait kegiatan Intelijen, kegiatan Cegah Tangkal, kegiatan Patroli Siber dan Penyidikan untuk Tahun 2025.	Operasi Intelijen telah dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2025 Operasi penindakan telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025. SPDP diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2025. Tahap I dilaksanakan pada tanggal 11 September 2025 Tahap II dilaksanakan pada tanggal 12 November tahun 2025	Selesai	akan dilakukan operasi penertiban Obat dan makanan pada bulan Juli Tahun 2025 / di TW III	Juli 2025 / TW III 2025	T	-	-
		P21 belum diterbitkan oleh Jaksa Peneliti	Agar dilakukan koordinasi secara intens dengan JPU untuk mempercepat terbitnya P21.		Selesai	P21 diterbitkan oleh Jaksa Peneliti	Oktober - Desember	T	-	-
		Telah Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	Agar di kawal jalannya persidangan dan putusan yang akan di terbitkan oleh	Tahap II telah dilaksanakan pada tanggal 12 November 2025 di	Selesai	Mengawal putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan	Desember 2025 / TW IV	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		Olahan dan Perkara atas nama Tersangka Awang anak dari Cong Cin Pin (alm) sudah sampai pada Tahap II (100%) di bulan November 2025	pengadilan Negeri Sintang untuk dilaporkan sebagai laporan kemajuan atas perkara ditangani oleh PPNS Balai POM di Sanggau	Kejaksaan Negeri Sintang		Negeri Sintang untuk di sampaikan sebagai laporan kemajuan perkara yang di tangani oleh PPNS Balai POM di Sanggau	Tahun 2025			
21	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Sampai dengan bulan Juni, telah dilaporkan laporan patroli siber dan profiling tepat waktu. Perlu dilakukan monitoring patroli siber dan profiling, serta laporan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal dan laporan analisis kerawanan kejahatan tahun 2025	Agar dilakukan monitoring pelaporan siber dan profiling serta pelaporan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal dan laporan analisis sesuai dengan perencanaan		Selesai	Target laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar mencapai target	TW IV 2025	Y	O-04-02	Pelaporan patroli siber dan profiling tidak tepat waktu
		Sampai dengan bulan September, telah dilaporkan laporan patroli siber dan profiling tepat waktu. Perlu dilakukan monitoring patroli siber dan profiling, serta laporan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal dan	Agar konsisten melaporkan laporan siber dan profiling sesuai timeline. Melakukan monitoring terkait pelaporan Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal dan Laporan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai perencanaan.		Selesai	Target laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar mencapai target	TW IV 2025	Y	O-04-02	Pelaporan patroli siber dan profiling tidak tepat waktu

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		laporan analisis kerawanan kejahatan tahun 2025								
		Melakukan pelaporan siber dan profiling secara rutin setiap bulan. Menyusun Laporan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal dan laporan analisis kerawanan kejahatan tahun 2025	Agar melakukan pelaporan tepat waktu	Telah dilakukan pelaporan laporan patroli siber dan profilling tepat waktu. Telah dilakukan pelaporan laporan tindak lanjut rekomendasi dan laporan analisis kerawanan kejahatan 2025	Selesai	Target laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar mencapai target	TW IV 2025	Y	O-04-02	Pelaporan patroli siber dan profiling tidak tepat waktu
22	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indikator ini akan dinilai melalui Monev PEKPPP yang direncanakan dilakukan oleh Biro Hukor pada Triwulan III	Persiapkan data dukung yang dibutuhkan dalam penilaian PEKPPP	Melakukan publikasi hasil SKM di media elektronik dan non elektronik	Selesai	Data dukung terkait pelaksanaan FKP, Standar Pelayanan Publik, maklumat pelayanan serta publikasinya telah tersedia	Tw III 2025-	Y	S-02-01	Tidak terpenuhinya jumlah responden yang telah ditetapkan untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat
		Telah dilakukan penilaian PEKPPP oleh Biro Hukor. Nilai IPP Balai POM di Sanggau 4,93 (Pelayanan	Agar tetap melaksanakan kegiatan rutin yang mendukung tercapainya IPP berupa pelaksanaan SKM tiap bulan, publikasi informasi setiap hari kerja secara rutin, serta membuat tindak lanjut	1. Pelaksanaan SKM bulan Oktober, November, dan Desember 2025 2. Pelaksanaan publikasi setiap bulan	Selesai	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sanggau 4,93 (Pelayanan Prima) dari target 4,51 dan telah dilakukan	Oktober-Desember	Y	S-02-01	Tidak terpenuhinya jumlah responden yang telah ditetapkan untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		Prima) dari target 4,51 dan akan dilakukan kegiatan rutin yang mendukung tercapainya IPP setiap bulan serta membuat tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian PEKPPP tahun 2025	atas rekomendasi hasil penilaian PEKPPP tahun 2025			kegiatan rutin yang mendukung tercapainya IPP setiap bulan serta membuat tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian PEKPPP tahun 2025				
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sanggau 4,93 (Pelayanan Prima) dari target 4,51	Agar tetap melaksanakan kegiatan rutin yang mendukung tercapainya IPP berupa pelaksanaan SKM tiap bulan, publikasi informasi setiap hari kerja secara rutin.		Selesai	Telah dilaksanakan SKM bulan Januari, Februari, dan Maret 2026 serta publikasi informasi Obat dan makanan setiap hari kerja	Januari - Maret 2026	Y	S-02-01	Tidak terpenuhinya jumlah responden yang telah ditetapkan untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat
23	Nilai AKIP UPT BPOM	Nilai AKIP belum memenuhi target	Mulai dikoordinir pelaksanaan evaluasi SAKIP sesuai penilaian tahun sebelumnya, dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi melalui SAPA APIP	Rapat Tim SAKIP terkait pemenuhan data dukung penilaian SAKIP UPT	Selesai	Target Nilai SAKIP tercapai	Juli 2025	T	-	-
		Desk SAKIP sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus, masih	Agar melakukan perbaikan berdasarkan catatan pada saat desk dengan inspektorat	Melakukan perbaikan berdasarkan catatan pada saat desk	Selesai	Perbaikan data terkait catatan saat desk telah dilaksanakan dan diharapkan	TW 4	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		menunggu penetapan nilai hasil desk dari inspektorat				nilai AKIP mencapai target (nilai 76)				
		Capaian Nilai AKIP tidak mencapai target dengan nilai 75,63 dari target 76	Agar melakukan perbaikan berdasarkan catatan pada LHE yang akan dikirimkan oleh pusat, serta tindak lanjut dengan pengajuan bimbingan teknis mandiri bersama inspektorat agar dapat mencapai target di tahun selanjutnya		Selesai	Feedback dari tim inspektorat terkait bimbingan teknis mandiri, serta temuan oleh inspektorat di LHE sudah teridentifikasi	TW 1 2026	Y	S-01-01 S-01-02	Dokumen pendukung AKIP berupa laporan evaluasi internal dan laporan kinerja tidak sesuai dengan pedoman Penyajian data capaian indikator antara RAPK, Laporan Internal, dan Laporan kinerja tidak selaras
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Belum adanya monitoring mingguan terkait capaian Indikator IKPA khususnya pada realisasi anggaran dan deviasi target agar meminimalisir tidak tercapainya target	Tetap pertahankan dan lanjutkan kegiatan perencanaan serta membuat monitoring dan evaluasi rutin mingguan pada tahun 2025	Menyusun perencanaan serta capaian realisasi dan deviasi terkait kegiatan mingguan yang mendukung Nilai kinerja anggaran UPT	Selesai	Capaian Realisasi anggaran, serta monitoring deviasi terhadap target sudah dibuat mingguan, serta di sounding di grup secara mingguan	Juni 2025	Y	K-01-02	Penyerapan anggaran belanja barang tidak sesuai target
		Nilai IKPA belum tercapai kategori Sangat Baik (90,01 - 100)	Agar memulai perencanaan terkait indikator-indikator yang mempengaruhi penilaian IKPA	Monitoring dan evaluasi perencanaan dan realisasi capaian baik mingguan maupun bulanan	Selesai	Nilai IKPA sudah tercapai dengan nilai 99 dan masuk kategori Sangat Baik (90,01 - 100)	Desembe r 2025	Y	K-01-02	Penyerapan anggaran belanja barang tidak sesuai target

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		Nilai IKPA sampai dengan bulan September adalah 100, untuk nilai EKA adalah 43,24, untuk NKA masih di bawah target dengan angka 71,62 (target 90,01 untuk klasifikasi 5)	Agar mengawal terus indikator-indikator yang mempengaruhi penilaian IKPA dan EKA	Kawal indikator yang mempengaruhi penilaian IKPA dan untuk penilaian EKA mulai dilakukan perhitungan dan evaluasi khusus di TW 4.	Selesai	Nilai EKA di angka 92,51 sehingga nilai NKA mencapai target yaitu 95,76 (minimal 90,01 untuk klasifikasi 5)	Desember 2025	Y	K-01-02 K-01-01 K-01-03	Penyerapan anggaran belanja barang tidak sesuai target SOP mikro pengelolaan anggaran yang ada sudah tidak sesuai Besaran uang panjar masing-masing bidang tidak sesuai dengan kebutuhan
		Capaian Tahun 2025 nilai NKA mencapai Klasifikasi 5 dari target 5	Agar mempersiapkan perencanaan untuk mengawal indikator-indikator yang mempengaruhi penilaian NKA khususnya IKPA dan EKA di tahun anggaran 2026		Selesai	Rapat terkait perencanaan terlaksana dengan proyeksi kegiatan triwulan I sudah dilaporkan	TW I 2026	T	-	-
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Pelaksanaan desk maturitas manajemen risiko menunggu jadwal dari inspektorat	Mempersiapkan data dukung untuk desk maturitas manajemen risiko	Persiapkan data dukung untuk desk maturitas manajemen risiko	Selesai	Target nilai maturitas manajemen risiko mencapai target	September	T	-	-
		Pelaksanaan desk maturitas manajemen risiko akan dilaksanakan pada TW IV	Persiapkan data dukung dalam rangka desk maturitas manajemen risiko pada TW IV		Selesai	Desk maturitas manajemen risiko telah dilaksanakan dan nilai maturitas manajemen risiko mencapai target	Oktober-Desember 2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		Pelaksanaan desk maturitas manajemen risiko dilaksanakan pada bulan November 2025	Persiapkan data dukung dalam rangka desk maturitas manajemen risiko		Selesai	Telah dilaksanakan desk maturitas manajemen risiko pada tanggal 17 November 2025	Novembe r 2025	T	-	-
		Capaian Indeks Manajemen Risiko tidak mencapai target dengan nilai 2.844 dari target 2,850	Agar melakukan perbaikan berdasarkan catatan pada LHE yang akan disampaikan oleh inspektorat		Selesai	Melakukan rapat pembahasan tindak lanjut terhadap LHE yang disampaiakn oleh tim inspektorat	TW I 2026	Y	O-01-07	Daftar risiko yang dibuat tidak relevan dengan sasaran strategis
26	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Telah disusun tim RB dalam melakukan pelaksanaan RB. Perlu disusun LKE ZI pada bulan April	Agar menyusun LKE ZI dan melaksanakan Monev Renja TW I sesuai target bulan April	Menyusun LKE ZI dan Monev Pelaksanaan Renja TW	Selesai	LKE ZI Balai POM Sanggau telah disusun dan pelaksanaan RB sesuai dengan Renja	April 2025	Y	O-01-08	Pelaksanaan Rencana Kerja RB tidak dimonitoring secara berkala
		Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi sesuai dengan target Renja bulan Juni	Agar dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja pada TW II	Melakukan monev renja pada TW II	Selesai	Pelaksanaan RB sesuai dengan Renja pada masing-masing area dan dilaksanakan TL terhadap monev renja	Juli 2025	Y	O-01-08	Pelaksanaan Rencana Kerja RB tidak dimonitoring secara berkala
		Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi sesuai	Agar dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja TW III pada Bulan Oktober	Melakukan monev renja TW III	Selesai	Pelaksanaan RB sesuai dengan Renja pada	Oktober 2025	Y	O-01-08	Pelaksanaan Rencana Kerja RB tidak dimonitoring

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		dengan target Renja bulan Juli - Agustus				masing-masing area dan dilaksanakan TL terhadap monev renja TW III				secara berkala
			Agar dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2025 dan melaksanakan perencanaan kegiatan reformasi birokrasi dengan memperhatikan target dan penilaian ZI Tahun 2026		Selesai	Tim kerja ZI dan rencana kerja telah disusun untuk pelaksanaan ZI di tahun 2026	Januari - Maret 2026	T	-	-

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja merupakan elemen krusial dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi kinerja memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi organisasi. Adapun pemanfaatan informasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa aspek berikut:

a. Penyesuaian Aktivitas/Kegiatan untuk Mencapai Target Kinerja

- Pada awal tahun 2025 terdapat beberapa penyesuaian aktivitas atau kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan reagen dan kemampuan pengujian dalam melakukan pengujian sampel, sehingga pada awal tahun berjalan di bulan Januari 2026 dilakukan koordinasi bersama Balai Koordinator dalam penetapan rencana sampling di tahun berjalan. Selain dengan koordinasi berbagai fungsi juga dilakukan Penguatan Perencanaan Sampling Berbasis Risiko dimana kegiatan sampling dilakukan dengan Menyusun rencana pengambilan sampel Sediaan Farmasi dengan pendekatan berbasis risiko, seperti produk dengan riwayat ketidaksesuaian, produk dengan peredaran luas, atau produk yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan tinggi sesuai dengan pedoman sampling yang berlaku. selain itu juga dilakukan Optimalisasi Pelaksanaan Pengambilan Sampel dengan menyesuaikan jadwal dan lokasi sampling agar cakupan pengambilan sampel lebih efektif dan sesuai dengan target serta meningkatkan koordinasi antara petugas pengawas dan laboratorium untuk memastikan proses pengujian berjalan tepat waktu.
- Pada awal tahun 2025 dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan aktivitas dan kegiatan dengan mempertimbangkan ketersediaan reagen serta kapasitas pengujian laboratorium dalam pelaksanaan pengujian sampel. Sehubungan dengan hal tersebut, pada awal tahun berjalan, telah dilaksanakan koordinasi dengan Balai Koordinator dalam rangka penetapan rencana sampling tahun berjalan. Optimalisasi pelaksanaan pengambilan sampel melalui penyesuaian jadwal dan lokasi sampling guna meningkatkan efektivitas cakupan pengambilan sampel agar selaras dengan target yang telah ditetapkan
- Terbatasnya anggaran di tahun 2025 terlebih IKU Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT tidak memiliki anggaran khusus sehingga dilakukan penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai kinerja, salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi dengan petugas pengambil sampel dan Dinas Kesehatan tempat KLP KP terjadi. Hal ini merupakan upaya Balai POM di Sanggau

memastikan sampel yang diambil telah ditangani dengan baik dan telusur epidemiologi KLB KP dilaksanakan secara lengkap. Sehingga dugaan agen penyebab dapat disimpulkan dan sampel dapat dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak.

- Penyesuaian aktivitas perlu dilakukan dalam Komponen keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Perlu dilakukan strategi untuk tercapainya komponen ini diantaranya, melakukan *desk CAPA* baik secara daring maupun luring yang dibarengi dengan kegiatan bimtek AMR di kabupaten yang menjadi target untuk mengefisienkan anggaran dan kegiatan. Selain itu aktivitas monitoring dan pendampingan penyusunan CAPA merupakan hal yang penting, agar pelaku usaha dapat memahami seluruh temuan dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedepannya diperlukan mempertahankan koordinasi yang baik, guna mempertahankan komponen keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan yang mendapat surat rekomendasi tindak lanjut.
- Pada tahun 2025, terdapat perubahan definisi operasional indikator kinerja unit dimana perhitungan dalam kegiatan pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi dihitung sebagai proses dengan memperhitungkan beberapa aspek seperti pada pemeriksaan sarana produksi OBA, proses yang dinilai yaitu kesesuaian pelaksanaan inspeksi, Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat, Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi serta Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana. Dalam mencapai target yang diharapkan dilakukan brainstorming bersama petugas untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan inspeksi kemudian dilakukan reminder ketepatan waktu pelaksanaan dimana timeline pelaporan sesuai juknis yaitu 25 HK sejak tanggal pemeriksaan. Dalam peningkatan akurasi penentuan kesimpulan dan kesesuaian tindak lanjut dilakukan verifikasi bertingkat dari ketua tim, koordinator fungsi yang dalam hal ini adalah supervisor SIPT dan Kepala Balai POM di Sanggau sehingga didapatkan kesesuaian proses pemeriksaan sarana produksi dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025, Balai POM di Sanggau telah memiliki 1 sarana produksi Kosmetik di Kab Sintang, namun tidak terdapat target pemeriksaan untuk sarana produksi Kosmetik pada tahun berjalan, sehingga dilakukan pengajuan revisi target pemeriksaan sarana produksi pangan menjadi sarana produksi Kosmetik pada tahun berjalan dan disetujui. Proses pemeriksaan sarana produksi Kosmetik juga

berjalan sesuai dengan ketentuan dengan menjalankan proses yang sama dengan pemeriksaan sarana produksi OBA.

- Pada tahun 2025, terdapat perubahan definisi operasional indikator kinerja unit dimana perhitungan dalam kegiatan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan dihitung sebagai proses dengan memperhitungkan beberapa aspek seperti pada ketepatan waktu pelaporan kegiatan dengan timeline tanggal 10 bulan berikutnya, kesesuaian tindak lanjut serta kesesuaian grading yang berhubungan dengan indeks kepatuhan pelaku usaha. Pada tahun 2025, target pemeriksaan sarana produksi pangan dipindahkan 1 sarana ke sarana produksi Kosmetik sehingga dilakukan penyesuaian terhadap penentuan prioritas pengawasan sarana produksi. Penentuan prioritas pengawasan dalam perencanaan menjadi langkah awal dalam mencapai target kinerja, selain itu diperlukan reminder dan Monitoring dan Evaluasi Berkala agar target kinerja dapat tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2025 terdapat beberapa perubahan definisi operasional dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi dimana pada tahun 2025 yang dinilai dalam aktivitas kegiatan adalah proses pemeriksaan yang dilakukan. Terdapat beberapa penyesuaian kegiatan dalam mencapai target kinerja yang ada seperti Pemetaan dan Penetapan prioritas pengawasan. Petugas pada awal tahun berjalan melakukan pemutakhiran database fasilitas distribusi Sediaan Farmasi kemudian melakukan penyusunan pemetaan risiko fasilitas untuk menentukan prioritas pemeriksaan (risk-based inspection) serta melakukan penetapan target pemeriksaan per triwulan/bulan berdasarkan jumlah fasilitas yang ada. Selain itu dilakukan
- Pada tahun 2025 terdapat beberapa perubahan definisi operasional dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan dimana pada tahun 2025 yang dinilai dalam aktivitas kegiatan adalah proses pemeriksaan yang dilakukan. Terdapat beberapa penyesuaian kegiatan dalam mencapai target kinerja yang ada seperti Pemutakhiran Data Sarana Distribusi dengan melakukan pemutakhiran dan verifikasi database sarana distribusi Pangan Olahan (distributor, gudang, ritel modern, dan sarana lainnya) di wilayah kerja untuk memastikan jumlah dan lokasi sarana yang menjadi target pemeriksaan akurat serta memudahkan penentuan prioritas pengawasan. selain itu perlu dilakukan monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja. Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala (bulanan atau triwulanan) diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan dan tindak

lanjut serta menyusun langkah percepatan apabila capaian belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

- Pada Komponen persentase jumlah penggunaan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek memiliki realisasi 11 sarana dari target 12 sarana. Hal ini dibantu dengan persen ketepatan pengisian tools yang melebihi target. Kedepannya pada komponen ini diperlukan strategi guna mencapai target sarana yang diperiksa menggunakan tools AMR. Selain itu pada tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian aktivitas dalam pelaksanaan bimtek AMR, dimana kegiatan ini dibarengi dengan Launching Ayo Buang Sampah Obat guna meningkatkan efektifitas kegiatan.
- Komponen parameter pemenuhan alat tidak dapat ditingkatkan pada tahun 2025 dikarenakan Balai POM di Sanggau belum mendapatkan anggaran pengadaan alat laboratorium, sehingga selama tahun 2025 komponen pemenuhan alat tidak terdapat kegiatan untuk mencapai target kinerja. Komponen pemenuhan kompetensi laboratorium masih dapat dilakukan peningkatan dengan memastikan seluruh ruang lingkup telah di ampu minimal oleh 2 orang penguji, kegiatan komponen ini dapat disesuaikan untuk tahun 2026 sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja. Selain itu komponen terbesar untuk meningkatkan nilai SKL adalah komponen Pemenuhan ruang lingkup. Balai POM di Sanggau selama tahun 2025 telah menambahkan ruang lingkup Obat sebanyak 14 Metode analisis Obat dan ruang lingkup pangan sebanyak 3 jenis parameter.
- Terbatasnya anggaran di tahun 2025 terlebih IKU Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi tidak memiliki anggaran khusus sehingga dilakukan penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja, salah satunya adalah dengan melakukan advokasi maupun pendampingan melalui zoom meeting maupun via whatsapp untuk monitoring kegiatan.
- Pada tahun 2025, terdapat perubahan metode survei dalam kegiatan KIE, di mana survei dilakukan untuk mengukur efektivitas dua pendekatan sekaligus, yaitu KIE langsung (tatap muka) dan KIE melalui media. Berdasarkan hasil survei tersebut, KIE langsung terbukti memberikan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan KIE melalui media cetak. Atas dasar temuan ini, strategi kegiatan KIE selanjutnya difokuskan pada peningkatan frekuensi KIE interaktif di komunitas prioritas, penguatan peran kader dan pemangku kepentingan lokal sebagai perpanjangan tangan edukasi kepada masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan media digital dan media sosial untuk menjangkau sasaran yang lebih luas.

- Penyesuaian aktivitas dilakukan secara bertahap sejak awal tahun sebagai langkah antisipatif terhadap keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dan pemblokiran. Kondisi tersebut mengharuskan dilakukan penataan ulang perencanaan kegiatan agar pelaksanaan program tetap berjalan dan tidak menghambat pencapaian indikator kinerja. Pada tahun 2025, pelaksanaan advokasi bersamaan dengan program desa pangan aman dan pasar pangan aman yang berbasis komunitas. Sosialisasi keamanan pangan dan bimtek kader sekolah dilakukan secara offline, dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring dan sertifikasi. Terdapat penyesuaian pelaksanaan monitoring dan sertifikasi, dimana pada tahun sebelumnya dilaksanakan pada tahapan berbeda, namun pada tahun 2025 dilaksanakan dalam satu tahapan yang sama. Penyesuaian ini membuat pelaksanaan program sekolah yang membudayakan keamanan pangan lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kondisi lapangan, sehingga pencapaian target kinerja tidak hanya berorientasi pada jumlah sekolah yang diintervensi, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan implementasi program di wilayah kerja.
- Penyesuaian aktivitas dilakukan secara bertahap sejak awal tahun sebagai langkah antisipatif terhadap keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dan pemblokiran. Kondisi tersebut mengharuskan dilakukan penataan ulang perencanaan kegiatan agar pelaksanaan program tetap berjalan dan tidak menghambat pencapaian indikator kinerja. Tahapan Pengambilan data gap assessment/pre intervensi dan post intervensi, Fasilitasi Keamanan Pangan, dan Pengawasan Keamanan Pangan tidak dilakukan, sesuai dengan arahan Unit Pengampu yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Pada tahun 2025, pelaksanaan advokasi bersamaan dengan program sekolah yang membudayakan keamanan pangan dan pasar pangan aman yang berbasis komunitas. Pelatihan kader keamanan pangan desa, bimtek komunitas oleh kader, serta tahapan monitoring dan evaluasi dilakukan secara offline. Penyesuaian ini membuat pelaksanaan program Desa Pangan Aman lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kondisi lapangan, sehingga pencapaian target kinerja tidak hanya berorientasi pada jumlah desa yang diintervensi, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan implementasi program di wilayah kerja.
- Penyesuaian aktivitas dilakukan secara bertahap sejak awal tahun sebagai langkah antisipatif terhadap keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dan pemblokiran. Kondisi tersebut mengharuskan dilakukan penataan ulang perencanaan kegiatan agar pelaksanaan program tetap berjalan dan tidak menghambat pencapaian indikator

kinerja. Tahapan survei pasar serta sampling dan pengujian tidak dilakukan pada tahun 2025. Tahapan bimbingan teknis petugas pengelola pasar dan penyuluhan pedagang pasar disesuaikan menjadi tahapan bimtek dan penyuluhan komunitas pasar. Tahapan kampanye keamanan pangan pasar disesuaikan menjadi tahapan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar. Penyesuaian ini membuat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kondisi lapangan, sehingga pencapaian target kinerja tidak hanya berorientasi pada jumlah pasar yang diintervensi, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan implementasi program di wilayah kerja.

- Penyesuaian aktivitas dilakukan secara bertahap sejak awal tahun sebagai langkah antisipatif terhadap keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dan pemblokiran. Kondisi tersebut mengharuskan dilakukan penataan ulang perencanaan kegiatan agar pelaksanaan program tetap berjalan dan tidak menghambat pencapaian indikator kinerja. Penyesuaian Tahapan sosialisasi, bimbingan teknis dan beberapa kegiatan fasilitasi dokumen dilakukan secara daring.

  Penyesuaian ini membuat pelaksanaan program pendampingan UMKM lebih efektif, efisien, dan adaptif, sehingga pencapaian target kinerja tidak hanya berorientasi pada jumlah UMKM yang memperoleh sertifikat IP-CPPOB, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan implementasi pedoman CPPOB tersebut.
- Kejahatan khususnya di bidang Obat dan Makanan tidak dapat diprediksi kapan, dimana, dan berapa jumlahnya yang akan terjadi, serta Perkembangan teknologi yang canggih sehingga peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak luput dari peredaran secara daring dengan memanfaatkan media sosial serta *marketplace.* BPOM di Sanggau sebagai unit kerja yang salah satu tugas dan fungsinya melindungi masyarakat dari kejahatan di bidang Obat dan Makanan diharuskan menjamin perlindungan baik melalui pengawasan langsung di sarana maupun secara lebih fleksibel dengan melakukan pengawasan secara daring
- Pembuatan laporan Profiling terhadap sarana yang menjual Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara daring, pengumpulan bahan keterangan yang diolah menjadi Analisis Kerawanan Kejahatan dan tindak lanjut atas Rekomendasi Cegah Tangkal yang dikirimkan ke UPT merupakan komponen yang mendukung pencapaian atas indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar. Seluruh kegiatan yang menunjang dalam Indikator ini dapat terlaksana secara efektif meskipun terdapat kendala pada system aplikasi

serta website yang digunakan untuk pelaporan, blokir anggaran pada tahun 2025 juga tidak berpengaruh kepada pencapaian atas indikator ini.

- Capaian indikator indeks pelayanan publik UPT dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam peningkatan kinerja tahun berikutnya. Peningkatan dapat dilakukan dengan melakukan pemutakhiran informasi publik secara berkala (setiap hari kerja) melalui media sosial yang dimiliki oleh Balai POM di Sanggau. untuk mendukung upaya ini, dilakukan penetapan PIC dan dilakukan monitoring setiap hari.
- Balai POM di Sanggau telah berupaya melakukan penyesuaian aktivitas untuk mencapai target kinerja seperti menyusun dokumen perencanaan, pengukuran, serta pelaporan kinerja. Mempublikasikan dokumen melalui media yang mudah diakses oleh stakeholder, menyusun SOP Mikro terkait pengumpulan data kinerja, pimpinan terlibat langsung dalam rapat evaluasi internal, dan juga pemberian reward and punishment. Aktivitas kegiatan ini mendukung dalam pencapaian nilai AKIP di Balai POM di Sanggau.
- Balai POM di Sanggau melakukan penyesuaian aktivitas berdasarkan evaluasi indikator IKPA melalui langkah-langkah strategis seperti membatasi frekuensi revisi untuk menjaga stabilitas poin IKPA, menyelaraskan kalender kegiatan dengan RPD pada Halaman III DIPA untuk menekan deviasi antara rencana dan realisasi belanja, mengakselerasi kontrak belanja barang, menerapkan evaluasi saldo UP/TUP setiap akhir pekan untuk mempercepat proses revolving UP, Menetapkan deadline internal pengajuan TUP lebih awal untuk menghindari keterlambatan di akhir tahun, serta memastikan pelaporan capaian fisik (*output*) dilakukan secara tepat waktu dan valid.
- Dalam mencapai target kinerja Indeks manajemen risiko Balai POM di Sanggau melakukan beberapa penyesuaian melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara intensif dan berkala, menyusun rencana pengembanagan kompetensi secara berkesinambungan, mendorong keterlibatan dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pengelolaan manajemen risiko
- Capaian indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Balai POM di Sanggau dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam peningkatan kinerja tahun berikutnya. Ketercapaian persentase implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2025 ini menjadi langkah strategis awal dalam mendukung pemenuhan Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) UPT Balai POM di Sanggau pada tahun 2026, sekaligus memperkuat komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel

b. Penyesuaian Penggunaan Anggaran

- Pada awal tahun 2025 terdapat beberapa penyesuaian anggaran yang berakhir dengan adanya relaksasi anggaran untuk beberapa kegiatan fungsi pemeriksaan salah satunya adalah kegiatan sampling. Pada januari - Maret 2025, kegiatan sampling dilakukan dengan penyesuaian anggaran sesuai dengan instruksi adanya pemblokiran anggaran. Pada bulan April 2025 kegiatan yang dilaksanakan telah mengikuti adanya relaksasi anggaran sehingga terdapat beberapa penyesuaian kembali dalam perencanaan sampling di tahun berjalan. Kembali dilakukan koordinasi antara petugas pengawas dan laboratorium dalam kapasitas pengujian. Koordinasi yang baik dan penetapan analisis risiko yang tepat menjadi pendukung dalam penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
- Pada awal tahun 2025 terdapat beberapa penyesuaian anggaran yang berakhir dengan adanya relaksasi anggaran untuk beberapa kegiatan fungsi pemeriksaan salah satunya adalah kegiatan sampling Pangan Olahan. Pada Januari - Maret 2025, kegiatan sampling dilakukan dengan penyesuaian anggaran sesuai dengan instruksi adanya pemblokiran anggaran. Pada bulan April 2025 kegiatan yang dilaksanakan telah mengikuti adanya relaksasi anggaran sehingga terdapat beberapa penyesuaian kembali dalam perencanaan sampling di tahun berjalan. Kembali dilakukan koordinasi antara petugas pengawas dan laboratorium dalam kapasitas pengujian. Koordinasi yang baik dan penetapan analisis risiko yang tepat menjadi pendukung dalam penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
- Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT tidak memiliki anggaran khusus. Kegiatan yang berhubungan dengan IKU ini digabungkan dengan kegiatan koordinasi lintas sektor. Kegiatan seperti sampling sampel dugaan KLB belum dapat dilakukan pada tahun 2025 karena lokasi yang cukup jauh untuk di jangkau .
- Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tidak memiliki anggaran khusus. Kegiatan yang berhubungan dengan IKU ini digabungkan dengan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi dan sarana produksi. Selama tahun 2025 dilakukan beberapa aktivitas guna efisiensi anggaran dan pelaksanaan kegiatan, yaitu dilakukan desk CAPA menggunakan media zoom dan desk CAPA secara langsung pada saat pertemuan luring BIMTEK AMR yang mengundang seluruh apoteker penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian.

- Penyesuaian anggaran yang berjalan pada bulan Januari - Maret 2026 yang berakhir dengan adanya relaksasi anggaran dalam pengawasan sarana produksi menyebabkan beberapa kegiatan mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan. Dibutuhkan strategi dalam menyusun anggaran sarana produksi yang cukup terbatas dimana sarana produksi yang ada di wilayah kerja Balai POM di Sanggau tidak seluruhnya berada di kab Sanggau, namun juga tersebar di 4 kabupaten lainnya. Penentuan prioritas pengawasan juga diperlukan untuk menetapkan sarana produksi yang akan dilakukan pemeriksaan, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran serta sumber daya yang ada.
- Penyesuaian anggaran yang berjalan pada bulan Januari - Maret 2026 yang berakhir dengan adanya relaksasi anggaran dalam pengawasan sarana produksi menyebabkan beberapa kegiatan mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan. Dibutuhkan strategi dalam menyusun anggaran sarana produksi yang cukup terbatas dimana sarana produksi yang ada di wilayah kerja Balai POM di Sanggau tidak seluruhnya berada di kab Sanggau, namun juga tersebar di 4 kabupaten lainnya. Penentuan prioritas pengawasan juga diperlukan untuk menetapkan sarana produksi yang akan dilakukan pemeriksaan, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran serta sumber daya yang ada.
- Penyesuaian anggaran yang berjalan pada bulan Januari - Maret 2026 yang berakhir dengan adanya relaksasi anggaran dalam pengawasan sarana distribusi menyebabkan beberapa kegiatan mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan. Anggaran yang tersedia dalam pengawasan sarana distribusi tidak hanya digunakan untuk melakukan pengawasan sarana distribusi rutin namun juga terhadap penelusuran kasus, intensifikasi pengawasan menjelang hari raya, serta bimbingan teknis dalam peningkatan kompetensi petugas pelayanan kefarmasian di wilayah kerja Balai POM di Sanggau salah satunya terkait Antimicrobial resistance dan aksi ayo buang sampah Obat. Dengan demikian diperlukan analisis prioritas serta strategi dalam menyusun anggaran sarana distribusi seperti dilakukan optimalisasi Jadwal Pemeriksaan dengan mengoptimalkan pemeriksaan terpadu (misalnya satu tim melakukan pemeriksaan terhadap beberapa fasilitas dalam satu wilayah).
- Penyesuaian anggaran yang berjalan pada bulan Januari - Maret 2026 yang berakhir dengan adanya relaksasi anggaran dalam pengawasan sarana distribusi menyebabkan beberapa kegiatan mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan. Anggaran yang tersedia dalam pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan melekat pada

anggaran pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi, sehingga anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk melakukan pengawasan sarana distribusi rutin namun juga terhadap penelusuran kasus, intensifikasi pengawasan menjelang hari raya, serta bimbingan teknis dalam peningkatan kompetensi petugas pelayanan kefarmasian di wilayah kerja Balai POM di Sanggau salah satunya terkait Antimicrobial resistance dan aksi ayo buang sampah Obat. Dengan demikian perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan dengan Meningkatkan intensitas pemeriksaan melalui penyusunan jadwal pemeriksaan yang lebih terencana (bulanan/triwulanan), optimalisasi pembagian tim pemeriksa, serta pelaksanaan pemeriksaan terpadu pada wilayah yang berdekatan guna meningkatkan jumlah sarana yang diperiksa.

- Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT memiliki RO anggaran yang sama dengan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi. Penyesuaian penggunaan anggaran telah dilakukan guna terlaksananya bimtek AMR, dimana kegiatan ini dibarengi dengan Launching Ayo Buang Sampah Obat guna meningkatkan efisiensi anggaran. Serta berbagai revisi anggaran dilakukan selama tahun 2025 guna menyesuaikan realisasi kegiatan pengendalian AMR di Balai POM di Sanggau.
- Selama tahun 2025 penyesuaian anggaran dilakukan guna mencapai target kinerja . Anggaran difokuskan pada kegiatan pemenuhan ruang lingkup Obat yaitu pengadaan reagensia yang dibutuhkan dan pengadaan *glassware*. Selain itu penyesuaian anggaran juga dilakukan dalam kegiatan peningkatan kompetensi petugas, dari yang sebelumnya luring menjadi daring. Kedepannya, diperlukan perencanaan anggaran yang lebih mendalam dalam kegiatan pengadaan reagensia yang akan digunakan dalam pemenuhan ruang lingkup serta penyesuaian anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas mobil laboratorium.
- Presentase kab/kota yang didampingi dalam pencapaian Kab/kota pangan aman tidak memiliki anggaran khusus. Kegiatan yang berhubungan dengan IKU ini digabungkan dengan kegiatan sampling produk pangan dan pengawasan sarana produksi pangan di sarana. Kegiatan seperti advokasi dan pendampingan sebagian besar dilaksanakan melalui kegiatan zoom ataupun melalui daring.
- Blokir anggaran dari bulan Januari hingga Desember 2025 menyebabkan penyesuaian target pada layanan publikasi Obat dan makanan serta perubahan strategi pelaksanaan KIE. Pelaksanaan yang semula dilakukan secara offline yang berpusat di suatu tempat pertemuan berubah menjadi KIE langsung ditempat peserta berada. Hal itulah yang mendasari pelaksanaan KIE selama tahun 2025 dilakukan di

sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerja Balai POM di Sanggau. Perubahan target layanan publikasi yang semula terdiri dari KIE elektronik,media cetak, dan media luar ruang berubah menjadi optimalisasi KIE melalui media sosial sepanjang tahun 2025

- Blokir anggaran dari bulan Januari hingga Maret 2025 menyebabkan tertundanya pelaksanaan beberapa tahapan kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun, termasuk advokasi lintas sektor, sosialisasi kepada sekolah sasaran, serta persiapan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah. Selain berdampak pada pergeseran jadwal, kondisi tersebut juga membatasi ruang gerak dalam melakukan penugasan lapangan dan koordinasi langsung dengan pemerintah daerah. Prioritas anggaran difokuskan pada kegiatan inti yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian IKU, seperti pelaksanaan Bimtek kader, monitoring, dan sertifikasi sekolah. Selain itu, dilakukan efisiensi biaya melalui pengelompokan lokasi sekolah agar lebih efektif dari sisi perjalanan dinas, serta pemanfaatan media daring untuk kegiatan koordinasi.
- Blokir anggaran dari bulan Januari hingga Maret 2025 menyebabkan tertundanya pelaksanaan beberapa tahapan kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun, termasuk advokasi lintas sektor, persiapan bimbingan teknis kader dan bimtek komunitas. Selain berdampak pada pergeseran jadwal, kondisi tersebut juga membatasi ruang gerak dalam melakukan penugasan lapangan dan koordinasi langsung dengan pemerintah daerah. Balai POM di Sanggau memprioritaskan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap ketercapaian jumlah desa pangan aman. Anggaran difokuskan pada kegiatan advokasi, pelatihan kader keamanan pangan desa, serta monitoring dan evaluasi, sehingga penggunaan sumber daya keuangan dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian target.
- Blokir anggaran dari bulan Januari hingga Maret 2025 menyebabkan tertundanya pelaksanaan beberapa tahapan kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun, termasuk advokasi lintas sektor, persiapan bimbingan teknis dan penyuluhan komunitas pasar. Balai POM di Sanggau memprioritaskan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap ketercapaian jumlah desa pangan aman . Anggaran difokuskan pada kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan komunitas pasar. Selain itu, dilakukan efisiensi biaya melalui pemanfaatan media daring/media lainnya untuk kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasa sehingga penggunaan sumber daya keuangan dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian target.

- Blokir anggaran dari bulan Januari hingga Maret 2025 menyebabkan tertundanya pelaksanaan beberapa tahapan kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun, yaitu sosialisasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi/pendampingan secara luring/tatap muka langsung. Anggaran difokuskan pada kegiatan pelaksanaan pendampingan/fasilitasi yang sifatnya harus melakukan observasi langsung untuk melihat alur, layout dan sarana prasarana UMKM di tempat produksi. Selain itu, dilakukan efisiensi biaya melalui pemanfaatan media daring (konsultasi by WA chat dan zoom) untuk kegiatan pendampingan sehingga penggunaan sumber daya keuangan dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian target.
- Berdasarkan Capaian target pada tahun 2025, Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan masih berada diatas target yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra pada tahun 2025 sehingga target tahun 2026 dapat menyesuaikan dengan DIPA Tahun 2026.
- Terdapat blokir anggaran pada tahun 2025 yang digunakan untuk mendukung indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, pemblokiran sepenuhnya hingga pada akhir tahun 2025 menyebabkan pencapaian atas indikator ini sama sekali tidak menggunakan anggaran.
- Blokir anggaran dari bulan Januari hingga Desember 2025 menyebabkan penyesuaian pelaksanaan publikasi standar layanan publik dan publikasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Anggaran difokuskan pada kegiatan pelaksanaan publikasi standar pelayanan publik menggunakan media luar ruang berupa spanduk, dan optimalisasi publikasi menggunakan subsite dan media sosial Balai POM di Sanggau.
- Implementasi SAKIP tahun 2025 telah menunjukkan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Meski demikian, LHE mencatat bahwa pada periode sebelumnya, belum menyajikan informasi yang memadai terkait upaya atau penyebab kegagalan terkait efisiensi maupun inefisiensi penggunaan sumber daya di setiap capaian sasaran. Kedepannya, diperlukan analisis anggaran yang lebih mendalam pada matriks tersebut untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar selaras dengan pencapaian realisasi kinerja.
- Balai POM di Sanggau melakukan refocusing dan efisiensi alokasi anggaran guna memastikan ketahanan fiskal organisasi di tengah kebijakan pembatasan belanja. Penyesuaian tersebut adalah melakukan pemetaan dan pemblokiran mandiri terhadap pos belanja non-prioritas sesuai instruksi Presiden, mengalihkan fokus penggunaan sisa pagu dari kegiatan yang terhambat ke kegiatan yang lebih urgent, mengatur ulang

pola penyerapan anggaran agar lebih proporsional setiap bulan, memperketat penggunaan Uang Persediaan hanya untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan memiliki bukti pertanggungjawaban yang cepat

- Penyesuaian penggunaan anggaran dalam mendukung indeks manajemen risiko Balai POM di Sanggau dengan pemanfaatan pelatihan yang diakomodir oleh IDEAS, mengikuti kegiatan yang bersifat daring seperti kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan risiko.
- Penyesuaian penggunaan anggaran dalam mendukung kegiatan persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan pemanfaatan kegiatan yang bersifat daring seperti kegiatan sosialisasi dan internalisasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mempublikasikan kegiatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan UPT

c. Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja dan Tindak Lanjut

- Pada tahap evaluasi kinerja, informasi yang tertuang dalam laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan sampel Sediaan Farmasi. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai, ketepatan pemilihan sasaran, serta optimalisasi penggunaan anggaran. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi perbaikan dan rencana aksi, antara lain penyesuaian aktivitas pemeriksaan serta pengoptimalan dalam penggunaan anggaran dan sumber daya.
- Pada tahap evaluasi kinerja, informasi yang tertuang dalam laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan sampel sediaan Pangan Olahan. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, hasil yang dicapai, serta optimalisasi penggunaan anggaran. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi perbaikan dan rencana aksi, antara lain penyesuaian aktivitas sampling serta pengoptimalan dalam penggunaan anggaran dan sumber daya.
- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar pada Balai POM di Sanggau tidak dapat diukur sepanjang tahun 2025. Kondisi ini terjadi dikarenakan tidak adanya sampel KLB keracunan pangan yang disampling oleh petugas Balai POM di Sanggau selama periode tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan kendala aksesibilitas geografis yang menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan respons lapangan. Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang terjadi di wilayah kerja Balai POM di Sanggau pada tahun

2025 berlokasi di daerah yang cukup jauh dan sulit dijangkau, sehingga petugas Balai POM di Sanggau tidak dapat melakukan pengambilan sampel secara langsung di lokasi kejadian. Dengan kondisi demikian, realisasi indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar pada tahun 2025 tercatat sebesar 0% atau tidak terdapat realisasi sama sekali, sehingga capaian kinerja pada indikator ini tidak dapat ditetapkan dan dievaluasi secara kuantitatif. Ke depannya, Balai POM di Sanggau perlu memperkuat koordinasi dengan Puskesmas dan fasilitas kesehatan di wilayah kerja, serta mengembangkan mekanisme respons cepat yang mempertimbangkan kondisi geografis wilayah Kalimantan Barat, guna memastikan bahwa setiap kejadian KLB keracunan pangan dapat ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel yang sesuai standar oleh petugas yang berwenang.

- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Balai POM di Sanggau adalah 98,66 dari target 95. Nilai ini didapatkan dari komponen rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebesar 100%, artinya telah seluruh rekomendasi ditindaklanjuti. Sedangkan persen nilai rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah 97,3%, artinya pada akhir tahun 2025 terdapat pelaku usaha yang belum menindaklanjuti keputusan/rekomendasi yang diberikan. Nilai ini menjadi evaluasi kinerja kedepannya, dimana diperlukan strategi lebih baik lagi dalam hal monitoring rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.
- Pada tahap evaluasi kinerja, informasi yang tertuang dalam laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan sarana produksi. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai, ketepatan pemilihan sasaran, serta optimalisasi penggunaan anggaran. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi perbaikan dan rencana aksi, antara lain penyesuaian aktivitas pemeriksaan serta pengoptimalan dalam penggunaan anggaran dan sumber daya.
- Pada tahap evaluasi kinerja, informasi yang tertuang dalam laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan sarana produksi. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai, ketepatan pemilihan sasaran, serta optimalisasi penggunaan anggaran. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi perbaikan dan rencana aksi, antara lain penyesuaian aktivitas pemeriksaan serta pengoptimalan dalam penggunaan anggaran dan sumber daya.

- Pada tahap evaluasi kinerja, informasi yang tertuang dalam laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan sarana distribusi. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai, ketepatan pemilihan sasaran, serta optimalisasi penggunaan anggaran. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi perbaikan dan rencana aksi, antara lain penyesuaian aktivitas pemeriksaan serta pengoptimalan dalam penggunaan anggaran dan sumber daya.
- Pada tahap evaluasi kinerja, informasi yang tertuang dalam laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan sarana distribusi. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai, ketepatan pemilihan sasaran, serta optimalisasi penggunaan anggaran. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi perbaikan dan rencana aksi, antara lain penyesuaian aktivitas pemeriksaan serta pengoptimalan dalam penggunaan anggaran dan sumber daya.
- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Balai POM di Sanggau adalah 100%. Nilai ini didapatkan dari komponen Komponen pertama IKU yaitu persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek sebesar 100%. Komponen kedua berupa bimbingan teknis pengendalian AMR telah dilakukan sebanyak 1 kali sesuai target. Komponen ketiga yaitu publikasi hasil pengawasan pengendalian resistensi antibiotik oleh UPT yang memiliki target melakukan 2 publikasi dan telah terlaksana 100%. Serta Kegiatan advokasi sebagai komponen ke-4 dari IKU pengendalian AMR di wilayah UPT telah terlaksana pada tanggal 13 November 2025 dengan realisasi 100%.
- Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 telah melebihi target pada triwulan satu berdasarkan penetapan target di awal tahun, sehingga dilakukan evaluasi kembali terhadap target kinerja tahunan. Pada triwulan 2 dilakukan tindak lanjut berupa pengajuan revisi target tahunan yang dari sebelumnya 11,5 menjadi 12 hingga akhir tahun 2025. Realisasi akhir pada triwulan 4 adalah 13,18 dengan capaian 109,83 %.
- Pada tahap evaluasi kinerja, dilakukan monitoring dan evaluasi hambatan serta kendala yang dihadapi dalam mencapai keberhasilan kinerja. Komitmen dan koordinasi yang baik antara UPT dan lintas sektor menjadi pendukung keberhasilan kinerja ini.

Tindak lanjut difokuskan pada peningkatan komitmen daerah, pendampingan teknis berkelanjutan, dan replikasi praktik baik guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan capaian pada periode berikutnya.

- Pada tahap evaluasi kinerja, informasi yang tertuang dalam laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan KIE. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai, termasuk efektivitas pesan, ketepatan pemilihan sasaran, serta optimalisasi penggunaan anggaran. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi perbaikan dan rencana aksi, antara lain penyesuaian aktivitas KIE, penguatan pemanfaatan media komunikasi, serta peningkatan peran mitra kerja dalam mendukung keberhasilan program.
- Informasi yang tertuang dalam laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan program sekolah yang membudayakan keamanan pangan. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Hal ini mencakup seluruh tahapan mulai dari penetapan sekolah intervensi, pembinaan dan edukasi kepada siswa, guru, dan pengelola kantin, hingga penilaian akhir untuk mengukur perubahan perilaku komunitas sekolah terhadap keamanan pangan
- Informasi yang tertuang dalam laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan program desa pangan aman. Hal ini mencakup seluruh tahapan mulai dari pemilihan desa lokus intervensi, pembentukan kader keamanan pangan pangan desa, pelaksanaan bimtek kepada komunitas oleh kader, hingga penilaian akhir untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan komunitas terkait keamanan pangan melalui *pre-post test.* Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai langkah untuk mengukur tingkat keberhasilan program, yang selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi Program Desa Pangan Aman secara mandiri ke depannya.
- Informasi yang tertuang dalam laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Hal ini mencakup seluruh tahapan mulai dari penetapan lokus pasar yang diintervensi, pembentukan dan penguatan kader keamanan pangan di lingkungan pasar, pelaksanaan intervensi dan edukasi kepada pedagang serta pengelola pasar mengenai Cek KLIK hingga penilaian akhir untuk mengukur perubahan perilaku pedagang terhadap keamanan pangan.

- Informasi yang tertuang dalam laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan program pendampingan UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan. Hal ini mencakup seluruh tahapan mulai dari sosialisasi, penetapan target UMKM, bimbingan teknis , pendampingan/fasilitasi, hingga pelaporan.
- Pemenuhan perbaikan berkas perkara yang dituangkan oleh Jaksa dalam P19 menjadi salah satu tantangan bagi Penyidik yang menyebabkan waktu dan anggaran dalam proses pemberkasan menjadi lebih panjang sehingga tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan serta adanya ketidaksesuaian waktu antara Penyidik dan Jaksa dalam hal koordinasi serta konfirmasi atas petunjuk jaksa (beberapa kali Penyidik datang untuk melakukan koordinasi ke Kejari Sintang namun tidak dapat bertemu dengan jaksa). Namun hal ini diatasi dengan melakukan komunikasi intensif secara daring untuk memastikan keselarasan pemahaman antara Jaksa Penuntut dan Penyidik.
- Pada tahun 2025 Terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaporan Patroli Siber melalui laman inawebcrawler.id dan pelaporan Profiling yang diakibatkan system ADP yang down sehingga tidak bisa di akses. Pelaporan patroli siber dan pelaporan profilling dialihkan secara manual dan dikirimkan melalui SRIKANDI untuk mencegah terjadinya keterlambatan pelaporan yang menyebabkan penurunan penilaian tepat waktu. Membangun komunikasi efektif dengan PIC Pusat serta sesama petugas di UPT lain dapat membantu dalam menemukan solusi atas kendala yang dihadapi dalam penyampaian laporan.
- Capaian penyelesaian layanan publik tepat waktu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan dikorelasikan dengan hasil survei kepuasan masyarakat yang juga dilaksanakan setiap bulan. Peningkatan hasil survei kepuasan masyarakat berbanding lurus dengan capaian penyelesaian layanan publik tepat waktu.
- Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Balai POM di Sanggau menunjukkan kinerja Balai POM di Sanggau berada pada kategori BB (Sangat Baik) dengan nilai total 75,63, naik tipis dari tahun sebelumnya. Meskipun komponen Perencanaan Kinerja meningkat, terdapat penurunan pada komponen Capaian Kinerja dari 17,31 menjadi 16,91. Hal ini menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat dalam mengimplementasikan saran perbaikan agar akuntabilitas kinerja terus meningkat.

- Balai POM di Sanggau secara konsisten melakukan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja anggaran untuk memastikan efektivitas kegiatan. Walaupun secara umum target kinerja fisik tercapai secara optimal, namun terdapat catatan pada aspek administratif seperti dispensasi SPM di akhir tahun lalu yang menjadi bahan evaluasi utama untuk perbaikan.
- Capaian indeks manajemen risiko Balai POM di Sanggau menunjukkan kinerja Balai POM di Sanggau berada pada tingkat maturitas risk aware dengan nilai 2,844, meningkat 0,031 dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian capaian Indeks manajemen risiko Balai POM di Sanggau belum memenuhi target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap rekomendasi yang telah disampaikan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
- Capaian realisasi program rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT dalam Laporan Kinerja dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan program tahun berikutnya. Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap capaian implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT dilakukan untuk memastikan efektivitas kegiatan.

d. Penyesuaian Perencanaan Kinerja Periode Berikutnya

- Dalam perencanaan kinerja berikutnya diperlukan adanya evaluasi terhadap tingkat pencapaian IKU, termasuk analisis kesenjangan antara target dan realisasi serta Mengidentifikasi faktor pendukung serta kendala yang mempengaruhi capaian kinerja. Perencanaan berbasis risiko juga diperlukan agar sumber daya dapat digunakan secara lebih efektif. Melakukan pembagian tugas yang lebih efektif serta meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan atau pembinaan juga diperlukan dalam evaluasi kinerja selanjutnya. Penyesuaian Target dan Strategi Pelaksanaan dengan Menyusun strategi pelaksanaan kegiatan yang lebih realistis dan terukur serta Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan capaian indikator kinerja menjadi catatan dalam perencanaan kinerja periode berikutnya.
- Realisasi indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Balai POM di Sanggau tahun 2025 telah melebihi target 2026 dan melebihi target 2029, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target di tahun 2026 dengan target minimal sama dengan realisasi 2025.
- Realisasi indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada 2025 belum dapat dievaluasi karena tidak ada sampel KLB KP diwilayah kerja yang di sampling oleh Balai POM di Sanggau. Hal ini menyebabkan

untuk penyesuaian target 2026 belum perlu dilakukan, sehingga target tahun 2026 tetap mengikuti target Renstra yaitu 100%.

- Realisasi indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Balai POM di Sanggau tahun 2025 telah melebihi target 2026 dan melebihi target 2029, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target di tahun 2026 dengan target minimal sama dengan realisasi 2025.
- Penyesuaian mencakup perencanaan pemeriksaan sarana produksi berbasis risiko dengan Penguatan Perencanaan Berbasis Risiko dimana perlu dilakukan analisis risiko terhadap seluruh sarana produksi Sediaan Farmasi, Optimalisasi Target dan Jadwal Pemeriksaan dengan Menyusun jadwal pemeriksaan yang lebih terstruktur agar seluruh sarana prioritas dapat tercakup dalam periode kinerja, Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Meningkatkan koordinasi antara tim pemeriksa, pengawas, dan unit terkait agar proses pemeriksaan dan tindak lanjut berjalan lebih cepat, Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas dengan Melakukan pelatihan atau peningkatan kompetensi bagi petugas pemeriksa agar pemeriksaan lebih efektif dan sesuai standar serta melakukan evaluasi Berkala terhadap Capaian IKU.
- Penyesuaian mencakup perencanaan pemeriksaan sarana produksi berbasis risiko dengan Penguatan Perencanaan Berbasis Risiko dimana perlu dilakukan analisis risiko terhadap seluruh sarana produksi Sediaan Farmasi, Optimalisasi Target dan Jadwal Pemeriksaan dengan Menyusun jadwal pemeriksaan yang lebih terstruktur agar seluruh sarana prioritas dapat tercakup dalam periode kinerja, Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Meningkatkan koordinasi antara tim pemeriksa, pengawas, dan unit terkait agar proses pemeriksaan dan tindak lanjut berjalan lebih cepat, Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas dengan Melakukan pelatihan atau peningkatan kompetensi bagi petugas pemeriksa agar pemeriksaan lebih efektif dan sesuai standar serta melakukan evaluasi Berkala terhadap Capaian IKU.
- Penyesuaian mencakup perencanaan pemeriksaan sarana produksi berbasis risiko dengan Penguatan Perencanaan Berbasis Risiko dimana perlu dilakukan analisis risiko terhadap seluruh sarana produksi Sediaan Farmasi, Optimalisasi Target dan Jadwal Pemeriksaan dengan Menyusun jadwal pemeriksaan yang lebih terstruktur agar seluruh sarana prioritas dapat tercakup dalam periode kinerja, Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Meningkatkan koordinasi antara tim pemeriksa, pengawas, dan unit terkait agar proses pemeriksaan dan tindak lanjut berjalan lebih cepat, Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas dengan Melakukan pelatihan atau peningkatan

kompetensi bagi petugas pemeriksa agar pemeriksaan lebih efektif dan sesuai standar serta melakukan evaluasi Berkala terhadap Capaian IKU.

- Penyesuaian mencakup perencanaan pemeriksaan sarana produksi berbasis risiko dengan Penguatan Perencanaan Berbasis Risiko dimana perlu dilakukan analisis risiko terhadap seluruh sarana produksi Sediaan Farmasi, Optimalisasi Target dan Jadwal Pemeriksaan dengan Menyusun jadwal pemeriksaan yang lebih terstruktur agar seluruh sarana prioritas dapat tercakup dalam periode kinerja, Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Meningkatkan koordinasi antara tim pemeriksa, pengawas, dan unit terkait agar proses pemeriksaan dan tindak lanjut berjalan lebih cepat, Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas dengan Melakukan pelatihan atau peningkatan kompetensi bagi petugas pemeriksa agar pemeriksaan lebih efektif dan sesuai standar serta melakukan evaluasi Berkala terhadap Capaian IKU.
- Realisasi indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Balai POM di Sanggau tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Sehingga tidak memerlukan penyesuaian target pada tahun 2026 hingga 2029 karena target sudah maksimal yaitu 100%.
- Laboratorium Balai POM di Sanggau pada tahun 2026 harus memenuhi standar Laboratorium tingkat 2 sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor 161 Tahun 2025 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini berbeda dengan tahun 2025, dimana penilaian IKU Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium masih menggunakan standar Laboratorium tingkat 1. Sehingga diperlukan penyesuaian perencanaan kinerja sesuai standar tersebut, diantaranya perencanaan pengembangan ruang lingkup komoditi baru selain Obat dan pangan. Penyesuaian ini dapat meningkatkan nilai dari komponen standar ruang lingkup dan kompetensi laboratorium. Selain itu diperlukan juga monitoring dan evaluasi terhadap capaian tiap triwulan, sehingga jika diperlukan penyesuain target dapat segera dilakukan di tahun berjalan.
- Penyesuaian mencakup penyempurnaan strategi pendampingan, penguatan alokasi sumber daya, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta penetapan prioritas wilayah berdasarkan tingkat risiko dan kesiapan daerah. Dengan demikian, perencanaan kinerja periode berikutnya diharapkan lebih efektif, adaptif, dan mampu meningkatkan capaian indikator secara berkelanjutan.

- Penyesuaian mencakup perencanaan KIE melalui media maupun pelaksanaan KIE langsung baik menggunakan media seperti zoom atau pelaksanaan offline dengan mendatangi audiens. KIE melalui media dilakukan secara rutin setiap bulannya dengan memanfaatkan media sosial maupun subsite Balai POM di Sanggau. Frekuensi pelaksanaan KIE langsung dilaksanakan sesuai dengan target jumlah audiens yang akan mendapatkan KIE pada periode berikutnya.
- Penyesuaian mencakup perencanaan pelaksanaan tiap tahapan program yaitu advokasi yang dilakukan pada periode Januari - April, sosialisasi keamanan pangan pada periode Maret - Mei, bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah pada periode Maret - Mei, serta monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada periode Juni - Juli.
- Penyesuaian mencakup perencanaan pelaksanaan tiap tahapan program yaitu advokasi kelembagaan desa yang dilakukan pada periode Februari - April, Pelatihan kader keamanan pangan desa pada periode Juli - Agustus terhadap 5 orang kader, bimbingan teknis keamanan pangan komunitas oleh kader pada periode September - Oktober terhadap minimal 20 orang komunitas, serta monitoring dan evaluasi pada periode November.
- Penyesuaian mencakup perencanaan pelaksanaan tiap tahapan program yaitu forum advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor yang dilakukan pada periode Januari - April, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar pada periode Maret - Juni, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar pada periode Maret - Juni, serta pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pada periode November.
- Penyesuaian mencakup perencanaan pelaksanaan tiap tahapan program yaitu sosialisasi yang dilakukan pada periode Januari - Maret, penetapan target UMKM periode Januari- Maret, bimbingan teknis pada periode Februari - Juni, pendampingan/fasilitasi pada periode Februari - Desember, serta Pelaporan pada periode Februari - Desember.
- Realisasi Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan melebihi target 2029, sehingga perlu ada penyesuaian target ditahun 2026 dengan target minimal sama dengan realisasi tahun 2025.
- Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026

dan melebihi target 2029, sehingga perlu ada penyesuaian target ditahun 2026 dengan target minimal sama dengan realisasi tahun 2025.

- Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik UPT pada tahun 2025 telah melebihi target Renstra tahun 2029, sehingga target untuk tahun 2026 dapat mengacu pada realisasi yang dicapai pada tahun 2025
- Untuk perencanaan periode berikutnya, Balai POM di Sanggau telah menyusun draf Renstra 2025-2029 dan dokumen perencanaan tahunan 2026. Namun, diperlukan penyesuaian signifikan guna menyelaraskan perbedaan nomenklatur sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang saat ini beberapa masih tidak konsisten antar dokumen. Selain itu, penetapan target kinerja untuk periode mendatang harus didukung dengan Kertas Kerja Penetapan Target yang lebih memadai dan berbasis data hasil analisis yang lebih akurat.
- Berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika kebijakan anggaran tahun berjalan, Balai POM di Sanggau menyusun strategi perencanaan untuk periode mendatang seperti menggunakan data realisasi tahun ini untuk menyusun rencana penarikan dana (Halaman III DIPA) yang lebih akurat guna meminimalisir deviasi sejak awal tahun, merencanakan percepatan proses pengadaan belanja modal dan barang kontraktual, menyusun jadwal kegiatan teknis yang sinkron dengan kegiatan di keuangan untuk menghindari penumpukan pengajuan tagihan dan memitigasi risiko dispensasi SPM di akhir tahun.
- Berdasarkan renstra Balai POM tahun 2025-2029 target indeks manajemen risiko Balai POM di Sanggau tahun 2026 meningkat menjadi 2,88 sehingga perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan pemahaman pengelolaan risiko secara komprehensif baik dalam hal pengembangan kompetensi, komitmen dan keterlibatan pimpinan beserta seluruh pegawai, pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap risiko yang dikelola.
- Pada tahun 2026 indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Balai POM di Sanggau sudah tidak dilaksanakan, namun capaian persentase implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pemenuhan self assessment LKE ZI dalam memenuhi nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) UPT Balai POM di Sanggau pada tahun 2026.

3.4 REALISASI ANGGARAN

a. Realisasi anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025 Balai POM di Sanggau memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp 4.148.145.000. Pada tanggal 19 Februari 2025 terdapat pemblokiran anggaran terkait efisiensi anggaran pada Balai POM di Sanggau sebesar Rp 1.746.569.000, kemudian pada tanggal 25 Maret 2025 terdapat relaksasi pemblokiran anggaran sehingga anggaran yang di blokir berkurang menjadi Rp 1.349.504.000. Pada tanggal 30 Juni 2025, terdapat penambahan anggaran belanja pegawai untuk pemenuhan gaji CPNS dan PPPK, sehingga total pagu anggaran bertambah menjadi Rp 4.427.160.000, dan Pagu Anggaran setelah dikurangi blokir adalah senilai Rp 3.120.514.000. Realisasi anggaran tahun 2025 adalah Rp 3.120.000.943 atau sebesar 70,47% dari pagu anggaran total, atau sebesar 99,98% dari pagu anggaran setelah blokir. Berikut disajikan tabel realisasi anggaran per jenis belanja:

Tabel 3.112 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu Anggaran Total	Pagu Anggaran Setelah Blokir	Realisasi	Persentase Realisasi Pagu Total	Persentase Realisasi Pagu Setelah Blokir
Belanja Pegawai	Rp1,193,000,000	Rp1,193,000,000	Rp1,192,661,991	*99.97%*	*99.97%*
Belanja Barang	Rp2,883,160,000	Rp1,927,514,000	Rp1,927,338,952	*66.85%*	*99.99%*
Belanja Modal	Rp351,000,000	Rp0	Rp0	*0.00%*	*100%*
Total	Rp4,427,160,000	Rp3,120,514,000	Rp3,120,000,943	*70.47%*	*99.98%*

b. Realisasi kinerja pada Balai POM di Sanggau tahun 2025 per sasaran kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.113 Realisasi Kinerja Balai POM di Sanggau 2025

No	Sasaran Kegiatan	Pagu anggaran total	Pagu anggaran setelah blokir	Realisasi anggaran	Persentase realisasi pagu total	Persentase realisasi pagu setelah blokir
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Rp 472.990.000	Rp 472.990.000	Rp 472.951.925	*99,99%*	*99,99%*
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Rp 463.965.000	Rp 66.192.000	Rp 66.189.420	*14,27%*	*99,99%*
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Rp 27.950.000	Rp 5.037.000	Rp 4.953.950	*17,72%*	*98,35%*
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Rp 107.367.000	Rp 107.367.000	Rp 107.354.730	*99,99%*	*99,99%*
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Rp 52.824.000	Rp 0	Rp 0	*0%*	*0%*
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Rp 48.030.000	Rp 48.030.000	Rp 48.025.030	*99,99%*	*99,99%*
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Rp 3.254.034.000	Rp 2.468.928.000	Rp 2.420.525.888	*74,39%*	*98,03%*

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 2 versi perhitungan realisasi anggaran yaitu perhitungan menggunakan pagu anggaran DIPA secara total dan anggaran DIPA setelah blokir.

Terdapat 3 Sasaran Kegiatan dalam capaian realisasi anggaran tertinggi berdasarkan perhitungan DIPA total, yaitu: “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”, “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”, dan “Layanan Publik UPT yang Prima” dengan capaian sebesar 99,99%.

Pada pagu anggaran setelah blokir, realisasi anggaran tertinggi ada pada 4 sasaran kegiatan, yaitu: “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”, “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”, dan “Layanan Publik UPT yang Prima” sebesar 99,99%.

Sedangkan realisasi anggaran terendah pada pagu anggaran total dan pagu anggaran setelah blokir ada pada sasaran kegiatan “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” dengan persentase sebesar 0%, hal ini disebabkan karena adanya pemblokiran penuh pada sasaran kegiatan tersebut sehingga tidak dapat direalisasikan anggarannya.

c. Evaluasi dan Analisis Anggaran berisi perbandingan rencana dan realisasi anggaran per program/ kegiatan Tahun 2025

Dalam mencapai 7 Sasaran Kegiatan, dan 26 Indikator Kegiatan Kinerja Sasaran Kegiatan, Balai POM di Sanggau melaksanakan 19 Kegiatan Rincian Output pada tahun 2025, untuk perbandingan capaian output, serta capaian realisasi anggaran 19 Rincian Output tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.114 Perbandingan Capaian Output serta Capaian Realisasi Anggaran Balai POM di Sanggau 2025

No	Kode Rincian Output	Rincian Output	Target Output	Realisasi Output	Persentase Capaian	Pagu anggaran total (Rp)	Pagu anggaran setelah blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi pagu total	Persentase realisasi pagu setelah blokir
1	AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100	52.824.000	0	0	0%	0%
2	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	5	5	100	48.030.000	48.030.000	48.025.030	99,99%	99,99%
3	BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	100	105,26	70.625.000	1.250.000	1.250.000	1,72%	100%
4	BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan	1	1	100	223.000.000	131.914.000	131.909.450	59,15%	99,99%

No	Kode Rincian Output	Rincian Output	Target Output	Realisasi Output	Persentase Capaian	Pagu anggaran total (Rp)	Pagu anggaran setelah blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi pagu total	Persentase realisasi pagu setelah blokir
		Obat dan Makanan								
5	**BMB.001**	**Layanan Informasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT**	21	22	104,76	44.607.000	25.773.000	25.771.420	57,77%	99,99%
6	**CAB.002**	**Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia**	1	0	0	301.000.000	0	0	0%	0%
7	**CAN.001**	**Perangkat pengolah data dan komunikasi**	10	0	0	50.000.000	0	0	0%	0%
8	**PDD.001**	**Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium**	1	1	100	148.740.000	148.740.000	148.735.020	99,99%	99,99%
9	**QCD.U31**	**Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan**	1	1	100	107.367.000	107.367.000	107.354.730	99,98%	99,98%

No	Kode Rincian Output	Rincian Output	Target Output	Realisasi Output	Persentase Capaian	Pagu anggaran total (Rp)	Pagu anggaran setelah blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi pagu total	Persentase realisasi pagu setelah blokir
		Makanan Di Loka Pom Kabupaten Sanggau								
10	**QDB.001**	**Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman**	2	2	100	94.959.000	13.328.000	13.328.000	14,03%	100%
11	**QDB.002**	**Desa Pangan Aman**	1	1	100	153.129.000	18.781.000	18.780.000	12,26%	99,99%
12	**QDB.003**	**Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas**	1	1	100	100.645.000	7.060.000	7.060.000	7,01%	100%
13	**QDG.001**	**UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT**	3	3	100	27.950.000	5.037.000	4.953.950	17,72%	98,35%
14	**QIA.001**	**Sampel Makanan yang diperiksa oleh UPT**	138	138	100	52.621.000	52.621.000	52.611.522	99,98%	99,98%
15	**QIA.002**	**Sampel Obat, Obat tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang**	223	223	100	89.223.000	89.223.000	89.206.761	99,98%	99,98%

No	Kode Rincian Output	Rincian Output	Target Output	Realisasi Output	Persentase Capaian	Pagu anggaran total (Rp)	Pagu anggaran setelah blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi pagu total	Persentase realisasi pagu setelah blokir
		diperiksa sesuai standar oleh UPT								
16	QIC.001	Sarana produksi Obat dan makanan yang diperiksa oleh UPT	11	11	100	18.943.000	18.943.000	18.940.225	99,98%	99,98%
17	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa Oleh UPT	157	157	100	163.463.000	163.463.000	163.458.397	99,99%	99,99%
18	EBA.956	Layanan BMN	1	1	100	8.000.000	4.067.000	4.067.000	50,83%	100%
19	EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	100	2.393.019.000	2.284.917.000	2.284.549.438	95,46%	99,98%

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa realisasi anggaran yang tertinggi menurut perhitungan anggaran DIPA penuh sebesar 99,99% ada pada 3 rincian output yaitu “Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT”, “Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium”, dan “Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa Oleh UPT” dengan capaian realisasi volume output untuk ketiga Rincian Output tersebut sama sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran terendah adalah sebesar 0% akibat dari pemblokiran anggaran secara menyeluruh pada Rincian output tersebut. Terdapat 3 Rincian Output dengan realisasi 0% yaitu “Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT” dengan capaian output 100%, sedangkan Rincian Output “Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia” dan “Perangkat pengolah data dan komunikasi” dengan capaian realisasi output 0% dikarenakan tidak adanya kegiatan belanja modal.

Realisasi anggaran tertinggi menurut perhitungan DIPA setelah dikurangi anggaran blokir sebesar 100% yaitu pada rincian output “Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE” dengan capaian output 105,26%, Rincian Output “Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman”, “Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas”, dan “Layanan BMN” dengan capaian realisasi volume output sama sebesar 100%, dan realisasi anggaran terendah sebesar 0% akibat dari pemblokiran anggaran secara menyeluruh pada Rincian output tersebut ada pada 3 Rincian Output yaitu “Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT” dengan capaian output 100%, “Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia” dan “Perangkat pengolah data dan komunikasi” dengan capaian realisasi output 0% dikarenakan tidak adanya kegiatan belanja modal.

Pengelolaan anggaran Balai POM di Sanggau senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Sanggau dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
c. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$\mathbf{IE} = \frac{\%\ \boldsymbol{CapaianOutput}}{\%\ \mathbf{Capaianinput}} \mathbf{IE} = \frac{\mathbf{100\ \%}}{\mathbf{100\%}} = \mathbf{1}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$\mathbf{TE} = \frac{\mathbf{IE} - \mathbf{SE}}{\mathbf{SE}}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 3.115 Tingkat Efisiensi dan Capaian

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Perhitungan tingkat efisiensi anggaran pada Balai POM di Sanggau Tahun Anggaran 2025 menggunakan perhitungan dari Capaian Target. Input adalah pagu anggaran setelah blokir, dan Output adalah rata-rata total capaian Indikator Kinerja dalam Sasaran Kegiatan, untuk perhitungan tingkat efisiensi per Sasaran Kegiatan tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.116 Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
		Input	Output				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	99,99	107,94	1,08	1	0,08	**Efisien**
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	99,996	107,96	1,08	1	0,08	**Efisien**
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	98,35	100,00	1,02	1	0,02	**Efisien**
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	99,99	104,17	1,04	1	0,04	**Efisien**
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	-	111,11	-	1	-	**Tidak dapat dihitung**
6	Layanan Publik UPT yang prima	99,99	109,31	1,09	1	0,09	**Efisien**
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99,98	99,79	1,00	1	-0,002	**Tidak Efisien**

Pada tahun 2025 Balai POM di Sanggau melaksanakan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan (SK) dengan hasil 5 SK efisien, 1 SK tidak efisien dan 1 SK tidak dapat dihitung dikarenakan adanya pemblokiran pada anggaran SK tersebut. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,002 sampai 0,09. Efisiensi tertinggi dicapai oleh SK "Layanan Publik UPT yang prima" dengan nilai TE 0,09. Artinya, terdapat efisiensi capaian sebesar 9% di atas standar efisiensi yang ditetapkan. Sedangkan inefisiensi (tidak efisien) terdapat pada SK "Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal" dengan nilai TE -0,002, hal ini terjadi karena walaupun realisasi anggaran tinggi namun capaian output tidak tercapai karena ada dua Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan tersebut yang tidak mencapai target, sehingga capaian output di angka 99,79.

Kendala serta hambatan sehingga terjadinya data tidak dapat diukur pada SK "Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT" disebabkan oleh pemblokiran secara menyeluruh pada anggaran di SK tersebut sehingga tidak dapat perhitungan data efisiensi lebih lanjut.

Untuk detail Indikator Kegiatan Sasaran Kegiatan per Sasaran Kegiatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.117 Tingkat Efisiensi per Indikator Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
			Input	Output				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,98	103,30	1,03	1	0,03	**Efisien**
2		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,98	114,53	1,15	1	0,15	**Efisien**
3		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	99,98	-	-	1	-	**Tidak dapat dihitung**
4		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,98	109,89	1,10	1	0,10	**Efisien**
5		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	99,99	103,84	1,04	1	0,04	**Efisien**
6		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,99	114,94	1,15	1	0,15	**Efisien**
7		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,99	109,89	1,10	1	0,10	**Efisien**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
			Input	Output				
8		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	107,53	1,08	1	0,08	**Efisien**
9		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	107,85	1,08	1	0,08	**Efisien**
10		Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,95	108,70	1,09	1	0,09	**Efisien**
11		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	99,95	109,89	1,10	1	0,10	**Efisien**
12		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	100,00	1,00	1	0,00	**Efisien**
13		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100,00	109,83	1,10	1	0,10	**Efisien**
14		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	99,98	100,00	1,00	1	0,00	**Efisien**
15	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	99,99	108,32	1,08	1	0,08	**Efisien**
16		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00	100,00	1,00	1	0,00	**Efisien**
17		Jumlah desa pangan aman	99,99	100,00	1,00	1	0,00	**Efisien**
18		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	100,00	1,00	1	0,00	**Efisien**
19	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	98,35	100,00	1,02	1	0,02	**Efisien**
20	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	99,99	104,17	1,04	1	0,04	**Efisien**
21	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	-	111,11	-	1	-	**Tidak dapat dihitung**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
			Input	Output				
	efektif di wilayah kerja UPT							
22	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	99,99	109,31	1,09	1	0,09	**Efisien**
23	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	-	99,51	-	1	-	**Tidak dapat dihitung**
24		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	99,98	100,00	1,00	1	0,00	**Efisien**
25		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	100,00	99,65	1,00	1	-0,0035	**Tidak Efisien**
26		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00	100,00	1,00	1	0,00	**Efisien**

Pada tahun 2025 Balai POM di Sanggau melaksanakan 26 (dua puluh) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) untuk mendukung pencapaian 7(tujuh) Sasaran Kegiatan dengan hasil 22 IKSK efisien, 1 IKSK tidak efisien dan 3 IKSK tidak dapat dihitung dikarenakan adanya pemblokiran pada anggaran IKSK tersebut. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,0035 sampai 0,15. Efisiensi tertinggi dicapai oleh IKSK “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dan “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan nilai TE 0,15. Artinya, terdapat efisiensi capaian sebesar 15% di atas standar efisiensi yang ditetapkan. Sedangkan inefisiensi (tidak efisien) terdapat pada IKSK Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM dengan nilai TE -0,0035, hal ini terjadi karena walaupun realisasi anggaran mencapai 100% namun capaian output tidak tercapai dengan angka 99,65.

Kendala serta hambatan sehingga terjadinya data tidak dapat diukur pada IKSK Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT disebabkan oleh adanya kendala dalam kondisi geografis dimana pengambilan sampel keracunan pangan sulit dijangkau sehingga dilakukan oleh petugas Puskesmas setempat yang lebih dekat dengan lokasi kejadian. Sampel yang diambil oleh petugas Puskesmas tersebut tidak termasuk dalam kategori sampel yang diuji sesuai standar pengujian Balai POM, sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai realisasi pada indikator ini. Untuk IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dan Nilai AKIP UPT BPOM kendala terjadinya data tidak dapat diukur adalah adanya pemblokiran secara

menyeluruh pada anggaran di dua IKSK tersebut sehingga tidak dapat perhitungan data efisiensi lebih lanjut.

Upaya efisiensi yang dilakukan Balai POM di Sanggau adalah menjaga penyerapan anggaran tetap berada di angka rata-rata 99,9%, adanya tingkat efisiensi yang tinggi mencerminkan adanya penghematan biaya dalam mencapai target IKSK meskipun tahun 2025 dilakukan pemblokiran. Pada IKSK dengan capaian TE tertinggi sebesar 0,15, “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” mencapai efisiensi yang tinggi dikarenakan petugas dalam melakukan kegiatan sampling melakukan penggabungan kegiatan dengan kegiatan lain, optimalisasi rute perjalanan petugas dalam melakukan sampling, sehingga menghemat anggaran yang efisien, dan “IKSK Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” mencapai efisiensi yang tinggi juga dengan nilai 0,15 dikarenakan adanya penggabungan pemeriksaan dengan kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan rutin lainnya, serta penjadwalan dan pengelompokan lokasi untuk mengurangi biaya perjalanan.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (anggaran) yang terbatas karena adanya pemblokiran anggaran, Balai POM di Sanggau mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi SK maupun IKSK secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pada Tahun Anggaran 2025 ini evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Balai POM di Sanggau Tahun 2025-2029 dan DIPA Tahun 2025. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Balai POM di Sanggau Tahun 2025 antara lain:

1. Nilai Kerja Organisasi (NKO) Balai POM di Sanggau tahun 2025 adalah **94,38%** dengan predikat **Baik**.
2. Dari 26 (dua puluh enam) indikator kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 7 (delapan) sasaran kegiatan yang diukur sebagai berikut:
   a. 3 indikator dengan kategori "**Tidak dapat disimpulkan**" (>110%) terdiri dari
      - Indikator Kegiatan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan memperoleh Capaian sebesar 114,53% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**;
      - Indikator Kegiatan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memperoleh Capaian sebesar 114,94% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**;
      - Indikator Kegiatan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar memperoleh Capaian sebesar 111,11% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**;
   b. 12 indikator dengan kategori **"Sangat Baik"** (100% < x ≤ 110%); terdiri dari:
      - Indikator Kegiatan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 103,30% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
      - Indikator Kegiatan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan memperoleh Capaian sebesar 109,89% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
      - Indikator Kegiatan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder memperoleh Capaian sebesar 103,84% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
      - Indikator Kegiatan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memperoleh Capaian sebesar 109,89% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;

- Indikator Kegiatan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memperoleh Capaian sebesar 107,53% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
- Indikator Kegiatan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memperoleh Capaian sebesar 107,85% dengan kriteria **SANGAT BAIK;**
- Indikator Kegiatan Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan memperoleh Capaian sebesar 108,70% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
- Indikator Kegiatan Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar memperoleh Capaian sebesar 109,89% dengan kriteria **Sangat BAIK**;
- Indikator Kegiatan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium memperoleh Capaian sebesar 109,83% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
- Indikator Kegiatan Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT memperoleh Capaian sebesar 108,32% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
- Indikator Kegiatan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT memperoleh Capaian sebesar 104,17% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
- Indikator Kegiatan Indeks Pelayanan Publik UPT memperoleh Capaian sebesar 109,31% dengan kriteria **SANGAT BAIK**;

c. 10 indikator memperoleh capaian dengan kriteria **"Baik"** (90%< x ≤ 100%) terdiri dari

- Indikator Kegiatan Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT memperoleh Capaian sebesar 100% dengan kriteria **BAIK**;
- Indikator Kegiatan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman memperoleh Capaian sebesar 100% dengan kriteria **BAIK**;
- Indikator Kegiatan Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan memperoleh Capaian sebesar 100% dengan kriteria **BAIK**;
- Indikator Kegiatan Jumlah desa pangan aman memperoleh Capaian sebesar 100% dengan kriteria **BAIK**;

- Indikator Kegiatan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas memperoleh Capaian sebesar 100% dengan kriteria **BAIK**;
- Indikator Kegiatan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan memperoleh Capaian sebesar 100% dengan kriteria **BAIK**;
- Indikator Kegiatan Nilai AKIP UPT BPOM memperoleh Capaian sebesar 99,51% dengan kriteria **BAIK**;
- Indikator Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Capaian sebesar 100% dengan kriteria **BAIK**;
- Indikator Kegiatan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM memperoleh Capaian sebesar 87,40% dengan kriteria **BAIK**;
- Indikator Kegiatan Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT memperoleh Capaian sebesar 100% dengan kriteria **BAIK;**

d. 1 (satu) indikator **''Tidak Masuk Hitungan''** terdiri dari

- Indikator Kegiatan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT memperoleh Capaian sebesar 0% dengan kriteria **TIDAK MASUK HITUNGAN**;

3. Jumlah pagu anggaran dengan blokir di Balai POM di Sanggau tahun 2025 sebesar Rp. 4.427.160.000, sedangkan jumlah pagu anggaran tanpa blokir di Balai POM tahun 2025 Sanggau sebesar Rp. 3.120.514.000. Realisasi anggaran Balai POM di Sanggau Tahun 2025 sebesar Rp 3.120.000.943 yang jika dibandingkan dengan pagu termasuk blokir, realisasi anggaran memiliki persentase sebesar 70,47% dan jika dibandingkan dengan pagu tanpa blokir sebesar 99,98%.
4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar pada Balai POM di Sanggau tidak dapat diukur sepanjang tahun 2025. Kondisi ini terjadi dikarenakan tidak adanya sampel KLB keracunan pangan yang disampling oleh petugas Balai POM di Sanggau selama periode tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan kendala aksesibilitas geografis yang menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan respons lapangan. Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang terjadi di wilayah kerja Balai POM di Sanggau pada tahun 2025 berlokasi di daerah yang cukup jauh dan sulit dijangkau, sehingga petugas Balai POM di Sanggau tidak dapat melakukan pengambilan sampel secara langsung di lokasi kejadian. Mengingat kondisi tersebut, pengambilan sampel keracunan pangan dilakukan oleh petugas Puskesmas setempat yang lebih dekat dengan lokasi kejadian dan dapat merespons lebih cepat. Sampel yang diambil

oleh petugas Puskesmas tersebut tidak termasuk dalam kategori sampel yang disampling oleh Balai POM, sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai realisasi pada indikator ini. Dengan kondisi demikian, realisasi indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar pada tahun 2025 tercatat sebesar 0% atau tidak terdapat realisasi sama sekali, sehingga capaian kinerja pada indikator ini tidak dapat ditetapkan dan dievaluasi secara kuantitatif. Meskipun demikian, Balai POM di Sanggau tetap melakukan upaya dengan melakukan koordinasi dengan petugas pengambil sampel dan Dinas Kesehatan tempat KLP KP terjadi untuk memastikan sampel yang diambil telah ditangani dengan baik dan telusur epidemiologi KLB KP dilaksanakan secara lengkap. Sehingga dugaan agen penyebab dapat disimpulkan dan sampel dapat dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak. Selain itu Balai POM di Sanggau tetap melakukan monitoring sampai dengan hasil uji dugaan agen penyebab KLB KP dikeluarkan dan melaporkan kejadian KLB KP melalui aplikasi Spimker. Ke depannya, Balai POM di Sanggau perlu memperkuat koordinasi dengan Puskesmas dan fasilitas kesehatan di wilayah kerja, serta mengembangkan mekanisme respons cepat yang mempertimbangkan kondisi geografis wilayah Kalimantan Barat, guna memastikan bahwa setiap kejadian KLB keracunan pangan dapat ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel yang sesuai standar oleh petugas yang berwenang.

5. Pada Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP UPT BPOM terdapat penurunan pada komponen **Capaian Kinerja**, yaitu dari **17,31** menjadi **16,91**. Penurunan nilai pada komponen capaian kinerja tersebut dikarenakan terdapat 2 IKU yang tidak tercapai pada tahun 2024 yaitu persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dan Nilai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Ketidaktercapaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat disebabkan oleh adanya 1 sampel pangan fortifikasi tepung terigu yang hasil pengujiannya tidak memenuhi syarat yaitu pada parameter uji PK vitamin B9 (asam folat), sedangkan pada nilai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) disebabkan kurangnya monitoring pengawasan terhadap Penetapan Status Pengguna yang belum diajukan atas mutasi aset masuk yang bernilai besar pada akhir tahun. Penurunan ini menjadi catatan penting bahwa meskipun perencanaan membaik, realisasi fisik atau output di lapangan mengalami sedikit kendala yang perlu dievaluasi lebih lanjut guna memastikan seluruh target tercapai secara maksimal di periode mendatang. Sebagai upaya perbaikan dan penguatan implementasi SAKIP Balai POM di Sanggau melakukan Bimbingan Teknis SAKIP oleh Inspektorat sesuai dengan pedoman dan memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025. Balai POM di Sanggau juga mengawal capaian indikator kinerja melalui monitoring dan evaluasi

secara rutin dalam pencapaian target serta melakukan analisa kendala dan hambatan dalam pencapaian target kinerja.

6. Nilai Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sanggau sebesar 2,84 belum memenuhi target tahun 2025 yaitu 2,85. Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target indeks manajemen risiko Balai POM di Sanggau adalah sebagai berikut :
   - Belum seluruh pegawai memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko sehingga perlu dilakukan pelatihan/ refreshment secara berkala
   - Terdapat ketidaksesuaian dalam penyusunan daftar risiko sehingga perlu dilakukan reviu kembali secara berkala.
   - Dokumentasi terkait keterlibatan pimpinan dalam memberikan masukan/ arahan tidak memadai
   - Belum terdapat eskalasi risiko kepada tingkat yang lebih tinggi atas risiko yang berada di atas selera risiko (≥16)
   - Cascading IKU Indeks manajemen risiko belum diturunkan kepada seluruh anggota tim manajemen representatif

   Berdasarkan kendala diatas, Balai POM di Sanggau melakukan upaya perbaikan berdasarkan rekomendasi sesuai surat Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Balai POM di Sanggau dengan berkoordinasi dengan inspektorat, melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan risiko yang ada pada setiap proses bisnis di masing-masing fungsi setiap triwulannya serta mendorong peningkatan pemahaman setiap pegawai mengenai pengelolaan manajemen risiko dengan melakukan diseminasi dan pelatihan mandiri.
7. Pada tahun 2025 Balai POM di Sanggau melaksanakan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan (SK) dengan hasil 5 SK efisien, 1 SK tidak efisien dan 1 SK tidak dapat dihitung dikarenakan adanya pemblokiran pada anggaran SK tersebut. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,002 sampai 0,09. Efisiensi tertinggi dicapai oleh SK “Layanan Publik UPT yang prima” dengan nilai TE 0,09. Artinya, terdapat efisiensi capaian sebesar 9% di atas standar efisiensi yang ditetapkan. Sedangkan inefisiensi (tidak efisien) terdapat pada SK “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” dengan nilai TE -0,002, hal ini terjadi karena walaupun realisasi anggaran tinggi namun capaian output tidak tercapai karena ada dua Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan tersebut yang tidak mencapai target, sehingga capaian output di angka 99,79.

Rekomendasi

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi indikator kegiatan, khususnya untuk indikator yang mempunyai capaian dengan kriteria di bawah 100% dan menyusun strategi agar mencapai target.
2. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target pada tahun anggaran 2025 untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.
3. Pada indikator nilai AKIP Balai POM di Sanggau perlu melakukan perbaikan pada 5 komponen penilaian yaitu (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; (5) Capaian Kinerja sesuai dengan rekomendasi perbaikan pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP.
4. Pada indikator indeks manajemen risiko maka perlu melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi sebagai berikut:
    - Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko melalui pelatihan/ sertifikasi/ refreshment/ workshop/ awareness manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.
    - Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM secara berkala.
    - Mendokumentasikan keterlibatan dan komitmen Pimpinan unit kerja selaku pemilik risiko dalam proses pengelolaan manajemen risiko dengan melengkapi secara detail masukan/arahan yang disampaikan pada notulen rapat.
    - Melaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi untuk risiko yang berada di atas selera risiko atau terhadap risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima, melalui checklist pada aplikasi SAPAAPIP maupun pelaporan secara formal.
    - Menyertakan uraian tugas manajemen risiko pada SKP seluruh pegawai yang terlibat dalam tim manajemen representatif unit kerja.

5. Melakukan pemantauan setiap triwulan terhadap tingkat efisiensi seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya yang tidak mencapai target.

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ERIK BUDIANTO TAMPUBOLON
Jabatan	: Kepala Loka POM di Kabupaten Sanggau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sanggau, 12 February 2025

Pihak Pertama Kepala Loka POM di Kabupaten Sanggau	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
ERIK BUDIANTO TAMPUBOLON	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SANGGAU

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.5 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		06 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	89.5 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		ketentuan	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91 Persentase
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5 Nilai
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.13 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.51 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Klasifikasi
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.85 Nilai
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 4.148.145.000 (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.747.126.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.401.019.000

Sanggau, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Sanggau

ERIK BUDIANTO TAMPUBOLON

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ERIK BUDIANTO TAMPUBOLON
Jabatan	: Kepala Balai POM di Sanggau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sanggau, 29 August 2025

Pihak Pertama Kepala Balai POM di Sanggau	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
ERIK BUDIANTO TAMPUBOLON	**TARUNA IKRAR**

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KABUPATEN SANGGAU

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	95 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92 Persentase
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik	91 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		yang diawasi sesuai standar	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20 Persentase
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.13 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	11.11 Persentase
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96 Persentase
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.51 Nilai
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.85 Nilai
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 4,427,160,000 (Empat Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,747,126,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,680,034,000

Sanggau, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Sanggau

ERIK BUDIANTO TAMPUBOLON

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	44.611.500
		03 - Persentase sampel Pangan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	17.891.140

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengadaan Sampel Obat Loka Sanggau	89.223.000	44.611.500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan Loka Sanggau	52.621.000	17.891.140

	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	17.364.930

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan Loka Sanggau	52.621.000	17.364.930

	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	17.364.930

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan Loka Sanggau	52.621.000	17.364.930

06 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	35	45	50	55	60	65	70	75	80	85	95	100	44.611.500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengadaan Sampel Obat Loka Sanggau	89.223.000	44.611.500

07 - Persentase sarana	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	9.471.500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Luar Kota) di Loka POM Sanggau (6 Sarana)	14.080.000	7.040.000
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Administrasi Kegiatan Pemeriksaaan Sarana Produksi Loka POM Sanggau	1.603.000	801.500
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Koordinasi dalam Rangka Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	1.460.000	730.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Dalam Kota) di Loka POM Sanggau (8 Sarana)	1.800.000	900.000

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	9.471.500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Koordinasi dalam Rangka Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	1.460.000	730.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
			2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			C - Administrasi Kegiatan Pemeriksaaan Sarana Produksi Loka POM Sanggau			1.603.000		801.500
			3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - Pemeriksaan Sarana Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Luar Kota) di Loka POM Sanggau (6 Sarana)			14.080.000		7.040.000
			4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - Pemeriksaan Sarana Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Dalam Kota) di Loka POM Sanggau (8 Sarana)			1.800.000		900.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	80.835.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Sarana Distribusi	16.300.000	8.150.000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaaan Sarana Distribusi Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Luar Kota)	60.360.000	30.180.000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Administrasi Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Loka Sanggau	2.500.000	1.250.000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaaan Sarana Distribusi Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Dalam Kota)	8.100.000	4.050.000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika,	E - Operasi Penertiban Produk Obat dan Makanan dan Penanganan Tindak	60.840.000	30.420.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Lanjut		
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Desk CAPA kepada Penanggungjawab Sarana Pelayanan Kefarmasian	13.570.000	6.785.000

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.835.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaaan Sarana Distribusi Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Luar Kota)	60.360.000	30.180.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - Operasi Penertiban Produk Obat dan Makanan dan Penanganan Tindak Lanjut	60.840.000	30.420.000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Sarana Distribusi	16.300.000	8.150.000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Desk CAPA kepada Penanggungjawab Sarana Pelayanan Kefarmasian	13.570.000	6.785.000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Administrasi Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Loka Sanggau	2.500.000	1.250.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaaan Sarana Distribusi Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Dalam Kota)	8.100.000	4.050.000

		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1.793.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Pengawasan Periklanan dan Penandaan	1.793.000	1.793.000

2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan			10.07	10.07	10.07	10.51	10.51	10.51	10.95	10.95	10.95	11.5	148.740.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - PENGADAAN TES KIT BAHAN BERBAHAYA DLL LOKA POM SANGGAU	32.690.000	32.690.000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	B - PELAKSANAAN MOBIL LABORATORIUM KELILING DALAM KOTA	6.000.000	6.000.000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	C - PELAKSANAAN MOBIL LABORATORIUM KELILING LUAR KOTA	31.600.000	31.600.000
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	D - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	24.876.000	24.876.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	E - PENGADAAN GLASSWARE	19.000.000	19.000.000
6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	F - SAMPLING DAN OPERASIONAL LABORATORIUM	14.624.000	14.624.000
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	G - PEMELIHARAAN PERALATAN LABORATORIUM	10.000.000	10.000.000
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	H - PENANGANAN LIMBAH DAN B3	3.500.000	3.500.000
9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	I - VERIFIKASI/KALIBRASI INSTRUMEN	6.450.000	6.450.000

3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan			88.13	88.13	88.13	88.13	88.13	88.13	88.13	88.13	88.13	88.13	115.232.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT	Olahan di wilayah kerja UPT													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Tentang OMKABA	30.780.000	30.780.000
2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - KIE Obat dan Makanan Aman Serta Forum Konsultasi Publik	11.550.000	11.550.000
3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	C - KIE dalam rangka BPOM Goes to Rumah Panjang	3.415.000	3.415.000
4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	D - Operasional Dalam Rangka KIE	24.880.000	24.880.000
5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - KIE di Media Cetak dan Elektronik/Talkshow	13.000.000	13.000.000
6.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - Pembuatan Produk Informasi	22.847.000	22.847.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	C - Koordinasi ke Instansi Terkait	8.760.000	8.760.000

	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				75	75	75	100	100	100	100	100	2	94.959.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN	25.085.000	25.085.000
2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - OPERASIONALISASI MOBLING	40.040.000	40.040.000
3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER SEKOLAH	19.274.000	19.274.000
4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	10.560.000	10.560.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Jumlah desa pangan aman				25	25	25	50	50	75	75	100	1	153.129.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	C - BIMBINGAN TEKNIS KOMUNITAS KEAMANAN PANGAN DESA	53.762.000	53.762.000
2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	A - ADVOKASI KEGIATAN TERPADU DESA, PASAR DAN PJAS	32.018.000	32.018.000
3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	B - BIMBINGAN TEKNIS KADER KEAMANAN PANGAN DESA	22.664.000	22.664.000
4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	D - PENGAWASAN KOMUNITAS DESA	19.300.000	19.300.000
5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	E - MONITORING DAN EVALUASI DESA PANGAN AMAN	21.105.000	21.105.000
6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	F - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	4.280.000	4.280.000

		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				25	50	75	100	100	100	100	100	1	100.645.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/ pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - PENYULUHAN KEPADA KOMUNITAS PASAR	29.252.000	29.252.000
2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/ pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGAWAS PASAR	14.431.000	14.431.000
3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/ pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	E - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	12.680.000	12.680.000
4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/ pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	D - PELATIHAN PETUGAS / FASILITATOR PASAR	34.872.000	34.872.000
5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/ pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	C - SURVEI / KAMPANYE PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS	9.410.000	9.410.000

4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan	10	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78	91	27.950.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	standar keamanan dan mutu	memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - FASILITAS/ AUDIT DALAM RANGKA PENDAMPINGAN UMKM	18.450.000	18.450.000
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - BIMBINGAN TEKNIS PENDAMPINGAN UMKM	9.500.000	9.500.000

5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT							15	55	85	96	96	96	107.367.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	7.040.000	7.040.000
2.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	960.000	960.000
3.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	2.000.000	2.000.000
4.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	7.820.000	7.820.000
5.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	17.826.000	17.826.000
6.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik	840.000	840.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	560.000	560.000
8.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	22.622.000	22.622.000
9.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	420.000	420.000
10.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	420.000	420.000
11.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	420.000	420.000
12.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	21.550.000	21.550.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
13.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	22.609.000	22.609.000
14.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	2.280.000	2.280.000

6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	52.824.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	B - Forum Koordinasi Intelijen	6.360.000	6.360.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	C - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	5.440.000	5.440.000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	D - Pertemuan Penggalangan Stakeholders dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	29.054.000	29.054.000
4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	E - Koordinasi dalam Rangka Pertemuan Penggalangan Stakeholders Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	5.610.000	5.610.000
5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	A - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Koordinasi PPNS BPOM TA 2025	6.360.000	6.360.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B12	ANGGARAN
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.51	48.030.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - Audit Sarana Dalam Rangka Sertifikasi	24.690.000	24.690.000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B - Dukungan Pelayanan Publik (Koordinasi ke Instansi Terkait dalam Rangka Peningkatan Kinerja Sertifikasi)	14.490.000	14.490.000
3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	C - Sosdesk Jemput Bola dalam Rangka Registrasi Pangan Olahan	7.110.000	7.110.000
4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	D - Administrasi Kegiatan Sertifikasi	1.740.000	1.740.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B12	ANGGARAN
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76	301.000.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Loka	301.000.000	301.000.000

		03 - Nilai Kinerja	5	2.393.019.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Anggaran UPT BPOM													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan	951.155.000	951.155.000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR (LOKA POM Sanggau)	58.500.000	58.500.000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	72.146.000	72.146.000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - OPERASIONAL PERKANTORAN (OLEH LOKA POM SANGGAU)	916.820.000	916.820.000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - PEMELIHARAAN PERALATAN PERKANTORAN	29.460.000	29.460.000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Layanan Umum Perkantoran	218.392.000	218.392.000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - Pengadaan Pakaian Dinas Kerja	33.536.000	33.536.000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi	6.000.000	6.000.000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - Internalisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pegawai Loka POM di Kab. Sanggau	86.810.000	86.810.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan	20.200.000	20.200.000

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM													2.85	223.000.000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan di Perbatasan	29.750.000	29.750.000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Perjalanan Pimpinan Loka	71.910.000	71.910.000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor/ Peningkatan Kompetensi Petugas/ Workshop/ Bimtek	114.840.000	114.840.000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - Bimtek Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Dasar	6.500.000	6.500.000

05 - Persentase	3	7	14	23	35	44	55	64	75	85	95	100	58.000.000

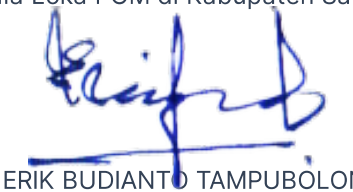
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA	500.000	500.000
2.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	C - SOSIALISASI BMN	1.740.000	1.740.000
3.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	B - KOORDINASI PENGELOLAAN BMN	5.760.000	5.760.000
4.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	50.000.000	50.000.000

Total	4.148.145.000

Sanggau, 12 February 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Sanggau



ERIK BUDIANTO TAMPUBOLON

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	90	90	90	90	90	89,223,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengadaan Sampel Obat Loka Sanggau	84,263,000	84,263,000
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	B - Koordinasi dalam rangka kegiatan sampling	4,960,000	4,960,000

03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	86	86	86	86	86	13,155,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan Loka Sanggau	52,621,000	13,155,250

	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	13,155,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan Loka Sanggau	52,621,000	13,155,250

	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	91	91	91	91	91	13,155,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan Loka Sanggau	52,621,000	13,155,250

	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	35	45	50	55	60	65	70	95	95	95	95	95	6,440,620

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Koordinasi dalam Rangka Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	1,460,000	496,400
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Dalam Kota) di Loka POM Sanggau (8 Sarana)	1,800,000	612,000
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Luar Kota) di Loka POM Sanggau (6 Sarana)	14,080,000	4,787,200
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Administrasi Kegiatan Pemeriksaaan Sarana Produksi Loka POM Sanggau	1,603,000	545,020

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	6,251,190

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Luar Kota) di Loka POM Sanggau (6 Sarana)	14,080,000	4,646,400

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Koordinasi dalam Rangka Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	1,460,000	481,800
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Dalam Kota) di Loka POM Sanggau (8 Sarana)	1,800,000	594,000
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Administrasi Kegiatan Pemeriksaaan Sarana Produksi Loka POM Sanggau	1,603,000	528,990

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	91	91	91	91	91	6,251,190

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Luar Kota) di Loka POM Sanggau (6 Sarana)	14,080,000	4,646,400
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Administrasi Kegiatan Pemeriksaaan Sarana Produksi Loka POM Sanggau	1,603,000	528,990

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	93	93	93	93	93	52,622,790

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Koordinasi dalam Rangka Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	1,460,000	481,800
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Dalam Kota) di Loka POM Sanggau (8 Sarana)	1,800,000	594,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaaan Sarana Distribusi Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Luar Kota)	70,290,000	23,195,700
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Desk CAPA kepada Penanggungjawab Sarana Pelayanan Kefarmasian	14,350,000	4,735,500
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,	F - Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Sarana Distribusi	18,660,000	6,157,800

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaaan Sarana Distribusi Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Dalam Kota)	9,300,000	3,069,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - Operasi Penertiban Produk Obat dan Makanan dan Penanganan Tindak Lanjut	29,020,000	9,576,600
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	H - Pengawasan Perbatasan	14,850,000	4,900,500
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Administrasi Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Loka Sanggau	2,993,000	987,690

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	52,622,790

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaaan Sarana Distribusi Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Luar Kota)	70,290,000	23,195,700
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Desk CAPA kepada Penanggungjawab Sarana Pelayanan Kefarmasian	14,350,000	4,735,500
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Administrasi Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Loka Sanggau	2,993,000	987,690
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - Operasi Penertiban Produk Obat dan Makanan dan Penanganan Tindak Lanjut	29,020,000	9,576,600
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Sarana Distribusi	18,660,000	6,157,800
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor,	A - Pemeriksaaan Sarana Distribusi Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Dalam Kota)	9,300,000	3,069,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	makanan dan bahan berbahaya			
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	H - Pengawasan Perbatasan	14,850,000	4,900,500

	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	91	91	91	91	91	91	92	92	92	92	92	2,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Pengawasan Periklanan dan Penandaan	4,000,000	2,000,000

	12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	2,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Pengawasan Periklanan dan Penandaan	4,000,000	2,000,000

		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	54,217,420

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Desk CAPA kepada Penanggungjawab Sarana Pelayanan Kefarmasian	14,350,000	4,879,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Sarana Distribusi	18,660,000	6,344,400
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Administrasi Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Loka Sanggau	2,993,000	1,017,620

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN KONTRIBUSI
		4. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				E - Operasi Penertiban Produk Obat dan Makanan dan Penanganan Tindak Lanjut						29,020,000 9,866,800
		5. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Pemeriksaaan Sarana Distribusi Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Luar Kota)						70,290,000 23,898,600
		6. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				H - Pengawasan Perbatasan						14,850,000 5,049,000
		7. DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - Pemeriksaaan Sarana Distribusi Produk OMKA Oleh Petugas Loka (Dalam Kota)						9,300,000 3,162,000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			10.07	10.07	11.2	11.2	11.2	12	12	12	12		148,740,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	D - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	0	0
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	B - PELAKSANAAN MOBIL LABORATORIUM KELILING DALAM KOTA	6,000,000	6,000,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	C - PELAKSANAAN MOBIL LABORATORIUM KELILING LUAR KOTA	56,476,000	56,476,000
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - PENGADAAN TES KIT BAHAN BERBAHAYA DLL LOKA POM SANGGAU	45,957,000	45,957,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	I - VERIFIKASI/KALIBRASI INSTRUMEN	6,450,000	6,450,000
6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	H - PENANGANAN LIMBAH DAN B3	0	0

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	G - PEMELIHARAAN PERALATAN LABORATORIUM	0	0
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	F - SAMPLING DAN OPERASIONAL LABORATORIUM	5,090,000	5,090,000
9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	E - PENGADAAN GLASSWARE	28,767,000	28,767,000

15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman — 20 — 13,155,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan Loka Sanggau	52,621,000	13,155,250

2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			88.13	88.13	88.13	88.13	88.13	88.13	88.13	88.13	88.13	88.13	115,232,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				75	75	75	100	100	100	100	100	2	94,959,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Tentang OMKABA	30,780,000	30,780,000
2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - KIE Obat dan Makanan Aman Serta Forum Konsultasi Publik	11,550,000	11,550,000
3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	C - KIE dalam rangka BPOM Goes to Rumah Panjang	3,415,000	3,415,000
4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	D - Operasional Dalam Rangka KIE	24,880,000	24,880,000
5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - KIE di Media Cetak dan Elektronik/Talkshow	22,000,000	22,000,000
6.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - Pembuatan Produk Informasi	13,847,000	13,847,000
7.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	C - Koordinasi ke Instansi Terkait	8,760,000	8,760,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	10,560,000	10,560,000
2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - OPERASIONALISASI MOBLING	35,290,000	35,290,000
3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	E - Monitoring dan Sertifikasi Sekolah	9,600,000	9,600,000
4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER SEKOLAH	13,620,000	13,620,000
5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN	25,889,000	25,889,000

03 - Jumlah desa pangan aman			25	25	25	50	50	75	75	100	1	153,129,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	C - BIMBINGAN TEKNIS KOMUNITAS KEAMANAN PANGAN DESA	53,762,000	53,762,000
2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	D - PENGAWASAN KOMUNITAS DESA	19,300,000	19,300,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	E - MONITORING DAN EVALUASI DESA PANGAN AMAN	21,105,000	21,105,000
4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	F - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	4,280,000	4,280,000
5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	A - ADVOKASI KEGIATAN TERPADU DESA, PASAR DAN PJAS	32,018,000	32,018,000
6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	B - BIMBINGAN TEKNIS KADER KEAMANAN PANGAN DESA	22,664,000	22,664,000

04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	50	75	100	100	100	100	100	1	100,645,000		

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGAWAS PASAR	14,431,000	14,431,000
2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	F - PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN MONITORING EVALUASI	1,800,000	1,800,000
3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - PENYULUHAN KEPADA KOMUNITAS PASAR	32,102,000	32,102,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	C - SURVEI / KAMPANYE PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS	9,410,000	9,410,000
5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	D - PELATIHAN PETUGAS / FASILITATOR PASAR	30,222,000	30,222,000
6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	E - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	12,680,000	12,680,000

3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	15	22	29	48	62	73	80	86	88	90	11.11	27,950,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - BIMBINGAN TEKNIS PENDAMPINGAN UMKM	9,500,000	9,500,000
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - FASILITAS/ AUDIT DALAM RANGKA PENDAMPINGAN UMKM	18,450,000	18,450,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT							15	55	85	96	96	96	107,367,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	33,964,000	33,964,000
2.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	420,000	420,000
3.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik	840,000	840,000
4.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	15,614,000	15,614,000
5.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	6,980,000	6,980,000
6.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	2,000,000	2,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU				
7.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	880,000	880,000
8.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	2,280,000	2,280,000
9.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	19,829,000	19,829,000
10.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	5,480,000	5,480,000
11.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	17,680,000	17,680,000
12.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	420,000	420,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
13.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	420,000	420,000
14.	DR.3165.QCD.U31 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SANGGAU	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	560,000	560,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	52,824,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	A - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Koordinasi PPNS BPOM TA 2025	6,360,000	6,360,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	B - Forum Koordinasi Intelijen	6,360,000	6,360,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja	C - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	5,440,000	5,440,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
		Penindakan Obat dan Makanan			
4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	D - Pertemuan Penggalangan Stakeholders dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	29,054,000	29,054,000
5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	E - Koordinasi dalam Rangka Pertemuan Penggalangan Stakeholders Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	5,610,000	5,610,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B12	ANGGARAN
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.51	48,030,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	C - Sosdesk Jemput Bola dalam Rangka Registrasi Pangan Olahan	7,110,000	7,110,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	D - Administrasi Kegiatan Sertifikasi	1,740,000	1,740,000
3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B - Dukungan Pelayanan Publik (Koordinasi ke Instansi Terkait dalam Rangka Peningkatan Kinerja Sertifikasi)	14,490,000	14,490,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - Audit Sarana Dalam Rangka Sertifikasi	24,690,000	24,690,000

7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												76	301,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Loka	301,000,000	301,000,000

		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	2,672,034,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Layanan Umum Perkantoran	132,196,000	132,196,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - Pengadaan Pakaian Dinas Kerja	33,536,000	33,536,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi	6,000,000	6,000,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - Internalisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pegawai Loka POM di Kab. Sanggau	86,810,000	86,810,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan	16,970,000	16,970,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - Perjalanan Dinas Penempatan CPNS	6,724,000	6,724,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - Keperluan Alat Penunjang Kantor	1,639,000	1,639,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - Pencanangan Zona Integritas Balai POM di Sanggau	16,780,000	16,780,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan	1,212,426,000	1,212,426,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR (LOKA POM Sanggau)	103,500,000	103,500,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	93,751,000	93,751,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - OPERASIONAL PERKANTORAN (OLEH LOKA POM SANGGAU)	924,721,000	924,721,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - PEMELIHARAAN PERALATAN PERKANTORAN	36,981,000	36,981,000

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.85	223,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	3	7	14	23	35	44	55	64	75	85	95	100	58,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Perjalanan Pimpinan Loka	73,370,000	73,370,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan di Perbatasan	29,750,000	29,750,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor/ Peningkatan Kompetensi Petugas/ Workshop/ Bimtek	113,380,000	113,380,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - Bimtek Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Dasar	6,500,000	6,500,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	B - KOORDINASI PENGELOLAAN BMN	5,760,000	5,760,000
2.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	50,000,000	50,000,000
3.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	C - SOSIALISASI BMN	1,740,000	1,740,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA	500,000	500,000
			Total		4,427,160,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Sanggau, 29 August 2025

Kepala Balai POM di Sanggau

ERIK BUDIANTO TAMPUBOLON

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	92,97	103,30	Rp89.223.000	Rp89.206.761	99,98
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	98,5	114,53	Rp13.155.250	Rp13.152.881	99,98
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	Rp13.155.250	Rp13.152.881	99,98
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	Rp13.155.250	Rp13.152.881	99,98
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	95	98,65	103,84	Rp6.440.620	Rp6.439.677	99,99
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100	114,94	Rp6.251.190	Rp6.250.274	99,99
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	Rp6.251.190	Rp6.250.274	99,99
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	100	107,53	Rp52.642.920	Rp52.642.094	100,00
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	98,14	107,85	Rp52.642.920	Rp52.642.094	100,00
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92	100	108,70	Rp1.969.500	Rp1.968.450	99,95
11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109,89	Rp1.969.500	Rp1.968.450	99,95
12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100,00	Rp54.238.160	Rp54.237.309	100,00
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12	13,18	109,83	Rp148.740.000	Rp148.735.020	100,00
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100,00	Rp13.155.250	Rp13.152.881	99,98
15	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,13	95,46	108,32	Rp27.023.000	Rp27.021.420	99,99
16	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100,00	Rp13.328.000	Rp13.328.000	100,00
17	Jumlah desa pangan aman	1	1	100,00	Rp18.781.000	Rp18.780.000	99,99
18	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	Rp7.060.000	Rp7.060.000	100,00
19	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	11,11	11,11	100,00	Rp5.037.000	Rp4.953.950	98,35
20	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	100	104,17	Rp107.367.000	Rp107.354.730	99,99
21	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111,11	Rp0	Rp0	-
22	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51	4,93	109,31	Rp48.030.000	Rp48.025.030	99,99
23	Nilai AKIP UPT BPOM	76	75,63	99,51	Rp0	Rp0	-
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00	Rp2.284.917.000	Rp2.284.549.438	99,98
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85	2,84	99,65	Rp131.914.000	Rp131.909.450	100,00
26	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100,00	Rp4.067.000	Rp4.067.000	100,00